RANCANGAN AKHIR

RPJMD

KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20

(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggunan anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
11. Rencana kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sampai akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
    a. Visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
    b. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
    c. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; dan
    d. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2) RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) RPJMD menjadi pedoman bagi:
   a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
   b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra PD;
   c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Renja PD;
   d. Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDes; dan
   e. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

(4) Penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian urgensitas yang menjadi kebutuhan masyarakat Daerah dan/atau kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*)

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD terdiri atas:
   a. bab I berisi pendahuluan;
   b. bab II berisi gambaran umum daerah;
   c. bab III berisi visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
   d. bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   e. bab V berisi penutup.

(2) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
   a. memberikan penghargaan terhadap kepala Perangkat Daerah yang memenuhi sasaran pokok dan indikator utama pembangunan Daerah; dan/atau
   b. mengenakan sanksi terhadap kepala Perangkat Daerah yang tidak memenuhi sasaran pokok dan indikator utama pembangunan Daerah,

   yang tercantum dalam RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan tahapan pelaksanaan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian program tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan

capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir masa jabatannya.

(2) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

Pasal 8

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2030

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR ...

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-7
1.3 HubunganAntar Dokumen..... I-18
1.4 Maksud Dan Tujuan..... I-20
1.5 Sistematika Penulisan..... I-20

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah..... II-2
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-2
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah..... II-2
2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis..... II-2
2.1.1.1.2 Batas Wilayah Fungsional..... II-7
2.1.1.1.3 Iklim..... II-10
2.1.1.1.4 Topografi..... II-11
2.1.1.1.5 Geologi..... II-12
2.1.1.1.6 Jenis Tanah..... II-14
2.1.1.1.7 Hidrologi..... II-16
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam..... II-22
2.1.1.2.1 Sumber Daya Alam dan Industri..... II-22
2.1.1.2.2 Hortikultura..... II-22
2.1.1.2.3 Perkebunan..... II-27
2.1.1.2.4 Perikanan..... II-28
2.1.1.2.5 Peternakan..... II-28
2.1.1.2.6 Pariwisata..... II-30
2.1.1.2.7 Industri..... II-32
2.1.1.2.8 Pertambangan..... II-35
2.1.1.2.9 Penggunaan Lahan..... II-36
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... II-38
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan..... II-38
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas..... II-44

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Daerah..... II-46
2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim..... II-47
2.1.1.7.1 Resiliensi Terhadap Bencana..... II-47
2.1.1.7.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK..... II-55
2.1.1.7.3 Perubahan Iklim..... II-56
2.1.1.8 Demografi..... II-58
2.1.1.8.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk..... II-59
2.1.1.8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk..... II-62
2.1.1.8.3 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2024..... II-62
2.1.1.8.4 Proyeksi Penduduk..... II-64
2.1.1.8.5 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin..... II-65
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-68
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... II-68
2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II-68
2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan..... II-72
2.1.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka..... II-75
2.1.2.1.4 Indeks Gini..... II-77
2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia..... II-77
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua..... II-78
2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup..... II-78
2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat..... II-79
2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting..... II-80
2.1.2.2.4 Angka Kematian Ibu..... II-81
2.1.2.2.5 Success Rate Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024..... II-82
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II-82
2.1.2.3.1 Rata Rata Lama Sekolah..... II-82
2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah..... II-83
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif..... II-83
2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja..... II-84
2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Sosial Kesehatan..... II-84

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju..... II-85
2.1.2.5.1 Indeks Kesalehan Sosial..... II-85
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif..... II-88
2.1.2.7 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal..... II-89
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-90
2.1.3.1 Indeks Daya Saing Daerah..... II-90
2.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... II-91
2.1.3.2.1 Angka Ketergantungan..... II-91
2.1.3.3 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... II-92
2.1.3.3.1 Indeks Inovasi Daerah..... II-92
2.1.3.3.2 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara..... II-93
2.1.3.3.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif..... II-95
2.1.3.3.4 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten..... II-95
2.1.3.3.5 ICOR..... II-95
2.1.3.3.6 Pertumbuhan Usaha Mikro..... II-96
2.1.3.3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin..... II-97
2.1.3.4 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... II-98
2.1.3.4.1 Indeks Ekonomi Hijau..... II-98
2.1.3.4.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia..... II-98
2.1.3.4.3 Intensitas Energi Primer..... II-99
2.1.3.5 Transformasi Digital..... II-99
2.1.3.5.1 Indeks Transformasi Digital..... II-99
2.1.3.5.2 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi..... II-101
2.1.3.6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global..... II-101
2.1.3.6.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto..... II-101
2.1.3.6.2 Ekspor Barang dan Jasa..... II-102
2.1.3.6.3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten..... II-102
2.1.3.7 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan II-102

Ekonomi.....
2.1.3.7.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur..... II-103
2.1.3.7.2 Indeks Konektivitas..... II-103
2.1.3.7.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan..... II-103
2.1.3.7.4 Persentase Desa Mandiri..... II-104
2.1.3.8 Stabilitas Ekonomi Makro..... II-104
2.1.3.8.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB..... II-104
2.1.3.8.2 Tingkat Inflasi..... II-105
2.1.3.8.3 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan..... II-105
2.1.3.8.4 Inklusi Keuangan..... II-106
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-107
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... II-107
2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi..... II-107
2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum..... II-108
2.1.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik... II-108
2.1.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik..... II-111
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial..... II-111
2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda..... II-111
2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM..... II-112
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan..... II-112
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah..... II-113
2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar..... II-113
2.1.4.4.1.1 Pendidikan..... II-113
2.1.4.4.1.2 Indeks Pendidikan..... II-116
2.1.4.4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah..... II-116
2.1.4.4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah..... II-117
2.1.4.4.1.5 Angka Partisipasi Kasar..... II-119
2.1.4.4.1.6 Angka Partisipasi Murni..... II-119
2.1.4.4.1.7 Angka Kelulusan..... II-120
2.1.4.4.1.8 Angka Melek Huruf..... II-121

2.1.4.4.1.9 Angka Partipasi Sekolah..... II-121
2.1.4.4.1.10 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah..... II-121
2.1.4.4.2 Kesehatan..... II-122
2.1.4.4.2.1 Angka Harapan Hidup..... II-122
2.1.4.4.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart..... II-123
2.1.4.4.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak..... II-124
2.1.4.4.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan..... II-124
2.1.4.4.2.5 Penanganan Penyakit Menular..... II-125
2.1.4.4.2.6 Universal Health Coverage..... II-129
2.1.4.4.2.7 Vaksinasi Covid-19..... II-129
2.1.4.4.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri..... II-130
2.1.4.4.2.9 Indikator Pelayanan Rumah Sakit..... II-130
2.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-131
2.1.4.4.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM..... II-131
2.1.4.4.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang..... II-133
2.1.4.4.3.3 Normalisasi Waduk..... II-134
2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi..... II-134
2.1.4.4.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)..... II-135
2.1.4.4.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik..... II-135
2.1.4.4.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan..... II-136
2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-137
2.1.4.4.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni..... II-137
2.1.4.4.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan..... II-139

2.1.4.4.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh..... II-139
2.1.4.4.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum II-141
2.1.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-142
2.1.4.4.6 Sosial..... II-145
2.1.4.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... II-145
2.1.4.5.1 Tenaga Kerja..... II-145
2.1.4.5.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka..... II-146
2.1.4.5.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja..... II-146
2.1.4.5.1.3 Hubungan Industrial..... II-147
2.1.4.5.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.. II-147
2.1.4.5.2.1 Pengendalian Penduduk..... II-147
2.1.4.5.3 Pangan..... II-148
2.1.4.5.4 Pertanahan..... II-149
2.1.4.5.5 Lingkungan Hidup..... II-150
2.1.4.5.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... II-150
2.1.4.5.5.2 Ruang Terbuka Hijau..... II-151
2.1.4.5.5.3 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup..... II-151
2.1.4.5.5.4 Pengelolaan Persampahan..... II-152
2.1.4.5.5.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman..... II-153
2.1.4.5.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-153
2.1.4.5.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-154
2.1.4.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-156
2.1.4.5.9 Perhubungan..... II-157
2.1.4.5.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)..... II-158
2.1.4.5.9.2 Pengelolaan Pelayaran..... II-159
2.1.4.5.9.3 Pengelolaan Perkretaapian..... II-160
2.1.4.5.10 Komunikasi Dan Informatika..... II-160
2.1.4.5.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... II-160

2.1.4.5.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik..... II-162
2.1.4.5.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah..... II-163
2.1.4.5.12 Penanaman Modal..... II-164
2.1.4.5.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal..... II-164
2.1.4.5.13 Kepemudaan dan Olah Raga..... II-166
2.1.4.5.14 Statistik..... II-167
2.1.4.5.15 Persandian..... II-167
2.1.4.5.16 Kebudayaan..... II-168
2.1.4.5.17 Perpustakaan..... II-171
2.1.4.5.18 Kearsipan..... II-172
2.1.4.6 Urusan Pilihan..... II-173
2.1.4.6.1 Kelautan dan Perikanan..... II-173
2.1.4.6.1.1 Nilai Tukar Nelayan..... II-173
2.1.4.6.1.2 Perikanan Tangkap dan Budidaya..... II-174
2.1.4.6.2 Pariwisata..... II-179
2.1.4.6.3 Pertanian..... II-181
2.1.4.6.3.1 Nilai Tukar Petani..... II-181
2.1.4.6.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian..... II-182
2.1.4.6.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan..... II-185
2.1.4.6.3.4 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan..... II-185
2.1.4.6.4 Energi dan Sumberdaya Mineral..... II-187
2.1.4.6.5 Perdagangan..... II-188
2.1.4.6.6 Perindustrian..... II-190
2.1.4.7 Urusan Penunjang..... II-192
2.1.4.7.1 Sekretariat Daerah..... II-192
2.1.4.7.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... II-192
2.1.4.7.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah II-193

2.1.4.7.2 Sekretariat DPRD..... II-195
2.1.4.7.3 Perencanaan..... II-196
2.1.4.7.4 Penelitian dan Pengembangan..... II-197
2.1.4.7.5 Keuangan..... II-198
2.1.4.7.6 Inspektorat..... II-199
2.1.4.7.7 Kepegawaian..... II-200
2.1.4.7.8 Kewilayahan..... II-202
2.1.4.7.9 Kesatuan Bangsa dan Politik..... II-203
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal..... II-204
2.1.5.1 Pendidikan..... II-205
2.1.5.2 Kesehatan..... II-206
2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-208
2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-209
2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..... II-211
2.1.5.6 Sosial..... II-215
2.2 Gambaran Keuangan Daerah..... II-216
2.2.1 Realisasi APBD 2020-2024..... II-216
2.2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... II-227
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Periode 2024-2029..... II-229
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis..... II-240
2.3.1 Permasalahan Pembangunan..... II-240
2.3.2 Isu Strategis..... II-261

BAB III VISI, MISI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran..... III.2
3.1.1 Visi Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029..... III.2
3.1.2 Misi Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029..... III.7
3.1.3 Tujuan RPJMD Kabupaten Gresik 2025 - 2029..... III.32
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III.55
3.2.1 Strategi Dan Arah Kebijakan III.55
3.2.2 Program-Program Pembangunan Daerah..... III.115

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah..... IV.1

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029..... IV.1

4.1.2 Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif Program..... IV.38

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV.39

4.2.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)..... IV.39

4.2.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... IV.46

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi..... V-1

5.2 Kaidah Pelaksanaan..... V-2

BAB I
PENDAHULUAN

RANCANGAN AKHIR
RPJMD
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029





1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah ini menetapkan Kepala Daerah terpilih untuk masa bhakti 2025-2029. Berkenaan dengan hal tesebut maka sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubat terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penetapan RPJMD untuk masa bhakti sebagaimana dimaksud merupakan keberlanjutan dari perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta menjadi periode

pertama dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045.

Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk masa perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen RPJMD teknokratik pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2024 sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Perihal Penyusunan Rancangan Tekhnokratis RPJMD Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024. RPJMD terknokratik sebagaimana dimaksud dijelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut Permendagri No. 86 Tahun 2017) adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi bagian dari persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 41 Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Kabupaten Gresik telah melaksanakan pemilihan kepala Daerah pada 27 November 2024 dengan penetapan hasil sesuai Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang Penetaan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024. Keputusan ini menetapkan Saudara H.Fandi Ahmad Yani., S.E., M.MB dan Saduara dr. H.Asluchul Alif M.Kes., M.N., M.HP sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih. Penetapan keputusan *aquo* dilaksanakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) namun ditolak sesuai sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2024. Berkenaan dengan itu, Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025 secara serentak meliputi 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, serta 85 Wali Kota dan 85 Wakil Wali Kota dari 481 Daerah di Indonesia. Penetapan pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2029.

Berkenaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gresik untuk masa bakti 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menyusun Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Penyusunan ini secara normatif selaras dengan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Amanah pasal ini menjelaskan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD dengan batasan waktu Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Secara substansial, penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 harus selaras dengan Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa Penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal. Pasal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa periodesasi RPJMD Kabupaten Gresik harus selaras dengan RPJMN atau melandasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Penyesuaian ini tidak periodesasi melainkan dukungan keselarasan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dengan tetap mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Pasal 41 Permendagri No. 86 Tahun 2017 meliputi:

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
b. Orientasi mengenai RPJMD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Penyusunan rancangan teknokratik telah diselesaikan pada Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melaksanakan Penyusunan rancangan awal RPJMD , dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Rancangan awal ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Rancangan awal RPJMD menjadi landasan dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Dokumen rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya, proses verifikasi dilaksanakan oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

Tahapan selanjutnya, dilaksanakan penyusunan rancangan RPJMD sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi. Rancangan RPJMD dibahas dalam Musrenbang RPJMD untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

Hasil musrembang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili seluruh pemangku kepentingan termasuk memberikan ruang afirmasi. Proses ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang dirancang untuk memberikan ruang partisipasi yang luas dan setara kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas dan rentan lainnya. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion),* Musrenbang RPJMD tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang

afirmasi dan memastikan bahwa suara kelompok yang selama ini terpinggirkan didengar dan diperhitungkan dalam perumusan kebijakan dengan menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan gender, serta aksesibilitas bagi semua, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Kesepakatan musrembang RPJMD ini menjadi landasan perumusan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilaksaakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dievaluasi oleh gubernur dan ditetpkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik yaitu 19 Agustus 2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perumusan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 dilandaskan berbagai aspek konstitusional meliputi:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
14) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
16) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
19) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
20) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
22) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
23) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
26) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
27) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
28) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

29) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
30) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
31) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
32) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
33) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
34) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
35) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
36) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
37) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

38) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
39) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
40) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
41) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
42) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
43) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
44) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
45) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

46) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

47) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

48) Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional ;

49) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

50) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

51) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

52) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

53) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

54) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah ;

55) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

56) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

57) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

58) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

59) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

60) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

61) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

62) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
63) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
64) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
65) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
66) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
67) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
68) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

69) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
70) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
71) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
72) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
73) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomro 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
74) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
75) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;

76) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
77) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomot 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
78) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
79) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
80) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
81) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; dan
82) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dan memperhatikan dokumen lain, antara lain dengan:

1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
5. Keselarasan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
6. Keselarasan pada Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID);
7. Keselarasan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

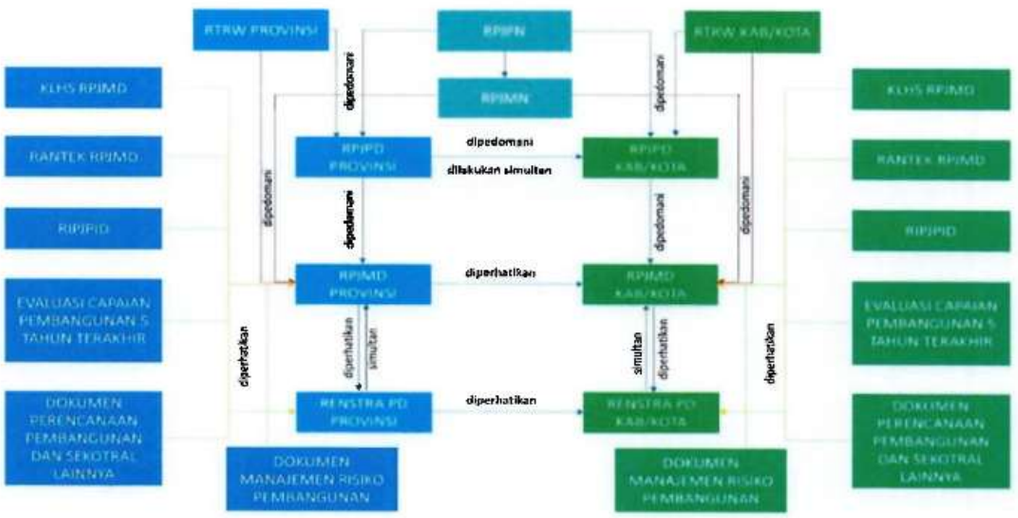
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 terhadap dokumen sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Amanat pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu, RPJMD adalah bagian yang terintegrasi dengan perencanaan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD harus sinkron dan sinergi dengan antar daerah, waktu, ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin

konsistendia dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Substansi dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJMD Jawa Timur 2025-2029, RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
3. Penyusunan RPJMD memperhatikan Dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kabupaten Gresik
4. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Gresik, terutama pada sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
5. Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global serta diselaraskan dengan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).

Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Lainnya, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Sumber: Inmendagri 2/2025 (diolah)

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi dan peluang Kabupaten Gresik sebagai modalitas dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029;
2. Mengoperasionalkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gresik sesuai dengan kaidah perencanaan;
3. Menjamin keselarasan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029;
4. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun hingga tahun 2030;
6. Menjadi acuan bersama bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mendukung dan mengintegrasikan berbagai agenda strategis lintas sektor seperti Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Jawa Timur, Program Prioritas Daerah Nawakarsa, Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*/GEDSI); pembangunan inklusif pro-rakyat miskin *(pro-poor development),* serta komitmen terhadap

lingkungan hidup, inovasi digital, dan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir RPJMD disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil perumusan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum Daerah;
c. visi, misi, dan prioritas pembangunan Daerah;
d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
e. penutup.

Sistematika penyajian rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJMD sesuai Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II.GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5. Standar pelayanan minimal*

2.1.6. Kerjasama daerah*

2.1.7. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi*

2.1.8. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda*

**sesuai dengan kondisi Daerah*

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024

2.2.2. Proyeksi keungan daerah tahun 2025-2029

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

2.3.2. Isu Strategis

BAB III. VISI, MISI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan arah kebijakan daerah

3.2.2. Program-program Prioritas Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah

4.1.2. Indikator, target, dan pagu indikatif program

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.2.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evlaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

RANCANGAN AKHIR
RPJMD
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029





2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kondisi fisik suatu wilayah menggambarkan karakteristik alamiah dan lingkungan yang membentuk suatu area geografis tertentu. Kondisi fisik suatu wilayah dapat mempengaruhi adanya perbedaan mata pencaharian dari masyarakat di wilayah tersebut (Santoso, 2019). Aspek-aspek yang akan dibahas terkait dengan kondisi fisik meliputi Letak dan Kondisi Geografis, Batas Wilayah Fungsional, Iklim, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi, Sumber Daya Alam, Kebencanaan, Penggunaan Lahan, dan Perwujudan Wilayah.

2.1.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara kewilayahan Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Dengan luas wilayah sebesar 125.675,97 Ha, dengan hampir sepertiga bagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Kecamatan di wilayah pesisir ini terletak di sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian wilayah Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan yang mencakup 26 kelurahan dan 330 desa

dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak antara 112° dan 113° Bujur Timur dan 7° dan 8° Lintang Selatan. Kabupaten Gresik menempati posisi geografis di arah barat laut dari Surabaya, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten gresik yaitu

Sebelah Utara : Selat Jawa,

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo,

Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto ; serta

Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya.

Berikut merupakan tabel luas daerah berdasarkan kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kecamatan	Total Luas Daerah (km^2)
Wringinanom	62,62
Driyorejo	51,29
Kedamean	65,95
Menganti	68,73
Cerme	71,73
Benjeng	61,26
Balongpanggang	63,88
Duduksampeyan	74,29
Kebomas	30,06
Gresik	5,54
Manyar	95,42
Bungah	79,44
Sidayu	47,13
Dukun	59,09
Panceng	62,59
Ujungpangkah	94,82
Sangkapura	118,72
Tambak	78,70
Kabupaten Gresik	1.191,26

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Sangkapura yang luas wilayahnya mencapai 9,97% dari luas wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan Gresik, yang merupakan ibukota Kabupaten Gresik, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya sebesar 0,46%. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu dengan jarak 18 km. Berikut merupakan Peta Administrasi Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Sangkapura yang luas wilayahnya mencapai 9,97% dari luas wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan Gresik, yang merupakan ibukota Kabupaten Gresik, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya sebesar 0,46%. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu dengan jarak 18 km. Berikut merupakan Peta Administrasi Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Ditinjau dari Rencana Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk menjaga atau melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup. Wilayah ini mencakup sumber daya alam, buatan, serta nilai sejarah dan budaya yang ada di dalamnya. Kawasan lindung di Kabupaten Gresik mencakup area Badan Air, Cagar Alam, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Perlindungan Setempat, dan suaka margasatwa.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya berdasarkan potensi serta kondisi sumber daya alam, manusia, dan buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik mencakup area Badan Jalan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Tanaman Pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, kawasan ini termasuk dalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan mencakup pertanian, perikanan, industri, pariwisata, serta eksploitasi sumber daya seperti panas bumi, minyak, dan gas bumi. Sementara itu, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043, kawasan ini diarahkan untuk berbagai penggunaan lahan, termasuk permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, serta pemanfaatan sumber daya panas bumi, minyak, dan gas bumi.

c. Kawasan Perkotaan

Perkembangan perkotaan di Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Kota Surabaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010–2030, sistem pusat permukiman di wilayah ini terbagi menjadi empat pusat kegiatan. Setiap pusat kegiatan memiliki peran dan fungsi tertentu, yang dapat dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Peran dan Fungsi Sisten Kegiatan di Kabupaten Gresik

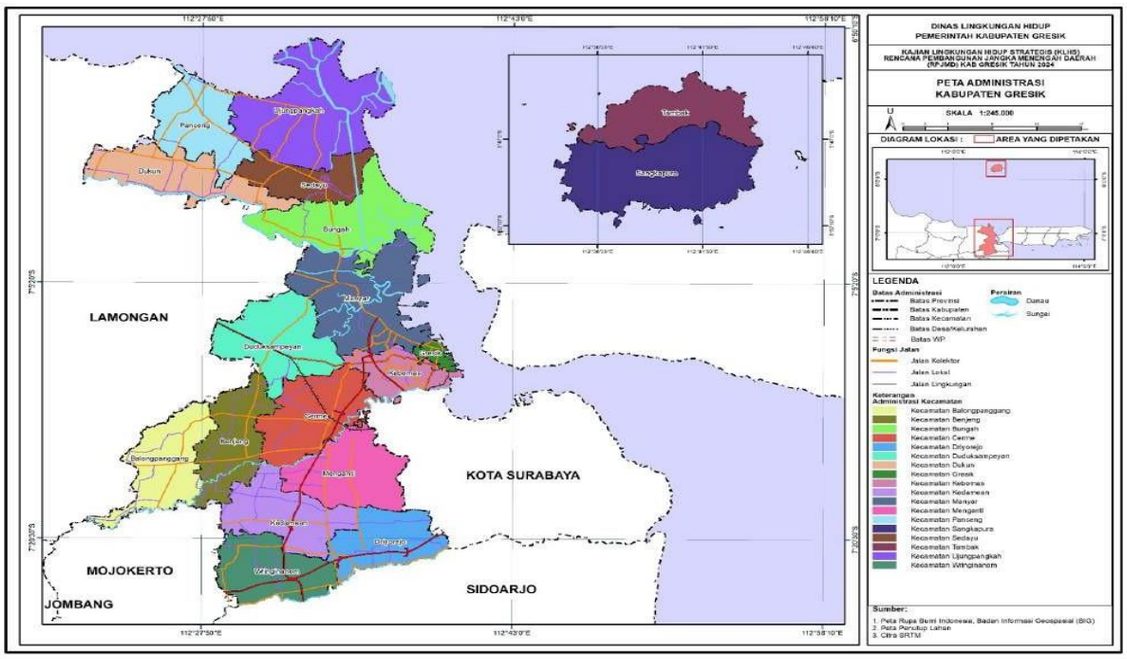
Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PKN	PKN, Manyar, dan PKN Menganti		Jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan; pusat pariwisata; industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat Pertumbuhan wilayah kabupaten
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	Pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PPK	Perkotaan Balongpanggang	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman pedesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun		Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman pedesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan

Pusat Kegiatan	Kota	Peran	Fungsi
PPL	PPL pada Pedesaan Kecamatan Kedamean	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Panceng		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Sangkapura		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Tambak		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Ujung Pangkah		

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan (Ha) di Kabupaten Gresik

Keterangan	Kawasan Budi Daya	Kawasan Lindung	Kawasan Perkotaan	Total Luas (Ha)
Badan Air		2.285,95		2.285,95
Badan Jalan	361,55			361,55
Cagar Alam		615,51		615,51
Kawasan Ekosistem Mangrove		1.869,28		1.869,28
Kawasan Hortikultura	11.950,66			11.950,66
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77			1.032,77
Kawasan Pariwisata	99,34			99,34
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	82,91			82,91
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00			19.824,00
Kawasan Perlindungan Setempat		1.403,45		1.403,45
Kawasan Permukiman Pedesaan			17.514,18	17.514,18
Kawasan Permukiman Perkotaan			15.531,69	15.531,69
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78			178,78
Kawasan	10.469,60			10.469,60

Keterangan	Kawasan Budi Daya	Kawasan Lindung	Kawasan Perkotaan	Total Luas (Ha)
Peruntukan Industri				
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41			38.537,41
Suaka Margasatwa		3.918,88		3.918,88
Total Luas (Ha)	**82.537,02**	**10.093,07**	**33,045.87**	**125.675,97**



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

2.1.1.1.2 Batas Wilayah Fungsional

Batas kawasan fungsional dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan pendekatan *ecoregion* ditetapkan berdasarkan karakteristik ekologis yang serupa, melintasi batas administratif, dan mencerminkan kesatuan ekosistem. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis dan rekomendasi kebijakan dalam KLHS mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan secara lebih menyeluruh, seperti kesatuan hidrologi, topografi, vegetasi, dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, penggunaan *ecoregion* dalam penentuan batas kawasan fungsional memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan, karena mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara holistik. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi risiko lingkungan, mitigasi dampak, serta integrasi kebijakan lintas sektor dan wilayah, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

Ecoregion merupakan wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang mirip. Secara umum ecoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan *bioregion* dan *ecozone*. Berdasarkan *World Wildlife Fund*

(WWF) suatu daerah dapat dikategorikan sebagai *ecoregion* ketika memiliki kesamaan dinamika ekosistem atau flora dan fauna, kesamaan pada faktor lingkungan dan interaksi yang krusial bagi kelangsungan kelompok/wilayah tersebut.

Ecoregion menjadi konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan faktor pembatas, potensi jasa ekosistem yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaannya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Pemenuhan terhadap aspek ini merupakan faktor kunci untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan yang berbasis sumber daya alam. Informasi mengenai *ecoregion* Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.4 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik

Jenis	Luas
Bukit Terisolasi	120,26
Dataran Antropogenik Reklamasi Material Pasir	736,50
Dataran *Fluvio-marin* Pesisir Utara Jawa Material Aluvium	20.080,28
Dataran Struktural Lipatan (Dataran Nyaris) Rembang Material Batupasir Tufaan dan Batulempung Gampingan	5.853,76
Delta Pangkah (Bengawan Solo) Material Aluvium	5.345,48
Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan	28.554,51
Palau Lepas Pantai Material Terumbu	19.984,63
Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan	26.092,34
Rataan Pasang Surut Pantai Selatan Jawa	1.462,23
Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium	12.664,20
Wilayah Perkotaan (Bentang Antropogenik)	4.781,79
Grand Total	**125.675,97**

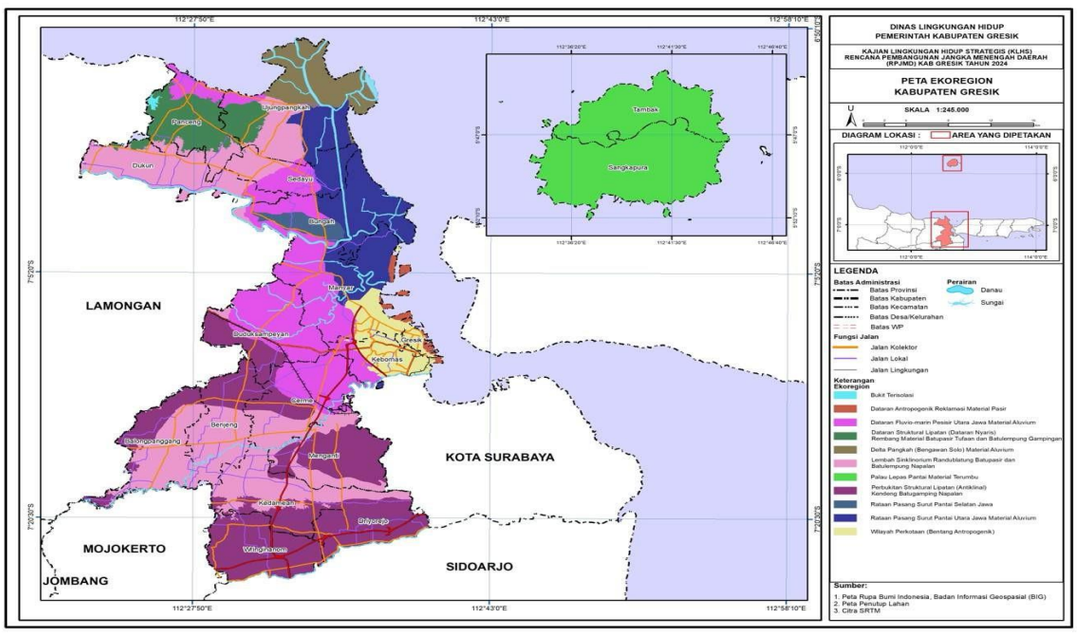
Sumber: D3TLH Kab. Gresik, 2021

Kabupaten Gresik terbagi kedalam 2 Daerah Aliran Sungai utama yaitu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hilir dan Daerah Aliran Sungai Brantas Hilir.

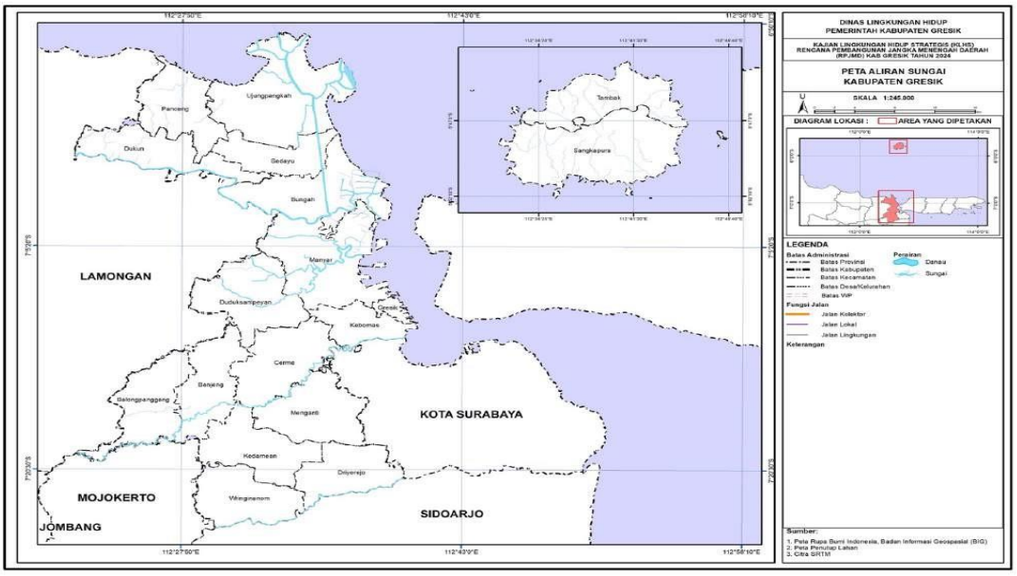
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Gresik

Kecamatan	WD Bengawan Solo Hilir	WD Brantas Hilir
Balongpanggang	6.471,99	
Benjeng	6.230,34	
Bungah	8.538,56	
Cerme	7.163,62	
Driyorejo	691,85	4.817,57
Duduksampeyan	7.717,91	
Dukun	6.401,26	
Gresik	710,02	
Kebomas	3.433,85	
Kedamean	5.794,46	908,44
Manyar	10.562,11	
Menganti	5.987,77	1.012,23
Panceng	6.182,40	
Sangkapura	12.700,95	
Sidayu	4.452,34	
Tambak	7.283,68	
Ujungpangkah	12.407,52	
Wringinanom	473,90	5.733,21
Total	**113.204,52**	**12.471,45**

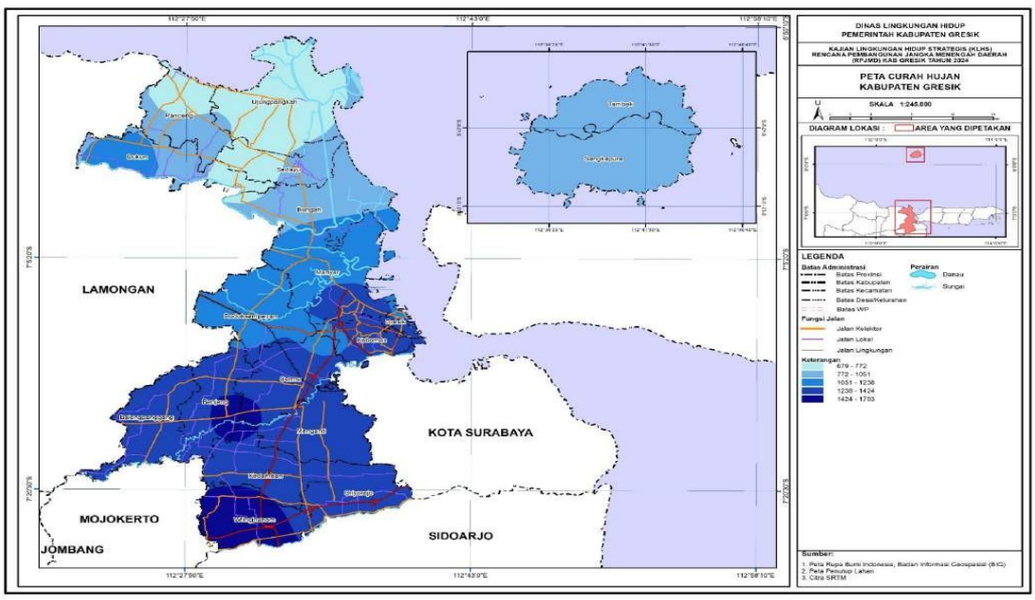
Sumber: D3TLH Kab. Gresik, 2021



Gambar 2.2 Peta Ekoregion Kabupaten Gresik



Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Gresik



Gambar 2.4 Peta Kawasan Fungsional Kabupaten Gresik

2.1.1.1.3 Iklim

Kabupaten Gresik memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, serta memiliki temperatur yang relatif sedang. Suhu udara di Kabupaten Gresik berkisar antara 27°C (suhu terendah) hingga 29°C (suhu tertinggi). Berikut merupakan tabel rincian kondisi iklim tiap bulan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.6 Kondisi Iklim di Kabupaten Gresik

Bulan	Rata-Rata Suhu	Rata-Rata Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Kelembapan	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
Januari	28,21	506,20	27	87,07	1,77	3,3
Februari	28,16	561,10	24	87,27	1,80	4,6
Maret	28,74	225,20	22	85,71	2,06	5,3
April	29,05	261,00	25	85,89	1,42	5,7
Mei	29,95	66,80	14	78,60	2,89	7,9
Juni	28,87	97,40	16	80,78	2,64	6,7
Juli	28,11	50,90	26	80,60	3,08	5,7
Agustus	28,53	3,10	31	77,37	3,27	7,5
September	29,53	0,10	30	75,91	2,84	8,0
Oktober	30,01	54,60	31	75,46	2,19	7,5
November	29,40	215,70	30	81,88	1,47	5,8
Desember	27,74	596,50	31	86,68	2,41	2,4

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2025

2.1.1.1.4 Topografi

Kabupaten Gresik memiliki topografi yang beragam, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Kawasan pesisir ini membentang dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, dan Panceng di daratan utama, serta mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak di Pulau Bawean. Ketinggian tanah di Kabupaten Gresik bervariasi antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan daerah terendah terletak di sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Gambaran kondisi topografi di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan

Tabel 2.7 Ketinggian dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Ketinggian	Luas Lahan (Ha)
Kecamatan Balongpanggang	0 - 100 meter	6.471,99
Kecamatan Benjeng	0 - 100 meter	6.230,33
Kecamatan Bungah	0 - 100 meter	8.538,56
Kecamatan Cerme	0 - 100 meter	7.163,62
Kecamatan Driyorejo	0 - 100 meter	5.509,41
Kecamatan Duduksampeyan	0 - 100 meter	7.717,90
Kecamatan Dukun	0 - 100 meter	6.401,26
Kecamatan Gresik	0 - 100 meter	710,02

Kecamatan	Ketinggian	Luas Lahan (Ha)
Kecamatan Kebomas	0 - 100 meter	3.428,29
Kecamatan Kebomas	100 - 500 meter	5,56
Kecamatan Kedamean	0 - 100 meter	6.702,90
Kecamatan Manyar	0 - 100 meter	10.562,11
Kecamatan Menganti	0 - 100 meter	6.999,99
Kecamatan Panceng	0 - 100 meter	6.165,29
Kecamatan Panceng	100 - 500 meter	17,11
Kecamatan Sangkapura	0 - 100 meter	6.263,78
Kecamatan Sangkapura	100 - 500 meter	6.170,31
Kecamatan Sangkapura	500 - 1.000 meter	266,86
Kecamatan Sidayu	0 - 100 meter	4.452,34
Kecamatan Tambak	0 - 100 meter	4.388,69
Kecamatan Tambak	100 - 500 meter	2.888,42
Kecamatan Tambak	500 - 1.000 meter	6,56
Kecamatan Ujungpangkah	0 - 100 meter	12.326,59
Kecamatan Ujungpangkah	100 - 500 meter	80,92
Kecamatan Wringinanom	0 - 100 meter	6.207,10
Jumlah		125.675,97

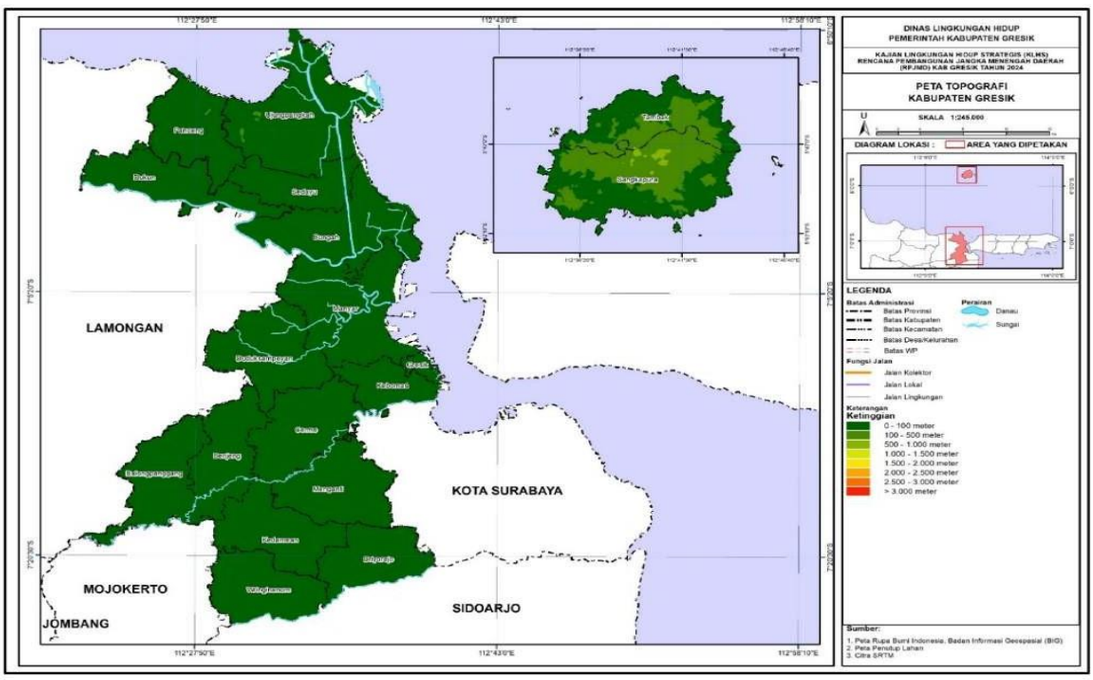
Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

Tabel 2.8 Kelerengan Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	0-2%	2-5%	5-15%	15-40%	>40%	Jumlah
Wringinanom	620.710	620.710	620.710	0,00	0,00	1.862.130
Driyorejo	550.941	550.941	550.941	0,00	0,00	1.652.823
Kedamean	670.289	670.289	670.289	0,00	0,00	2.010.867
Menganti	699.999	699.999	699.999	0,00	0,00	2.099.997
Cerme	716.362	716.362	716.362	0,00	0,00	2.149.086
Benjeng	623.033	623.033	0,00	0,00	0,00	1.246.066
Balonpanggang	647.199	647.199	647.199	0,00	0,00	1.941.597
Duduksampeyan	771.790	771.790	771.790	0,00	0,00	2.315.370
Kebomas	343.385	343.385	343.385	343.385	0,00	1.373.540
Gresik	71.002	71.002	71.002	0,00	0,00	213.006
Manyar	1.056.211	1.056.211	1.056.211	0,00	0,00	3.168.633
Bungah	853.856	853.856	853.856	0,00	0,00	2.561.568
Sidayu	445.234	445.234	0,00	0,00	0,00	890.468
Dukun	640.126	640.126	640.126	0,00	0,00	1.920.378
Panceng	618.240	618.240	618.240	618.240	0,00	2.472.960
Ujungpangkah	1.240.751	1.240.751	1.240.751	1.240.751	0,00	4.963.004

Kecamatan	0-2%	2-5%	5-15%	15-40%	>40%	Jumlah
Sangkapura	1.270.094	1.270.094	1.270.094	1.270.094	1.270.094	6.350.470
Tambak	728.367	728.367	728.367	728.367	728.367	3.641.835
Jumlah	12.567.589	12.567.589	11.499.322	4.200.837	1.998.461	42.833.798

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044



Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Gresik

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

2.1.1.1.5 Geologi

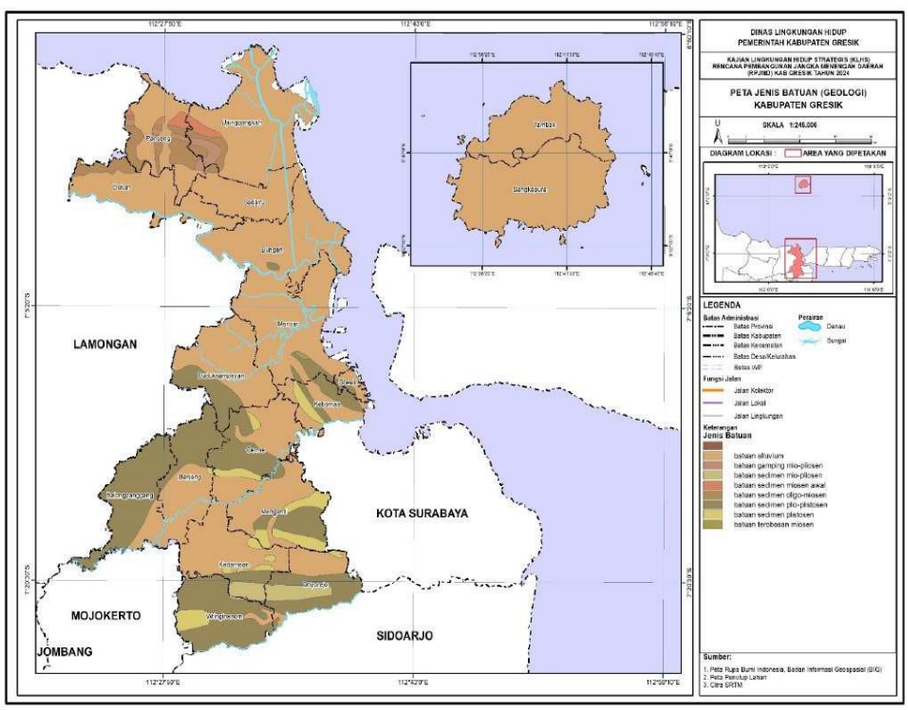
Kondisi geologi di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh beragam faktor yang memainkan peran penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan bagian dari gunung api belakang busur Kuarter di sisi timur Pulau Jawa, termasuk dalam zona cekungan Jawa Timur. Kabupaten Gresik tersusun dari batuan alluvium, batuan gamping mio-pliosen, batuan sedimen mio-pliosen, batuan sedimen miosen awal, batuan oligo-miosen, batuan sedimen pilo-plistosen, batuan sedimen plistosen, batuan terobosan miosen. Informasi mengenai jenis batuan atau geologi di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan

Tabel 2.9 Jenis Batuan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Jenis Batuan	Luas
Kecamatan Balongpanggang	Batuan sedimen plio-plistosen	6.471,99

Kecamatan	Jenis Batuan	Luas
Kecamatan Benjeng	Batuan sedimen plistosen	6.230,33
Kecamatan Bungah	Batuan sedimen plio-plistosen	8.538,56
Kecamatan Cerme	Batuan sedimen plistosen	7.163,62
Kecamatan Driyorejo	Batuan sedimen mio-pliosen	5.509,42
Kecamatan Duduksampeyan	Batuan sedimen plio-plistosen	7.717,90
Kecamatan Dukun	Batuan sedimen pligo-miosen	6.401,26
Kecamatan Gresik	Batuan sedimen plio-plistosen	710,021
Kecamatan Kebomas	Batuan sedimen plio-plistosen	3.433,85
Kecamatan Kedamean	Batuan sedimen mio-pliosen	6.702,90
Kecamatan Manyar	Batuan sedimen plio-plistosen	10.562,11
Kecamatan Menganti	Batuan sedimen plio-plistosen	6.999,99
Kecamatan Panceng	Batuan sedimen oligo-miosen	6.182,40
Kecamatan Sangkapura	Batuan alluvium	12.700,94
Kecamatan Sidayu	Batuan sedimen oligo-miosen	4.452,34
Kecamatan Tambak	Batuan alluvium	7.283,67
Kecamatan Ujungpangkah	Batuan sedimen oligo-miosen	12.407,51
Kecamatan Wringinanom	Batuan sedimen mio-pliosen	6.207,10
Jumlah		**125.675,97**

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044



Gambar 2.6 Peta Jenis Batuan (Geologi) Kabupaten Gresik

2.1.1.1.6 Jenis Tanah

Berdasarkan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, sebagian besar tanah wilayah Kabupaten Gresik terdiri atas jenis tanah Aluvial, Grumusol, dan Mediteran. Tanah Aluvial, yang terbentuk dari pengendapan sedimen sungai, danau, atau cekungan, memiliki karakteristik rentan terhadap beban dan daya topang rendah (Muhammad Taufik et al, 2019). Sementara itu, tanah grumusol berasal dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik, memiliki kandungan organik rendah, sehingga menjadikannya kurang subur dan tidak ideal untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian, tanah mediteran merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur yang keras dan batuan sedimen. Informasi mengenai jenis tanah di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10 Jenis Tanah Kecamatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Jenis Tanah	Luas
Kecamatan Balongpanggang	Aluvial	4.770,49
Kecamatan Balongpanggang	Grumosol	1.701,49
Kecamatan Benjeng	Aluvial	4.497,39
Kecamatan Benjeng	Grumosol	1.732,94
Kecamatan Bungah	Aluvial	7.349,31
Kecamatan Bungah	Grumosol	1.189,24
Kecamatan Cerme	Aluvial	5.745,38
Kecamatan Cerme	Grumosol	1.418,23
Kecamatan Driyorejo	Aluvial	0,98
Kecamatan Driyorejo	Grumosol	5.508,43
Kecamatan Duduksampeyan	Aluvial	4.654,26
Kecamatan Duduksampeyan	Grumosol	3.063,64
Kecamatan Dukun	Aluvial	5.586,55
Kecamatan Dukun	Grumosol	135,13
Kecamatan Dukun	Mediteran	679,58
Kecamatan Gresik	Aluvial	710,02
Kecamatan Kebomas	Aluvial	3.433,85
Kecamatan Kedamean	Aluvial	4.040,13
Kecamatan Kedamean	Grumosol	2.663,00
Kecamatan Manyar	Aluvial	10.562,00
Kecamatan Menganti	Aluvial	2.902,00
Kecamatan Menganti	Grumosol	4.098,00
Kecamatan Panceng	Aluvial	730,00
Kecamatan Panceng	Mediteran	5.453,00

Kecamatan	Jenis Tanah	Luas
Kecamatan Sangkapura	Aluvial	12.701,00
Kecamatan Sidayu	Aluvial	2.657,00
Kecamatan Sidayu	Grumosol	1.795,00
Kecamatan Tambak	Aluvial	7.284,00
Kecamatan Ujungpangkah	Aluvial	7.548,00
Kecamatan Ujungpangkah	Grumosol	232,00
Kecamatan Ujungpangkah	Mediteran	4.628,00
Kecamatan Wringinanom	Aluvial	2.168,00
Kecamatan Wringinanom	Grumosol	4.040,00

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Bagian utara Kabupaten Gresik meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, dan Manyar, yang termasuk dalam daerah Pegunungan Kapur Utara dengan tanah yang cenderung kurang subur, terutama di Kecamatan Panceng. Sebagian besar area ini berada di hilir aliran Sungai Bengawan Solo yang bermuara di pantai utara Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan Solo memiliki potensi besar karena dapat mendukung sektor industri, perikanan, perkebunan, dan pemukiman. Selain itu, potensi bahan galian di wilayah ini juga cukup signifikan, khususnya untuk mineral non-logam, dengan sebagian telah dieksplorasi dan sebagian lainnya sudah dalam tahap eksploitasi.

b. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

Bagian tengah Kabupaten Gresik meliputi wilayah Dukun Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, dan Kebomas, yang dikenal dengan tanah yang cukup subur. Di kawasan ini, terdapat beberapa sungai kecil seperti Kali Lamong, Kali Corong, dan Kali Manyar, menjadikan daerah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

c. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Bagian selatan Kabupaten Gresik mencakup wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringin Anom, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur, meskipun ada juga daerah berbukit. Area ini sangat potensial untuk pengembangan industri, permukiman, dan pertanian. Potensi bahan galian di wilayah ini cukup besar, terutama untuk mineral non-logam.

Beberapa jenis bahan mineral non-logam tersebut sudah dieksplorasi, sementara yang lainnya sedang dalam tahap eksploitasi.

d. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik terletak di Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Daerah ini sebagian besar merupakan dataran rendah yang subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan, sementara sebagian lainnya berupa daerah berbukit. Oleh karena itu, wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, pasir, dan batu gamping. Formasi batuan tertua di pulau ini adalah formasi batu gamping gelam, yang juga dikenal sebagai batu marmer (*onyx*), hasil perubahan dari batu gamping. Di atas formasi ini terdapat Formasi Batupasir Kepongan, yang diambil di lapangan untuk bahan bangunan. Formasi yang paling banyak dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung Api Balibak, yang membentuk dinding-dinding air terjun, dengan hasil pelapukannya berupa pasir yang ditemukan di sepanjang pantai. Endapan Aluvial, yang masih mengalami proses pengendapan hingga kini, merupakan formasi paling muda di wilayah ini.

2.1.1.1.7 Hidrologi

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong, serta dilalui oleh Kali Surabaya di wilayah selatan. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Gresik adalah 1.216 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari per tahun. Musim penghujan di Kabupaten Gresik biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga bulan Maret, dengan bulan terbasah adalah Januari yang memiliki curah hujan lebih dari 250 mm per bulan. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus. Berikut merupakan tabel, gambar dan peta yang menjelaskan mengenai kondisi hidrologi Kabupaten Gresik.

Tabel 2.11 Air Permukaan di Kabupaten Gresik

No	Air Permukaan
1	Kali Mas
2	Kali Bengawan Solo
3	Kali Lewean
4	Kali Lamongan
5	Kali Benem

No	Air Permukaan
6	Kali Corong
7	Kali Mentani
8	Kali Wangen
9	Kali Bedahan
10	Kali Mantup
11	Kali Medangan
12	Kali Ceper
13	Kali Mireng
14	Kali Wadak
15	Kali Gladakgede
16	Kali Tambak
17	Kali Baturata
18	Kali Raya
19	Kali Baturaya
20	Kali Kope
21	Kali Deje
22	Kali Laok
23	Kali Kebonagung
24	Kali Grunjungan
25	Kali Lancabur
26	Kali Legundi
27	Danau/Telaga

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

Tabel 2.12 Sungai di Kabupaten Gresik

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Bengawan Solo	59,17
2	Kali Baturata	6,01
3	Kali Baturaya	3,1
4	Kali Bedahan	6,38
5	Kali Benem	30,33
6	Kali Ceper	6,95
7	Kali Corong	8,90
8	Kali Deje	5,49
9	Kali Gladakgede	3,86
10	Kali Grunjungan	5,57
11	Kali Joho	3,93
12	Kali Kebonagung	4,42
13	Kali Kope	4,23
14	Kali Lamongan	63,97

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
15	Kali Lancabur	2,22
16	Kali Laok	5,59
17	Kali Legundi	2,69
18	Kali Lewean	4,12
19	Kali Mantup	14,99
20	Kali Mas	30,11
21	Kali Medangan	14,23
22	Kali Mentani	4,01
23	Kali Mireng	6,67
24	Kali Raya	4,16
25	Kali Tambak	7,05
26	Kali Wadak	3,91
27	Kali Wangen	9,76

Sumber: Rancangan Teknokratis RPJMD 2025-2029

Tabel 2.13 Cekungan Air Tanah Kabupaten Gresik

Cekungan Air Tanah	Jenis	Volume Air tanah Bebas (m^3/tahun)	Air Tanah Tertekan (m^3/tahun)	Dasar Hukum	Luas
Brantas	Daerah Lepasan Air	3.647 Juta	175 Juta	Kepres No 26 Tahun 2011	10.462,23
Panceng	Daerah Tanah Imbuhan Air	27 Juta	41 Juta		10.967,81
Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		16.883,05
Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		16.699,34
Surabaya-Lamongan	Daerah Lepasan Air	843 Juta	37 Juta		9.451,36

Sumber: DD Pembangunan Waduk Lamong, 2012

Berdasarkan Tabel 2.13, Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Gresik terdiri dari tiga wilayah utama yaitu CAT Brantas, CAT Panceng, dan CAT Surabaya-Lamongan. CAT Brantas yang merupakan daerah lepasan air memiliki volume air tanah bebas sebesar 3.647 juta m^3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 175 juta m^3/tahun, dengan luas area mencapai 10.462,23 hektar. Sementara itu, CAT Panceng yang merupakan daerah imbuhan air tanah memiliki volume air tanah bebas sebesar 27 juta m3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 41 juta m^3/tahun, dengan luas area 10.967,81 hektar.

CAT Surabaya-Lamongan yang seluruhnya merupakan daerah lepasan air, tercatat memiliki volume air tanah bebas yang sama yaitu 843 juta m^3/tahun dan air tanah tertekan sebesar 37 juta m^3/tahun. Area ini terbagi menjadi tiga bagian dengan luas yang berbeda yaitu 16.883,05 hektar, 16.699,34 hektar, dan 9.451,36 hektar. Data ini bersumber dari Kepres No 26 Tahun 2011, yang

menjadi acuan dalam pengelolaan cekungan air tanah di wilayah tersebut. Peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada

Gambar 2.7 dan peta arah aliran Sungai Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Luas total Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Gresik mencapai 12.243,247 Ha yang tersebar di 18 kecamatan. CAT Surabaya-Lamongan memiliki area terluas yakni 7.456,956 Ha, diikuti CAT Panceng seluas 2.944,351 Ha, dan CAT Brantas seluas 1.841,940 Ha. Kecamatan Ujungpangkah memiliki area CAT terluas dengan total 2.481,502 Ha yang terdiri dari CAT Panceng dan Surabaya-Lamongan masing-masing seluas 1.240,751 Ha. Sementara itu, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki area CAT sama sekali seperti Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Sangkapura, dan Tambak yang ditunjukkan dengan nilai 0,00. CAT Brantas hanya terdapat di tiga kecamatan yaitu Driyorejo (550,941 Ha), Kedamean (670,289 Ha), dan Wringinanom (620,710 Ha).

Tabel 2.14 Sistem Pelayanan Jaringan Perpipaan

No	Wilayah Pelayanan	Dilayani Sistem
1	Gresik Kota	IPA Legundi, Sumur GKB, Air Curag dari Segoromadu, Gadung Surabaya dan PT Dewata Bangun Tirta
2	Gresik Tengah	IPA Legundi, dan Air Curah PT Drupadi Agung Lestari
3	Gresik Selatan	Air Curah PT Drupadi Agung Lestari dan IPA Perumnas

Sumber: PDAM Kabupaten Gresik, 2014

Berdasarkan tabel tersebut, sistem pelayanan jaringan perpipaan di Kabupaten Gresik terbagi menjadi tiga wilayah pelayanan utama. Wilayah Gresik Kota dilayani oleh beberapa sistem yaitu IPA Legundi, Sumur GKB, serta sumber air curah dari Segoromadu, Gadung Surabaya dan PT Dewata Bangun

Tirta. Untuk wilayah Gresik Tengah, sistem pelayanan berasal dari IPA Legundi dan air curah PT Drupadi Agung Lestari. Sementara itu, wilayah Gresik Selatan mendapatkan layanan air dari dua sumber yaitu air curah PT Drupadi Agung Lestari dan IPA Perumnas.

Tabel 2.15 Sumber Pelayanan Jaringan Perpipaan

No	IPA	Lokasi	Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku yang diambil (debit)
1	Sumur GKB II	Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas	Sumur Dalam	28 L/detik
2	IPA Legundi	Desa Legundi	Kali Surabaya	600 L/detik
3	IPA Perumnas	Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo	Kali Surabaya	100 L/detik
4	Air Curah-Segoromandu	Segoromadu	Air Curah PDAM Surabaya	40 L/detik
5	Air Curah-Gadung	Desa Gadung	Air Curah PDAM Surabaya	5 L/detik
6	Air Curah-PT Dewata	Desa Legundi	Kali Surabaya	210 L/detik
7	Air Curah- PT Drupadi	Desa Krikilan	Kali Surabaya	400 L/detik

Sumber: PDAM Kabupaten Gresik, 2014

Berdasarkan tabel tersebut, sumber pelayanan jaringan perpipaan di Kabupaten Gresik berasal dari tujuh lokasi berbeda dengan kapasitas yang bervariasi. IPA Legundi yang berlokasi di Desa Legundi memiliki kapasitas terbesar yaitu 600 L/detik dengan sumber air baku dari Kali Surabaya. Diikuti oleh Air Curah-PT Drupadi di Desa Krikilan dengan kapasitas 400 L/detik, dan Air Curah-PT Dewata di Desa Legundi sebesar 210 L/detik, keduanya juga mengambil sumber dari Kali Surabaya. IPA Perumnas yang berada di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo memiliki kapasitas 100 L/detik. Sumur GKB II yang terletak di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas menggunakan sumber air dari sumur dalam dengan kapasitas 28 L/detik. Sementara itu, Air Curah-Segoromadu dan Air Curah-Gadung yang mengambil sumber dari Air Curah PDAM Surabaya masing-masing memiliki kapasitas 40 L/detik dan 5 L/detik.

Tabel 2.16 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Curah Hujan
Kecamatan Balongpanggang	1.424 – 1.517
Kecamatan Benjeng	1.238 – 1.331
Kecamatan Bungah	679 - 772
Kecamatan Cerme	1.238 – 1.331
Kecamatan Driyorejo	1.424 – 1.517

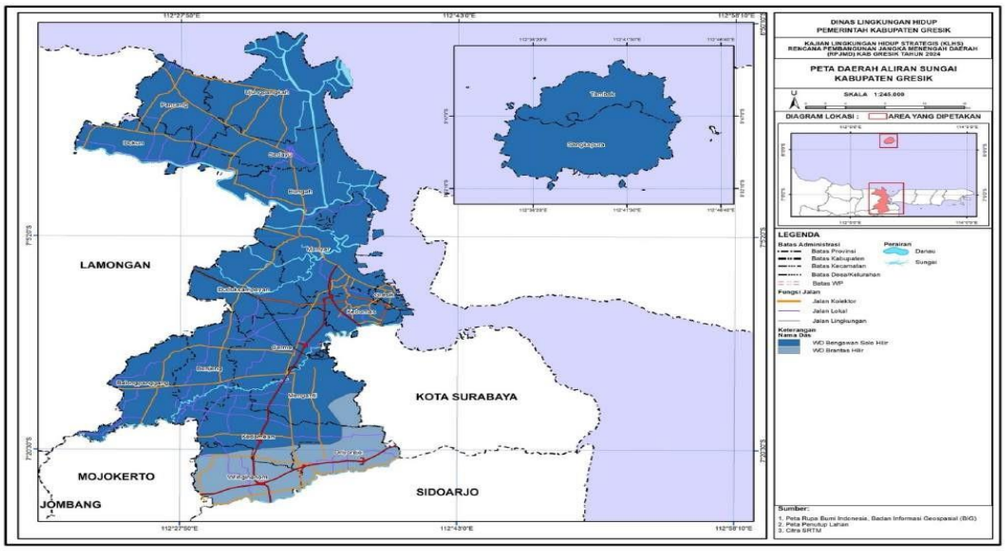
Kecamatan	Curah Hujan
Kecamatan Duduksampeyan	1.145 – 1.238
Kecamatan Dukun	1.238 – 1.331
Kecamatan Gresik	1.238 – 1.331
Kecamatan Kebomas	1.238 – 1.331
Kecamatan Kedamean	1.517 – 1.611
Kecamatan Manyar	1.052 – 1.145
Kecamatan Menganti	1.517 – 1.611
Kecamatan Panceng	679 - 772
Kecamatan Sangkapura	1.052 – 1.145
Kecamatan Sidayu	679 - 772
Kecamatan Tambak	1.052 – 1.145
Kecamatan Ujungpangkah	679 - 772
Kecamatan Wringinanom	1.704 – 1.797

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

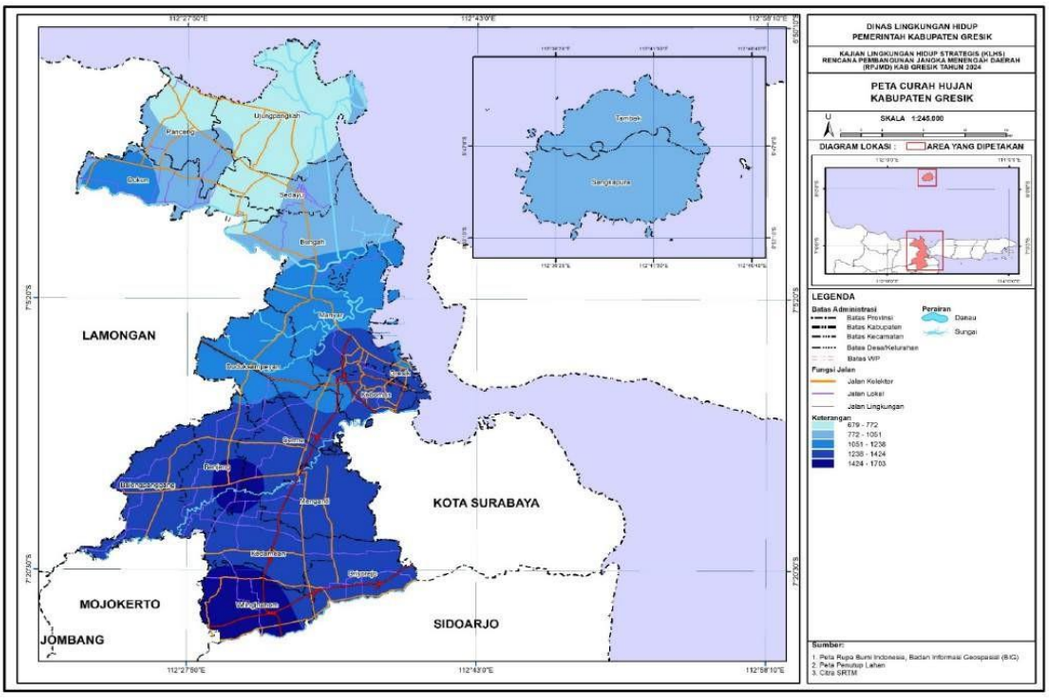
Berdasarkan Tabel 2.16, curah hujan di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Wringinanom dengan rentang 1.704 - 1.797 mm, diikuti oleh Kecamatan Kedamean dan Menganti yang memiliki rentang curah hujan sama yaitu 1.517 - 1.611 mm. Kecamatan Balongpanggang dan Driyorejo juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan rentang 1.424 - 1.517 mm. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Bungah, Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah mencatat curah hujan terendah dengan rentang 679 - 772 mm.



Gambar 2.7 Peta Aliran Sungai Kabupaten Gresik



Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Kabupaten Gresik



Gambar 2.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Gresik

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Sumber Daya Alam dan Industri

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita (R. latifah et al., 2023). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dengan demikian, pengelolaan SDA yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat digunakan secara efektif dan tidak merusak lingkungan hidup di masa depan.

2.1.1.2.2 Hortikultura

Produksi hortikultura mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias. Jumlah produksi ini dihitung berdasarkan luas area yang dipanen atau jumlah tanaman yang menghasilkan dalam periode waktu tertentu, baik itu bulanan maupun triwulanan. Berikut merupakan tabel produksi hortikultura di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.17 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)			
	2021	2022	2023	2024
Sayuran				
Bawang Daun	-	-	-	-
Bawang Merah	658,00	1.056,00	1.796,80	543,00
Bawang Putih	-	-	-	-
Bayam	3.831,00	4.233,00	3.341,00	3.008,00
Buncis	-	-	-	-
Cabai Besar	48.554,00	49.240,00	28.797,00	33.991,00
Cabai Keriting	-	-	-	-
Cabai Rawit	229.568,00	208.456,00	119.260,50	206.238,50
Jamur Tiram	1,00	-	7,05	11,90
Jamur Merang	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	-	-
Kacang Panjang	3.172,00	565,00	2.963,00	394,00
Kangkung	6.461,00	8.182,00	10.456,00	11.842,00
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-
Ketimun	131,00	-	-	940,00
Kubis	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	-	-
Petsai	3.220,00	4.427,00	10.977,00	31.142,00
Terung	2.791,00	2.947,00	5.199,00	1.351,00
Tomat	1.523,00	2.179,00	4,336,00	1.715,00
Wortel	-	-	-	-
Buah-buahan				
Melon	82,00	120,00	574,00	-
Semangka	1.240,00	204,00	1.223,00	199,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Tabel 2.17 menunjukkan data produksi sayuran dan buah-buahan semusim dari 2021-2024, dengan cabai rawit sebagai komoditas tertinggi meski mengalami penurunan di 2023 dengan produksi sebesar 20.623,9 ton di tahun 2024. Beberapa tanaman seperti kangkung dan sawi menunjukkan peningkatan produksi, sementara komoditas lain seperti ketimun, terung, dan tomat mengalami penurunan produksi. Total produksi keseluruhan menurun dari 29.991,0 ton di 2021 menjadi 29.117,6 ton di 2024. Untuk buah-buahan, produksi Melon dan Semangka relatif lebih rendah dan berfluktuasi dibanding kelompok sayuran.

Tabel 2.18 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)			
	2021	2022	2023	2024
Jahe	106.570	800.977	347	1.338
Jeruk Nipis	9.669.810	19.193.400	18.543.860	23.098.150
Kapulaga	-	-	-	-
Kencur	130	239	240	411
Kunyit	23.118.596	24.817.192	19.709.250	1.996.290
Laos	250	199	384	671
Lempuyang	1.200.000	650.000	-	-
Lidah Buaya	7	-	-	-
Mahkota Dewa	120	150	-	-
Mengkudu	830	1.100	578	85
Temuireng	5.184	3.682	4.855	2.710
Temukunci	2.139	2.582	165	429
Temulawak	11.946.045	9.389.172	4.526.231	530.353
Sambiloto	-	-	-	-
Serai	1.650	123.600	922.253	1.411.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.18 menunjukan bahwa terjadi fluktuasi produksi tanaman biofarmaka dari tahun 2021-2024. Produksi tanaman kunyit konsisten menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, mencapai puncak di tahun 2022 sebesar 24,8 juta kg. Tanaman Jeruk Nipis menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dengan produksi tertinggi mencapai 23,1 juta kg di tahun 2024. Temulawak juga menunjukkan angka produksi yang cukup tinggi dengan produksi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 11,9 juta kg. Total produksi tanaman biofarma terjadi peningkatan dari 46,1 juta kg di tahun 2021 menjadi 54,98 juta kg di tahun 2022. Sedangkan, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan produksi dengan total produksi masing-masing tahun sebesar 43,71 juta kg dan 27, 04 juta kg. Beberapa tanaman seperti Kapulaga, Lempuyang dan Sambiloto tidak memiliki catatan produksi selama periode tersebut.

Tabel 2.19 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Hias (Pohon)			
	2021	2022	2023	2024
Aglaonema	3.600	2.700	620	1.093
Anggrek Pot	-	1.890	1.725	43
Anggrek Potong	-	-	-	-
Anthurium Bunga	-	-	-	39
Bromelia	-	-	-	-
Bugenvil	870	1.439	1.017	34
Cordyline	-	-	-	-
Dracaena	-	-	-	-
Gerbera	-	-	-	-
Heliconia	-	-	-	-
Ixora	-	-	-	-
Krisan	-	-	-	-
Mawar	-	-	-	-
Melati	45.600	42.225	33.005	2.410
Pakis	-	-	-	-
Palem	1.020	1.020	90	15
Phylodendron	-	-	-	-
Puring	-	-	-	64
Sansevieria	-	-	-	82
Sedap Malam	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Data Tabel 2.19 menunjukkan produksi tanaman melati merupakan komoditas dengan produksi tertinggi, tanaman melati konsisten meningkat mencapai produksi paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 45.600 tanaman. Sedangkan produksi tanaman Anthurium Bunga, Puring, dan Sanseviera hanya tercatat di Tahun 2024. Total produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik secara keseluruhan mengalami penurunan signifikan dari 51.090 tanaman di 2021 menjadi 3.780 tanaman di 2024. Beberapa jenis tanaman seperti Anggrek Potong, Bromelia, Cordyline, Dracaena, Gerbera, Heliconia, Ixora, Krisan, Mawar, dan Sedap Malam tidak memiliki catatan produksi selama periode tahun 2021-2024.

Tabel 2.20 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (Kuintal)			
	2021	2022	2023	2024
Buah-buahan				
Alpukat	1.253,00	1.272,00	2.072,00	1.047,65
Anggur	-	-	1,10	3,40
Apel	-	-	-	-
Belimbing	6.896,00	7.074,00	6.978,59	20.796,75
Buah Naga	4.765,00	4.688,00	3.054,85	1.908,00
Duku	-	-	-	-
Durian	7.053,00	6.405,00	1.644,00	3.518,00
Jambu Air	9.389,60	9.337,00	10.032,72	5.968,17
Jambu Biji	15.497,00	16.957,00	14.280,11	25.930,61
Jeruk Pamelo	177,00	172,00	50,00	96,50
Jeruk Lemon	1.661,00	1.735,00	191,60	198,90
Jeruk Siam	4.600,00	4.880,00	6.653,00	20.192,48
Lengkeng	2,00	37,00	376,70	566,00
Mangga	871.346,40	786.538,88	831.044,57	763.122,75
Manggis	621,00	580,00	900,00	95,78
Nanas	-	-	-	-
Nangka	17.192,00	17.853,00	9.501,60	13.977,28
Pepaya	20.091,30	26.752,00	68.299,22	47.517,42
Pisang	311.148,00	384.351,00	313.122,59	305.298,64
Rambutan	11.535,00	11.337,00	511,60	1.198,90
Salak	-	-	6,70	58,00
Sawo	9.872,00	9.956,00	11.369,55	45.098,06
Sirsak	5.651,00	6.032,00	3.371,70	2.533,58
Sukun	7.342,00	6.694,00	3.952,70	5.447,29
Sayuran				
Melinjo	-	-	-	-
Petai	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.20 menunjukkan buah mangga menjadi komoditas dengan produksi tertinggi dengan produksi mencapai 76.312,3 ton pada tahun 2023. Pisang juga menjadi komoditas dengan produksi tinggi setelah mangga dengan produksi mencapai 30.529,9 ton di tahun 2024. Beberapa komoditas mengalami fluktuasi seperti Rambutan yang menurun drastis

dari 1153,5 ton di tahun 2021 menjadi 51,2 ton di tahun 2024. Sementara, Pepaya menunjukkan tren positif mencapai 6.829,9 ton di tahun 2023 dan 4751,7 ton di tahun 2024. Total produksi keseluruhan menurun dari 130.483,9 ton di 2021 menjadi 126.457,4 ton. Beberapa tanaman seperti Markisa dan Nanas tidak memiliki catatan produksi di tahun-tahun terakhir.

2.1.1.2.3 Perkebunan

Produksi perkebunan mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang secara berkelanjutan dapat ditanam setiap tahun seperti karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, pala, dan lada. Sedangkan tanaman semusim biasanya ditanam dalam satu musim dan kemudian dipanen sebelum musim berikutnya seperti tebu, tembakau, dan nilam.

Tabel 2.21 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)			
	2021	2022	2023	2024
Tanaman Tahunan				
Karet	-	-	-	
Kelapa	5.050,56	5.049,77	5.044,73	5 044,75
Kelapa Sawit	-	-	-	
Kopi	-	-	-	
Kakao	-	-	-	
Teh	-	-	-	
Jambu Mete	-	-	-	
Pala	-	-	-	
Lada	-	-	-	
Tanaman Semusim				
Tebu	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158 589,19
Tembakau	375,00	900,00	1.628,40	3.248,89
Nilam	-	-	-	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.21, sektor perkebunan di Kabupaten Gresik didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu kelapa, tebu, dan tembakau. Produksi kelapa menunjukkan tren penurunan, dari 5.050,56 ton pada tahun 2021 menjadi 5.044,75 ton pada tahun 2024. Hal yang sama terjadi pada produksi tebu dengan sedikit penurunan produksi, dari 159.790,50 ton pada tahun 2021 menjadi 158.589,19 ton pada tahun 2024. Tembakau

mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, meningkat drastis dari 375,00 ton pada tahun 2021 menjadi 3.248,89 ton pada tahun 2024. Total produksi perkebunan rakyat menunjukkan tren peningkatan, dari 165.216,06 ton pada tahun 2021 menjadi 166.882,83 ton pada tahun 2024.

2.1.1.2.4 Perikanan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik memiliki produksi perikanan budidaya tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Sebagian besar jenis budidaya yang digunakan di Kabupaten Gresik adalah Tambak Payau dan Tambak Tawar, yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Berikut merupakan tabel produksi ikan menurut sub sektor perikanan di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Tabel 2.22 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Kg)			
	2021	2022	2023	2024
Penangkapan di Laut	-	10.793.753	11.949.510,00	7.354.300,00
Budidaya				
Tambak Payau	108.639.603	68.664.948	71.210.017,27	76.430.015,33
Tambak tawar	22.856.646	66.267.607	64.237.678,50	63.959445,69
Perairan Umum	-	16.766.346	17.469.779,85	15.582.549,37
Jumlah	**131.496.249**	**162.492.654**	**164.866.985,62**	**155.979.364,68**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.22, Produksi perikanan Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 155,98 ribu ton. Jumlah produksi ikan terbanyak adalah dari produksi perikanan budidaya yaitu tambak payau sebanyak 76,43 ribu ton. Sub sektor perikanan budidaya, terutama tambak payau dan tambak tawar secara konsisten telah memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi ikan di Kabupaten Gresik.

2.1.1.2.5 Peternakan

Peternakan di Kabupaten Gresik didominasi oleh ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Contoh ternak besar seperti sapi dan kerbau digunakan untuk produksi susu dan daging, sementara ternak kecil seperti kambing dan domba digunakan untuk produksi daging dan wol. Kemudian,

ternak unggas seperti ayam dan itik digunakan untuk produksi telur dan daging. Dengan demikian, peternakan di Kabupaten Gresik memiliki beragam jenis ternak yang berkontribusi pada keberlanjutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.23 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Jenis Ternak	Populasi			
	2021	2022	2023	2024
Ternak Besar				
Sapi	59.259	57.347	54.352	24.853
Kerbau	234	109	53	57
Kuda	239	198	149	152
Sapi Perah	499	326	299	260
Ternak Kecil				
Kambing	79.059	80.100	75.746	60.579
Domba	37.899	39.900	42.135	23.129
Babi	27	20	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2024

Tabel 2.24 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Jenis Unggas	Populasi			
	2021	2022	2023	2024
Ayam Buras	759.629	763.050	768.020	203.528
Ayam petelur	260.140	266.005	266.938	344.993
Ayam Pedaging	6.039.142	6.084.518	24.438.606	2.060.263
Bebek	31.890	31.906	32.322	76.851
Entok	32.081	32.097	33.210	10.332

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.23 dan Tabel 2.24 terdapat tiga jenis ternak di Kabupaten Gresik, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Jenis ternak besar yang paling banyak diternakkan pada tahun 2024 adalah sapi, sebanyak 24.853 ekor. Namun, angka ini mengalami penurunan dari jumlah sapi di Kabupaten Gresik 3 tahun sebelumnya yang mencapai 59.259 ekor pada tahun 2021. Sedangkan, ternak kecil paling banyak adalah kambing dengan populasi sebanyak 60.579 ekor dan domba sebanyak 23.129 ekor di tahun 2024. Berbagai jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, bebek dan entok. Jenis ternak unggas paling banyak pada tahun 2024 adalah ayam pedaging yaitu mencapai 2.060.263 ekor.

2.1.1.2.6 Pariwisata

Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi pariwisata. Wilayah ini menawarkan sejumlah destinasi wisata menarik, mulai dari tempat wisata religi hingga wisata alam (Arief & Lokajaya, 2023). Oleh karena itu, Kabupaten Gresik menjadi salah satu tujuan wisata yang populer bagi wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik. Berikut ini adalah tabel jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.25 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024

Wisatawan	Jumlah Wisatawan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	4.320	37	12.599	18.281	18.655
Domestik	2.098.995	2.106.133	4.120.683	4.280.847	4.513.723
Jumlah	**2.103.355**	**2.106.170**	**4.133.282**	**4.299.128**	**4.532.378**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.25 wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.532.723 orang, meningkat sebesar 5,4 persen dari tahun 2023.

Tabel 2.26 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri Cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu	81	Mangrove Dekasba

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
	Lintang		
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Deman Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadje
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
			Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	132	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, 2024

Bersarkan Tabel 2.26 destinasi wisata di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebanyak 132 lokasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Destinasi-destinasi ini tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik. Jumlah destinasi yang cukup banyak ini menunjukkan keberagaman potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Gresik, mulai dari objek wisata alam, hingga situs-situs religi yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya. Dengan sebaran yang merata di seluruh wilayah, setiap kecamatan di Kabupaten Gresik memiliki daya tarik wisata, yang semakin memperkuat posisi daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

2.1.1.2.7 Industri

Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang maju dan memiliki keberagaman sektor industri yang berkembang pesat. Berbagai jenis industri, seperti industri elektronik, petrokimia, semen, tekstil, hingga industri makanan berskala rumahan, tumbuh subur di wilayah ini (Mauliza et al., 2023). Keberagaman sektor industri ini menjadikan Kabupaten Gresik sebagai pusat industri yang sangat signifikan di Jawa Timur, dengan berbagai produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun internasional. Berikut daftar industri yang berada pada Kawasan Industri Gresik pada tahun 2023.

Tabel 2.27 Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	PT. PETROKIMIA GRESIK	Jl. Jenderal Ahmad Yani Gresik, Jawa Timur 61119
2	PT. KELOLA MINA LAUT	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C-5, Randuboyo, Randuagung, Kebomas, Gresik.
3	PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI	Jl. Kig Raya Barat No.8, Randuboyo, Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
4	PT. PETROKIMIA KAYAKU	Jl. Jendral Ahmad Yani PO Box 107 Gresik, 61119 Jawa Timur – Indonesia
5	PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA	Jl. Kig Raya Selatan Blok A5, Karangturi, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121, Indonesia
6	PT. SUMBER BERSIH DUNIA	Jl. Tri Dharma Kawasan Industri Gresik No.3, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
7	PT. ANEKA JASA GRHADIKA	Jl. Prof. Moch. Yamin, SH
8	PT. FOKUS JASA MITRA	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin SH, KIG Gresik
9	PT. BUMI PERSADA KARYA	Jl. Raya Roomo No.94B, Maduran, Roomo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik
10	Eterindo Nusa Graha (ENG)	Kawasan Industri Gresik, Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin
11	PT Petro Jordan Abadi	Jl. Raya Roomo, Manyar Gresik 61151
12	PT Petrowidada	Jl. Prof. Dr. Moch Yamin Sh, KIG Gresik
13	PT Anugerah Inti Germanusa	Jl Prof M Yamin SH Kompl Kawasan Industri Gresik Raya Utr Bl B/4-5, Gresik
14	PT Ranteindo Teknik Mandiri	Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, KIG Gresik
15	PT. Fruit ING indonesia	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik
16	PT Gotrans Logistics	Jalan Raya KIG Barat II Kav. Q 19-28, Gresik
17	PT Harvestar Flour Mills	Jl. KIG Raya Barat Kav. M No. 3-4, Sekarsore, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151
18	PT Blue Gas Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav. L Gresik, Jawa Timur

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
19	PT Bumi Mandiri Resource	Jl. Kig Raya Barat No.1, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
20	PT Mitra Nasional Kualitas (Minaku)	Jl. KIG Raya Selatan Kav. C7, Kawasan Industri Gresik, Gresik 61121
21	PT Krakatau Wiremesh Surabaya	Jalan KIG Barat 2 Kavling H-1, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur.
22	PT Colorpak Indonesia Tbk	Jl. Kig Raya Selatan kav E-8, Kawasan Industri Gresik, Gresik, Jawa Timur
23	PT Primergy Solution	KIG Raya Selatan E7-8, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia
24	PT Sarana Karya Utama	Jl. Kig Raya Selatan Kavling A No.4, Kawasan Industri Gresik, Gresik
25	PT Ispat Panca Putera	JL Tridharma, No. 3 Kav D 1 – 9/14-22, Komplek Kawasan Industri Gresik
26	PT Madsumaya Indo Seafood	Komplex Industri Gresik Kav. 8 No. 15-16 Gresik 61121 – Jawa Timur, Indonesia
27	PT Kimika Usaha Prima	Jl. Tri Dharma Blok B-14 Komplek Ruko KIG, Kebomas, Gresik
28	PT Petro Bumi Hijau	Jl. KIG Raya Barat
29	Sika Indonesia	Jl. KIG Raya Utara Kav. 3-4, Gresik
30	PT DSI	JL Kawasan Industri Gresik Barat VI Kav. Q16- 17 Gresik Jawa Timur
31	Komotech	Jl. KIG Raya Barat BI G/7, Gresik, Jawa Timur
32	PT Wiharta Karya Agung	Jl Notoprayitno 4, Kebomas, Gresik
33	PT Rollent Indonesia	Jl. KIG Raya Barat Kav-G No.11, Kawasan Industri Gresik
34	PT Samator Gas Industri	Jl. Kig Raya Selatan 61121 Roomo, Gresik, Jawa Timur
35	PT Buana Tirta Utama	Kawasan Industri Gresik Jl.KIG Raya Barat Kav.G4-5 & G22 Gresik, Indonesia

Sumber: KIG, 2023

2.1.1.2.8 Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan sumber daya alam yang dilakukan dengan menggali atau menambang dari dalam tanah atau perut bumi. Selain itu, pertambangan juga berperan dalam memberikan

kontribusi terhadap pendapatan negara (Fahris Suritno et al., 2022). Kawasan pertambangan di Kabupaten Gresik sendiri memiliki luas sebesar 817,25 hektar. Berikut merupakan tabel luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.28 Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik

No	Galian	Luas Usaha Penambangan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Gamping	124,35	2.400.000
2	Dolomit	36,13	528.960
3	Tanah Urug	26,54	270.000
4	Fosfat	4,13	39.600
5	Batu Gamping	8,50	54.720
6	Dolomit	309,13	6.000.000
7	Batu Gamping	2,60	95.625
8	Batu Gamping	5,00	112.500
9	Sirtu	6,94	432.000
10	Sirtu	22,82	72.000
11	Andesit	7,63	102.000
12	Batu Gamping	4,13	10.560

Sumber: ESDM Prov Jatim, 2022

Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.28, memberikan gambaran rinci mengenai sektor pertambangan. Berdasarkan data tersebut, jenis bahan galian yang paling banyak ditambang adalah dolomit, dengan luas usaha penambangan mencapai 309,13 hektar dan produksi mencapai 6 juta ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa dolomit menjadi salah satu komoditas utama dalam sektor pertambangan di Kabupaten Gresik.

Selain dolomit, batu gamping juga menjadi bahan galian yang cukup signifikan, dengan beberapa lokasi penambangan yang tersebar di wilayah ini. Produksi batu gamping di Kabupaten Gresik bervariasi, mulai dari 2.400.000 ton per tahun hingga 112.500 ton per tahun, tergantung pada lokasi dan ukuran usaha penambangannya. Sementara itu, jenis bahan galian lain seperti tanah urug, fosfat, sirtu, dan andesit juga memiliki kontribusi penting terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Gresik, meskipun dengan luas usaha dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan dolomit dan batu gamping.

2.1.1.2.9 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kedua-duanya. Konversi penggunaan lahan dapat berdampak pada ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukan lahan tersebut (Saifuddin & Danardono, 2024). Seperti penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologi, dapat dilihat dari lahan yang semula merupakan rawa-rawa, sawah, kawasan penampung air hujan, daerah resapan air hujan dan lainnya, yang diubah menjadi kawasan permukiman, pertokoan, industri dan lain sebagainya dengan tidak mempertimbangkan kemampuan lahannya (Susetyo, 2018). Berikut merupakan tabel luas penggunaan lahan di Kabupaten Gresik.

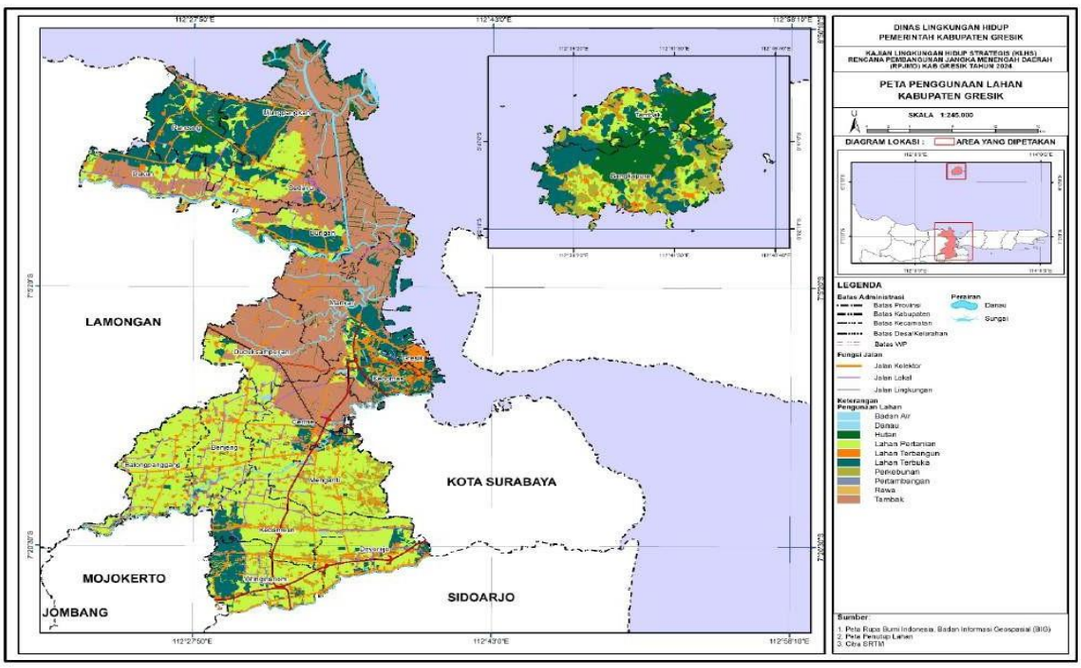
Tabel 2.29 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Gresik

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Badan Air	2.285,95
Badan Jalan	361,55
Cagar Alam	615,51
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.869,28
Kawasan Hortikultura	11.950,66
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77
Kawasan Pariwisata	99,34
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	82,91
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00
Kawasan Perlindungan Setempat	1.403,45
Kawasan Permukiman Perdesaan	17.514,18
Kawasan Permukiman Perkotaan	15.531,69
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78
Kawasan Peruntukan Industri	10.469,60
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41
Suaka Margasatwa	3.918,88
TOTAL	**125.675,97**

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.29, total luas lahan mencapai 125.675,97 Ha yang terbagi dalam berbagai peruntukan. Kawasan Tanaman Pangan mendominasi dengan luas 38.537,41 Ha, diikuti oleh Kawasan Perikanan Budi Daya seluas 19.824,00 Ha. Area permukiman terbagi menjadi dua

kategori yaitu Kawasan Permukiman Perdesaan (17.514,18 Ha) dan Perkotaan (15.531,69 Ha). Kawasan Hortikultura juga memiliki porsi yang cukup besar yakni 11.950,66 Ha, sementara Kawasan Peruntukan Industri mencapai 10.469,60 Ha. Kawasan konservasi dan lingkungan seperti Mangrove (1.869,28 Ha), Cagar Alam (615,51 Ha), dan Kawasan Perlindungan Setempat (1.403,45 Ha) mendapat porsi yang lebih kecil namun tetap signifikan. Adapun kawasan infrastruktur seperti Badan Air (2.285,95 Ha), Badan Jalan (361,55 Ha), dan Pembangkit Tenaga Listrik (82,91 Ha) mengambil porsi yang lebih kecil. Kawasan lainnya meliputi Hutan Produksi Tetap (1.032,77 Ha), Pariwisata (99,34 Ha), PertaHanan dan Keamanan (178,78 Ha), serta Suaka Margasatwa (3.918,88 Ha). Peta penggunaan lahan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Gambar 2.1Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sementara daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Di Kabupaten Gresik, penentuan daya dukung lingkungan dilakukan dengan memahami kapasitas lingkungan alam dan sumber daya yang ada untuk mendukung

aktivitas manusia. Kabupaten Gresik yang terus berkembang pesat, terutama di sektor industri dan permukiman, membutuhkan analisis daya dukung lingkungan yang mendalam, terutama dalam hal ketersediaan air dan pangan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan permintaan akan sumber daya alam, kebutuhan akan air dan pangan juga semakin besar, yang membuat analisis kondisi daya dukung pangan menjadi urgensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

a. Daya Dukung Air

Ketahanan daya dukung air di Kabupaten Gresik menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan kehidupan dan perkembangan wilayah ini, terutama mengingat kebutuhan air yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi industri. Tabel mengenai daya dukung air pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2029 di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 3.39.

Tabel 2.30 Luas Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2029 Kabupaten Gresik

Kecamatan	2024		2029	
	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)
Balongpanggang	116,13	6.530,61	1.686,13	4.960,61
Benjeng	617,95	5.693,37	3.382,14	2.929,18
Bungah	4.430,22	4.514,50	4.941,27	4.003,45
Cerme	3.043,93	4.395,03	3.095,91	4.343,05
Driyorejo	0,86	5.668,47	1.649,98	4.019,36
Duduksampeyan	4.630,26	3.049,67	5.213,71	2.466,23
Dukun	1.835,05	4.772,22	2.429,64	4.177,63
Gresik	14,41	800,69	16,95	798,16
Kebomas	573,21	2.781,28	689,32	2.665,17
Kedamean	-	6.740,93	1.326,54	5.414,39
Manyar	5.782,21	4.320,22	5.875,56	4.226,87
Menganti	155,87	6.502,57	2.222,98	4.435,47
Panceng	166,04	5.985,21	194,84	5.956,41
Sangkapura	61,02	12.884,73	82,58	12.863,17
Sidayu	1.653,75	2.686,08	1.653,75	2.686,08
Tambak	71,51	6.967,37	78,37	6.960,51
Ujungpangkah	6.116,96	6.063,42	6.116,96	6.063,42
Wringinanom	0,59	6.049,64	491,63	5.558,60

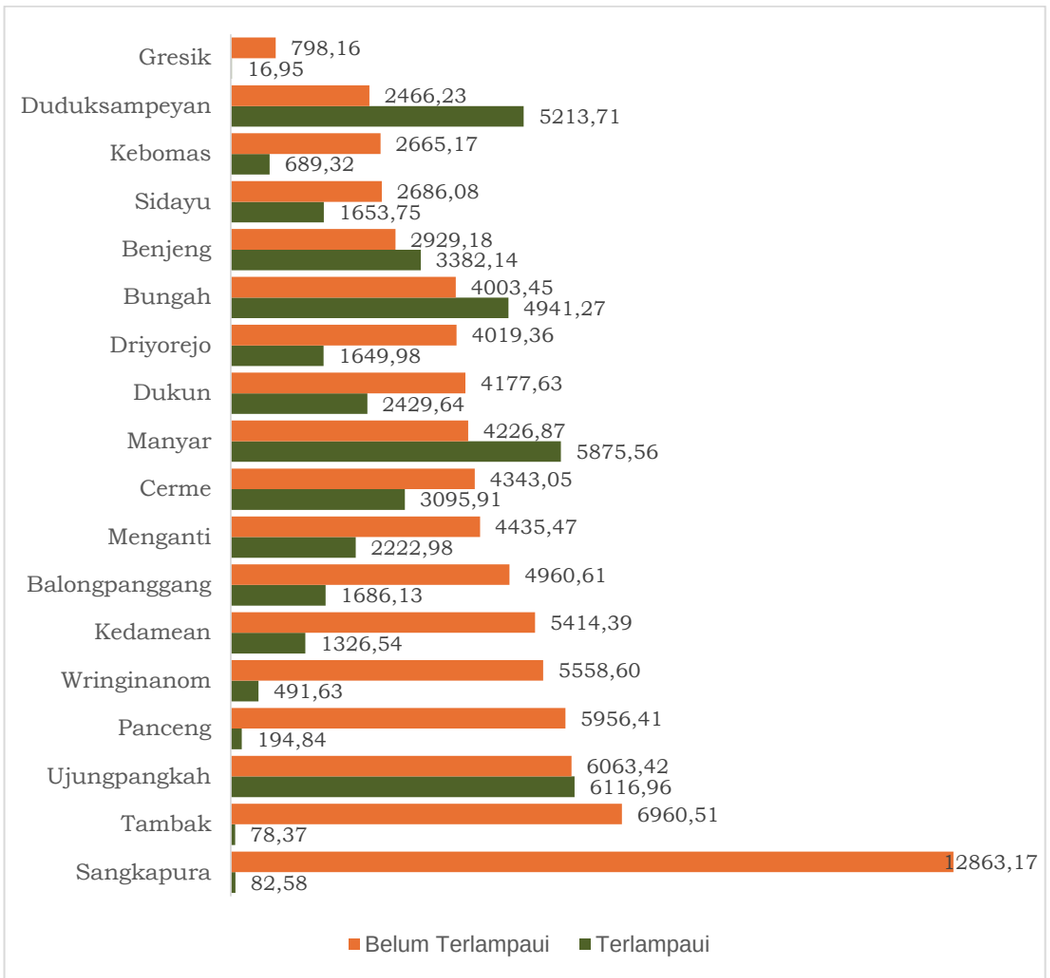
Kecamatan	2024		2029	
	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)	Terlampaui (m^3)	Belum Terlampaui (m^3)
Grand Total	**29.269,96**	**96.406,01**	**41.148,23**	**84.527,74**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis daya dukung air pada tahun 2024, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Gresik mengalami kondisi kekurangan daya dukung air, dengan total “belum terlampaui” mencapai 96.406,01 juta meter kubik. Meskipun demikian, beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bungah, Manyar, dan Duduksampeyan, telah melampaui kapasitas daya dukung air, dengan total “terlampaui” mencapai 29.269,96 juta meter kubik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik masih mengalami defisit, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi surplus air.

Proyeksi untuk tahun 2029 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kondisi daya dukung air di Kabupaten Gresik. Total daya dukung air “terlampaui” diperkirakan meningkat menjadi 41.148,23 juta meter kubik, dengan kecamatan seperti Balongpanggang, Benjeng, Bungah, dan Manyar mengalami peningkatan signifikan dalam ketersediaan air. Di sisi lain, total daya dukung air “belum terlampaui” diperkirakan akan menurun menjadi 84.527,74 juta meter kubik, meskipun permintaan air yang semakin tinggi di beberapa kecamatan tetap menjadi tantangan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik, seperti Sidayu, Sangkapura, dan Ujungpangkah, masih menghadapi tantangan terkait daya dukung air yang "belum terlampaui" pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah-daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air masih terbatas, yang dapat berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada ketersediaan air, seperti pertanian dan industri. Sebaliknya, kecamatan-kecamatan seperti Bungah dan Manyar menunjukkan daya dukung yang "terlampaui" cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan air di wilayah tersebut telah teratasi lebih dari cukup. Namun, kondisi ini juga menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di daerah-daerah dengan surplus, mengingat potensi pengelolaan yang tidak merata dan dampak perubahan iklim yang mungkin mempengaruhi ketersediaan air di masa depan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi daya dukung air, dapat dilihat grafik yang menjelaskan mengenai daya dukung air pada tahun 2029 di Kabupaten Gresik pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Proyeksi Luas Daya Dukung Air Kabupaten Gresik Tahun 2029 dalam satuan m^3

Perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik sangat penting, terutama bagi kecamatan-kecamatan dengan daya dukung air yang terlampaui tinggi, seperti Bungah dan Manyar. Meskipun wilayah-wilayah ini memiliki surplus air, pengelolaan yang efisien dan bijaksana diperlukan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dalam jangka panjang, mengingat potensi ketidakmerataan distribusi dan dampak perubahan iklim. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang tepat terkait pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, guna mengatasi tantangan di masa depan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kebutuhan air bagi masyarakat, pertanian, dan industri.

b. Daya Dukung Pangan

Kebutuhan pangan di Kabupaten Gresik akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, seringkali kebutuhan pangan ini tidak seimbang dengan ketersediaan pangan yang ada, sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam memastikan ketahanan pangan. Oleh karena itu, analisis daya dukung pangan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung stabilitas pangan di wilayah ini. Analisis status daya dukung pangan di Kabupaten Gresik dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di tiap kecamatan, yang dapat menentukan apakah status daya dukung pangan berada dalam kondisi “Belum Terlampaui” atau “Terlampaui.” Kondisi "Terlampaui" terjadi ketika kebutuhan pangan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan yang ada, yang dapat dilihat dari hasil pengurangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan, menunjukkan adanya kekurangan pangan di wilayah tersebut. Di Kabupaten Gresik, kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Berikut merupakan tabel daya dukung pangan tahun 2024 dan tahun 2029 di Kabupaten Gresik yang dapat dilihat pada Tabel 3.40.

Tabel 2.31 Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2029 Kabupaten Gresik

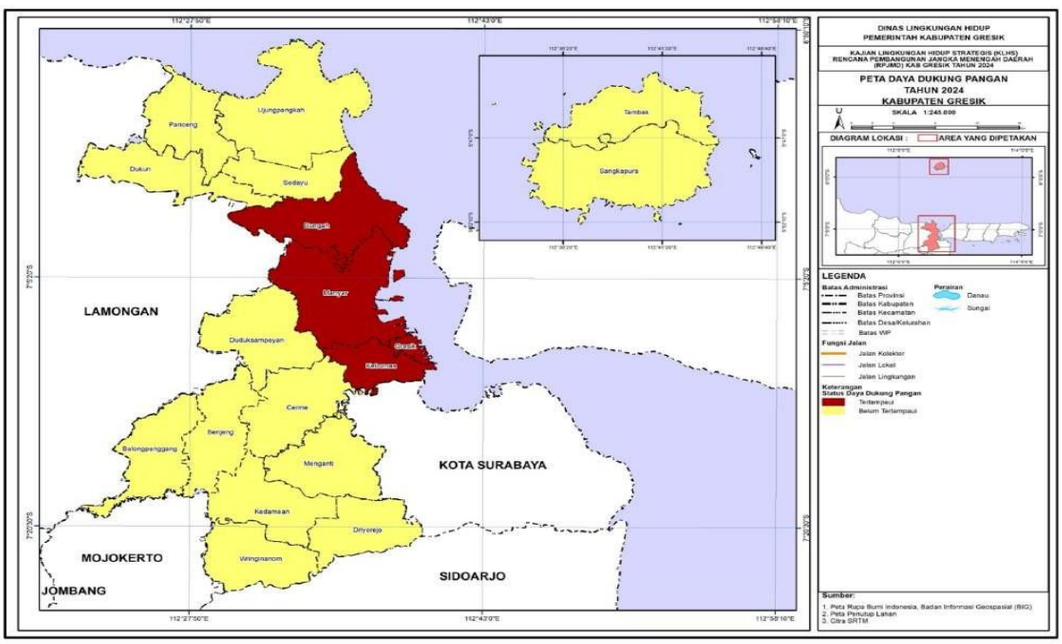
No	kecamatan	ketersediaan pangan (kg)	kebutuhan pangan (kg)	ketersediaan – kebutuhan (kg)	status
Daya Dukung Pangan Tahun 2024					
1	Wiringinanom	10.040.959	6.015.391	4.025.568	Belum Terlampaui
2	Driyorejo	9.351.452	8.628.427	723.025	Belum Terlampaui
3	Kedamean	12.967.046	5.252.527	7.714.518	Belum Terlampaui
4	Menganti	10.900.018	10.549.145	350.873	Terlampaui
5	Cerme	7.041.859	6.746.225	295.634	Terlampaui
6	Benjeng	16.955.558	5.442.702	11.512.855	Belum Terlampaui
7	Balongpanggang	19.529.369	4.686.993	14.842.376	Belum Terlampaui
8	Duduksampean	6.962.985	4.110.228	2.852.757	Belum Terlampaui
9	Kebomas	465.941	9.278.400	-8.812.459	Terlampaui
10	Gresik	0	6.666.611	-6.666.611	Terlampaui

No	kecamatan	ketersediaan pangan (kg)	kebutuhan pangan (kg)	ketersediaan – kebutuhan (kg)	status
11	Manyar	1.169.248	9.772.888	-8.603.641	Terlampaui
12	Bungah	4.887.982	5.655.589	-767.606	Terlampaui
13	Sidayu	6.400.092	3.626.638	2.773.454	Belum Terlampaui
14	Dukun	8.488.045	5.458.841	3.029.203	Belum Terlampaui
15	Panceng	8.144.228	4.354.228	3.790.000	Belum Terlampaui
16	Ujungpangkah	9.037.492	4.302.650	4.734.843	Belum Terlampaui
17	Sangkapura	6.739.138	4.386.839	2.352.299	Belum Terlampaui
18	Tambak	3.834.335	2.508.631	1.325.704	Belum Terlampaui
	Daya Dukung Pangan Tahum 2029				
1	Wiringinanom	9.722.198	6.385.081	3.337.117	Belum Terlampaui
2	Driyorejo	9.054.580	9.158.707	-104.127	Terlampaui
3	Kedamean	12.555.393	5.575.334	6.980.060	Belum Terlampaui
4	Menganti	9.568.591	11.197.468	-1.628.877	Terlampaui
5	Cerme	6.418.233	7.160.831	-742.598	Terlampaui
6	Benjeng	16.417.286	5.777.196	10.640.089	Belum Terlampaui
7	Balongpanggang	18.909.389	4.975.044	13.934.346	Belum Terlampaui
8	Duduksampean	6.741.938	4.362.832	2.379.106	Belum Terlampaui
9	Kebomas	451.149	9.848.626	-9.397.477	Terlampaui
10	Gresik	-	7.076.324	-7.076.324	Terlampaui
11	Manyar	1.132.129	10.373.504	-9.241.376	Terlampaui
12	Bungah	4.732.808	6.003.166	-1.270.358	Terlampaui
13	Sidayu	6.196.914	3.849.522	2.347.393	Belum Terlampaui
14	Dukun	8.218.583	5.794.327	2.424.256	Belum Terlampaui
15	Panceng	7.885.681	4.621.828	3.263.853	Belum Terlampaui
16	Ujungpangkah	8.750.588	4.567.079	4.183.509	Belum Terlampaui
17	Sangkapura	6.525.198	4.656.443	1.868.755	Belum Terlampaui
18	Tambak	3.712.611	2.662.805	1.049.805	Belum Terlampaui

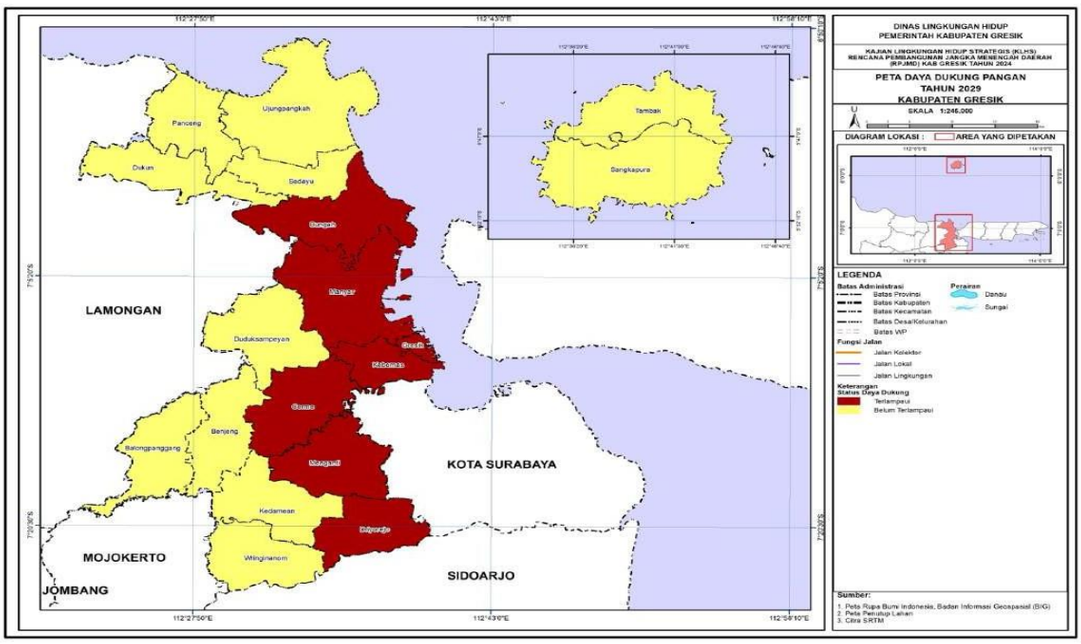
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Status daya dukung pangan dikategorikan menjadi Belum Terlampaui jika ketersediaan pangan masih lebih tinggi dari kebutuhan, dan Terlampaui jika kebutuhan pangan lebih besar dari ketersediaan yang ada. Pada tahun 2024, beberapa kecamatan seperti Kedamean, Benjeng, dan Balongpanggang berada dalam kondisi Belum Terlampaui, sedangkan kecamatan seperti Kebomas, Gresik, dan Manyar mengalami kondisi Terlampaui. Proyeksi tahun 2029 menunjukkan adanya perubahan dalam keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan di beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan yang sebelumnya berada dalam kondisi Belum Terlampaui, seperti Menganti dan Cerme, diproyeksikan akan mengalami status Terlampaui, sementara kecamatan seperti Kedamean dan Benjeng tetap berada dalam kondisi Belum Terlampaui. Beberapa kecamatan dengan status Terlampaui yang cukup parah, seperti Kebomas dan Gresik, diperkirakan akan mengalami peningkatan kebutuhan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang ada, sehingga memperburuk kondisi ketahanan pangan mereka.

Secara keseluruhan, tren yang terlihat menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi dan produksi pangan di Kabupaten Gresik. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi yang signifikan, sementara yang lain menghadapi kesenjangan yang semakin besar antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan distribusi pangan, peningkatan produksi lokal, serta upaya dalam mengatasi kondisi Terlampaui melalui kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berbasis data.



Gambar 2.12 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2024



Gambar 2.13 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2029

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Konsumsi Listrik Perkapita

Ketahanan energi di Kabupaten Gresik menjadi aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah distribusi listrik (kWh), yang mengukur jumlah energi listrik yang disalurkan kepada konsumen. Pemakaian tenaga listrik ini mencakup jumlah kWh (kilowatt hours) energi listrik yang digunakan baik secara langsung, seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, maupun secara tidak langsung, seperti untuk sektor komersial dan layanan publik.

Tabel 2.32 Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Listrik yang Terjual (kWh)	2.457.057.631	2.511.110.794	2.644.528.132	2.958.834.111

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Distribusi listrik PLN di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pada 2021, distribusi tercatat sebesar 2.457.057.631 kWh dan meningkat menjadi 2.511.110.794 kWh pada 2022. Pada 2023, distribusi listrik bertumbuh menjadi 2.644.528.132 kWh, dengan kenaikan signifikan pada 2024 mencapai 2.958.834.111 kWh.

b. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang layak dari sumber yang baik. Air minum yang layak adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan air adalah akses rumah tangga perkotaan
terhadap air siap minum perpipaan. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 2.33 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

c. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment* - PoU) di Kabupaten Gresik menggambarkan persentase penduduk yang mengonsumsi pangan kurang dari standar yang dibutuhkan untuk hidup sehat.

Tabel 2.34 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik

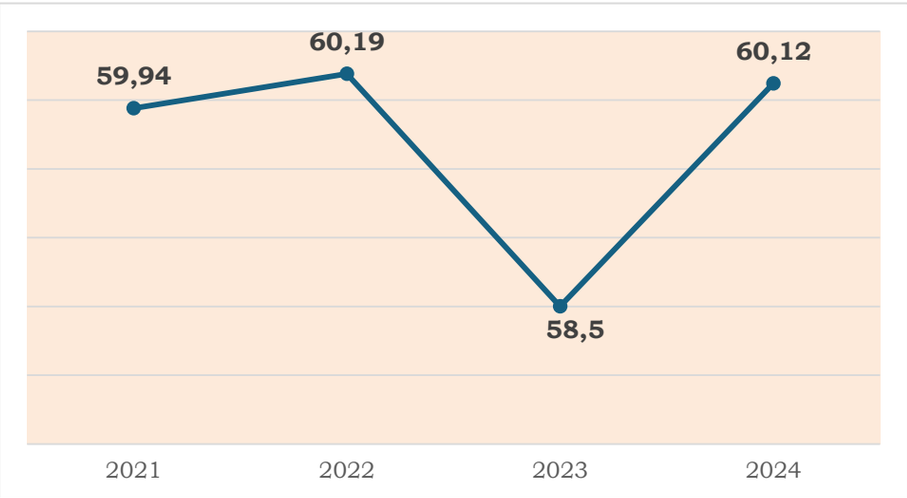
Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	4,43	4,59	6,60	3,67

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional pada Tabel 2.34, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,67%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi masalah pangan, tantangan masih ada dalam memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Gresik, dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep Environmental Performance Index (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026.



Gambar 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.14 pada tahun 2024, Kabupaten Gresik berhasil mencapai nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar

60,12. Nilai IKLH tersebut mencerminkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sempat turun ke angka 58,5. Tren ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengelola kualitas air, udara, dan lahan secara terpadu, sejalan dengan pedoman dan kebijakan nasional dalam perlindungan lingkungan hidup. Tabel 2.35 capaian tiga indikator penilaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.

Tabel 2.35 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	48.75	48.24	49.38	50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.99	81.03	81.24	82.94
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32.94	32.86	32.17	35.3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Selama periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika dalam kualitas lingkungan hidup berdasarkan empat indikator utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKA mengalami sedikit fluktuasi dengan tren peningkatan dari 48,75 pada 2021 menjadi 50,00 pada 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air meskipun masih di bawah kategori baik. IKU secara konsisten meningkat dari 80,99 menjadi 82,94, menandakan bahwa kualitas udara di Gresik terus membaik dan berada pada level sangat baik. Sementara itu, IKL sempat mengalami penurunan dari 32,94 (2021) ke 32,17 (2023), namun berhasil naik signifikan menjadi 35,30 pada 2024, yang menunjukkan dampak positif dari upaya rehabilitasi lahan.

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas atau ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. IKD merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dengan IKD, pemerintah daerah dapat mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Setelah diperoleh nilai IKD OPD Kabupaten dan Kota dan IKD OPD Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan perhitungan untuk nilai IRB dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan

kontribusi nilai IKD OPD Provinsi Jawa Timur terhadap IKD 38 OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.36 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah	99.29	96.50	94.89	91.42

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2024

Tabel 2.36 menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Daerah tercatat sebesar 99.29, menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 96.50, yang diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 menjadi 94.89. Pada tahun 2023, Indeks Ketahanan Daerah mencapai angka 91.42, yang menandakan penurunan signifikan dalam ketahanan daerah. Data ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat ketahanan daerah untuk mencapai kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1 Resiliensi Terhadap Bencana

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Gresik merujuk pada kemampuan masyarakat dan daerah untuk beradaptasi serta bertahan hidup di tengah ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perubahan iklim yang semakin meningkat. Tingkat resiliensi yang tinggi sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim, yang menciptakan kondisi yang semakin ekstrem, dapat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan tsunami, yang pada gilirannya berpotensi mengancam ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan, serta merusak fungsi ekosistem yang esensial bagi kehidupan. Informasi jumlah kejadian bencana di Kabupaten Gresik ditunjukkan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik
Tahun 2019 - 2023

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	48	53	62	83	90
Tanah Longsor	-	3	7	7	19
Puting Beliung	-	4	34	25	27
Kekeringan	1	-	53	7	70
Cuaca Ekstrem	6	-	-	3	3
Gempa Bumi	-	-	22	-	-
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-
Total	**54**	**60**	**156**	**172**	**209**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2024

A. Kawasan Risiko Bencana Banjir

Banjir adalah suatu kondisi di mana air menggenangi area daratan yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan, meluapnya Sungai, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Banjir biasanya dapat diukur dan diidentifikasi berdasarkan ketinggian air dan lama waktu genangan. Menurut data kejadian banjir dari tahun 2019 – 2023, banjir di Kabupaten Gresik umumnya disebabkan oleh meluapnya dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Muara Sungai Bengawan Solo terletak di Desa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah. Banjir yang disebabkan oleh Sungai Bengawan Solo terjadi karena tingginya intensitas hujan yang mencapai 100 mm dengan durasi curah hujan sekitar 8 jam per hari. Selain itu, Kabupaten Gresik juga mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sungai ini mengalir dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan di bagian hulu hingga perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya di bagian hilir. Kali Lamong memiliki panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 50- 60 meter.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong memiliki luas 720 km², dan debit airnya pada musim hujan bisa mencapai 460,282 m³ per detik, yang sering kali menyebabkan banjir. Banjir dari Kali Lamong menjadi bencana yang kerap terjadi di beberapa kecamatan, seperti Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kedamean. DAS Kali Lamong merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya air Sungai Bengawan Solo, yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Sebelum tahun 1980-an, kondisi Kali Lamong masih

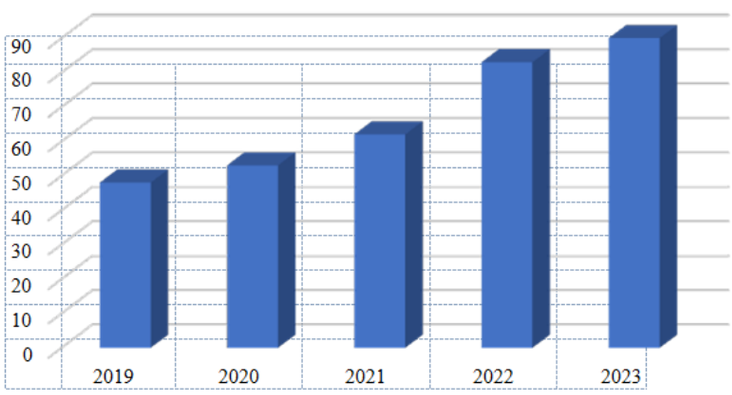
dalam keadaan normal. Namun, fungsi sungai ini berubah seiring dengan perkembangan penduduk dan industri, yang ditandai dengan banyaknya bangunan di tepi sungai. Banjir Kali Lamong menyebabkan kerugian seperti lahan pertanian yang gagal panen, tambak yang rusak, dan luapan air yang merendam jalan arteri.

Tabel 2.38 Luas Kawasan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Balongpanggang	2875,93	1754,95	322,99	4953,87
Benjeng	2232,74	1695,72	468,86	4397,31
Bungah	7870,71	301,04	124,26	8296,02
Cerme	4034,30	2241,73	510,71	6786,74
Driyorejo	1853,11	186,70	-	2039,81
Duduksampeyan	745,56	-	-	745,56
Dukun	1902,94	535,19	382,32	2820,44
Kebomas	1862,14	590,11	36,48	2488,73
Kedamean	2364,08	350,12	3,98	2718,17
Manyar	1128,21	85,50	29,98	1243,69
Menganti	2968,71	632,87	1,94	3603,52
Panceng	21,00	-	-	21,00
Sidayu	1985,08	522,59	1,21	2508,87
Ujungpangkah	4512,36	2238,78	2077,34	8828,49
Wringinanom	2527,23	-	-	2527,23
Total	**38884,09**	**11135,30**	**3960,06**	**53979,46**

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2022

Berdasarkan Tabel 2.38, data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik rentan terhadap banjir meskipun tingkat risikonya rendah, sehingga perlu ada antisipasi, terutama di daerah dengan risiko sedang dan tinggi.



Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik

Sumber: KRB Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan Gambar 2.15, terjadi peningkatan jumlah kejadian banjir setiap tahunnya di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang paling sering mengalami banjir dalam sejarahnya adalah Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Menganti. Berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik pada tahun 2023, tercatat sebanyak 90 kejadian bencana, dengan Kecamatan Benjeng menjadi yang paling banyak mengalami kejadian bencana, yaitu sebanyak 17 kali. Peningkatan frekuensi bencana ini menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang lebih efektif, terutama di kecamatan-kecamatan yang sering terdampak bencana.

B. Kawasan Risiko Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penilaian terhadap ancaman bencana kekeringan dilakukan dengan mengidentifikasi formasi geologi (batuan), memberikan skor, dan mengklasifikasikannya dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Di Kabupaten Gresik, kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang panjang serta penurunan curah hujan. Dampak dari kekeringan ini di beberapa kecamatan meliputi kegagalan panen. Kekeringan biasanya berlangsung sekitar tiga bulan, di mana warga mengandalkan air dari embung untuk mandi dan mencuci pakaian, sementara untuk kebutuhan air konsumsi, mereka terpaksa membelinya dengan harga yang relatif tinggi.

Tabel 2.39 Luas Kawasan Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Balongpanggang	1422,85	3151,69	1870,59	6445,14
Benjeng	2023,02	3866,21	341,32	6230,54
Bungah	3938,71	4251,04	342,82	8532,57
Cerme	4084,73	2149,70	905,76	7140,19
Driyorejo	4883,92	559,00	5,11	5448,03
Duduksampeyan	2131,11	5568,12		7699,23
Dukun	2674,04	3037,81	653,10	6364,96
Gresik	660,55	46,54		707,09
Kebomas	3365,06	64,23	0,13	3429,42
Kedamean	2398,53	3055,51	1239,20	6693,23

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Manyar	8484,31	1950,60		10434,90
Menganti	6359,38	588,60	6,31	6954,29
Panceng	3730,47	1767,25	679,64	6177,35
Sangkapura	9397,44	3277,49		12674,93
Sidayu	1989,29	2074,77	388,29	4452,34
Tambak	3326,38	3941,30		7267,69
Ujungpangkah	2964,81	9395,18		12359,99
Wringinanom	3950,02	2256,28		6206,30
Grand Total	**67784,63**	**51001,32**	**6432,25**	**125218,21**

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2022

Secara keseluruhan, total luas area yang berisiko kekeringan adalah 125.218,21, menjadikannya jenis bencana dengan cakupan risiko paling luas di Kabupaten Gresik. Kekeringan menjadi bencana utama yang mengancam daerah, dan perlu adanya langkah- langkah mitigasi yang lebih komprehensif terutama pada risiko kekeringan tinggi.

C. **Kawasan Risiko Bencana Cuaca ekstrim**

Cuaca ekstrem adalah kondisi cuaca di mana unsur-unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas tertentu dan umumnya berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Dalam menilai ancaman cuaca ekstrem di Kabupaten Gresik, digunakan indikator seperti curah hujan, kecepatan angin, serta data historis kejadian bencana. Hasil overlay dari parameter ancaman cuaca ekstrem ini menggunakan ketiga indikator tersebut. Cuaca ekstrem yang sering terjadi di Kabupaten Gresik adalah angin kencang atau angin puting beliung. Beberapa kecamatan yang terdampak angin kencang antara lain Kecamatan Balongpanggang, Kebomas, Cerme, Bungah, Kedamean, Wringinanom, Manyar, Driyorejo, Gresik, Menganti, Sangkapura, Tambak, Benjeng, Dukun, dan Sidayu. Bencana angin kencang terjadi setiap tahun namun dampaknya terhadap masyarakat cenderung tidak signifikan. Kerugian utama akibat bencana cuaca ekstrem ini adalah banyaknya nelayan yang tidak dapat melaut, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka. Cuaca ekstrem juga melanda beberapa desa di wilayah pesisir Pulau Bawean, seperti Desa Gunungteguh dan Desa Kota Kusuma di Kecamatan Sangkapura, serta Desa Tanjungori dan Desa Teluk Jatiwadang di Kecamatan Tambak. Bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Gresik ini biasanya terjadi saat peralihan dari

musim hujan ke musim kemarau, yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara.

Tabel 2. 40 Luas Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Total
Balongpanggang	5279,76	1165,38	6445,14
Benjeng	6075,74	155,09	6230,82
Bungah	8532,57		8532,57
Cerme	7140,24		7140,24
Driyorejo	5448,03		5448,03
Duduksampeyan	7699,23		7699,23
Dukun	5718,00	646,96	6364,96
Gresik	707,09		707,09
Kebomas	3429,42		3429,42
Kedamean	6664,97	28,26	6693,23
Manyar	10435,99		10435,99
Menganti	6954,29		6954,29
Panceng	6177,35		6177,35
Sangkapura	12674,93		12674,93
Sidayu	4452,34		4452,34
Tambak	7267,69		7267,69
Ujungpangkah	12359,99		12359,99
Wringinanom	6206,30		6206,30
Total	**123223,93**	**1995,69**	**125219,62**

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2022

Total keseluruhan luas area yang berisiko terhadap cuaca ekstrem adalah 125.219,62 Ha. Data ini menunjukkan bahwa walaupun risiko cuaca ekstrem tersebar luas, sebagian besar kecamatan hanya memiliki risiko rendah. Namun, kecamatan seperti Tambak dan Ujungpangkah tetap memerlukan perhatian khusus karena memiliki luas risiko yang lebih besar.

Data mengenai jumlah kejadian bencana cuaca ekstrem dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, terjadi enam kejadian bencana cuaca ekstrem, namun tidak ada kejadian yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah kejadian kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing dengan tiga kejadian. Meskipun terdapat peningkatan setelah dua tahun tanpa kejadian, angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa bencana cuaca ekstrem mungkin tidak terjadi secara konsisten, tetapi tetap memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi dampaknya di masa depan. Meskipun bencana angin kencang yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Gresik tidak menyebabkan korban jiwa secara signifikan, dampak yang ditimbulkan tetap dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dampak yang mungkin yang terjadi yaitu kerusakan infrastruktur seperti atap rumah dan fasilitas umum, penurunan hasil panen dan pendapatan, gangguan layanan publik, risiko kesehatan, menganggu keseimbangan lingkungan. Di samping itu, terjadinya angin kencang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan mendorong masyarakat untuk lebih siap menghadapi situasi darurat.

D. Kawasan Risiko Bencana Tanah Longsor

Provinsi Jawa Timur memiliki 50 kecamatan yang memiliki potensi tinggi terhadap risiko bencana tanah longsor, dan dari jumlah tersebut, 3 kecamatan berada di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Pulau Bawehan. Hingga tahun 2021, bencana tanah longsor di wilayah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh tanah longsor di Kabupaten Gresik adalah terputusnya akses dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat jalan yang tertimbun oleh material longsoran.

Tabel 2.41 Luas Kawasan RIsiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Balongpanggang	4259,22	1657,13	528,79	6445,14
Benjeng	6002,50	227,91		6230,41
Bungah	8532,57			8532,57
Cerme	6752,82	387,35		7140,17
Driyorejo	5242,04	205,99		5448,03
Duduksampeyan	7568,00	131,23		7699,23
Dukun	5718,00	646,96		6364,96
Gresik	671,01	36,08		707,09
Kebomas	3415,26	14,16		3429,42
Kedamean	5270,92	1422,31		6693,23
Manyar	10434,36			10434,36

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Menganti	6948,95	5,34		6954,29
Panceng	6177,35			6177,35
Sangkapura	12100,08	569,36	5,49	12674,93
Sidayu	4452,34			4452,34
Tambak	3615,54	3393,30	395,02	7403,86
Ujungpangkah	12359,99			12359,99
Wringinanom	5167,86	1038,44		6206,30
Total	**114688,82**	**9735,55**	**929,30**	**125353,67**

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2022

Total luas wilayah yang berisiko tanah longsor adalah 114.688,82. Meskipun sebagian besar area berisiko rendah, kecamatan seperti Tambak yang memiliki risiko sedang dan tinggi tetap harus menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana.

Kejadian bencana tanah longsor paling banyak terjadi pada tahun 2023, dengan total 19 kejadian. Di antara kecamatan yang terdampak, Kecamatan Sangkapura mencatat jumlah kejadian terbanyak, yaitu sebanyak 9 kejadian. Selain Sangkapura, kecamatan lain yang juga terdampak adalah Diyorejo, Manyar, Sidayu, dan Tambak. Peningkatan jumlah kejadian ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana tanah longsor di daerah tersebut.

E. Kawasan Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tinggi gelombang dan arus gelombang merupakan faktor utama penyebab bencana abrasi dan gelombang ekstrem di Kabupaten Gresik. Semua wilayah pesisir pantai di Kabupaten Gresik memiliki indeks risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkatan mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Wilayah pesisir ini membentang di sepanjang Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean.

Tabel 2.42 Luas Kawasan RIsiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Bungah	152,53	2,32	36,53	191,38
Gresik	1,96		51,72	53,68
Kebomas	2,25		38,60	40,85
Manyar	134,66		8,77	143,43

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Panceng	9,70	64,57		74,27
Sangkapura	397,80	11,95	172,95	582,70
Sidayu	8,68			8,68
Tambak	188,94	57,61	184,53	431,08
Ujungpangkah	392,48	104,48		496,97
Total	1288,99	240,93	493,10	2023,03

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombanmg ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

2.1.1.7.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan kebijakan pembangunan yang memuat tentang ketentuan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah. Penurunan emisi GRK sangat erat kaitannya dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui perhitungan intensitas emisi GRK dapat diketahui besarnya jumlah emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu wilayah. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu wilayah pada tahun yang sama (diasumsikan dengan data PDRB). Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Melalui implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebagaimana ditetapkan pasca pertemuan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada COP (*Conference of The Parties*) ke 21 di Paris tanggal 30 November - 11 Desember 2015 dari 26% dengan usaha sendiri pada Tahun 2020 menjadi 29% dengan usaha sendiri pada Tahun 2030. Sedangkan berdasarkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), Target penurunan emisi GRK dengan upaya sendiri (unconditional) ditingkatkan dari 29% menjadi 31,89%, sementara target dengan dukungan internasional (conditional) meningkat dari 41% menjadi 43,20% pada tahun 2030. Sebagai dukungan terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK secara nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik secara berkala melaporkan aksi pembangunan rendah karbon melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Indonesia (AKSARA)

Penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Gresik menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaporan kegiatan pembangunan rendah karbon melalui aplikasi Aksara, baik oleh pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Pelaporan dan pemantauan kegiatan pembangunan rendah karbon pada aplikasi Aksara dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, dan diharapkan dapat meningkatkan capaian penurunan emisi GRK di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan capaian penurunan emisi GRK tahunan yang menunjukkan fluktuasi, capaian penurunan emisi GRK kumulatif di Provinsi Gresik hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2024, capaian penurunan emisi kumulatif tercatat sebesar 13.803,27 ton CO2eq.

2.1.1.7.3 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu global yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas penggunaan bahan dan perubahan fungsi lahan (deforestasi). Peningkatan konsentrasi beberapa jenis gas rumah kaca menyebabkan penyerapan energi matahari dan refleksi panas matahari menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan suhu udara di Bumi dan memicu perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim terhadap aspek kelautan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Dengan meningkatnya suhu udara dan terjadinya pemanasan global, air laut mengalami pemuaian dan salju abadi di daerah Arktik dan Antarktik mulai mencair. Dampak tidak langsung ini menambah volume air di lautan dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut.

Gresik adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, di sebelah barat laut Kota Surabaya. Kabupaten ini memiliki posisi strategis dan potensi untuk berkembang dalam konteks Surabaya Metropolitan Area. Pemerintah terus berupaya untuk meratakan pembangunan industri dengan mempercepat pengembangan kawasan industri, termasuk 27 kawasan industri yang direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu kawasan tersebut adalah JIIPE, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan luas total 3.000 hektar yang mencakup kawasan industri, pelabuhan, dan area residensial. Pemerintah mengumumkan bahwa KEK Gresik telah resmi beroperasi dan pembangunan tahap III diperkirakan akan selesai pada tahun 2036. Dengan adanya Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion, dan pembangunan kawasan industri baru JIIPE, serta pertumbuhan industri di luar kawasan, nilai investasi di sektor industri pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Nilai investasi ini ditargetkan akan terus tumbuh hingga 7,23% pada tahun 2032 seiring dengan meningkatnya aktivitas industri di Kabupaten Gresik. Namun, industrialisasi di Kabupaten Gresik juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di wilayah tersebut, terutama karena adanya industri besar yang menghasilkan emisi tinggi, seperti industri semen, kimia, kertas, aspal, dan baja. Cerobong asap dari industri berkontribusi sebagai sumber polusi udara sekitar 10-15%.

Di wilayah perkotaan Gresik, yang mencakup Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Duduksampeyan, terjadi perubahan tata guna lahan yang signifikan, terutama dari lahan non-terbangun menjadi lahan untuk perumahan dan industri. Wilayah ini menghasilkan emisi gas CO2 dari berbagai aktivitas, yaitu 215.567 ton/tahun di Kecamatan Gresik, 564.404 ton/tahun di Kecamatan Kebomas, 454.267 ton/tahun di Kecamatan Manyar, dan 104.536 ton/tahun di Kecamatan Duduksampeyan. Total emisi tersebut mencapai

50,37% atau sekitar 1,34 juta ton/tahun dari total 2.657.660 ton/tahun gas CO2 yang dihasilkan di seluruh Kabupaten Gresik. Jumlah emisi CO2 ini belum termasuk emisi yang berasal dari sektor pertanian, yang mencapai 3,89 juta ton/tahun.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer Bumi. Terdapat enam jenis gas yang termasuk dalam kategori GRK, yaitu CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (dinitrogen oksida), HFC (hidrofluorokarbon), PFC (perfluorokarbon), dan SF6 (sulfur heksafluorida). Efek rumah kaca memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan suhu di Bumi. Tanpa adanya gas rumah kaca, suhu planet ini akan sangat dingin, seperti permukaan bulan. Namun, jika konsentrasi gas rumah kaca meningkat secara drastis, hal ini dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak negatif yang ditimbulkan termasuk peningkatan suhu Bumi, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan berbagai masalah lingkungan lainnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Gresik memiliki hubungan yang erat dengan risiko terjadinya bencana seperti banjir, abrasi, dan kekeringan. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang rendah menunjukkan adanya pencemaran yang dapat menyebabkan saluran air tersumbat, sehingga meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi. Selain itu, penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) akibat konversi lahan yang tidak terencana mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air, yang juga berkontribusi pada limpasan permukaan dan potensi banjir. Di sisi lain, kualitas udara yang buruk dapat memperburuk perubahan iklim, meningkatkan frekuensi badai yang berpotensi mempercepat proses abrasi di daerah pesisir. Tanpa vegetasi yang memadai, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi oleh gelombang laut. Selain itu, kualitas air yang buruk mengurangi ketersediaan air bersih untuk irigasi, memperburuk kondisi kekeringan, terutama di musim kemarau. Lahan yang terdegradasi juga memiliki kemampuan resapan air yang rendah, sehingga air hujan tidak dapat disimpan dengan baik, menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Dapat dilihat dari jumlah bencana yang paling mendominasi di Kabupaten Gresik, yaitu banjir, yang di tahun 2023 mencapai 90 kejadian. Angka ini mencerminkan dampak langsung dari rendahnya kualitas lingkungan, di mana pencemaran air dan penurunan kualitas lahan berkontribusi pada meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir. Oleh karena itu, perbaikan IKLH menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana

dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan yang merugikan.

2.1.1.8 Demografi

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2023. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

2.1.1.8.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2024 tercatat mencapai 1.327.497 jiwa, yang terdiri dari 667.540 laki-laki dan 659.957 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 23.294 jiwa dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini, tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti fertilitas dan migrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat mortalitas penduduk.

Di sisi lain, meskipun terdapat kenaikan jumlah penduduk, faktor eksternal seperti dampak pandemi global COVID-19 juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Pandemi ini, yang melanda Indonesia sejak awal 2020, menyebabkan lonjakan angka kematian, terutama di kalangan penduduk usia lanjut yang lebih rentan terhadap infeksi virus. Seperti yang diungkapkan dalam *penelitian The World Bank* (2014), pandemi berpotensi menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas secara langsung, yang dapat berdampak pada struktur demografis suatu wilayah. Tidak hanya itu, dampak tidak langsung dari pandemi juga dapat dilihat pada sektor kesehatan, yang menghadapi tekanan besar untuk menangani lonjakan kasus dan memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun,

dapat dilihat lebih jelas pada data yang tercantum dalam Tabel 2.43 dan Tabel 2.44.

Tabel 2.43 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2024

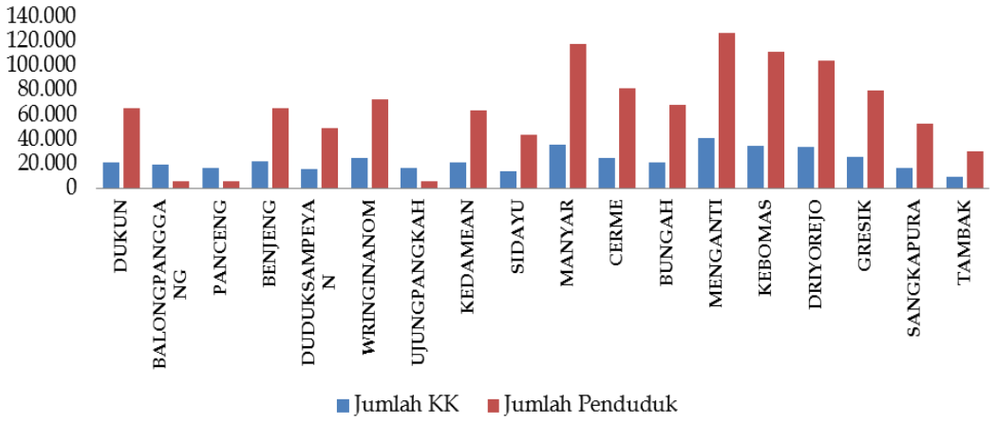
Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
2017	661.045	652.581	1.313.626
2018	672.583	663.788	1.336.371
2019	652.982	645.202	1.298.184
2020	649.640	642.754	1.292.394
2021	660.624	654.271	1.314.895
2022	648,861	642,657	1,291,518
2023	655.895	648.908	1.304.203
2024	667.540	659.957	1.327.497

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2025

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Kecamatan	Desa	2021	2022	2023	2024
Dukun	26	67.483	65.618	65.628	66.086
Balongpanggang	25	58.166	56.340	56.397	56.862
Panceng	14	53.305	52.340	52.831	53.606
Benjeng	23	67.102	65.424	65.904	66.608
Duduksampeyan	23	50.748	49.407	49.597	49.736
Wringinanom	16	74.178	72.308	73.047	74.154
Ujungpangkah	13	52.771	51.720	51.808	52.359
Kedamean	15	64.984	63.138	63.709	64.213
Sidayu	21	44.241	43.594	43.835	44.542
Manyar	23	117.967	117.475	119.730	122.645
Cerme	25	82.034	81.093	82.048	83.903
Bungah	22	69.280	67.983	68.598	69.581
Menganti	22	127.882	126.806	129.230	133.875
Kebomas	21	111.779	111.531	112.665	115.078
Driyorejo	16	104.820	103.718	105.501	108.924
Gresik	21	81.494	80.136	79.457	80.005
Sangkapura	17	55.190	52.732	53.663	54.311
Tambak	13	31.471	30.155	30.555	31.009
Jumlah	**356**	**1.314.895**	**1.291.518**	**1.304.203**	**1.327.497**

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2024



Gambar 2.16 Grafik Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023
Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.43 dan Gambar 2.16, pada tahun 2024 Kecamatan Menganti mencatatkan jumlah keluarga terbanyak, yaitu 43.749 jiwa, yang sejalan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 133.875 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Tambak memiliki jumlah keluarga terendah, yakni 10.032 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 31.009 jiwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kecamatan Menganti menjadi pusat perekonomian Kabupaten Gresik, sehingga jumlah penduduk di daerah tersebut cenderung lebih tinggi. Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tabel 2.44 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	43.648	41.091	84.739
2	5 - 9 Th	51.734	48.213	99.947
3	10 - 14 Th	53.820	50.481	104.301
4	15 - 19 Th	50.764	47.359	98.123
5	20 - 24 Th	54.749	51.855	106.604
6	25 - 29 Th	51.501	50.314	101.815
7	30 - 34 Th	48.245	47.169	95.414
8	35 - 39 Th	46.565	46.286	92.851
9	40 - 44 Th	53.837	54.128	107.965
10	45 -49 Th	51.544	51.773	103.317
11	50 - 54 Th	47.176	47.554	94.730
12	55 - 59 Th	39.538	40.815	80.353
13	60 - 64 Th	29.559	31.595	61.154
14	65 - 69 Th	21.437	22.485	43.922
15	70 - 74 Th	13.443	13.554	26.997

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
16	>75 Th	9.980	15.285	25.265
	JUMLAH	**667.540**	**659.957**	**1.327.497**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.44, penduduk Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan penduduk berusia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun pada tahun 2045 sebesar 69,51%. Proporsi penduduk pada umur tersebut, membutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjutan yang cukup, mudah dijangkau dan relatif murah, agar seluruh penduduk usia pendidikan dapat tertampung. Selain itu juga diperlukan lapangan kerja untuk mereka yang baru memasuki pasar kerja.

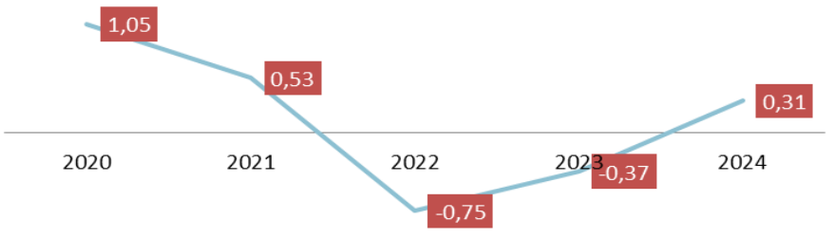
Meskipun penduduk muda (0-14 tahun) memiliki persentase yang relatif rendah, namun masih tetap dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa penduduk kelompok muda tersebut akan mulai memasuki kelompok umur produktif, sementara kelompok umur produktif yang ada sekarang juga menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Lebih lanjut jika diperhatikan pada kelompok umur 20-29 tahun menunjukkan jumlah yang cukup tinggi.

Sementara itu penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang rendah. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus bertambah di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2.1.1.8.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang sangat penting dalam memahami dinamika kependudukan di Kabupaten Gresik, karena dapat memberikan gambaran mengenai perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Indikator ini memiliki peran krusial dalam merencanakan kebijakan yang tepat untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu kabupaten dengan

perkembangan yang pesat di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pola pertumbuhan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10, yang menggambarkan tren peningkatan jumlah



penduduk di daerah ini.

Gambar 2.17 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024
Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.17, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,05%. Namun, terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2021, yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun menjadi 0,53%. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk semakin menurun, mencapai angka -0,75%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk kembali menurun menjadi -0,37%, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,31%. Informasi persebaran penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Jumlah dan Laju Penduduk per Kecamatan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Wringinanom	74.154	0,45
2	Driyorejo	108.924	-2,94
3	Kedamean	64.213	1,20
4	Menganti	133.875	-1,81
5	Cerme	83.903	0,82
6	Benjeng	66.608	1,46
7	Balongpanggang	56.862	1,45
8	Duduksampean	49.736	1,39
9	Kebomas	115.078	-0,75
10	Gresik	80.005	1,18
11	Manyar	122.645	0,69
12	Bungah	69.581	1,60

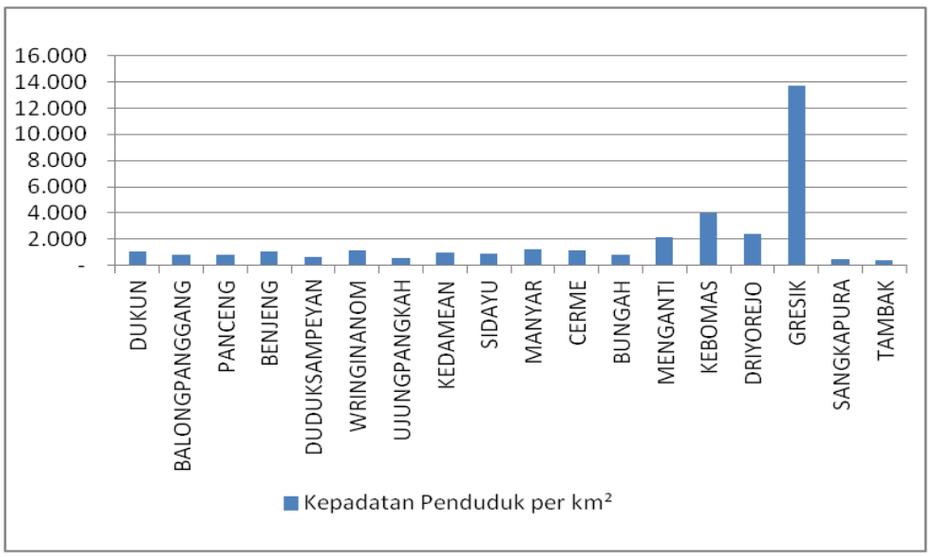
13	Sidayu	44.542	0,60
14	Dukun	66.086	1,31
15	Panceng	53.606	1,49
16	Ujungpangkah	52.359	1,69
17	Sangkapura	54.311	1,78
18	Tambak	31.009	1,10
Total		**1.237.497**	**0,31**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.45, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gresik, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan di setiap kecamatan. Kecamatan Driyorejo mengalami penurunan terbesar dengan laju pertumbuhan -2,94%, yang disebabkan oleh migrasi keluar atau penurunan jumlah penduduk. Sebaliknya, Kecamatan Ujungpangkah, Sangkapura, dan Benjeng mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi, masing-masing sebesar 1,69%, 1,78%, dan 1,46%, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Beberapa kecamatan seperti Wringinanom, Kebomas, dan Cerme menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih moderat, sementara kecamatan lainnya, seperti Kedamean, Balongpanggang, dan Dukun, mencatatkan angka pertumbuhan yang stabil.

2.1.1.8.3 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk 2024

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi, seperti kabupaten atau kota, yang menggambarkan bagaimana persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk ini dapat memberikan informasi penting mengenai distribusi populasi di setiap kecamatan, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyediaan fasilitas publik hingga kebijakan pembangunan daerah. Distribusi kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.18 dan Tabel 2.46, yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai tingkat kepadatan di masing-masing kecamatan.



Gambar 2.18 Grafik Kepadatan Penduduk Gresik Tahun 2024 berdasarkan Kecamatan
Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024

Tabel 2.46 Kepadatan dan Persentase Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan	Luas (km^2)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Kepadatan (jiwa/km2)	Persentase Penduduk	Kepadatan (jiwa/km2)	Persentase Penduduk
Wringinanom	5,6	1166,51	5,59	1.184	5,6
Driyorejo	8,09	2056,95	8,21	2.124	8,09
Kedamean	4,89	966,02	4,84	974	4,89
Menganti	9,91	1880,26	10,08	1.948	9,91
Cerme	6,29	1143,84	6,32	1.170	6,29
Benjeng	5,05	1075,81	5,02	1.087	5,05
Balongpanggang	4,33	882,86	4,28	890	4,33
Duduksampean	3,8	667,61	3,75	669	3,8
Kebomas	8,64	3748	8,67	3.828	8,64
Gresik	6,09	14342,42	6,03	14.441	6,09
Manyar	9,18	1254,77	9,24	1.285	9,18
Bungah	5,26	863,52	5,24	876	5,26
Sidayu	3,36	930,09	3,36	945	3,36
Dukun	5,03	1110,64	4,98	1.118	5,03
Panceng	4,05	844,08	4,04	856	4,05
Ujungpangkah	3,97	546,38	3,94	552	3,97
Sangkapura	4,12	452,01	4,09	457	4,12
Tambak	2,34	388,25	2,34	394	2,34

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.46, Kecamatan Gresik memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik, yakni 14.441 jiwa per km^2, yang mencerminkan tingginya konsentrasi penduduk di pusat pemerintahan dan

kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Kecamatan Tambak yang terletak di Pulau Bawean memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 394 jiwa per km², menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki lebih sedikit penduduk yang tersebar di area yang lebih luas. Perbedaan kepadatan penduduk ini memberikan wawasan penting dalam perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, serta penyesuaian kebijakan untuk masing-masing kecamatan, mengingat kebutuhan yang berbeda-beda di wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi maupun rendah.

2.1.1.8.4 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan ramalan jumlah penduduk melalui perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain.

Demografi global sangat berpenaruh dalah perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

Tabel 2.47 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik

Proyeksi Jumlah Penduduk	2024	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
	1327,50	1377,29	1437,72	1487,80	1597,84	1670,44

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024 (diolah)

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2024 sebanyak 1327.497 jiwa yang terdiri dari 667.540 laki-laki dan 659.957 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 1.114 jiwa/Km^2. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Pada awal perencanaan Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar 1377,29 ribu jiwa, dan diestimasikan naik pada tahun 2045 sebesar 1670,44 ribu jiwa.

2.1.1.8.5 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin sangat penting untuk diketahui, terutama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di suatu wilayah, karena setiap kelompok umur memiliki kebutuhan dan penanganan yang berbeda. Sebagai contoh, kelompok penduduk di bawah 5 tahun memerlukan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi, dan perhatian khusus terhadap kesehatan mereka karena kelompok ini rentan terhadap kematian. Hal serupa berlaku untuk kelompok remaja, khususnya perempuan, di mana penting untuk merancang program kesehatan reproduksi remaja guna mempersiapkan mereka menjadi calon ibu yang sehat. Oleh karena itu, informasi mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin sangat berguna dalam merencanakan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, sandang, papan, dan pekerjaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok umur. Selain itu, komposisi penduduk ini tidak hanya mencerminkan proses demografi masa lalu, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan penduduk di masa depan melalui analisis kelahiran dan kematian.

Tabel 2.167 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Gresik

Jenis Kelamin	2023	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	651.463	693,07	722,00	744,94	804,11	840,53
Perempuan	645.225	684,22	715,72	742,87	793,74	829,91

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Gresik (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2024 sebesar 1:1. Pada Tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk

laki-laki mencapai 840,53 ribu Jiwa dan penduduk perempuan 829,91 ribu jiwa. Berikut ini merupakan proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2045.

Tabel 2.48 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik

Komposisi Umur	2024	Proyeksi Penduduk (%)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	21,77	21,55	20,24	19,33	18,28	17,37
15-64	70,99	70,61	69,81	68,41	69,77	69,51
65+	7,25	7,84	9,94	12,27	11,95	13,12
Angka Ketergantungan (%)	40,87	41,63	43,24	46,19	41,59	43,86

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2024 (diolah)

Pada akhir tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.670,44 ribu jiwa, dengan 69,51% di antaranya berada pada usia produktif. Dengan komposisi penduduk tersebut, rasio ketergantungan atau beban tanggungan (dependency ratio) tercatat sebesar 43,86%. Ini berarti setiap 100 jiwa penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 43-44 jiwa penduduk yang tidak produktif. Di Kabupaten Gresik, jumlah penduduk usia kerja di perkotaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara jumlah penduduk usia kerja di pedesaan menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan.

Bonus demografi merupakan peluang yang sangat baik, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk Kabupaten Gresik. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif akan menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang potensial dalam perekonomian, yang berkontribusi aktif dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan menggerakkan perekonomian melalui pengeluaran belanja. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, peluang untuk pertumbuhan ekonomi juga semakin besar. Namun, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, dapat menimbulkan dampak buruk, seperti masalah sosial yang terkait dengan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, pengangguran, dan meningkatnya tingkat kriminalitas.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur perubahan dan perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ini diperoleh melalui perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, yang memungkinkan untuk melihat perbandingan antarperiode tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga. Secara matematis, laju pertumbuhan PDB dapat diukur dengan cara mengurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dengan pendapatan total ekonomi pada Tahun (n-1), lalu membagi hasilnya dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dan mengalikannya dengan 100%. Dengan kata lain, angka laju pertumbuhan ini mencerminkan seberapa besar perubahan agregat pendapatan yang terjadi antara satu periode tertentu (Tahun n) dibandingkan dengan periode sebelumnya (Tahun n-1). Laju pertumbuhan ini menjadi ukuran yang penting dalam analisis ekonomi, karena dapat memberikan gambaran mengenai dinamika perekonomian, apakah ekonomi sedang berkembang, stagnan, atau mengalami kontraksi, serta bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam periode tersebut. Sebagai indikator utama, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi dasar dalam merencanakan kebijakan fiskal dan moneter, serta dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.004,08	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05
B. Pertambangan dan Penggalian	8.582,77	8.705,94	9.385,49	9.293,59	8.783,73
C. Industri Pengolahan	47.703,86	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76
D.	543,75	556,66	590,75	611,89	649,31

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Listrik dan Gas					
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,12	70,67	73,15	76,61	80,33
F. Konstruksi	9.234,80	9.418,46	9.929,74	10.477,02	10.939,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08
H. Transportasi dan Pergudangan	2.209,85	2.284,80	2.603,66	2.915,52	3.169,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02
J. Informasi dan Komunikasi	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.075,75	1.079,42	1.102,43	1.149,29	1.212,97
L. Real Estat	1.383,88	1.445,48	1.527,52	1.585,05	1.642,29
M,N. Jasa Perusahaan	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131,65	1.140,31	1.144,45	1.156,92	1.259,67
P. Jasa Pendidikan	916,57	937,05	939,42	1.002,26	1.050,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	441,85	462,55	452,58	469,68	500,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	250,75	264,62	314,89	329,93	354,3
PDRB	**97.616,60**	**101.318,69**	**108.796,88**	**113.825,43**	**119.274,42**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.49, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan

fluktuasi. Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik mulai naik dengan nilai yang cukup signifikan setelah pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2022 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai Rp108.796,88 miliar. Angka tersebut meningkat dari Rp101.318,69 miliar pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi sektor jasa lainnya 19% dan sektor Transportasi dan Pergudangan 13,96%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,51% pada tahun 2022 turun dari tahun 2021 dengan nilai sebelumnya sebesar 10,23%. Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.337,08	10.160,48	11.085,25	11.969,33	12.352,11
B. Pertambangan dan Penggalian	8.000,41	10.034,94	13.757,11	12.126,94	11.575,10
C. Industri Pengolahan	66.583,60	72.264,74	81.039,11	88.719,44	96.658,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	682,84	683,07	733,13	765,89	803,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88,8	98,56	105,71	112,58	119,74

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
F. Konstruksi	12.642,99	12.903,96	14.327,94	15.484,98	16.343,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.742,78	18.260,50	20.775,08	22.770,34	24.312,14
H. Transportasi dan Pergudangan	3.334,17	3.431,93	4.096,71	4.893,73	5.407,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.785,41	1.958,41	2.232,16	2.495,87	2.724,15
J. Informasi dan Komunikasi	6.021,50	6.470,87	6.790,45	7.335,50	7.920,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.612,73	1.675,36	1.853,62	1.979,39	2.121,85
L. Real Estat	1.874,36	2.015,92	2.170,38	2.285,03	2.396,61
M,N. Jasa Perusahaan	430,9	446,03	482,81	534,48	586,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.893,90	1.896,02	1.961,23	2.069,32	2.358,70
P. Jasa Pendidikan	1.266,38	1.305,95	1.332,16	1.456,29	1.551,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	602,43	646,79	664,82	712,26	766,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	368,27	402,54	500,27	549,62	607,18
PDRB	**134.268,56**	**144.656,07**	**163.907,91**	**176.261,00**	**188.604,51**

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar yang komprehensif dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan berbasis pada karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu fokus utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terarah, dengan memperhatikan karakteristik penduduk miskin sebagai faktor penting untuk menyusun kebijakan yang efektif. Salah satu komponen utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah implementasi program *pro-poor*

secara komprehensif, yang meliputi berbagai dimensi kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri mengacu pada harga yang diperlukan oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial lainnya, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Tabel 2.51 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020-202**4**

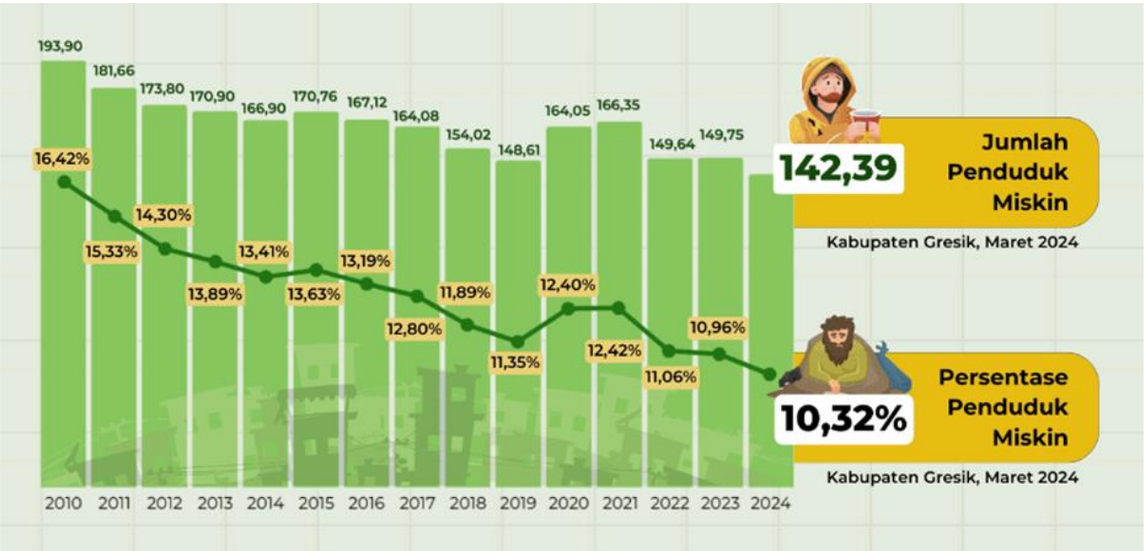
Garis Kemiskinan (Perkapita/ Bulan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	492.628	505.499	536.544	588.316	608.828

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan perubahan dalam biaya hidup dan kebutuhan dasar penduduk. Pada tahun 2020, garis kemiskinan per kapita per bulan tercatat sebesar Rp492.628. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp505.499, menunjukkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi yang mempengaruhi standar kehidupan masyarakat. Pada tahun 2022, garis kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp536.544, yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap inflasi dan peningkatan harga barang serta jasa.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan kembali mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp588.316, mencerminkan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Di tahun 2024, garis kemiskinan per kapita per bulan di Kabupaten Gresik mencapai Rp608.828, yang menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam biaya hidup. Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi indikator penting dalam merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, karena angka ini mencerminkan kebutuhan minimal untuk memenuhi standar hidup yang layak di Kabupaten Gresik, serta mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penduduk dengan penghasilan rendah dalam menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi. Garis kemiskinan Kabupaten Gresik dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Gresik untuk

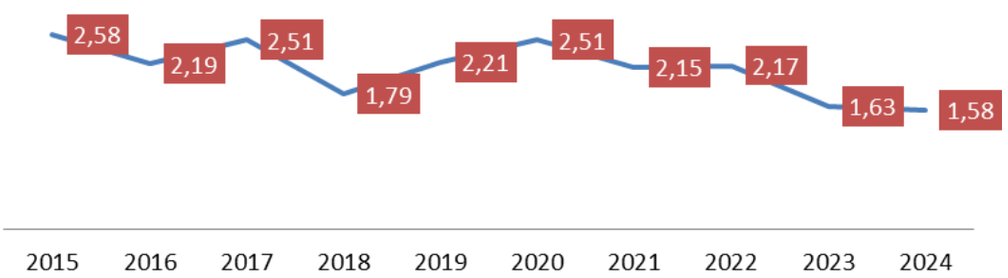
memenuhi kebutuhan pokok, lebih besar dibandingkan dengan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan sebagain besar masyarakat Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2.19 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2024

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.19, persentase kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 6,39%. Hal tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Berjalan ke tahun 2022 dan 2023 perekonomian berangsur pulih, daya beli masyarakat juga berangsur naik sehingga persentase kemiskinan juga mulai turun hingga angka 11.06%, hingga pada akhir 2024 kembali turun ke angka 10.32%.

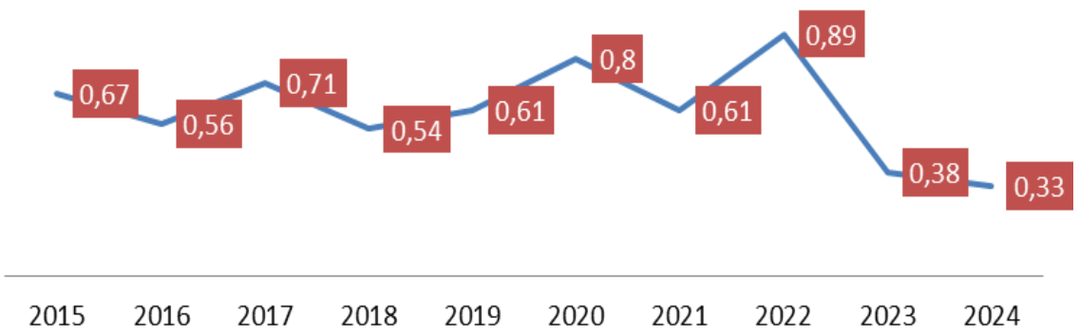


Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Gambar 2.20 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami tren penurunan selama periode lima tahun

terakhir. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik tercatat sebesar 2,51. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 1,84 pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks sebesar 1,62, dan tetap stabil pada angka 1,63 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik kembali turun sedikit menjadi 1,58. Penurunan indeks ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan di wilayah Gresik, meskipun angka tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang mengalami indeks kedalaman kemiskinan di kisaran 1,46 pada tahun 2024.



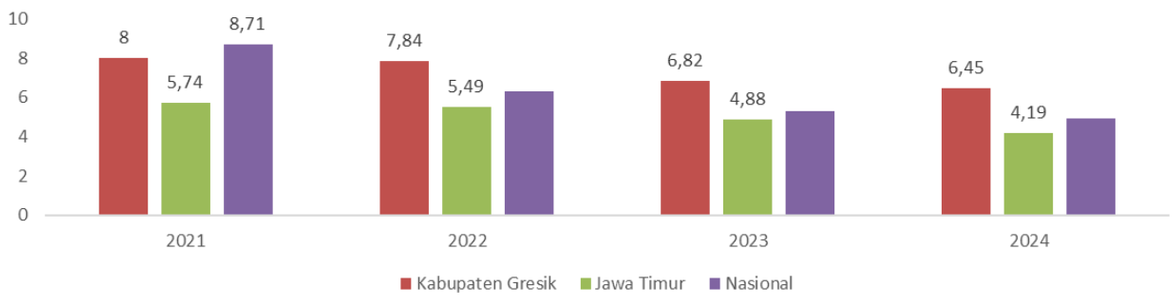
Gambar 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang menunjukkan perbedaan pengeluaran di antara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020, nilai P2 di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,80, yang menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran yang cukup besar di kalangan penduduk miskin. Meskipun terjadi penurunan menjadi 0,61 pada tahun 2021, nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,89 pada tahun 2022. Namun, antara tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Gresik mengalami penurunan signifikan dalam nilai P2, yang menurun dari 0,89 pada 2022 menjadi 0,38 pada tahun 2023, dan lebih lanjut menjadi 0,33 pada 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran, yang tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan melalui

Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dengan program Go-Tani.

2.1.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan, yang menggambarkan persentase penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang secara aktif bersedia dan mampu bekerja. Penghitungan TPT dilakukan dengan membandingkan jumlah individu yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan dengan total angkatan kerja. Hasil perbandingan ini kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkannya, termasuk mereka yang baru diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Gambaran TPT Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.22 yang menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran di masing-masing wilayah tersebut.



Gambar 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2025

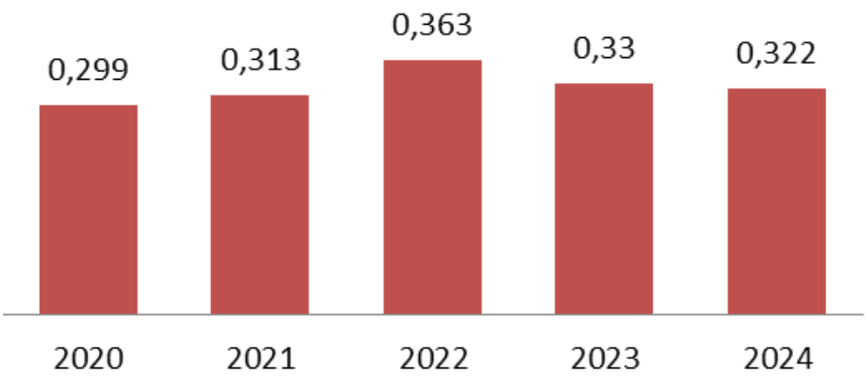
Berdasarkan Gambar 2.22 dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, TPT Kabupaten Gresik mengalami tren menurun. Namun nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan

pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 jika distribusi pendapatan di antara penduduknya sangat merata, sedangkan jika skor mencapai 1, itu berarti seluruh pendapatan di wilayah tersebut dikuasai oleh satu orang. Meskipun indeks ini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, penting untuk dicatat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan, karena kesejahteraan lebih sulit dihitung dibandingkan dengan pendapatan. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23 Indeks Gini Kabupaten Gresik
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 2.23, terlihat bahwa indeks gini Kabupaten Gresik fluktuasi setiap tahunnya, dan pada akhir periode tahun 2024 mencapai 0,32 menurun dari tahun 2023 sebesar 0,33. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik, meskipun masih ada ketimpangan yang perlu ditangani.

2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mencakup seluruh dimensi pembangunan manusia, IPM dianggap efektif dalam mengukur tiga dimensi utama dari pembangunan manusia. IPM berperan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Selain itu, IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup yang layak (decent standard of living). Perkembangan IPM Kabupaten Gresik dari Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, Nasional dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	76,59	76,98	77,62	78,44	78,93
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 2.52, capaian IPM Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Dalam periode 2020 hingga 2024, IPM Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan, dimulai dari 76,59 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 78,93 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan angka provinsi Jawa Timur dan nasional, IPM Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi selama lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil melampaui rata-rata provinsi dan nasional dalam hal pembangunan manusia. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Gresik dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Kenaikan yang stabil ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, mulai memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

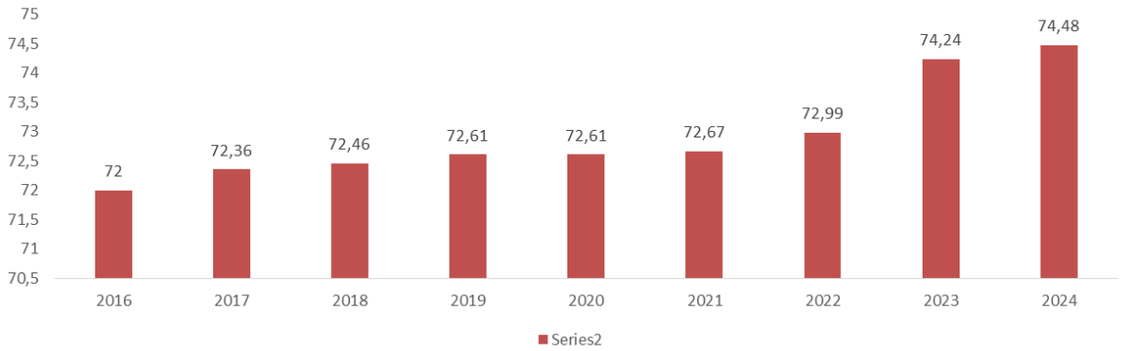
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan tujuan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolak ukur, di antaranya adalah Usia Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak, serta penanganan tuberkulosis. UHH yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik. Kesehatan ibu dan anak diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan prevalensi stunting pada balita, yang harus ditekan melalui layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau.

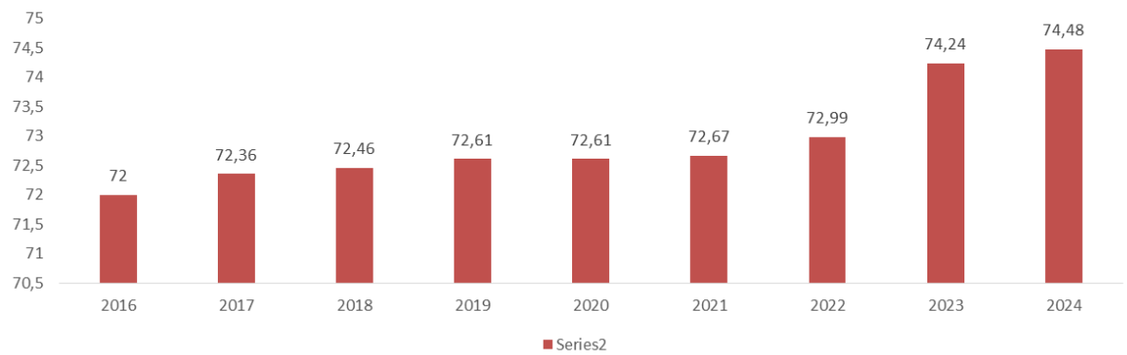
2.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu dalam suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu, dan biasanya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR). Perhitungan UHH dapat dilakukan

melalui catatan registrasi mortalitas yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu atau dengan menggunakan program analisis data seperti *Mortpak Lite*. Grafik perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada

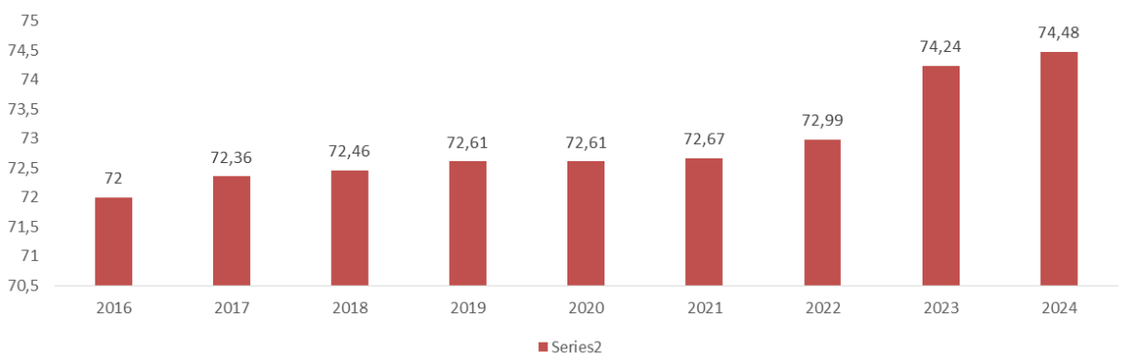


Gambar 2.24



Gambar 2.24 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024.
Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2025

Berdasarkan



Gambar 2.24, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 72,61 tahun, yang kemudian meningkat sedikit menjadi 72,67 tahun pada tahun 2021. Peningkatan lebih

signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan UHH mencapai 72,99 tahun, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 74,24 tahun. Pada tahun 2024, Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 74,48 tahun, menunjukkan tren positif yang terus berlanjut. Kenaikan UHH ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan layanan kesehatan dan faktor-faktor pendukung lainnya.

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik diarahkan pada beberapa aspek penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Fokus utama kebijakan ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem jaminan kesehatan yang terutama menyasar penduduk miskin. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pada peningkatan sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, pendidikan kesehatan sejak usia dini, serta pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar serta penyebaran tenaga kesehatan. Penting untuk melibatkan masyarakat dan berbagai unsur terkait dalam pemberdayaan dan kemitraan untuk mengelola kehidupan lingkungan yang sehat, sehingga tujuan untuk mencapai kesehatan yang paripurna dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan harus melibatkan mereka sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek, agar dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan, setiap faktor yang mengganggu kesehatan masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, derajat kesehatan yang baik merupakan salah satu bentuk investasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah kumpulan indikator kesehatan yang dirancang untuk mengukur dan menggambarkan masalah kesehatan secara langsung dan mudah diukur. Indikator-indikator yang dipilih dalam IPKM mencerminkan dampak dari pembangunan kesehatan pada tahun sebelumnya dan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan program

pembangunan kesehatan di masa mendatang. Perkembangan nilai IKPM Kabupaten Gresik tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	63,39	67,60	63,39	65,94	82,50

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada tahun 2020, IPKM tercatat sebesar 63,39 dan meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan kembali menjadi 63,39 pada tahun 2022, yang diduga disebabkan oleh gangguan pelayanan kesehatan pasca-pandemi atau faktor sosial ekonomi lainnya. Pada tahun 2023, terjadi perbaikan dengan nilai IPKM mencapai 65,94. Target IPKM tahun 2024 ditetapkan sebesar 69,3, namun realisasi capaian mencapai 82,5, melampaui ekspektasi sebesar 119,05% dari target. Lonjakan signifikan ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan kesehatan, yang meliputi perluasan akses layanan kesehatan primer, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta peningkatan kualitas intervensi kesehatan masyarakat.

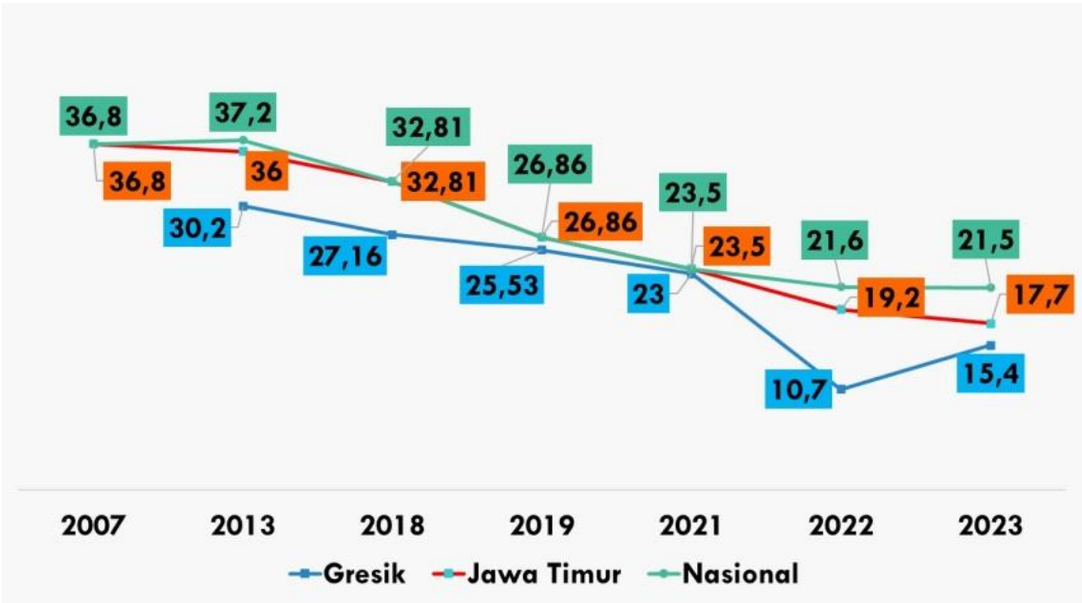
2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3.0
2. Pendek : Zscore ≥- 3.0-Zscore < -2.0

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata tinggi badan penduduk acuan. Stunting pada anak mencerminkan dampak luas dari kekurangan gizi kronis dan penyakit berulang yang sering kali disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Stunting dapat berpengaruh serius terhadap

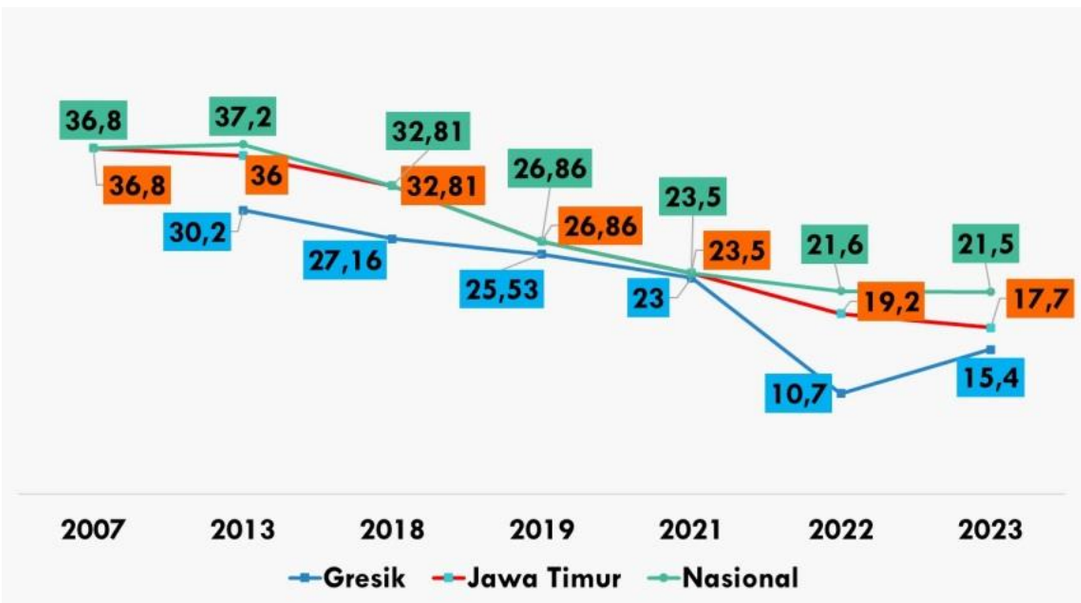
perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Penelitian menunjukkan bahwa efek stunting pada usia dini, terutama yang berkaitan dengan perkembangan otak, sulit diperbaiki di usia dewasa, meskipun anak tersebut kemudian mendapatkan gizi yang cukup. Selain itu, anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa, seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menegaskan betapa pentingnya memberikan gizi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak.



Gambar 2.25 Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan



Gambar 2.25, terlihat penurunan yang signifikan dalam angka stunting dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 23,0%, namun angka ini terus menurun menjadi 10,7% pada tahun 2022, 9,12% pada tahun 2023, dan mencapai 8,14% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik, yang dapat diatribusikan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta program pemberian gizi yang lebih baik bagi anak-anak. Jika dibandingkan dengan data di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang lebih rendah. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Jawa Timur mencapai 23,5%, sementara di tingkat nasional angkanya juga sama, yaitu 23,5%. Namun, pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur (14,7%) dan Nasional (19,8%), yang menunjukkan keberhasilan program-program kesehatan dan gizi yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik.

2.1.2.2.4 Angka Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tabel 2.54 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	316,37	94.18	79.5	77.59

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan ibu. Pada tahun 2022, AKI tercatat sebesar 94,18 per 100.000 kelahiran hidup, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 79,5 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, AKI kembali menurun menjadi 77,59 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan maternal, termasuk peningkatan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, serta upaya yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

2.1.2.2.5 *Tuberculosis*

Penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat keberhasilan pengobatan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyaknya temuan kasus TBC menandakan peningkatan deteksi penyakit yang dilakukan melalui layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemeriksaan dan diagnosis TBC semakin meningkat, yang memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap penderita TBC. Meskipun demikian, semakin tingginya jumlah kasus yang ditemukan memerlukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lonjakan kasus, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang gejala TBC, faktor sosial-ekonomi, atau masalah dalam distribusi obat dan pengobatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setelah deteksi yang tinggi, sangat penting untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang lebih efektif guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut, memastikan pengobatan yang tepat, dan mengurangi angka kematian akibat TBC.

Tabel 2.55 *Treatment Coverage Tuberculosis* Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

	Tahun			
Success Rate Tuberculosis	2021	2022	2023	2024
	92,17	88,71	91,02	90,70

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

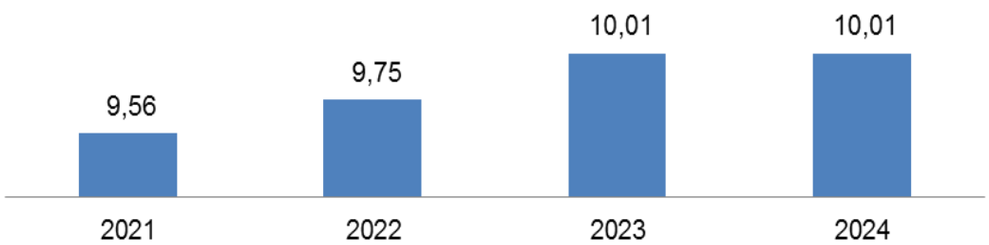
Berdasarkan Tabel 2.55, Success Rate (Tingkat Keberhasilan) pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat keberhasilan pengobatan TBC tercatat sebesar 92,17%, yang mencerminkan hasil yang sangat baik. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 88,71%, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan dalam pengobatan atau deteksi yang lebih baik. Meskipun demikian, pada tahun 2023, tingkat keberhasilan pengobatan kembali meningkat menjadi 91,02%, menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pengobatan dan penanganan

pasien. Pada tahun 2024, tingkat keberhasilan pengobatan TBC sedikit menurun menjadi 90,7%, namun tetap berada pada angka yang tinggi. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap program pengobatan TBC untuk memastikan keberhasilan pengobatan yang optimal dan mengurangi angka kesakitan serta kematian akibat penyakit tersebut.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



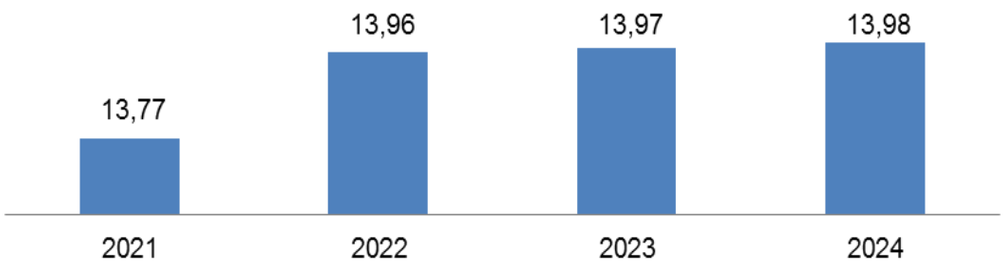
Gambar 2.26 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.26, RLS di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 9,56 tahun, yang meningkat menjadi 9,75 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi pendidikan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan lebih lama. Pada tahun 2023, RLS kembali meningkat menjadi 10,01 tahun dan angka ini tetap stabil pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai standar pendidikan yang lebih baik dan setara bagi

masyarakatnya. Peningkatan RLS ini menjadi indikator penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, dengan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah indikator yang mengukur durasi pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan, berdasarkan peluang pendidikan yang ada saat ini. AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan menggambarkan proyeksi jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh generasi mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak untuk melanjutkan pendidikan pada usia-usia berikutnya akan serupa dengan peluang yang dimiliki penduduk yang bersekolah pada usia yang sama saat ini. Indikator ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan dan dapat digunakan untuk menilai kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Peningkatan AHLS menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi di masa depan.



Gambar 2.27 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2021– 2024

Gambar 2. 27 menunjukkan AHLS di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif dan stabil dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, AHLS tercatat sebesar 13,77 tahun, yang meningkat menjadi 13,96 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka ini sedikit meningkat lagi menjadi 13,97 tahun, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,98 tahun. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Gresik diperkirakan akan menyelesaikan pendidikan mereka dalam waktu yang lebih lama, mencerminkan adanya peningkatan

dalam partisipasi pendidikan dan keberhasilan sistem pendidikan di Kabupaten Gresik.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif (*adaptive social protection*/ASP) adalah pendekatan yang memfokuskan pada peningkatan ketahanan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi guncangan, baik yang bersifat sementara maupun jangka panjang, termasuk perubahan iklim dan bencana. ASP bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari kemiskinan, kerentanan, dan pengucilan sosial melalui kebijakan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merujuk pada jumlah atau persentase tenaga kerja yang terdaftar dan menjadi peserta program jaminan sosial yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, dan kehilangan pekerjaan.



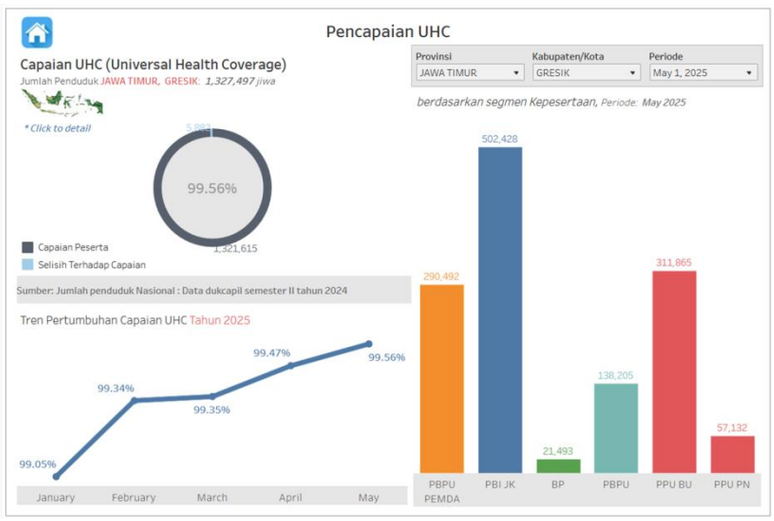
Gambar 2.28 Cakupan Kepesertaan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan 2025

Gambar **2.28** menunjukkan cakupan Kepesertaan Sosial tenaga kerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan, dengan tercatat

322.306 peserta aktif pada bulan Desember 2024. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 303.415 peserta aktif pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemerataan akses terhadap jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Gresik.

2.1.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Sosial Kesehatan

Cakupan Kepesertaan Sosial Kesehatan atau dalam konteks JKN/BPJS Kesehatan, "Cakupan Peserta JKN" adalah jumlah atau persentase dari total penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau program asuransi kesehatan lainnya.



Gambar 2.29 Cakupan Kepesertaan Sosial Kesehatan Kabupaten Gresik Bulan Mei Tahun 2025

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful

alijtima'i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-I'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi.

Tabel 2.56 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024

Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan		
	2022	2023	2024
Wringinanom	74,7	70,3	74,1
Driyorejo	59,1	55,0	55,2
Kedamean	51,6	72,0	75,8
Menganti	73,2	58,6	62,1
Cerme	68,9	68,9	62,2
Benjeng	49,0	72,9	79,7
Balongpanggang	74,6	66,7	73,3
Duduksampean	41,4	80,3	81,5
Kebomas	51,6	62,2	63,8
Gresik	63,2	75,9	70,8
Manyar	47,5	65,8	65,8
Bungah	85,5	74,2	63,0
Sidayu	85,2	85,2	85,3
Dukun	54,4	80,9	78,0
Panceng	65,2	73,9	82,3
Ujungpangkah	64,1	80,8	83,0
Sangkapura	65,2	69,2	77,8
Tambak	74,7	62,2	62,2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

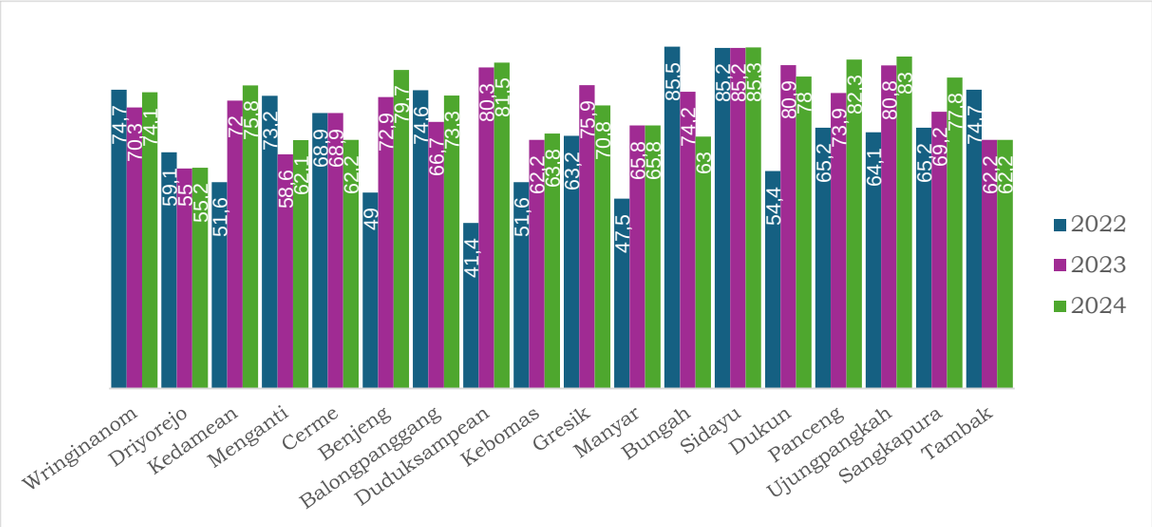
Tabel 2.57 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Kesalehan Sosial	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	76,94	79,16	80,32	80,32

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa

berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan "pemaknaan" terhadap hidupnya di bumi (will to meaning). Dapat dilihat dari Tabel 2.56 diatas, menunjukkan bahwa nilai Indeks Pengetahuan paling tinggi pada tahun 2024 adalah Kecamatan Sidayu dengan nilai sebesar 85,3 sedangkan terendah pada Kecamatan Driyorejo sebesar 55,2.



Gambar 2.30 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik

Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam nilai-nilai sosial dan keharmonisan masyarakat. Pada tahun 2021, Indeks Kesalehan Sosial tercatat sebesar 76,94, yang kemudian meningkat menjadi 79,16 pada tahun 2022. Angka ini terus menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2023 dengan mencapai 80,32, dan tetap stabil pada angka yang sama pada tahun 2024. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

a. Melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
b. Bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial

agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi;

c. Melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah tiga pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Keluarga berkualitas menjadi fondasi untuk pembangunan manusia yang berkualitas, sedangkan kesetaraan gender memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat inklusif menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua kelompok, termasuk kelompok terpinggirkan, untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan.

Tabel 2.58 Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

No	Uraian Penilaian	2024
1	Indeks Perlindungan Anak	71,57
2	Indeks Pembangunan Keluarga	n/a
3	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak mengukur sejauh mana hak-hak anak seperti hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terpenuhi. Pada Tahun 2024 menunjukkan IPA Kabupaten Gresik sebesar 71.57. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesetaraan akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IPG mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Konsep IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

2.1.2.7 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, tetapi tetap bekerja dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Mereka memiliki kemampuan kerja yang sama dengan karyawan lain, meskipun mengalami keterbatasan tertentu. Diskriminasi disabilitas dalam pekerjaan terjadi ketika seseorang yang memiliki disabilitas (baik fisik, mental, atau kognitif) diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki disabilitas dalam hal kesempatan kerja, promosi, atau lingkungan kerja. Ini bisa termasuk penolakan untuk dipekerjakan, penolakan untuk promosi, atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hak dalam Bekerja di sektor formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan mempekerjakan mereka di sektor formal.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran yang disusun untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi serta kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas suatu wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. IDSD Tahun 2023, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdiri atas empat komponen utama pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua

belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Dengan demikian, IDSD berfungsi sebagai acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.59 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Daya Saing Daerah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	2,59	3,42	3,38	3,77

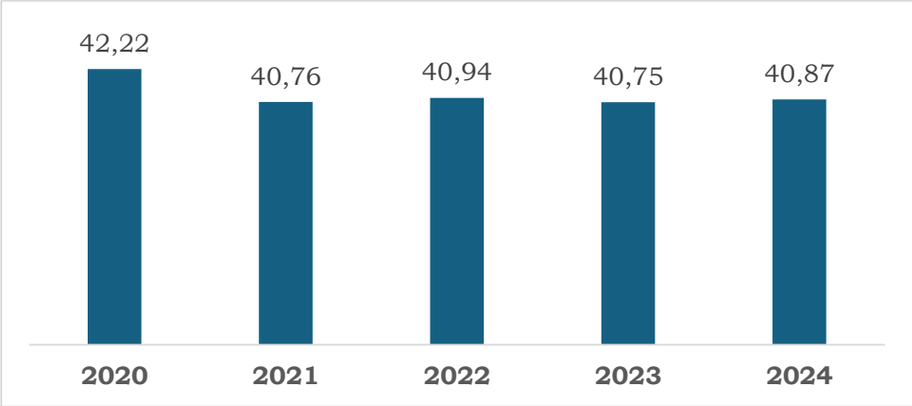
Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2024

Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Gresik tercatat sebesar 2,59 akibat tekanan pandemi terhadap sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022, ketika indeks meningkat signifikan menjadi 3,42. Pada tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tercatat sebesar 3,38, dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 3,77.

2.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.2.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja/usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Gambar 2.31 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun, 2024

Berdasarkan Gambar 2.31, Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam struktur demografis wilayah tersebut. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan tercatat sebesar 42,22%, yang kemudian menurun menjadi 40,76% pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut dengan angka 40,94% pada tahun 2022, dan tetap relatif stabil pada tahun 2023 dengan sedikit penurunan menjadi 40,75%. Pada tahun 2024, Rasio Ketergantungan sedikit meningkat menjadi 40,87%, yang menunjukkan adanya sedikit perubahan dalam struktur penduduk, tetapi tetap berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.3.3 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.3.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan padakriteria:

a. Dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik;
b. Dapat diterapkan pada daerah lain.

Tabel 2.60 Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Inovasi Daerah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	43,04	48,40	45,92	54,43

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik pada Tabel 2.60 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak tahun 2021, yakni sebesar 43,04, kemudian meningkat menjadi 48,4 pada 2022, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 45,92 pada 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi mencapai 54,43.

2.1.3.3.2 Jamu Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah Tamu Wisatawan mencerminkan tingkat daya tarik destinasi dalam menangkap peluang dari pasar domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadi indikasi bahwa destinasi wisata tersebut berhasil memenuhi harapan pengunjung, baik dari segi fasilitas, atraksi, maupun pelayanan. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sektor terkait, serta keberhasilan dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik. Selain itu, jumlah wisatawan yang terus meningkat berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, karena sektor pariwisata sering kali menjadi sumber utama pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi destinasi wisata untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga kelestarian lingkungan, dan berinovasi dalam menawarkan pengalaman baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional.

Tabel 2.61 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Gresik Dari 2019-2024

Wisatawan	Jumlah Wisatawan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mancanegara	4.320	37	12.599	18.281	18.655
Domestik	2.098.995	2.106.133	4.120.683	4.280.847	4.513.723
Jumlah	**2.103.355**	**2.106.170**	**4.133.282**	**4.299.128**	**4.532.378**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan Tabel 2.61 wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebanyak 18.655 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 4.532.723 orang, meningkat sebesar 5,4 persen dari tahun 2023.

2.1.3.3.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi sektor berbasis kreativitas, inovasi dan pemanfaatan nilai budaya terhadap total PDRB. Sektor ini berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi berkekelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. dengan kontribusi yang semakin besar, ekonomi kreatif dapat menjadi pendiring diserfikasi struktur ekonomi, serta memperkuat resiliensi terhadap perubahan global dan disrupsi tekhnologi.

2.1.3.3.4 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika ekonomi daerah pada level kabupaten. Indikator ini mencerminkan kapasitas sektor non pertanian dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung transformasi struktur dalam pembangunan. Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan perubahan ekonomi daerah. dalam berbagai kenijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

2.1.3.3.5 ICOR

Nilai *Incremental Capotal Output Ratio* (ICOR) mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan antara tambahan kapital dan tambahan output. Nilai ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu investasi. Koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil menunjukkan kondisi investasi yang efisien, sedangkan koefisien ICOR yang bernilai negatif atau bernilai relatif besar menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi dalam suatu investasi. Pemenuhan investasi bisa dibantu oleh sektor swasta, bila APBD setempat tidak bisa menunjang pemenuhan kebutuhan investasi tersebut,

maka dari itu sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi pemenuhan investasi yang ditetapkan. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga diperlukan adanya koefisien ICOR tiap sektor untuk menentukan kebutuhan investasi tiap sektor tersebut.

Tabel 2.62 Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik Tahun 2024

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	5,11

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

2.1.3.3.6 Pertumbuhan Usaha Mikro

Peningkatan Usaha Mikro menjadi krusial karena sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Gresik. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya lokal, peningkatan kewirausahaan juga memperkuat ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ekosistem kewirausahaan yang kuat, potensi ekonomi berbasis kearifan lokal semakin optimal dan struktur ekonomi daerah semakin resilience serta adaptif terhadap tantangan global.

Tabel 2.63 Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase Usaha Mikro (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	1,92	1,08	1,92	33,81

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perinduatrian dan Perdagangan

Berdasarkan Tabel 2.63, Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2019–2024. Dinamika ini mencerminkan adanya tantangan dalam penguatan ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Gresik, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta daya saing pelaku usaha. Penurunan tajam pada 2022 kemungkinan besar merupakan dampak residual pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi sektor usaha,

sedangkan pemulihan pada 2023 mengindikasikan efektivitas strategi revitalisasi ekonomi. Namun, kecenderungan penurunan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro masih belum stabil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, termasuk penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta optimalisasi ekosistem bisnis guna mendorong pertumbuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

2.1.3.3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin banyak penduduk yyang bekerja dan memiliki pendapatan, sehingga perekonomian rata-rata angkatan kerja akan membaik.

Tabel 2.64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki	84,85	85,55	85,78	85,82	86,80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48,82	53,86	51,42	54,37	56,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kekurangan dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bahwa indikator ini hanya menunjukkan jumlah angkatan kerja, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, dibandingkan dengan seluruh penduduk usia produktif di suatu wilayah. TPAK belum dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai jumlah penduduk yang benar-benar bekerja dalam angkatan kerja di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pada periode berikutnya, indikator TPAK digantikan dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yang mengukur persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TKK memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai besar angkatan kerja yang benar-benar bekerja. Semakin tinggi nilai TKK, semakin tinggi pula kesempatan kerja di wilayah tersebut.

2.1.3.4 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.4.1 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

2.1.3.4.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia adalah indikator yang mengukur sejauh mana sektor ekonomi kelautan dan pesisir dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Indeks ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi, sehingga ekonomi dapat berkembang tanpa merusak ekosistem laut. ndeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah pesisir di Indonesia menerapkan prinsip ekonomi biru, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi maritim terbesar di Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 2.800 km, provinsi ini memiliki sektor perikanan, pariwisata bahari, dan industri maritim yang menjadi pilar utama ekonomi pesisir. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, tantangan keberlanjutan juga menjadi perhatian, sehingga indeks ekonomi biru menjadi tolak ukur penting dalam menilai pengelolaan sumber daya laut di Jawa Timur.

2.1.3.4.3 Intensitas Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi di Indonesia memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, provinsi ini mulai mempercepat transisi energi dengan meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer. Saat ini, Jawa Timur telah mengembangkan berbagai proyek energi bersih, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gresik dan Sidoarjo, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Arjuno dan Ijen. Selain itu, pemanfaatan biomassa dari limbah pertanian dan biogas dari peternakan juga menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kontribusi EBT.

2.1.3.5 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas bandwith besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata.

2.1.3.5.1 Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Dalam menyusun perencanaan nasional ke depan yang sinergis akan memerlukan acuan ukuran yang bisa dimonitor bersama. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan

digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Tabel 2.65 Indeks Transformasi Digital Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	49,89	51,64	53,96	55,34	56,38
Nasional	43,67	44,83	47,14	48,40	49,20
Kabupaten Gresik	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Pada periode 2018-2022, sebanyak 10 Provinsi mengalami peningkatan klasifikasi dari C ke B dalam Indeks TDN, termasuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Salah satu provinsi yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah Provinsi Jawa Timur, dengan pendorong utama perolehan skor Indeks TDN adalah Pilar Pemerintah, yang mencatatkan skor 69,85 dan masuk dalam klasifikasi B (Baik). Selain Pilar Pemerintah, Pilar Jaringan dan Infrastruktur juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan skor Indeks TDN Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Komdigi tahun 2022, sekitar 94,61 persen wilayah Jawa Timur sudah tercakup jaringan 4G, yang mendukung kemajuan dalam sektor infrastruktur digital.

Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu perhatian untuk perbaikan lebih lanjut, terutama pada Pilar Bisnis dan Pilar Masyarakat. Pada Pilar Bisnis, skor yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor fundamental, seperti lingkungan bisnis yang kurang kondusif dan kurangnya perkembangan iklim investasi. Meskipun demikian, perkembangan startup lokal dan adopsi teknologi digital di sektor usaha sudah menunjukkan kemajuan. Di sisi Pilar Masyarakat, terdapat kekurangan pada dukungan terhadap literasi digital, keterampilan digital, dan kualitas pendidikan vokasi yang perlu diperbaiki. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu fokus pada penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan digital yang merata untuk seluruh kelompok masyarakat serta menyusun kurikulum digital yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk mendukung kemajuan sektor ini di masa depan.

2.1.3.5.2 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indeks komposit yang menggabungkan 11 indikator, yang dikelompokkan dalam tiga subindeks: Akses dan Infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, dan Keahlian TIK. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau dan membandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu, serta untuk mengukur kesenjangan digital antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mengukur potensi pembangunan TIK dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan, berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia di masing-masing wilayah.

Sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Timur terus mengembangkan infrastruktur dan ekosistem digitalnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan TIK. Dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan pendidikan, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung daya saing provinsi ini. Akses internet di Jawa Timur semakin luas, berkat proyek perluasan jaringan fiber optik dan penguatan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah pedesaan. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menjadi pusat perkembangan ekonomi digital, didukung oleh ekosistem startup, e-commerce, dan layanan berbasis teknologi. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital, melalui pelatihan untuk UMKM agar dapat beradaptasi dengan bisnis digital, serta program smart city yang diterapkan di beberapa kota. Selain itu, integrasi layanan publik berbasis digital semakin diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.

2.1.3.6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.6.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) didefinisikan sebagai perubahan dalam jumlah aset tetap suatu unit produksi, yang mencakup baik penambahan maupun pengurangan barang modal. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (baik baru maupun bekas), perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset dari sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer, atau barter barang modal ke pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Namun, kerugian yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan barang modal.

Tabel 2.66 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	34,10	36,30	36,76	37,29

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.3.6.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Gresik.

Tabel 2.67 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	16,00	17,81	16,34	15,91

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.3.6.3 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten

Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi. Korelasi koefisien variasi harga terhadap Biaya Logistik Nasional (%) yaitu semakin rendah Koefisien Variasi Harga (KVH) antarwilayah di Tingkat Kabupaten menunjukan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara kecamatan pada satu kabupaten semakin konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing kabupaten.

2.1.3.7 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.7.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ini bertujuan untuk mengukur kinerja layanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Gresik serta mengetahui persepsi masyarakat dan tingkat kepuasan atas kinerja pembangunan infrastruktur. Selain itu juga untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga diperoleh rekomendasi atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kajian, capaian IKLI Tahun 2024 sebesar 89,62% (Kategori Kinerja Sangat Baik), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 89,04%. Indikator yang dinilai terdiri dari jalan dan jembatan, transportasi darat, infrastruktur air bersih, Infrastruktur Jaringan Irigasi, Irigasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Infrastruktur Ruang Publik.

Tabel 2.68 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	87,39	89,04	89,62	89,71

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.3.7.2 Indeks Konektivitas

Indeks Konektivitas merupakan indikator baru yang akan diperhitungkan tahun 2025. Indikator tersebut untuk mengukur keterhubungan antarwilayah dan pemenuhan sarana prasarana penunjang sistem transportasi. Komposit indeks konektivitas terdiri atas indeks aksesibilitas, persentase kemantapan jalan, persentase lebar jalan yang memenuhi standar, persentase pemenuhan sarana dan prasarana terminal tipe B, persentase terpenuhinya sarana prasarana pelabuhan

laut, persentase terpenuhinya sarana prasarana pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyebrangan, persentase pemenuhan fasilitas keselamatan perkeretapian.

2.1.3.7.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada keluarga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan beberapa aspek utama, di antaranya adalah luas bangunan yang memadai, ketersediaan akses air bersih, fasilitas sanitasi yang baik, serta tingkat keamanan yang terjaga. Kelayakan hunian ini sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang sehat dan nyaman bagi penghuni, dengan memastikan bahwa mereka memiliki lingkungan yang mendukung kebutuhan dasar seperti kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, rumah tangga dapat tinggal dengan lebih aman dan sejahtera, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.

Tabel 2.69 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nasional	60,9	60,66	63,15	65,25
Jawa Timur	66,93	66,28	70,74	73,40
Kabupaten Gresik	91,56	90,29	95,00	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.3.7.4 Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sejak tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur, hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam membangun daerah perdesaan. Seiring dengan hal tersebut, persentase desa mandiri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hingga pada Tahun 2024 lebih dari separuh desa di Jawa Timur telah menjadi desa mandiri. Hal ini didorong oleh pulihnya kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pasca COVID-19, sehingga pembangunan di desa dapat berjalan lebih cepat.

Selanjutnya, mulai Tahun 2025 IDM digantikan oleh Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur kinerja pembangunan desa. Berbeda dengan IDM yang hanya meninjau tiga dimensi pembangunan (sosial, ekonomi dan lingkungan), pada Indeks Desa terdapat enam dimensi pembangunan yang ditinjau (1) Layanan Dasar, (2) Sosial, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan, (5) Aksesibilitas, dan (6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Sehingga desa mandiri berdasarkan Indeks Desa diinterpretasikan sebagai desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

Tabel 2.70 Persentase Desa Mandiri di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	9,02	19,29	36,26	52,05
Kabupaten Gresik	84,24	93,64	100,00	100,00

Sumber: Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2024.

2.1.3.8 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.8.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

2.1.3.8.2 Tingkat Inflasi

Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).

Tabel 2.71 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Inflasi	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
	0,81	0,60	0,44	1,85	0,81

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.3.8.3 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

Sektor keuangan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus (penabung dan investor) ke pihak yang membutuhkan dana (peminjam dan pelaku usaha). Efektivitas intermediasi ini menentukan sejauh mana sektor keuangan dapat mendukung produktivitas, investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan terdiri dari 3 indikator, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB, Aset Dana Pensiun/PDRB, Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi, Total Kredit/PDRB.

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan

di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil pengelolaan aset; d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau e. pengalihan dana awal pemberi kerja. Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 94 regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. Nilai transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

2.1.3.8.4 Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai enabler dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.72 Tingkat Inklusi dan Keuangan di Jawa Timur dan Nasional

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	-	92,99	-	-

Nasional	-	85,11	-	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten tahun 2024 tercatat sebesar 85.94 dengan predikat A. Capaian tersebut mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien dalam mewujudkan visi pemerintahan berkelas dunia yaitu pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan pelayanan publik yang prima. Tahun 2024 merupakan akhir dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dengan konsep Dynamic Governance yang berfokus pada pelaksanaan *Double Track* (Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik). Selanjutnya konsep Reformasi Birokrasi akan ditekankan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan Human Base Publiuc Governance dengan mengembangkan Digital *Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital Structure, Digital Process, Digital Infrastructure dan Digital Service.*

Tabel 2.73 Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Timur dan Nasional

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	76,38	76,71	80,11	80,56	94,14
Nasional	69,40	69,47	68,93	86,84	85,94

Sumber : Kemenpan RB Tahun 2025

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan

sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Pada tahun 2024 capaian IRH Provinsi Jawa Timur sebesar 98,12.

2.1.4.1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Penerapan SPBE berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif, Oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Dalam Pasal 2 Perpres SPBE juga tertuang bahwa SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Tabel 2.74 Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : Kementrerian PAN RB, Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 4,32 dengan Predikat Memuaskan. Capaian Kabupaten Gresik naik 0,04 poin dari tahun 2023 dengan perolehan nilai 4,28. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik yang berkinerja tinggi.

Tabel 2.75 Hasil Penilaian Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024

NAMA INDEKS	2023	2024
SPBE	**4.28**	**4.32**
Kebijakan Internal SPBE	**5.00**	**5.00**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5.00	5.00
Tata Kelola SPBE	**3.90**	**3.70**
Perencanaan Strategis SPBE	3.00	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.50	4.00
Penyelenggara SPBE	4.50	4.00
Manajemen SPBE	**2.82**	**3.18**
Penerapan Manajemen SPBE	3.00	3.38
Pelaksanaan Audit TIK	2.33	2.67
Layanan SPBE	**4.82**	**4.88**
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	4.70	4.80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5.00	5.00





Gambar 2.32 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023 - 2024

Berdasarkan Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023 – 2024 di atas terlihat bahwa beberapa aspek mendapat nilai yang fluktuatif bahkan stagnan. Nilai stagnan terdapat pada aspek kebijakan internal SPBE dengan tingkat kematangan 5,00. Sedangkan pada aspek penilaian tata kelola SPBE menurun sebesar 0,20 poin ke tingkat kematangan 3,70 pada Tahun 2024. Adapun aspek manajemen dan layanan SPBE, keduanya mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan pada aspek manajemen SPBE dengan kenaikan sebesar 0,36 poin sehingga tingkat kematangan menjadi 3,18 di Tahun 2024. Aspek layanan SPBE juga mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin sehingga tingkat kematangan menjadi 4,88 pada Tahun 2024 dari Tahun sebelumnya yakni 4,82 poin. Beberapa rekomendasi perbaikan Penerapan SPBE dari Kementerian PANRB, diantaranya :

a. Memperkuat pelaksanaan audit TIK melalui penyusunan kebijakan audit yang lebih komprehensif dan fokus pada seluruh aspek SPBE, khususnya keamanan informasi dan infrastruktur;
b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait audit SPBE;
c. meningkatkan kapabilitas manajemen SPBE dengan menyusun panduan rinci untuk delapan area manajemen SPBE, terutama pada aspek manajemen aset TIK dan perubahan;
d. Integrasi layanan publik berbasis elektronik perlu diperkuat dengan memastikan interoperabilitas antar aplikasi dan sistem untuk mendukung efektivitas dan efisiensi layanan.

Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap dijalankan oleh instansi baik kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan

oleh Pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.4.1.4 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks sebesar 95,88 dan berada pada zona hijau.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penegakan Perda yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan supremasi hukum, keadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi yang substansial. Persentase penegakan Perda mengacu pada proporsi Perda yang berhasil diterapkan dan ditegakkan secara efektif dibandingkan dengan total Perda yang ada. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penegakan Perda di Kabupaten Gresik ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM di berbagai sektor, termasuk hukum, keadilan, keamanan nasional, dan demokrasi. Persentase capaian aksi HAM mengindikasikan sejauh mana

target yang ditetapkan dalam RANHAM telah tercapai oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menurut laporan dari Kantor Staf Presiden (KSP), pada tahun 2022, pelaporan aksi HAM diikuti oleh 90,49% kementerian, lembaga, dan daerah yang tersebar di 32 provinsi. Panitia Nasional RANHAM menargetkan nilai capaian sebesar 75 untuk aksi kementerian dan lembaga, 65 untuk aksi pemerintah provinsi, dan 60 untuk aksi pemerintah kota/kabupaten. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan aksi HAM yang berkaitan dengan hukum, keadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 khususnya agenda ketangguhan diplomasi diharapkan mampu secara adaptif dan agile untuk menjawab tantangan. Ketangguhan diplomasi dapat ditempuh dengan peningkatan kelembagaan secara komprehensif dengan memperhatikan proses bisnis, organisasi, dan penerapan digitalisasi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui digitalisasi layanan yang terintegrasi merupakan hal yang harus dilakukan dalam upaya untuk percepatan pembangunan. Dengan meningkatnya indeks SPBE maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya penilaian indeks lainnya seperti indeks korupsi dan kemudahan berusaha maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan penguatan tata kelola organisasi pemerintah terkait reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi serta urgensi dilakukannya revisi terhadap Keputusan Presiden No. 108/2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Reformasi birokrasi pada dasarnya penggerak untuk perubahan. Melalui reformasi birokrasi tematik diharapkan perubahan yang dilakukan dapat dirasakan dan berdampak oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan statistik, perpustakaan, kearsipan, serta pada urusan pilihan yaitu Bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.1.4.4.1.1 Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan, pada jenjang Pendidikan dibagi dari TK hingga SMA. Pada tingkatan Pendidikan terbanyak dari segi siswa dan guru ada pada SD dengan jumlah sekolah negeri ataupun swasta sejumlah 76.040 siswa dan 4.975 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 15,28. Kemudian pada tingkatan SMP baik negeri maupun swasta sebanyak 34.287 siswa dan 2.764 guru dengan rasio murid terhadap guru 12,40. Sementara untuk SMA baik negeri maupun swasta sebanyak 19.855 siswa dan 1.727 guru. Sedangkan SMK baik negeri maupun swasta sebanyak 20.334 siswa dan 1.699 guru. Sehingga rasio murid terhadap guru untuk SMA adalah 11,50 dan 11,97 untuk SMK.

Tabel 2.76 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	-	30	30
Driyorejo	-	62	62
Kedamean	-	20	20
Menganti	1	61	62
Cerme	-	48	48

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Benjeng	-	38	38
Balongpanggang	1	32	33
Duduksampeyan	-	23	23
Kebomas	-	45	45
Gresik	-	31	31
Manyar	1	38	39
Bungah	-	22	22
Sidayu	-	23	23
Dukun	-	27	27
Panceng	-	27	27
Ujungpangkah	-	21	21
Sangkapura	-	35	35
Tambak	-	21	21
Jumlah	3	604	607

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2025

Tabel 2.77 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	23	5	28
Driyorejo	26	14	40
Kedamean	21	-	21
Menganti	26	13	39
Cerme	25	2	27
Benjeng	25	3	28
Balongpanggang	26	4	30
Duduksampeyan	16	-	16
Kebomas	20	6	26
Gresik	15	8	23
Manyar	16	4	20
Bungah	19	1	20
Sidayu	14	2	16
Dukun	20	2	22
Panceng	16	1	17
Ujungpangkah	16	2	18
Sangkapura	36	2	38
Tambak	29	1	30
Jumlah	389	70	459

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2025

Tabel 2.78 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	2	4	6
Driyorejo	2	8	10
Kedamean	1	3	4
Menganti	2	11	13
Cerme	2	3	5
Benjeng	2	4	6
Balongpanggang	3	2	5
Duduksampeyan	1	2	3
Kebomas	2	5	7
Gresik	4	7	11
Manyar	3	7	10
Bungah	1	10	11
Sidayu	4	2	6
Dukun	1	1	2
Panceng	1	5	6
Ujungpangkah	1	6	7
Sangkapura	2	3	5
Tambak	1	2	3
Jumlah	35	116	120

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2025

Tabel 2.79 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gresik Tahun 2023/2024

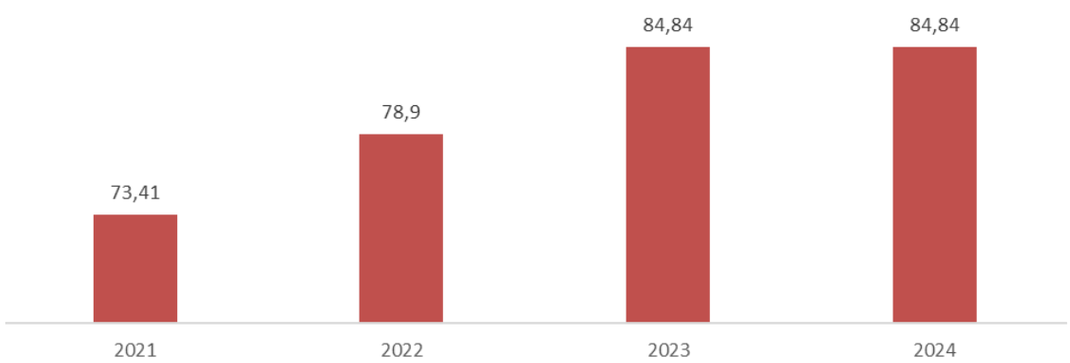
Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Wringinanom	1	-	1
Driyorejo	1	4	5
Kedamean	1	1	2
Menganti	1	3	4
Cerme	1	3	4
Benjeng	-	3	3
Balongpanggang	1	2	3
Duduksampeyan	-	1	1
Kebomas	1	2	3

Kecamatan	Sekolah		Jumlah (unit)
	Negeri (unit)	Swasta (unit)	
Gresik	1	4	5
Manyar	1	2	3
Bungah	-	3	3
Sidayu	1	2	3
Dukun	1	3	4
Panceng	-	1	1
Ujungpangkah	-	3	3
Sangkapura	1	2	3
Tambak	-	1	1
Jumlah	12	40	52

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2025

2.1.4.4.1.2 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy*

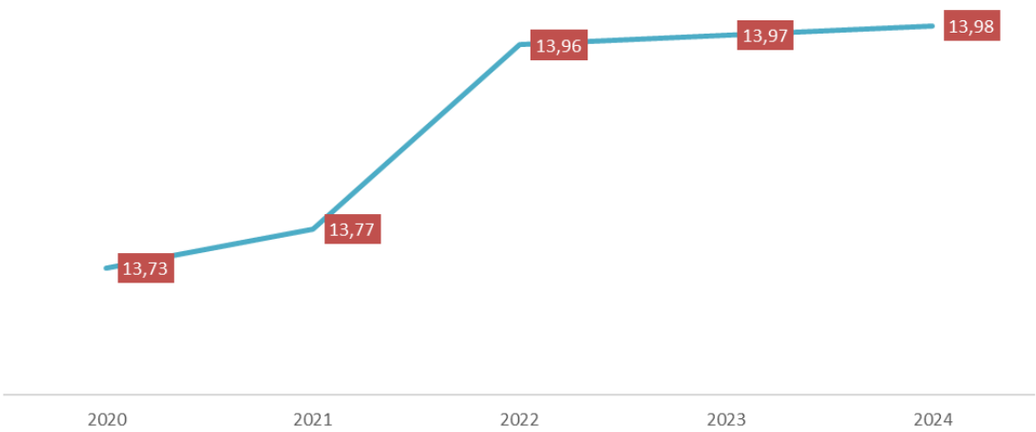


Competency dan State Partially.

Gambar 2.33 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

2.1.4.4.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 13.98 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Gresik diperkirakan dapat menempuh pendidikan formal selama hampir 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Gresik memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas, dan sebagian besar mungkin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.



Gambar 2.34 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

2.1.4.4.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dijalani penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan RLS ini dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan mengalami penurunan. Batas maksimum RLS adalah 15 tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai adalah setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan batas minimum adalah 0 tahun, yang mengindikasikan tidak ada pendidikan formal yang dijalani. Berdasarkan data, Kabupaten Gresik menunjukkan angka RLS yang lebih

tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun angka nasional. Pada tahun 2022, RLS di Provinsi Jawa Timur tercatat 8,03 tahun, dan di tingkat nasional sebesar 8,69 tahun, sementara Kabupaten Gresik telah mencapai 9,75 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik rata-rata telah menempuh pendidikan setara dengan kelas 3 SMP, yang mencerminkan tercapainya program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Selanjutnya, ini menunjukkan perlunya upaya untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA atau setara.

Selama lima tahun terakhir, perkembangan angka RLS di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,13 tahun per tahun dari 2017 hingga 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk lebih meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, yang memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan, berdasarkan peluang mereka untuk tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya. HLS dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, dengan batas maksimum 18 tahun, yang menggambarkan harapan untuk anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. HLS ini digunakan untuk menilai kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, serta untuk mengetahui lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dalam suatu wilayah.

Tabel 2.80 Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	9,3	9,56	9,75	10,01	10,01
Jawa Timur	7,78	7,88	8,03	8,11	8,11
Nasional	8,49	8,54	8,69	11,04	11,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025 (diolah)

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) antara Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Gresik tercatat sebesar 9,3 tahun,

dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 10,01 tahun pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan di Kabupaten Gresik, yang berhasil melampaui angka RLS Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Sementara itu, RLS di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dengan 7,78 tahun pada tahun 2020 dan mencapai 8,11 tahun pada tahun 2024. Di tingkat nasional, RLS juga mengalami peningkatan, dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur, dari 8,49 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,04 tahun pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun angka RLS Kabupaten Gresik lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

2.1.4.4.1.5 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.81 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI/sederajat	102,88	103,00	101,81	96,99	102,59
APK SMP/MTS/sederajat	93,68	94,99	94,51	75,02	94,12
APK anak yang mengikuti PAUD	75,95	80,00	82,93	85,28	83,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.1.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.82 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/ sederajat	96,67	97,00	96,00	96.99	97,10
APM SMP/MTS/ sederajat	74.77	75,00	74,24	75.02	76,12
APM perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	72,58	95,00	98,97	93.45	92,24
APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	0,00	75,00	97,68	92.8	91,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.1.7 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Gresik untuk tingkat SD dan SMP sederajat menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada setiap tahun, angka kelulusan untuk SD sederajat tercatat mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa semua siswa di tingkat SD di Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Begitu pula dengan angka kelulusan di tingkat SMP sederajat, yang juga tetap mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan di Kabupaten Gresik dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua siswa.

Tabel 2.83 Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SD Sederajat	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP Sederajat	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.1.8 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kecakapan baca-tulis penduduk di suatu wilayah. Indikator ini mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, yang merupakan keterampilan dasar dalam memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mengakses peluang pendidikan dan pekerjaan. Semakin tinggi angka melek huruf di suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan literasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.84 Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Angka Melek Huruf	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	97,28	97,20	98,03	98,15	98,31

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Angka Melek Huruf di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan kemajuan dalam upaya peningkatan literasi di masyarakat. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 97,28%, dan angka ini sedikit menurun menjadi 97,20% pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022, angka melek huruf kembali meningkat, mencapai 98,03% pada tahun 2022, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya, dengan 98,15% pada tahun 2023 dan 98,31% pada tahun 2024.

2.1.4.4.1.9 Angka Partipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.85 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS SD Sederajat	100,00	101,00	104,71	111.85	107,44
APS SMP Sederajat	94,00	94,99	88,87	92.24	95,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang menarik, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada tingkat SD sederajat, APS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan angka 100,00 pada tahun 2020, APS SD sederajat terus menunjukkan kenaikan yang stabil, mencapai 101,00 pada tahun 2021, 104,71 pada tahun 2022, dan 111,85 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 107,44 pada tahun 2024.

2.1.4.4.1.10 Sekolah Yang Merumuskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah rencana biaya dan pendanaan terperinci untuk satu periode tahun anggaran. Dokumen anggaran sekolah resmi ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan komite sekolah, kepala sekolah, dan penanggung jawab perumusan RAPBS untuk kemudian diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. RAPBS terdiri atas dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Di dalamnya sudah mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, terutama untuk tahun anggaran selanjutnya. Pendapatan yang dimasukkan RAPBS hanya dana berupa uang yang akan diterima dan dikelola sekolah secara langsung. RAPBS ibarat pilar manajemen sekolah karena melalui dokumen inilah seluruh perencanaan kegiatan sekolah dilakukan, mulai dari hal teknis hingga non teknis. Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, maupun dana bantuan lain harus diatur secara transparan dan terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Tabel 2.86 Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun 2021-2024

Persentase Sekolah yang merumuskan APBS (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

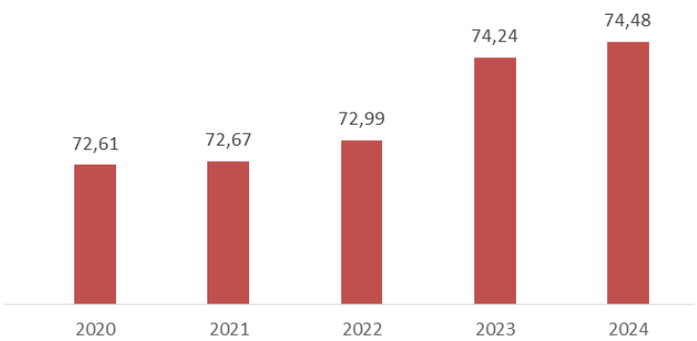
Persentase sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di Kabupaten Gresik tercatat mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap sekolah di Kabupaten Gresik telah secara konsisten merumuskan dan mengelola APBS

dengan baik, yang merupakan indikator penting dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat pendidikan.

2.1.4.4.2 Kesehatan

2.1.4.4.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur *(Age Spesifik Date Rate/ASDR)* diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mencapai 74,48 tahun mengalami kenaikan 0,24 dari tahun 2023. Berikut ini merupakan grafik Perkembangan Angka Harapan hidup Kabupaten Gresik



Gambar 2.35 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.2 Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Standart

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan utuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Sedangkan prasarana adalah merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan.

Tabel 2.87 Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	34,38%	55,00%	100,00%	100,00%
Persentase RS terakreditasi	90,48%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

Pada tahun 2021 dan 2022, pemenuhan sarana pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Gresik telah mencapai 100% di 32 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah tersebut memenuhi kriteria pelayanan yang optimal. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pada tahun 2022, sekitar 55% dari 32 Puskesmas berhasil memperoleh akreditasi Utama dan Paripurna, sementara RSUD telah memperoleh akreditasi Paripurna dengan 100%. Pencapaian akreditasi ini memastikan bahwa prosedur standar pelayanan kesehatan diterapkan dengan baik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh Puskesmas di Kabupaten Gresik berhasil meraih akreditasi Utama dan Paripurna, serta RSUD mempertahankan akreditasi Paripurna dengan 100%, mencerminkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan tentu didukung dengan faktor pendukung lainnya seperti tenaga kesehatan sebagaimana indikator berikut:

Tabel 2.88 Indikator Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100%	100%	100%	100%
Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	61%	89%	90.47%	100%

Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100%	100%
Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	59,00%	61,30%	78.8%	100%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	84.24%	86.73%	86.9%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.3 Angka Kematian Ibu dan Anak

Angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu daerah, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka kematian ibu mencerminkan keberhasilan dalam memperbaiki akses dan kualitas perawatan selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Sementara itu, angka kematian bayi yang lebih rendah menunjukkan peningkatan dalam upaya pencegahan penyakit dan pemberian perawatan kesehatan yang memadai untuk bayi. Meskipun ada kemajuan, angka kematian ibu dan bayi yang masih ada mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki layanan kesehatan, pendidikan, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah kematian yang dapat dicegah.

Tabel 2. 89 Angka Kematian Ibu dan Anak Kabupaten Gresik Tahun 20**20-2024**

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	316,37	94,18	79,50	77,59
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3,22	4,34	4,62	4,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

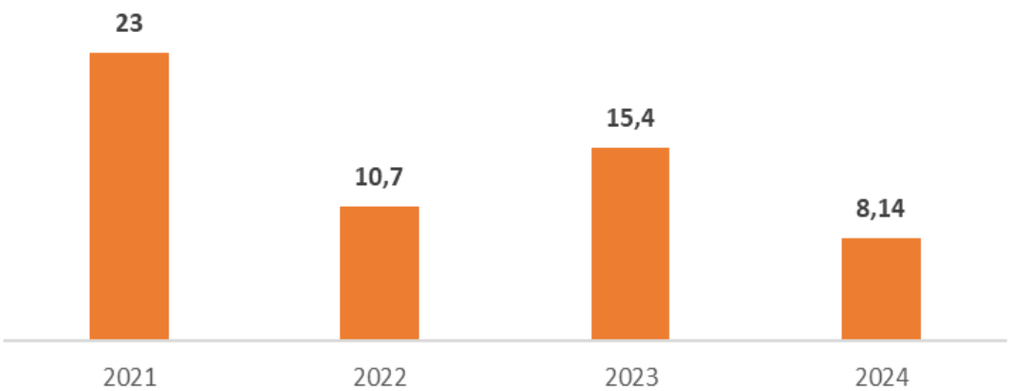
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang berbeda selama periode 2021 hingga 2024. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan signifikan, dari 316,37 pada tahun 2021 menjadi 94,18 pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 79,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini sedikit menurun lagi menjadi 77,59, mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya penanggulangan kematian ibu, yang dapat

diatribusikan pada perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan maternal dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada tahun 2021, angka kematian bayi tercatat sebesar 3,22, kemudian meningkat menjadi 4,34 pada tahun 2022 dan 4,62 pada tahun 2023, sebelum turun kembali menjadi 4,34 pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit kenaikan dalam angka kematian bayi pada tahun 2023, secara keseluruhan angka ini tetap berada pada tingkat yang perlu perhatian untuk memastikan bahwa semua upaya dilakukan untuk mengurangi kematian bayi. Penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai angka yang lebih rendah lagi.

2.1.4.4.2.4 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan

Penyebab stunting menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada dua, yakni faktor lingkungan dan genetik. Lingkungan adalah aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan pendek atau stunting dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Selain disebabkan oleh lingkungan, stunting dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Namun sebagian besar stunting disebabkan oleh kekurangan gizi.



Gambar 2.36 Angka Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024
Sumber: SSGI Tahun 2021-2025

Stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Balita Stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 10,7%, namun pada tahun 2023 Kabupaten Gresik mengalami peningkatan ke angka 15,4 %. Angka ini jauh jika dibandingan dengan Stunting di Provinsi Jawa Timur dengan angka 17,7% dan Indonesia 21,5%. Penurunan angka tersebut diiringi dengan Penanganan Balita Stunting di Kabupaten Gresik yang sudah 100%.

Tabel 2.90 Balita Stunting yang Mendapatkan Pelayanan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase balita stunting mendapatkan penanganan (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.5 Penanganan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit. Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik dilakukan kepada Seseorang dengan penyakit menular Demam Berdarah, tuberkulosis dan Orang dengan HIV/AIDS.

Tabel 2.91 Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Case Fatality Rate (CFR) DBD	0,00	0,00	0,56	0,82
Penemuan Kasus Baru (CDR) TB	61,03	79,60	94,09	85,83
ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	37,64	86,75	89,51	81,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

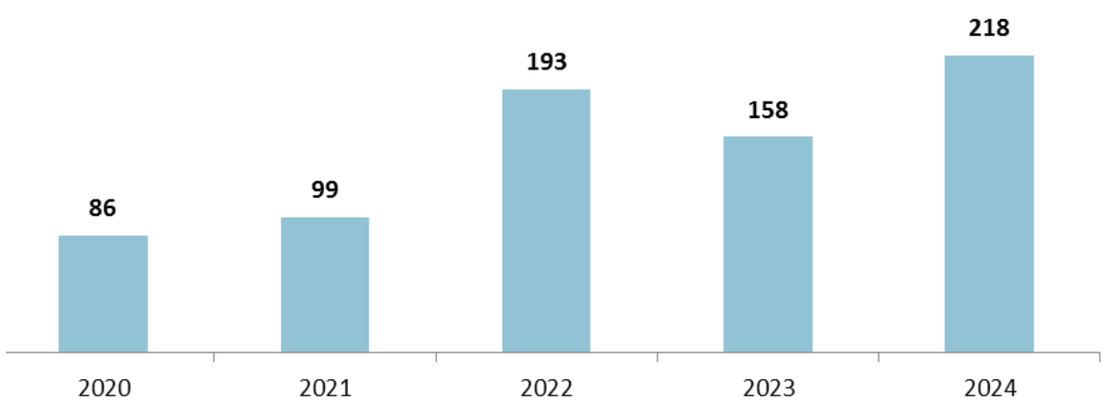
Penanganan penyakit menular di Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan beberapa indikator yang mencerminkan upaya penanggulangan yang dilakukan. Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Case Fatality Rate (CFR) tercatat 0,00 pada tahun 2021 dan 2022, namun mengalami sedikit

peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,56 dan 0,82 pada tahun 2024. Meskipun angka ini tetap relatif rendah, peningkatan CFR pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengendalikan wabah DBD, terutama pada musim hujan.

Sementara itu, untuk penanganan Tuberkulosis (TB), Penemuan Kasus Baru (CDR) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dari 61,03 menjadi 94,09, meskipun sedikit menurun menjadi 85,83 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa deteksi kasus TB semakin baik, namun tantangan tetap ada dalam menurunkan angka penemuan kasus baru tersebut. Adapun untuk pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV), terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan angka mencapai 86,75%, meskipun sedikit menurun menjadi 81,54% pada tahun 2024.

A. HIV/AIDS

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dengan menargetkan sel-sel yang disebut sel CD4 atau sel T-helper. Sel-sel ini penting dalam membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh yang parah, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit yang umumnya tidak akan berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan yang sehat. AIDS adalah tahap lanjut infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh telah sangat melemah sehingga tubuh tidak dapat secara efektif melawan infeksi. Orang yang mengalami AIDS dapat mengalami berbagai infeksi serius dan masalah kesehatan kronis. AIDS juga dapat menyebabkan kanker dan penyakit yang berhubungan dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Berikut merupakan grafik pengidap HIV/AIDS di



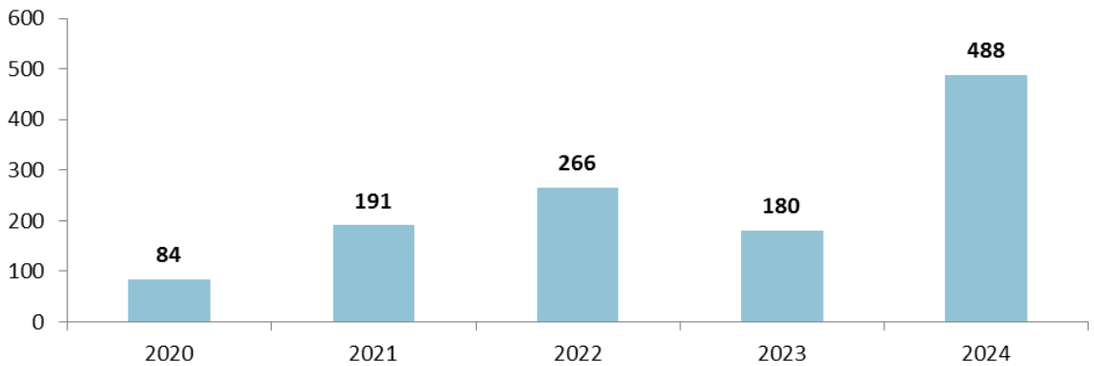
Kabupaten Gresik.

Gambar 2.37 Jumlah HIV/AIDS Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik menurun di tahun 2023. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Gresik adalah adanya terapi pasien yang mengdap HIV/AIDS, sosialisasi, serta berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Gresik.

B. Demam Berdarah Dengue

Demam berdarah, juga dikenal sebagai demam dengue, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam berdarah umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Berikut merupakan grafik demam berdarah di Kabupaten Gresik.



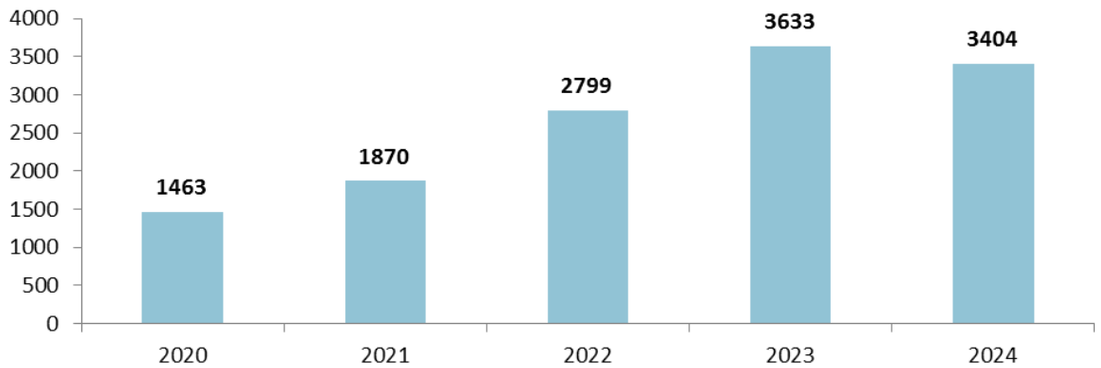
Gambar 2.38 Jumlah Demam Berdarah Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Berdasarkan grafik di atas, jumlah demam berdarah Kabupaten Gresik menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah demam berdarah mencapai 180 kasus. Pemerintah Kabupaten Gresik, seperti banyak pemerintah daerah lainnya di daerah tropis yang rentan terhadap demam berdarah, memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit ini seperti pengawasan dan pemantauan, pemberantasan sarang nyamuk, monitoring kasus, dan sosialisasi serta kampanye.

C. Tuberculosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menginfeksi



paru-paru (tuberkulosis paru), tetapi juga dapat menyerang organ lain dalam tubuh seperti ginjal, tulang, dan otak. Tuberkulosis dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Berikut merupakan grafik pengidap TB di Kabupaten Gresik. Berdasarkan grafik , pengidap Tubercolosis yang ada di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, pengidap tubercolosis mencapai 3.633 orang. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengidap TB dengan cara pemberian vitamin dan sembako.

Gambar 2.39 Jumlah Pengidap Tuberculosis Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

D. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk

Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Malaria dapat menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam tinggi, menggigil, nyeri tubuh, sakit kepala, mual, dan muntah. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan anemia berat, gangguan organ, dan bahkan kematian. Berdasarkan Publikasi BPS Kabupaten Gresik, Kasus malaria pada tahun 2024 sebanyak 7 kasus.

2.1.4.4.2.6 Universal Health Coverage

Cakupan Kesehatan Universal (UHC) adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap individu dalam suatu populasi mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, mencakup promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, dengan kualitas yang tinggi dan biaya yang terjangkau. Tujuan utama dari UHC adalah untuk menghapus hambatan ekonomi dan sosial yang menghalangi akses terhadap layanan kesehatan, sehingga setiap orang dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan tanpa terkendala biaya. Di Kabupaten Gresik, penerapan UHC tercermin dalam tingginya persentase masyarakat miskin yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan tingkat kepesertaan mencapai 99,65% pada tahun 2022, yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat miskin di wilayah tersebut telah terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan, mewujudkan upaya pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 2.92 Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS (%)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	100,00	99,65	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.7 Vaksinasi Covid-19

Tujuan utama pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh infeksi virus ini. Meskipun vaksin tidak dapat memberikan perlindungan 100% terhadap infeksi COVID-19, vaksin ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko munculnya gejala berat serta komplikasi yang dapat memperburuk kondisi pasien. Selain itu, vaksinasi juga berperan penting dalam menekan penyebaran virus di masyarakat, sehingga dapat mengurangi beban pada

sistem kesehatan. Di Kabupaten Gresik, hal ini tercermin dalam capaian vaksinasi yang mencapai 100% dari jumlah penduduk, yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi. Selain itu, data juga menunjukkan penurunan signifikan dalam rasio pemeriksaan, yang turun dari 101,28% pada tahun 2021 menjadi 78,27% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan vaksinasi dalam mengurangi angka infeksi dan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, serta menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 memiliki dampak positif dalam mengendalikan pandemi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.93 Realisasi Pemeriksaan dan Pemberian Vaksin COVID-19 di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu (%)	101,28	78,27	100,00
Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19 (%)	80,46	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.2.8 Posyandu Purnama atau Mandiri (PURI)

Selain menilai pelayanan di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan di tingkat Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren, dan Pos Kesehatan Desa dengan mengukur persentase peningkatan tingkat kemandirian, yang dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 2.94 Indikator Pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	98,00%	95,65%	99,41%	100,00%
Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	64,70%	72,09%	64,00%	60,00%

Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	84,24%	71,38%	94,00%	87,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

Indikator peningkatan strata kemandirian pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi hasil dari tahun 2021 hingga 2024. Posyandu Balita (PURI) menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan peningkatan signifikan, dari 98% pada 2021, sedikit menurun menjadi 95,65% pada 2022, namun kembali naik menjadi 99,41% pada 2023 dan mencapai 100% pada 2024. Sebaliknya, Pos Kesehatan Pesantren (PURI) mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dari 64,70% pada 2021 menjadi 72,09% pada 2022, namun menurun menjadi 64% pada 2023 dan 60% pada 2024. Pos Kesehatan Desa (PURI) mengalami penurunan dari 84,24% pada 2021 menjadi 71,38% pada 2022, tetapi berhasil meningkat kembali menjadi 94% pada 2023 dan 87% pada 2024, mencerminkan usaha yang berkesinambungan meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan kemandirian di beberapa sektor.

2.1.4.4.2.9 Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Indikator pelayanan rumah sakit merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Penilaian terhadap indikator pelayanan ini penting untuk memastikan bahwa rumah sakit dapat memberikan perawatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Tabel 2.95 Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Bed Occupancy Rate (BOR)	65,04	62,42	68.49	65,78
Average Lenght of Stay (ALOS)	5,57	4,46	4.66	4,48
Turn Over Internal (TOI)	3,6	2,53	2.04	2,2
Bed Turn Over (BTO)	35,44	55,32	56.25	56,74

Gross Death Rate (GDR)	139,25	105,04	102.04	99,1
Net Death Rate (NDR)	91,53	63,63	66.59	65,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4.3.1 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM

Urusan Keciptakaryaan didukung oleh pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum secara kuantitas minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan kualitas parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum dihitung dengan jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target Pencapaian SPM Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tahun 2022 di Kabupaten Gresik sebesar 100 % terlayani.

Tabel 2.96 Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih dan Limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	39.45	38.47	41.8	43.24	44.34

Sumber : DCKPKP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Capaian akses air minum/bersih mengalamai penurunan di tahun 2022 yakni sebesar 60,83%, hasil yang didapat untuk persentase ini masih jauh dari SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani. Turunnya capaian di tahun 2022 disebabkan beberapa kendala yaitu pada aspek teknis dimana kapasitas jaringan

distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada, sehingga persentase cakupan pelayanan air minum yang belum optimal di Kabupaten Gresik.

Masih belum optimalnya capaian layanan penyediaan akses air bersih/minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/*Sustainabele Development Goals* (SDGs) Indonesia Bappenas Tahun 2020, nilai SPM pengolahan air limbah diukur dengan indikator persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) yakni apabila menggunakan kloset leher angsa dengan tangki septik/IPALD dibagi dengan jumlah total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target pencapaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 sebesar 100 % tertangani. Capaian persentase sanitasi aman dan layak Kabupaten Gresik cukup baik, dimana capaian akses air limbah domestik Kabupaten Gresik tahun 2021 yang masuk dalam kategori akses layak sebesar 96,45%, sedangkan untuk capaian 2022 adalah sebesar 96,52% dan sudah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

Tabel 2.97 Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	55.160	39.367
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air	6.370	2.818

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	2023	2024
		limbah domestik		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025

Persentase Akses Air Bersih/Minum jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 telah mencapai 39,13% atau 158.360 rumahtangga dan Akses Air Bersih/Minum bukan jaringan perpipaan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 21,70% atau 87.820 rumahtangga. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, didukung dengan indikator Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 96,52% atau 390.335 rumahtangga dari total 404.702 rumahtangga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022.

2.1.4.4.3.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan nomenklatur salah satu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang pada suatu lahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ataupun oleh Bupati Gresik melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum disahkannya UUCK, nomenklatur untuk dokumen kesesuaian kegiatan dengan peruntukan ruang adalah Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Realisasi persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukan ruang berdasarkan dokumen SIPR dan KKPR adalah sebagai berikut.

Tabel 2.98 Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020- 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukan Ruang	100%	95%	99,11%	99,11%	109%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.3 Normalisasi Waduk

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Fungsi Waduk utamanya untuk untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Waduk antara lain sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Persentase waduk milik Pemerintah Daerah sebesar 6,41% pada tahun 2024 yang berhasil di normalisasi.

Tabel 2.99 Indikator Persentase Waduk yang Dinormalisasi di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Waduk yang dinormalisasi	2,56%	5,77%	6,41%	7.69%	6,41%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah. Hal ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani. Realisasi persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara pada tahun 2024 sebesar 7,43%.

Tabel 2.100 Indikator Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	16,24%	4,30%	7,60%	8,31%	7,43%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.5 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD-T merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman tahun 2024 sebesar 44,34% yang menurun dari tahun 2023 dengan persentase sebesar 54,62%.

Tabel 2.101 Indikator Prosentase Penyediaan Pelayanan SPALDT Akses Aman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	52,74	45,55	52,72	54.62	44.34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.6 Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. nAda 2 macam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yaitu :

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.

Tabel 2.102 Indikator capaian akses layak air limbah di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	94,44	94,87	96,52	100	100

Sumber : Dinas CKPKP dan Dinas PUTR Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.4.3.7 Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang. Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten. Dimana terdapat 122 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Pada tahun 2020 terdapat perubahan atau peningkatan status pada 20 ruas jalan dari status Jalan Poros Desa menjadi Jalan Kabupaten, sehingga saat ini bidang Bina Marga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang dalam tahap menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating.

2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.1.4.4.4.1 Penyediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 alokasi SPM urusan Perumahan dan Permukiman ditekankan kepada 2 indikator kinerja utama yakni Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah

Daerah. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui rehabilitasi, pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah. Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan ketentuan terjadi pada saat masa pasca bencana yang ditetapkan dalam surat penetapan bencana dari bupati/walikota, serta terdapat dampak bencana yang merugikan bagi masyarakat. Mutu pelayanan terhadap spm persentase capaian penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah dihitung berdasarkan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan dilakukan pembangunan pembali maupun rehabilitasi dan atau direlokasi.

Tabel 2.103 SPM Penyediaan Rumah layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Output	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
Fasilitasi penydaiaan rumah layah huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

Pada tahun 2022 data capaian spm penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tercatat sebesar 100 %, Dimana hasil pencatatan data dilapangan terdapat total 4 jiwa yang rumahnya terdampak bencana angin puting beliung yang berlokasi di Desa Pucung, Hulaan dan Kesamben kulon, dari total 4 jiwa tersebut sudah terlayani secara optimal 100 %. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususkan pada “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),

Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya". Mutu pelayanan dasar capaian spm fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dihitung berdasarkan rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.

Tabel 2.104 SPM Penyediaan Rumah layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Indikator	Output	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
Fasilitasi penydaiaan rumah layah huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

Tabel 2.105 Indikator Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	16,59	1,87	5,21	2,80	2,04

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi capaian persentase rumah swadaya yang tidak layak huni yang ditangani di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah swadaya yang diperbaiki mencapai 16,59%. Namun, angka ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021, yakni hanya 1,87%. Pada tahun 2022, penanganan rumah swadaya sedikit meningkat menjadi 5,21%, menandakan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi rumah swadaya yang tidak layak huni. Meski demikian, pada tahun 2023, persentase penanganan kembali turun menjadi 2,80%, dan pada tahun 2024, jumlah rumah yang ditangani tercatat hanya 2,04%.

2.1.4.4.4.2 Persentase Penurunan Backlog Perumahan

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani.

Tabel 2.106 Indikator Persentase Penurunan Backlog Perumahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Backlog Perumahan	16.73%	7%	12,89%	9.72%	16,60%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

2.1.4.4.4.3 Penurunan Kawasan Kumuh

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui

Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan penataan kawasan kumuh guna mencapai target 0% kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satunya adalah kawasan Gresik Kota Lama yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Tabel 2.107 Indikator Kawasan Kumuh Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	2,41%	12,64%	14.13%	12,19%
Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	-	2,61%	1,04%	7.39%	10,30%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Sesuai dengan kewenangannya dalam penanganan kawasan kumuh, pada tahun 2021, persentase panjang jalan lingkungan yang ditangani mencapai 12,64%, yang mengalami kenaikan sebesar 10,23% dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan persentase mencapai 14,13%. Namun, pada tahun 2024, persentase ini mengalami penurunan menjadi 12,19%. Sementara itu, persentase penanganan panjang saluran lingkungan kawasan kumuh pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar 2,61% dan 1,04%. Angka ini meningkat pada tahun 2023 dengan persentase 7,39%, dan terus naik menjadi 10,30% pada tahun 2024.

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/417/HK/437.12/20121 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, total luasan Kumuh di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 874 Ha yang dibagi menjadi beberapa Tematik Kawasan yang meliputi Kawasan Kota Pesisir Timur, Kawasan Kota Pesisir Barat,

Kawasan Kota Pesisir Selatan, Kawasan Wisata Religi, Kawasan Industri Kebomas, Kawasan Pertanian Kebomas, Kawasan Industri Perdagangan Manyar, Kawasan Pertanian Manyar, Kawasan Das Bengawan Solo, Kawasan Balongpanggang Benjeng, Kawasan Munggugianti, Kawasan Cerme, Kawasan Semampir, Kawasan Sidomukti, Kawasan Das Bengawan Solo Dukun, Kawasan Tiremenggal, Kawasan Panceng Ujungpangkah, Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu, Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo, Kawasan Driyorejo Kota Baru, Kawasan Pertanian Driyorejo, Kawasan Permukiman Menganti, Kawasan Industri Pergudangan Menganti, Kawasan Pertanian Menganti, Kawasan Tulung, Kawasan Tanjung, Kawasan Pertanian Wringinanom, Kawasan Industri Pergudangan Wriginanom, Kawasan Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Timur Bawean. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

2.1.4.4.4.4 Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah harus dipastikan kelayakannya. Berikut ini merupakan capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan PSU di Wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2.108 Indikator Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	71.11%	0,94%	0,92%	0.45%	0,82%
Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik	9.93%	0,54%	0,71%	10.63%	0%

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	99.30%	0,04%	0,05%	0.12%	0,54%

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

2.1.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Adapun Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020–2024 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.109 Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT

Sumber : Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik 2025

Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2022 sampai 2024 mencapai 100%. Dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP telah melakukan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2022 sampai tahun 2024 penananganan terhadap gangguan tibumtranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya dengan realisasi mencapai 100% sehingga tercipta kondisi yang tertib dan kondusif.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Telah dibentuk Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) untuk Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dan Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan. Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT dengan target 1 Linmas per RT sudah terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Satgas Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini menandakan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah berhasil melaksanakan kegiatannya secara baik dan humanis, sehingga tidak ada warga kabupaten yang terdampak akibat penegakan peraturan daerah dan perbup, maupun dalam kegiatan pengamanan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas).

2.1.4.4.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.110 Indikator Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dibina di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	92,15	110,13	123,80	95,95	98,48
Persentase Data Urusan Sosial yang Dimutakhirkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Puskesos yang Terbentuk	4,93	14,79	33,71	97,19	97,19
Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi	0,39	0,78	0,40	0,42	0,63
Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	2,07	2,66	0,01	3,26	3,89
Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,87	37,11	0,00	55,67	64,38
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	70,29	63,43	97,12	100,46	69,32

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

2.1.4.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.5.1 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK di suatu wilayah, semakin banyak penduduk yang bekerja dan memiliki pendapatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian rata-rata angkatan kerja.

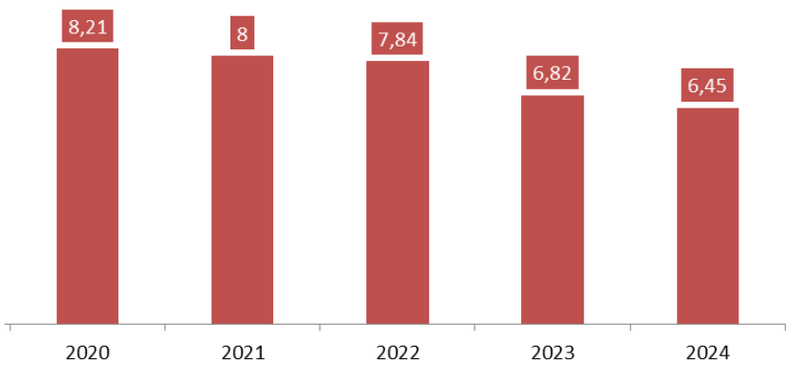
Tabel 2.111 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.4.5.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif cenderung menurun. Walaupun di tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah penganggur dikarenakan Pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Gresik mengalami penurunan dengan persentase mencapai 6,454%.



Gambar 2.40 40 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2025

2.1.4.5.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja untuk para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan sedangkan tingkat kesempatan kerja adalah peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memastikan warga gresik memperoleh Kesempatan kerja digambarkan dalam peningkatan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dengan realisasi sebagaimana berikut.

Tabel 2.112 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,79	92	92,16	93.18	93,55
Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	36,90	25,03	7,56	79.33	9,23
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	46,60	57,62	26,82	39.04	13,52

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pencari Kerja yang tidak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja dengan Persentase 9,23% pada Tahun 2024. Realisasi Indikator ini menurun drastis jika dibangdingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 79,33%, diikuti dengan penempatan Pencari Kerja yang juga menunjukkan tren yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dengan persentase tahun 2024 sebesar 13,52%.

2.1.4.5.1.3 Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2024 sebesar 97,53% atau meningkat sebesar 2,97% dari tahun 2023.

Tabel 2.113 Indikator Hubungan Industrial Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,13	15,44	24,19	94.56	97,53

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

2.1.4.5.2 Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Tabel 2.114 Indikator Pengendalian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	1,92	2,03	1,89	1.89	1,94
Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76,00	76,53	74.19	78.42	67,78
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	16,45	15,04	13,65	13.65	9,27
Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	-	100	100	100	100
Unmet Need ber-KB	13,88	10,08	9,55	13.02	9,18
Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	6,16%	27,25	27,25	37.08	10,11

Sumber : Dinas KBPPPA

2.1.4.5.3 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di

Kabupaten Gresik. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Tabel 2.115 Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83,00	83,37	85,00	92.60	93,60

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gresik

Untuk memastikan Pangan Utama tersedia, penting untuk menilai ketahanan pangan di suatu wilayah melalui beberapa indikator, yaitu rasio ketersediaan pangan (kg per kapitaper tahun), stabilitas harga pangan utama (beras), dan persentase keamanan pangan segar. Rasio ketersediaan pangan menunjukkan apakah kebutuhan pangan masyarakat tercukupi, dengan semakin tinggi angkanya menandakan pasokan yang cukup. Stabilitas harga pangan utama, seperti beras, mengukur kestabilan harga yang mempengaruhi daya beli masyarakat, dimana fluktuasi harga dapat mengganggu ekonomi. Sementara itu, persentase keamanan pangan segar mengukur tingkat keamanannya terhadap kontaminasi, yang penting untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman. Capaian indikator pangan Kabupaten Gresik secara detail sebagai berikut.

Tabel 2.116 Indikator Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	180,10	167.38	180,73	183.27	184,04
Stabilitas Harga	9,99%	9,89%	9,58%	9,19%	9,39%

Pangan Utama (Beras)					
Persentase Keamanan Pangan Segar	80,00%	83,33	83,33%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.5.4 Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang, dengan indikator pertanahan mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan pengelolaan tanah yang efisien dan adil, terutama dalam konteks pembangunan dan kepentingan umum. Persentase lokasi tanah yang dibebaskan mengukur sejauh mana proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik. Persentase konflik/kasus tanah garapan yang diselesaikan menggambarkan efektivitas penyelesaian sengketa atau masalah terkait kepemilikan dan penguasaan tanah, yang penting untuk mengurangi ketegangan sosial. Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum menunjukkan tingkat keadilan dalam proses pembebasan tanah, di mana masyarakat yang terkena dampak menerima kompensasi yang layak. Sementara itu, persentase tanah kosong/terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola tanah yang tidak terpakai untuk tujuan pembangunan atau kepentingan publik, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Secara lengkap realisasi Indikator pada urusan pertanahan sebagaimana berikut.

Tabel 2.117 Indikator Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	-	53,06%	80%	80%	50%
Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	100	42%	90%	100%	100%
Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	50%	65%	18%	80.77%	1,56%
Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah	100%	47%	99,14%	85.5%	10,31%

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
dimanfaatkan					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025

2.1.4.5.5 Lingkungan Hidup

2.1.4.5.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Tabel 2.118 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	59,94	60,19	58,5	60,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas lingkungan yang ada di suatu daerah. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 tidak terdapat data yang dapat diakses untuk IKLH. Namun, mulai tahun 2021, angka IKLH menunjukkan angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 59,94, yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 60,19 pada tahun 2022. Meskipun ada kenaikan, angka IKLH di tahun 2022 sedikit menurun menjadi 58,5. Akan tetapi, pada tahun 2023, kualitas lingkungan hidup kembali membaik dengan IKLH yang tercatat sebesar 60,12. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi, angka IKLH pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, indikator pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan sebagaimana **pada tabel berikut.**

Tabel 2.119 Indikator Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,1	48,75	48,24	49.38	50
Indek Kualitas Udara (IKU)	83,54	68,79	81,03	81.24	82,94
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,18	32,94	32,86	32.17	35,3
Persentase penurunan beban pencemaran air	40	41,67	88	111.03	60,50
Prosentase penurunan beban pencemar udara	40	61	94,00	111.03	60,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.1.4.5.5.2 Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam. Persentase Penambahan Ruang Terbuka hijau Pada Tahun 2024 sebesar 11,65%.

Tabel 2.120 Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase Penambahan RTH	1,31%	2,48%	2,50%	9.64%	11,65%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.1.4.5.5.3 Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya, pengendalian lingkungan adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, culture budaya), baik dampak primer maupun dampak sekunder sebagai konsekuensi pembangunan industri. Berikut ini merupakan indikator pendukung dalam pelaksanaan Ijin

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Dinas lingkungan Hidup.

Tabel 2.121 Indikator Ijin Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40	97	64	72.31	64,21
Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	30	33	101,1	114.67	60,50
Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25	36	118	45	67,26
Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30	33	3,50	265	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.1.4.5.5.4 Pengelolaan Persampahan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Berikut merupakan Indikator dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.122 Indikator Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan Sampah	59	46,76	67,46	76.52	77,21
Persentase Penanganan Sampah	50	100	65,68	61.7	58,7
Persentase Pengurangan sampah	9	47	11,70	15.5	11,74
Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	-	319	125	125	132
Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	1	2	4
Jumlah bank sampah yang terbentuk	301	330	231	231	334

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.1.4.5.5.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Fasilitas tersebut terhubung ke septic tank yang disedot secara berkala. Akses aman berarti rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas yang dilengkapi kloset berleher angsa, serta bagian bawah menggunakan tangki septik yang disedot minimal sekali dalam lima tahun terakhir dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau terhubung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini digunakan untuk mengukur akses sanitasi layak dan aman, serta persentase praktik buang air besar sembarangan, yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik terpenuhi, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan pencemaran air akibat limbah domestik.

2.1.4.5.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penataan, penertiban, dan penerbitan dokumen serta pengelolaan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, dan pemanfaatan informasi tersebut untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Sistem POEDAK (Online Dokumen Kependudukan) merupakan inovasi digital yang mendukung kelancaran administrasi ini dengan memungkinkan masyarakat mengakses dan memproses dokumen kependudukan secara online, sehingga mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan data. Pencatatan sipil, yang mencakup pendaftaran peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, menjadi dasar hukum identitas seseorang dan referensi bagi pengambilan keputusan administrasi lainnya. Dengan sistem yang terintegrasi, administrasi kependudukan yang efisien ini dapat meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan, dan memastikan pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu.

Tabel 2.123 Indikator Pendaftaran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perekaman KTP-el	98,43	98,24	99,47	99.17	99,60
Persentase kepemilikan KIA	54,51	72,97	79,74	67.77	99,31
Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	93,58	98,60	100	100	100,00
Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	89,12	100	100	100	100,00
Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	100	22,30	40,54	75.82	83,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.4.5.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menjawab capaian sasaran "Mewujudkan Desa Mandiri". Capaian sasaran tersebut dinilai berdasarkan persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.124 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai	60,30	84,24	93,64	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.125 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	47	86	153	222	222
2	Maju	152	192	156	108	108
3	Berkembang	131	52	21	-	-
4	Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik 2025

Indikator lain dalam Urusan pemberdayaan Masyarakat dan **D**esa sebagaimana berikut:

Tabel 2.126 Indikator Penataan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14,00	33,27	33,27	36,12
Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33	5,76	5,76	6,36
Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	62,67	72,36	68,29	92,13
Persentase Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha milik desa (Bumdes) dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	17,82	26,36	36,06	46,97
Persentase Desa Cepat Berkembang	79,09	90,91	93,82	96,36
Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	18,18	100,00	100,00	100,00
Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	90,91	100,00	100,00	100,00
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	36,88	47,02	52,65	49,91

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

2.1.4.5.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.127 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usulan	-	-	43,28	23,91	40,00

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan yang telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD (%)					
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Berhasil Diselesaikan (%)	96,00	63,20	87,50	88,78	90,48
Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (Poin)	-	100,00	111,50	125,50	152,65
Persentase Kasus Kekerasan Anak terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan (%)	-	82,00	83,42	74,00	83,77

Sumber: Dinas KBPPPA, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 Persentase Usulan Perempuan yang telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD mencapai 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan perempuan bisa tertampung dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik Pada Tahun 2024 mencapai 90,48%, dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 juga mencapai 83,77%. Dari dua persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa semua kasus perempuan maupun kasus anak yang terjadi mendapatkan penanganan dengan baik.

2.1.4.5.9 Perhubungan

Kinerja transportasi sebagai penggerak serta penunjang pembangunan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Indikator tersebut didukung dengan data indicator kinerja sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.128 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Persentase Prasarana angkutan laik fungsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan	17,65	35,29	64,71	64,71	66,67
Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik	41,67	41,67	41,67	50,00	52,17

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara umum ketiga sasaran rencana strategis di bidang perhubungan menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut: Persentase prasarana angkutan yang laik fungsi mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh 22 terminal dan halte angkutan umum telah beroperasi secara optimal. Sementara itu, indikator ketersediaan dan aksesibilitas trayek mencapai 66,67%, yang mencerminkan bahwa lebih dari separuh trayek telah terintegrasi dengan sistem perpindahan antar moda. Adapun nilai Volume to Capacity (VC) jalan di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 52,17%.

2.1.4.5.9.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan terpasang 2000 unit Fasilitas Keselamatan Jalan (PJU) di ruas jalan perkotaan di Kabupaten Gresik dan pada tahun 2024 telah terealisasi 72,16% Unit PJU. Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan 497 angkutan umum dalam trayek yang beroperasi dari 539 angkutan umum dalam trayek yang tersedia, dan pada Tahun 2024 masih terealisasi sebesar 66,98%. Rendahnya pencapaian target disebabkan oleh masih banyaknya pemilik angkutan umum yang belum melakukan peremajaan kendaraannya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dioperasikan. Selain itu, meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan angkutan berbasis daring turut berkontribusi terhadap menurunnya jumlah angkutan konvensional yang beroperasi. Sementara itu, total kendaraan yang lulus uji kendaraan sebesar 99,24%.

Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan layanan tertib lalu lintas dengan penempatan petugas di 40 lokasi persimpangan rawan kemacetan dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 40 lokasi (100,00%). Semua layanan atau 11 jenis layanan meliputi pengadaan dan pemeliharaan APILL, marka dan rambu telah terealisasi dan terlaksana dengan baik. Dapat dinilai capaian realisasi

terhadap target tahun 2024 sebesar 100,00%. Pada akhir tahun perencanaan (2026), Dinas Perhubungan menargetkan tersedia 24 lokasi tempat khusus parkir, dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 128.00% yang melebih target.

Tabel 2.129 Indikator Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	-	77,35	65,20	71,50	72,16
Persentase ketersediaan trayek angkutan darat	-	60,34	56,03	55,10	66,98
Persentase kendaraan lulus uji	-	98,63	98,92	99,18	99,24
Cakupan layanan tertib lalu lintas	-	75,00	100,00	97,50	100,00
Persentase layanan rekayasa lalu lintas	-	66,67	100,00	100,00	100,00
Persentase ketersediaan tempat Khusus Parkir	-	50,00	75,00	104,17	128,00

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2025

2.1.4.5.9.2 Pengelolaan Pelayaran

Target ketersediaan angkutan penyeberangan sampai dengan akhir tahun perencanaan (2026) ditetapkan sebanyak 4 angkutan dan sampai saat ini (2024) telah terealisasi 4 angkutan atau 100%. Capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 100% dan lebih lanjut tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.130 Indikator Pengelolaan Pelayaran Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan ASDP	-	62,50	100,00	75,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

2.1.4.5.9.3 Pengelolaan Perkeretaapian

Target ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang sampai dengan akhir tahun perencanaan (2026) ditetapkan sebanyak 14 unit dari 14 Lokasi Perlintasan KA, sampai saat ini (2024) telah terealisasi 8 unit atau 60,00%. Capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 100% atau sesuai target.

Tabel 2.131 Indikator Pengelolaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang	-	-	50,00	57,14	60,00

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2024

2.1.4.5.10 Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

2.1.4.5.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeksi SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*3*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin ke angka 4,32 dengan predikat “Baik” sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam

Gambar 2.32 dan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.132 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,31	3,27	4,28	4,32

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2024

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE; dan beberapa aspek yang menunjang domain tersebut. Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;

1. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
2. Penilaian Indeks SPBE 2024 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;

3. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD

Tabel 2.133 Indikator Pendukung Indeks SPBE Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100,00 (37/37)	100,00 (47/47)	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	-	64,00 (31/48)	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	-	10,00 (2)	20,00 (10/48)	65,00	50,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

2.1.4.5.10.2 Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Tahun 2024 pada Informasi dan Komunikasi Publik digambarkan pada capaian indikator Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi 100%, Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi 100%, Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID 100%.

Tabel 2.134 Indikator Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	90,54 (287/317)	100,00	100,00 (213/213)	100,00 (213/213)	100,00
Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	-	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00
Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100,00 (3/3)	100,00 (13/13)	100,00 (3/3)	100,00 (3/3)	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

2.1.4.5.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah "Meningkatnya Pengelolaan Koperasi" dan "Meningkatnya Usaha Mikro" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut.

Tabel 2.135 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Aktif	44,30	45,40	49,70	51,17	52,01
Pertumbuhan Usaha Mikro	0,18	0,09	0,43	1,92	33,81

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2024

Persentase koperasi aktif dihitung dari jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi dikalikan 100 persen. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro dihitung dari jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah usaha mikro tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah koperasi aktif di tahun 2024 sejumlah 815 koperasi. Pertumbuhan usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya memberikan sentimen positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dalam pemerataan ekonomi di daerah. Pada tahun 2024 pertumbuhan usaha mikro mengalami kenaikan signifikan menjadi 33,81%. Hal tersebut, selaras dengan persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 52,01%. Indikator lain dalam Urusan Koperasi, Usaha Mikro sebagaimana berikut.

Tabel 2.136 Indikator Koperasi Usaha Mikro Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase koperasi aktif	44,30	45,40	49,70	51,17	52,01
Pertumbuhan usaha mikro	0,18	0,09	1,08	1,92	33,81
Persentase jumlah koperasi aktif *grade* b, c1, c2 dan d menjadi koperasi aktif *grade* a	64,72	65,94	69,83	51,16	52,01
Persentase jumlah ksp/usp koperasi yang dinilai kesehatannya	40,27	83,56	33,42	3,80	4,17
Persentase pengurus koperasi yang dilatih	13,81	26,72	9,52	13,92	7,20
Pertumbuhan omzet koperasi	2,71	-15,62	1,40	>100	3,21
Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0,17	0,0013	0,46	0,12	0,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

2.1.4.5.12 Penanaman Modal

2.1.4.5.12.1 Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi adalah pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Gresik di tahun 2024 sebesar 22,66%

Tabel 2.137 Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52	35,52	24,11	41,99	22,66
Persentase Peningkatan Jumlah Investor	84,18	21,90	117,88	258,51	55,76
Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	16,67	57,14	70,00	17,65	15,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T. Pada tahun 2024 pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Gresik sebesar 22,66%. Sementara itu, persentase peningkatan jumlah investor dan pertumbuhan promosi penanaman modal pada tahun 2024 sebesar 55,76% dan 15,00%. Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatas kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini menandakan kualitas pelayanan perzinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

Tabel 2.138 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Ijin	90,00	81,20	117,55	94,27	93,89
Persentase Kepatuhan Perusahaan	103,00	31,70	53,42	68,42	69,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2024

2.1.4.5.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Parekrafbudpora) memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga “Meningkatkan Prestasi

Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.139 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda Berprestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	-	0,44	0,44	0,45	2,87

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2025

Persentase pemuda berprestasi dihitung dari jumlah pemuda yang berprestasi dibagi dengan jumlah pemuda yang mengikuti lomba dan dikalikan dengan 100%. Jumlah pemuda berprestasi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pemuda berprestasi.

Tabel 2.140 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	0,25	39,00	33,00	27,78	41,67
Persentase Cabor Berprestasi	95,00	96,55	96,00	87,88	84,21
Persentase Sarana Prasarana yang Terpelihara	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	52,57	9,46	96,63	96,51	94,02

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2025

2.1.4.5.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terus

berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.141 Indikator Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	-	7,00	13,00	27,00	43,00

Sumber: Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

2.1.4.5.15 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Adapun dalam urusan persandian digambarkan dalam indikator Penanganan Serangan *Cyber*.

Tabel 2.142 Indikator Persandian Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Serangan *Cyber*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.4.5.16 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis.

Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan kebudayaan dengan sasaran "Terwujudnya

Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.143 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Budaya yang Dilestarikan	100,00	94,93	13,50	1,93	0,46

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2025

Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain dengan mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kab. Lain serta menetapkan warisan budaya non bendawi tersebut. Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel 2.144 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik

No	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bengunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. Di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga.
2	Babad Sindujoyo	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf Pegon Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. Gambar-Gambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri

No	Objek	Uraian
		karena menyuguhkan makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/ piring kecil, baru kemudian diminum. Cara yang kedua adalah menambahkan krimer dan menikmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasik/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut.
7	Sego Krawu	Sego Krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta serundeng dari parutan kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit, yang merah berasal dari cabai merah besar. Sambal terasi agak gelap karena diberi campuran petis. Asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa “Krawuk” artinya meraih/mengambil dengan tangan.
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Gili. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat

No	Objek	Uraian
		tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate.

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

Adapun indikator pendukung lain dalam urusan kebudayaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.145 Indikator Pendukung Lain dalam Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase objek budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase WBTB berketetapan nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cagar budaya terkelola lestarikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase obyek diduga cagar budaya terdaftar	100,00	0,00	15,00	15,79	13,16
Persentase cagar budaya ditetapkan	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan kunjungan museum	20,52	306,09	38,88	35,17	42,03

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

2.1.4.5.17 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gresik. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat.

Tabel 2.146 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektifitas Penguatan Literasi	14,68	24,37	36,38	14,68	68,98
Persentase Pemustaka	51,87	42,83	57,00	43,09	70,69
Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	49,43	39,78	52,12	48,93	71,50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025

Pada tahun 2024, persentase pemustakan mengalami peningkatan sebesar 43,09% manjadi 70,69% dibandingkan tahun 2023 yang mempunyai persentase 43,09%, Persentase tingkat ketercukupan bahan pustaka juga mengalami peningkatan sebesar 48,93% menjadi 71,50% di tahun 2024. Namun untuk Efektifitas Penguatan Literasi mengalami kenaikan sebesar 68,98% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 14,68%. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perpustakaan yang dibina	56,01	64,08	73,39	94,79	95,82
Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	-	50,00	55,00	70,00	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025

2.1.4.5.18 Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip , alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Realisasi Indikator dalam Urusan Kearsipan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.148 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresikk Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan (%)	12,11	12,83	15,49	18,89	20,82
Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah (%)	1,48	13,95	1,88	2,69	5,00
Persentase Pencipta Arsip yang dibina (%)	28,48	32,89	46,14	46,80	58,72
Nilai Pengawasan Kearsipan	66,25 (BAIK)	68,03 (BAIK)	81,26 (MEMU-ASKAN)	88,07 (MEMU-ASKAN)	88,41 (MEMU-ASKAN)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025

2.1.4.6 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.6.1 Kelautan dan Perikanan

2.1.4.6.1.1 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.149 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	95,28	102,61	-	-	-
Jawa Timur	95,28	102,61	103,73	100,57	-
Nasional	100,37	104,69	106,45	105,4	101,76

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi dibandingkan NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2021, NTN Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 7,33 dibandingkan tahun 2020.

2.1.4.6.1.2 Perikanan Tangkap dan Budidaya

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Gresik tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan namun juga dilihat dari sisi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Perikanan budidaya difokuskan pada pembudidayaan di perairan payau, pesisir pantai dan perairan tawar. Pada Tahun 2024 pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya tumbuh 3,00% dengan nilai produksi 155.972 Ton.

Tabel 2.150 Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	-50,00	3,01	1,60	1,92	3,22
Produksi perikanan tangkap (ton)	11.115	11.459	11.451	13.124	13.547

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2025

Tingkat produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Pada tahun 2024 pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap tumbuh 3,22% dengan nilai produksi 13.540 Ton.

Tabel 2.151 Indikator Kinerja Perikanan Budidaya Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	1,80	3,01	2,99	3,02	3,00
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	138.579	142.746	146.698	152.557	155.972

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2025

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 155.972 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 13.547 ton. Tingginya produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa jumlah nelayan perikanan budidaya atau petani tambak air tawar dan payau di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan nelayan perikanan tangkap. Jumlah jenis ikan yang dibudidaya selama lima tahun terakhir tetap sama yakni terdiri dari 8 jenis, sedangkan jenis perikanan tangkap yang diperoleh selama lima tahun terakhir terdiri dari 42 jenis.

Tabel 2.152 Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1	Mas	
2	Jelawat	
3	Lampan	
4	Tawes	
5	Mujair	
6	Nila	
7	Jambal	
8	Gabus	
9	Lais	
10	Lele	
11	Nilem	
12	Toman	

No.	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
13	Sepat Siam	
14	Tambakan	
15	Belida	
17	Betutu	
18	Betok	
19	Keting	
20	Patin Jambal	
21	Ikan lainnya/Wader	
22	Udang Galah	
23	Udang Tawar	
24	Udang Grago	
25	Udang Lainnya	
26	Siput/bekicot	
27	Remis	
28	Binatang lunak lainnya	
30	Kura-kura	
31	Buaya	
32	Binatang air lainnya/Belut	
	Jumlah	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktiatif. Hasil laut ikan bandeng menjadi komoditas paling banyak yang didapatkan sepanjang lima tahun terakhir yakni pada tahun 2023 sebesar 90.504.550 kg, disusul dengan hasil kerang hijau sebesar 17.469.780 kg dan hasil udang vaname sebesar 15.747.825 kg.

Tabel 2.153 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 ~~s/d~~ 2024

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024*	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	(Rp. 000,-)
1	Bandeng	90,397,836	1,437,679,059	90,488,037	1,691,395,665	90,504,550	1,832,581,667	90.557.954	2.069.016.876
2	Gracilaria verrucosa			14,500	87,000	147,920	861,076		
3	Gurame, Gurami	2,491	50,795	2,456	52,510	2,982	70,990	3.263	83.924
4	Kakap Putih	9,851	289,321	9,811	287,040	12,389	390,881	13.894	454.336
5	Kepiting Bakau	122,140	4,744,757	123,139	4,623,216	131,182	7,248,656	135.951	8.959.407
6	Kerang Hijau	11,240,652	57,040,230	16,766,346	67,645,286	17,469,780	66,211,409	21.778.873	71.335.977
7	Kerapu	131,431	15,328,353	127,449	12,363,585	134,922	16,665,410	136.702	17.377.058
8	Lele	1,215,415	17,160,346	1,278,759	19,181,384	1,469,704	22,505,333	1.616.153	25.773.010
9	Mas, Ikan Mas, Karper	2,326,095	26,504,787	2,352,537	23,855,883	2,381,957	30,953,756	2.410.389	33.450.905
10	Mujair	9,847,173	101,060,288	9,579,902	87,634,464	8,973,172	71,351,679	8.565.707	59.953.705
11	Nila	5,432,185	69,877,088	5,486,252	80,086,422	5,052,316	74,280,961	4.872.462	76.585.909
12	Patin	10,442	146,135	10,330	52,097,319	11,409	14,675,724	11.926	147.069.353
14	Tawes	4,946,744	52,490,001	5,036,984	56,588,192	4,383,675	56,191,852	4.126.652	58.139.558
15	Udang Vaname	11,185,709	558,182,396	14,077,790	703,889,496	15,747,825	793,388,658	18.685.259	945.890.609
16	Udang Windu	2,381,527	190,522,131	2,402,218	198,530,533	2,542,834	235,222,069	2.627.540	261.363.167
17	Udang Putih	580	29,000	-	-	-	-		
18	Ikan Lainnya	3,486,636	14,367,556	3,942,392	17,150,959	3,950,859	16,200,955	4.205.658	17.203.605
	SUB JUMLAH	**142,736,908.87**	**2,545,472,244**	**151,698,901**	**3,015,468,955**	**152,917,476**	3,238,801,077	159.748.383	3.792.657.399

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2024



Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 90.504.550 kg. Luas areal tambak payau, tambak tawar, kolam air, dan waduk pada tahun 2024 sebesar 15.601,26 Ha; 13.052,01 Ha; 1.177,50 m^2; dan 618,23 Ha. Jumlah perikanan budidaya Gresik terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar 152.917.476 kg dan 2024 sebesar 155.980.000 kg. Sedangkan, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 10.793.753 kg dan 11.949.510 kg. Namun, kenaikan tersebut tidak bertahan karena angka produksi mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah di tahun 2024 dengan jumlah sebesar 7.354.300 kg.

Tabel 2.154 Indikator Perikanan yang diolah dan dipasarkan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan (%)	84,61	85,00	78,00	80,00	86,50

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2025

Meskipun data target produksi perikanan laut terus mengalami tren penurunan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, angka konsumsi ikan Kabupaten Gresik sebesar 56,61 kg/kapita/tahun. Hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 55,67 kg/kapita/tahun. Hal tersebut selaras dengan produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan di Gresik yaitu 86,50% yang meningkat daripada tahun 2023 (80,00%). Kelompok nelayan di Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah nelayan di Kabupaten Gresik sejumlah 10.440 orang dan meningkat sebesar 3,12% pada tahun 2024 sejumlah 10.766 orang.

2.1.4.6.2 Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dampak positif pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat beragam, diantaranya dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan pariwisata melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran "Terwujudnya Jumlah Kunjungan Wisata sebagai Bagian Pembangunan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.155 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Kunjungan Wisata	2-3	2,08	1,33	1,74	2,02

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2025

Sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata. Pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata. Berikut ini merupakan realisasi indikator pada urusan Pariwisata.

Tabel 2.156 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik	71	25	70	27,45	18

NO	INDIKATOR	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Wisata (ODTW)					
2	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100	200	100	100	100
3	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	40	20	45	10,75	16,50
4	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100	100	100	100	100
5	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	21,77	4	95	100	5,44
6	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	0	0	339	45,10	(98,03)
7	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	11,49	7	24	30,54	46,79

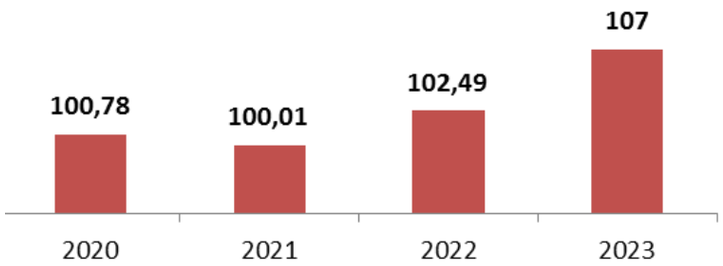
Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2025

2.1.4.6.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya : penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan.

2.1.4.6.3.1 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP Jawa Timur pada tahun 2021 berada pada titik impas dengan nilai tukar petani 100 hal ini hal ini mencerminkan kenaikan/penurunan harga produksi petani sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, dimana pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 sebesar 107. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:



Gambar 2.41 Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

2.1.4.6.3.2 Produksi Komoditas Unggulan Pertanian

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengan komoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Sebaliknya, tanaman pangan justru bergerak fluktuatif cenderung turun meskipun memiliki porsi yang besar dalam jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut

dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2.157 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2024

Komoditas (Ton)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	683,547.8	692,575.7	696,461.3	700,123.9	785,165.4	788,678.42	811.570,4
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	599,562.0	580,530.3	558,376.7	531,942.2	616,853.6	624,593.4	629.723,7
Padi	428,755.5	419,167.4	413,995.6	391,460.6	422,680.4	422,686.0	421.482,5
Jagung	158,136.6	145,856.2	132,555.1	125,041.0	176,773.1	185,961.8	192.088,8
Kedelai	279.9	107.7	103.8	164.5	433.6	1,030.6	1.337,5
Kacang Tanah	1,582.0	1,580.1	1,303.3	2,058.3	1,569.0	1,912.1	1.986,0
Kacang Hijau	1,854.5	347.9	8,710.9	332.4	684.6	1,656.8	1.619,9
Ubi kayu	8,775.0	13,059.3	972.1	11,914.5	14,712.9	11,281.0	11.862,3
Ubi jalar	178.5	411.7	736.0	970.9	-	65.1	50,6
Jumlah produksi hortikultura (ton)	83,985.8	112,045.4	138,084.6	168,181.7	168,311.8	164,085.1	187.603,9
a. Sayur (ton)	18,016.4	31,001.3	31,001.3	29,925.1	30,055.3	18,533.8	18.639,1
a.1 Sawi	300.4	204.8	204.8	322.0	323.4	1,097.7	1.422,5
a.2 Kacang panjang	541.3	521.6	521.6	317.2	318.6	296.3	262,7
a.3 Cabe	13,089.9	25,994.7	25,994.7	27,812.2	27,933.2	14,805.7	15.175,0
a.4 Tomat	829.3	1,107.1	1,107.1	152.3	153.0	433.6	380,9
a.5 Terong	1,775.8	1,744.4	1,744.4	279.1	280.3	519.9	406,7
a.6 Ketimun	423.8	351.5	351.5	13.1	13.2	-	5,6
a.7 Labu Siam	-	-	-	-	-	-	
a.8 Kangkung	619.7	659.4	659.4	646.1	648.9	1,046.5	1.162,1
a.9 Bayam	436.2	417.8	417.8	383.1	384.8	334.1	316,8
b. Buah (Ton)	50,166.5	61,679.0	87,718.2	114,930.6	114,930.6	125,841.7	151.254,0
b.1 jambu biji	498.8	515.0	515.0	1,556.4	1,556.4	1,428.0	1.762,3
b.2 Jeruk	143.0	518.8	518.8	628.8	628.8	689.5	944,4
b.3 Mangga	27,203.0	37,922.7	63,961.9	78,706.7	78,706.7	83,104.5	103.902,5



Komoditas (Ton)	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
b.4 Pepaya	515.8	848.6	848.6	2,017.8	2,017.8	6,829.9	11.449,9
b.5 Pisang	20,093.0	19,513.5	19,513.5	28,255.5	28,255.5	31,312.3	34.217,6
b.6 Belimbing	378.0	539.9	539.9	692.6	692.6	697.8	788,8
b.7 Sawo	176.9	246.1	246.1	991.5	991.5	1,137.0	1.649,6
b.8 Sirsak	78.0	74.4	74.4	567.7	567.7	337.2	451,9
b.9 Buah Naga	1,080.0	1,500.0	1,500.0	1,513.6	1,513.6	305.5	237,3
c. Obat (Ton)	15,802.9	19,365.1	19,365.1	23,325.9	23,325.9	19,709.55	20.599,9
c.1 Kunyit	15,696.7	19,259.3	19,259.3	23,219.2	23,219.2	19,709.25	20.627,3
c.2 Jahe	106.3	105.8	105.8	106.8	106.8	0.3	0,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2025



2.1.4.6.3.3 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Secara kumulatif, jumlah produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan terbesar berasal dari komoditas tanaman tembaku dari produksi 1.628,40 ton di tahun 2023 menjadi 3.248,89 ton di tahun 2024. Sedangkan penurunan produksi paling signifikan terjadi pada komoditas tebu dari produksi 159.622,71 ton di tahun 2023 menjadi 158.589,19 ton di tahun 2024. Komoditas tebu menjadi penyumbang terbesar produksi perkebunan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 2.158 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

No	Komoditas (Ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tembakau	285,00	375,00	900,00	1.628,40	3.248,89
2.	Tebu	159.298,63	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158.589,19
3.	Kelapa	5.052,86	5.050,58	5.049,77	5.044,73	5.044,75
4.	Cengkeh	-	-	-	-	-
5.	Jambu mete	-	-	-	-	-
Jumlah kumulatif		**164.627,49**	**165.216,08**	**165.755,22**	**166.295,84**	**166.882,83**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.4.6.3.4 Produksi Komoditas Unggulan Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan

populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 4,47% dari tahun 2022 sejumlah 5.890.500 ekor menjadi 6.154.200 ekor pada tahun 2023.

Tabel 2.159 Data Populasi Peternakan Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
a	Produksi Daging/KG	11.134.312	11.468.491	11.868.275	12.417.705
1.	Sapi potong	2.434.826	2.521.392	2.521.392	2.487.803
2.	Kambing	846.860	1.072.341	1.139.075	1.222.553
3.	Domba	121.680	141.492	148.278	155.954
4.	Itik	107.150	107.050	107.875	93.528
5.	Ayam ras petelur	332.750	332.970	338.250	314.218
6.	Ayam ras pedaging	5.889.293	5.890.500	6.154.200	6.722.821
7.	Ayam buras	1.301.400	1.300.800	1.359.650	1.396.753
8.	Babi	1.711	2.979	-	2.839
9.	Entok	98.450	98.775	99.359	90.832
10.	Puyuh	30	30	32	39
11.	Burung Dara	162	162	164	210
b	Produksi Susu/KG konversi dari liter	974.390	807.110	645.362,72	588.254
1	Susu sapi	974.390	807.110	645.362,72	588.254
c	Produksi Telur	3.349.487	3.388.314	3.423.288	3.621.217
1.	Telur entok	16.328	38.521	38.598,49	44.319
2.	Telur burung puyuh	12.497	12.574	12.260,40	12.425
3.	Telur ayam buras	270.498	418.120	439.416,57	444.147
4.	Telur ayam ras petelur	2.827.019	2.668.534	2.703.038,91	2.897.544
5.	Telur itik	223.145	250.565	229.973,39	230.460
Jumlah kumulatif		**15.458.189**	**15.663.915**	**15.936.925**	**16.580.434**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian sebagai berikut : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 11.868.275 kg pada tahun 2023. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi ayam ras pedaging dari jumlah produksi sebesar 5.890.500 pada tahun 2022 menjadi 6.154.200 pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

2.1.4.6.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Pemerintah kabupaten gresik sendiri memiliki BUMD yang bergerak dibidang energy yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas *Pipa Dedicated* and *Compresed Natural Gas*. Untuk Gas *Pipa Dedicated* Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk *Compresed Natural Gas* berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG.

Salah satu potensi sumber energi yang sering diremehkan adalah sampah. Melihat dari banyaknya timbunan sampah di kabupaten gresik

sebenarnya sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar PLTSa. Namun hal tersebut tentu saja membutuhkan investasi yang besar. Namun jika hal tersebut bisa terlakasana maka bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus yaitu masalah pengelolaan sampah dan masalah krisis energi.

2.1.4.6.5 Perdagangan

Sebagai daerah yang lebih dikenal dengan daerah industri dikarenakan terdapat ribuan industri mulai dari skala besar *sampai home industry*, Kabupaten Gresik memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan "Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2.160 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

Indikator Sasaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)	-	-35,17	0.06	-35.17	33,34

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2025

Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung dengan cara jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 kemudian hasilnya dibagi dengan nilai neraca perdagangan tahun n-1 barulah dikalikan dengan 100 persen. Pertumbuhan nilai neraca perdagangan tahun 2021 mengalami penurunan -35,17% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,06% dan masih menurun di tahun 2023 sebesar -35,17% kemudian mulai naik pada tahun 2024 sebesar 33,34%.

Tabel 2.161 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	US$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637	414.778.152	1.734.417.711
6	2022	2.263.534.770	880.208.587	1.383.326.183
7	2023	2.389.111.479	1.867.907.344	521.204.134
8	2024	2.521.654.950	2.124.209.489	397.445.461

Sumber: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2024

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara *year on year* menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2024, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 19. Dalam menunjang Indikator Sasaran tersebut didukung dengan indikator dibawahnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.162 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100	100	100	100	0
2	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	-	0,23	6,59	3,03	1,85
3	Pertumbuhan nilai ekspor	1,37	47,13	3,54	-3,78	-12,24
4	Persentase Alat UTTP bertera sah	99,87	100	157,4	141	207

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

2.1.4.6.6 Perindustrian

Industri kecil dan menengah berkembang sebagai motor perekonomian karena berperan sangat signifikan dalam menopang ekonomi kerakyatan nasional, dan tersebar di banyak daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga berperan dalam menekan urbanisasi karena karakteristiknya mandiri dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam rangka pemulihan ekonomi IKM berperan besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan urusan perindustrian melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran "Meningkatkan dan Mengembangkan Produk-produk Kerajinan IKM" dengan indikator sebagaimana berikut :

Tabel 2.163 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2018-2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan IKM	0,77	0,79	0,81	1,02	1,14
2	Persentase IKM yang terdata dan terbina	1,40 (100 IKM)	0,63	3,72	1,61	1,28
3	Persentase IKM yang mendapat fasilitasi	2,06 (145 IKM)	1,28	1.31	1,63	1,28
4	Persentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,62 (6 IKM)	0,31	0,81	1,14	1,24

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2024

Pertumbuhan industri ini dihitung dengan cara jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 kemudian dibagi dengan jumlah IKM tahun n-1 dan dikalikan 100 persen. Jumlah IKM selalu mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun sempat surut pada

masa industri Covid 19, akan tetapi IKM mulai bangkit kembali bersamaan dengan peningkatan pemulihan ekonomi pasca industri. Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) terus menunjukkan tren peningkatan secara *year on year*. Pada tahun 2024 pertumbuhan IKM sebesar 1,14%. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,02%. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah IMKM beserta pembinaan yang pernah dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 2.164 Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2017-2024

No	Tahun	Jumlah IKM	Pembinaan	Merek	Halal
1	2017	7086	702	60	-
2	2018	7207	233	40	5
3	2019	7275	312	126	32
4	2020	7336	261	75	15
5	2021	7389	-	72	40
6	2022	7467	188	75	40
7	2023	7546	135	78	42
8	2024	7626	97	81	45

Sumber: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2024

Peningkatan jumlah IKM dapat menunjukkan perbaikan perekonomian suatu daerah, karena terjadi pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah IKM telah meningkat 4,26% dari tahun dasar 2016. Namun, peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Gresik selama 2016 sampai dengan 2021 tidak berbanding lurus dengan pembinaan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari fluktuasi jumlah pembinaan yang cenderung menurun.

2.1.4.7 Urusan Penunjang

2.1.4.7.1 Sekretariat Daerah

2.1.4.7.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 2.165 Predikat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 – 2024

NO	Tahun	Nilai Sakip
1	2014	CC
2	2015	CC
3	2016	B
4	2017	BB
5	2018	A
6	2019	A
7	2020	A
8	2021	A
9	2022	A
10	2023	A
11	2024	A

Sumber: Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Hasil evaluasi Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 2.166 Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26.33
2	Pengukuran Kinerja	30	23.80
3	Pelaporan Kinerja	15	12.91
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81.59
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: Hasil Evaluasi menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

2.1.4.7.1.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi

terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skroring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Tabel 2.167 Nilai LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas penyusunan LPPD	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik (3,31)	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan perolehan skoring LPPD yang sangat baik. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.168 Indikator Pendukung Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemenuhan data dukung IKK (%)	100	100	100	100	100
2	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	baik
3	Persentase Perda yang diproses (%)	90	100	100	100	200
4	Persentase Perbup yang diproses (%)	90	71	100	100	81,44
5	Persentase Keputusan	90	85	100	91	118,64

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bupati yang diproses (%)					
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan (%)	100	100	100	100	100
7	Nilai evaluasi kinerja TPID	60	67	67	68	84,36
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	3	3,51

Sumber: Sekretariat Daerah Tahun 2024

2.1.4.7.2 Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dengan sasaran ”Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya”. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun 2024 tercapai 95% pada bagian penyusunan regulasi DPRD, 100% pada penganggaran DPRD, dan 282% pada pengawasan DPRD. Lebih lanjut indikator pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.169 Indikator Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	**Indikator**	**Realisasi**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD (%)	73	100	72	72	95

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD (%)	180	100	102	102	100
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD (%)	70	100	143	143	282
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.7.3 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada Tahun 2024 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2024 dengan Sasaran ”Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah” sebagaimana berikut:

Tabel 2.170 Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024

Perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang artinya disetiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras. Indikator Pendukung dalam urusan perencanaan sebagaimana berikut:

Tabel 2.171 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100
2	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100	100	100	100	100
3	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76	76	76	76	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.7.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan indikator utama pertumbuhan capaian inovasi daerah. Pertumbuhan capaian inovasi daerah pada tahun 2024 sebesar 54,43% atau dengan predikat inovatif. Secara lengkap berikut ini merupakan realisasi kinerja pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.172 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	17,65 (40 Inovasi)	47,37 (66 Inovasi)	11,29	20,29
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81,26 (sangat baik)	>81,26 (sangat baik)	>81,26 (sangat baik)	100 (sangat baik)
3	Capaian Indeks Inovasi Daerah	43,04 (inovatif)	48,4 (inovatif)	45,92 (inovatif)	54,43 (inovatif)
4	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	-	-	-	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.7.5 Keuangan

Capaian indikator kinerja urusan keuangan dengan sasaran ”Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah” dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan

capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 2.173 Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kemandirian Fiskal	51,68	53,45	74,27	77,95	86,68

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1,598 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 1,355 triliun dengan Rasio Kemandirian 86,68% atau naik dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan kemampuan Kabupaten Gresik dalam membiayai kegiatan dan program di daerah meningkat. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-90% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau eksternal termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.4.7.6 Inspektorat

Pada Tahun 2024 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2024 dengan sasaran ”Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik” dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.174 Indikator Urusan Inspektorat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tindak Lanjut Selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi (%)	79,00	78,30	80,98	90,02	90,66
2	Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD	81,65	82,75	72,47	85,80	86,37
3	Level Kapabilitas APIP	2,000	3,000	3,000	3,000	3,085
4	Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gresik	3,000	3,000	3,000	3,000	3,343
5	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal (%)	100,00	100,00	94,29	100,00	100,00
6	Persentase Tindak Lanjut Audit Eksternal (%)	74,57	76,26	78,76	87,32	88,41
7	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Nilai Evaluasi Internal AKIP OPD dengan Persentase Minimal A (%)	100	100	79,17	89,13	86,96
9	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.7.7 Kepegawaian

Pada Tahun 2024 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2024 dengan Sasaran ”Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.175 Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	47,00	49,62	53,08	89,71	88,87

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Tabel 2.176 Indikator Urusan Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN dengan penilaian kinerja	100,00	99,90	99,90	99,90	99,00

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	minimal "Baik"					
2	Persentase Kedisiplinan ASN	100,00	95,69	96,50	97,00	96,30
3	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	77,00	66,00	87,00	90,00	93,00
4	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100,00	100,00	80,00	95,00	100,00
5	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	100,00	88,00	88,00	91,00	99,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.4.7.8 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.177 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gresik	81,00	85,19	85,28	89,08	90,50
2	Kebomas	90,00	91,30	82,63	82,63	87,84
3	Manyar	90,00	90,19	88,68	88,68	92,23

No	Indikator Sasaran	Nilai SKM				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Cerme	90,83	90,83	82,32	82,32	88,88
5	Duduksampeyan	88,15	89,01	89,01	89,01	92,92
6	Wringinanom	85,00	97,36	92,00	92,00	99,99
7	Sidayu	90,00	98,90	84,83	98,77	98,02
8	Ujung Pangkah	90,00	97,67	96,55	96,40	96,50
9	Panceng	90,00	98,66	84,74	88,11	95,95
10	Driyorejo	80,00	95,36	88,40	90,70	93,25
11	Menganti	91,00	86,49	83,31	93,56	92,92
12	Kedamean	-	91,53	82,18	85,90	98,87
13	Sangkapura	-	92,00	82,71	100,00	92,67
14	Balongpanggang	98,00	98,00	99,00	97,00	89,73
15	Benjeng	75,61	79,53	84,41	96,25	88,98
16	Bungah	79,60	98,00	87,55	88,86	93,04
17	Dukun	89,91	92,64	92,64	92,20	86,77
18	Tambak	85,00	90,00	88,24	100,00	95,29

Sumber: Bagian Ortala Setda. Kabupaten Gresik Tahun 2025

2.1.4.7.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2024, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 2.178 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	81,83	100,00	33,33	10,00	16,60

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 6,60%, dengan capaian 16,60% dari target tahun 2024. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Gresik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Rentra Perubahan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, indikator sasaran menjadi persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial. Nilai SAKIP Kesbangpol mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 3,34%, dengan capaian 82,16% dari target tahun 2024. Persentase ketercapaian sasaran program OPD, persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, persentase Target Partisipasi Masyarakat, persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar, persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dan persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa memiliki nilai yang tetap di tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2024.

Tabel 2.179 Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Satuan	100	100	100	100	100

No	Indikator	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
2	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100	100	100	100	100
4	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	100	100	100	100
5	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM

terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.5.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Hal ini mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2023 dan 2024 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan sekolah. Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas. Tahun 2024 capaian SPM urusan Pendidikan Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut.

Tabel 2.180 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 - 2024

No	SPM		Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.142	1.579	35.928	38.156
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	125.857	1.097	163.241	164.451

No		SPM	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
		(SD/MI/SMP/MTs)				
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	937	12	1.243	1.137

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2024

2.1.5.2 Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.181 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 - 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	19.298	18.856	18.437	16.166
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (difasilitas kesehatan)	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	18.941	18.751	18.678	16.687

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	18.901	18.602	18.415	16.585
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	84.528	18.602	88.337	71.151
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sd Kelas 9)	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	108.414	162.652	178.412	175.618
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun)	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	121.053	369.351	855.839	921.721
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (>60 Tahun)	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	78.443	90.501	151.544	164.175
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (>=15 Tahun)	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	46.862	98.180	220.546	97.053
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (>=15 Tahun)	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	40.004	45.284	48.366	48,882
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan	2.520	2.102	2.215	2,515

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
		Kesehatan				
11	Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	7.809	16.416	18.112	24.389
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) =HIV	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	13.826	22.613	28.828	21.244

2.1.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut

rincian capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.182 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	838.005	246.191	55.160	39.367
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	730.761	390.150	6.370	2.818

2.1.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.183 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	-	4	41	3.468
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	5	141	0

2.1.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2024 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.184 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi 2021
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu	76
3	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Kabupaten yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan	1.314.895

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi 2021
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	442

Tabel 2.185 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2022 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/kota	1.311.215	5.186	997
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71.200	137.763	462.807
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaam terhadap bencana	Jumah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.674	42.770	566
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	297.256	381.421	213.625
5	Pelayanan Penyelamatan	Jumlah Warga Kabupaten yang	582	580	580

No	Pelayanan Dasar	Ouput	Realisasi		
			2022	2023	2024
	dan Evakuasi Korban Kebakaran	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran			

Tabel 2.186 Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2024

No	Output	Realisasi
		2024
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	43
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaa	33
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	242
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2
5.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1
6.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	462.087
7.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	462.087
8.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2
9.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	81
10.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	566

No	Output	Realisasi 2024
11.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1
12.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	213.625
13.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3
14.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0
15.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	213.625
16.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	173
17.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	2
18.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	425
19.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5
20.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1
21.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2

2.1.5.6 Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.187 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	1.442	555	737	6.309
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	7.012	13.953	6.877	7.351
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	28.977	19.196	17,825	19.529
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis	300	1.024	101	224

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
	dan pengemis diluar panti	yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				
5.	Perlindnungan dan jaminnan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	6.419	2.532	5,545	9.829

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gresik dan Kinerja keuangan pada periode 2021-2024 berpedoman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut ketentuan di atas, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD 2020-2024

Kinerja pelaksanaan APBD pada periode 2021-2024 didasarkan pada struktur APBD yang merupakan satu kesatuan terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
b. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;
   (1) Pajak daerah;
   (2) Retribusi daerah;
   (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan Transfer;
   (1) Transfer Pemerintah Pusat;
      1) Dana perimbangan;
      2) Dana insentif daerah;
      3) Dana otonomi khusus;
      4) Dana keistimewaan; dan
      5) Dana desa.
   (2) Transfer antar-daerah.
      1) Pendapatan bagi hasil;
      2) Bantuan keuangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   (3) Hasil kerja sama daerah;
   (4) Jasa giro;
   (5) Hasil pengelolaan dana bergulir;

(6) Pendapatan bunga;
(7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
(8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
(9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(11) Pendapatan denda pajak daerah;
(12) Pendapatan denda retribusi daerah;
(13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(14) Pendapatan dari pengembalian;
(15) Pendapatan dari BLUD; dan
(16) Pendapatan lainnya sesuai

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perunndang-undangan sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan umum;

b. Ketertiban dan ketentraman;
c. Ekonomi;
d. Lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum;
f. Kesehatan;
g. Pariwisata dan budaya;
h. Pendidikan; dan
i. Perlindungan sosial.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi;

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   (1) belanja pegawai;
   (2) belanja barang dan jasa;
   (3) belanja bunga;
   (4) belanja subsidi;
   (5) belanja hibah; dan
   (6) belanja bantuan sosial.

b. Belanja modal;

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga;

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

   (1) Belanja bagi hasil; dan
   (2) Belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan;
d. Pemberian pinjaman daerah;
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pelaksanaan APBD pada periode 2021-2024 secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.188 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pendapatan	**2.939.477.566.194**	**3.133.574.194.041**	**3.366.654.984.393**	**3.416.390.957.965**	**3.730.420.012.926**
1. Pendapatan Asli Daerah	924.657.913.563	1.031.387.734.236	1.191.799.202.154,29	1.171.022.355.999	1.385.028.684.601
2. Pendapatan Transfer	1.331.644.546.291	1.995.151.051.675	2.154.340.660.571	2.241.478.601.966	2.345.205.328.325
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	683.175.106.340	107.035.408.130	20.515.121.668	3.890.000.000	186.000.000
b. Belanja	**3.095.541.249.535**	**3.192.751.693.289**	**3.551.253.716.920**	**3.418.637.234.689**	**3.695.507.021.522**
1. Belanja Operasi		**2.107.828.823.192**	**2.336.052.115.276**	**2.202.478.442.331**	**2.495.363.606.434**
a. Belanja Pegawai		944.573.454.546	978.449.069.438	1.009.787.854.449	1.085.231.199.034
b. Belanja Barang dan Jasa		867.782.534.353	1.077.667.277.561	868.397.712.028	1.011.011.166.180
b. Belanja Bunga		-	-	-	964.120.370
c. Belanja Subsidi		-	-	-	-
d. Belanja Hibah		273.451.594.291	255.072.373.102	303.819.808.882	382.505.675.850
e. Belanja Bantuan Sosial		22.021.240.002	24.863.395.175	20.473.066.972	15.651.445.000
2. Belanja Modal		**298.579.850.433**	**310.157.730.143**	**431.340.278.246**	**424.418.337.238**
a. Tanah		21.417.109.595	18.343.184.523	11.021.176.466	1.727.306.005
b. Peralatan dan Mesin		111.170.853.408	102.990.160.803	123.664.589.654	86.126.274.741
c. Gedung dan Bangunan		55.196.329.005	36.726.692.945	149.832.834.297	118.126.274.741
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan		105.085.089.741	147.378.850.813	133.679.243.538	208.508.996.188

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
e. Aset Tetap Lainnya		5.590.360.432	4.637.798.060	10.702.434.291	8.617.485.563
f. Aset Lainnya		120.108.250	81.043.000	2.440.000.000	1.312.000.000
3. Transfer		**756.658.802.900**	**905.043.871.500**	**783.635.386.391**	**775.725.077.850**
Belanja Bagi Hasil		76.046.420.100	66.996.357.000	96.552.366.600	115.413.727.850
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		64.311.156.800	61.956.505.000	96.552.366.600	115.413.727.850
b. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		11.735.263.300	5.039.852.000	-	-
c. Bantuan Keuangan		680.612.382.800	838.047.514.500	687.083.019.791	660.311.350.000
(Defisit)	(156.063.683.341)	(59.177.499.248)	(187.423.368.434)	(2.246.276.725)	
c. Pembiayaan Netto :	**462.004.151.544**	**305.955.960.203**	**246.425.903.889**	**79.048.460.455**	**56.227.858.730**
1. Penerimaan	462.004.151.544	305.955.960.203	246.425.903.889	79.048.460.455	76.377.858.730
2. Pengeluaran	0	-	-	-	20.150.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	246.778.460.955,35	246.425.903.889,72	76.802.183.730,47	-

Sumber : APBD Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, 2021, 2022, 2023

Tabel 2.189 Neraca Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Aset**	**6.219.174.906.927**	**6.193.948.015.545**	**6.145.239.675.306**	**7.010.685.151.285**	**7.244.064.023.052**
1.1.	Aset Lancar	525.252.631.128	482.789.945.627	252.382.540.596	290.570.208.120	303.288.760.006
1.1.1.	Kas	305.986.717.598	246.781.746.879	62.738.375.008	76.370.858.731	89.071.896.727
1.1.2.	Piutang	109.853.391.491	177.005.950.201	140.307.191.509	160.663.422.735	163.959.236.849
1.1.3.	Persediaan	109.412.522.038	59.002.248.548	49.336.974.079	53.535.926.655	50.257.626.430
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**265.399.783.105**	**243.694.053.876**	**225.159.882.425**	**173.994.497.911**	**113.680.151.264**
1.2.1.	Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-
1.2.2.	Investasi Permanen	265.399.783.105	243.694.053.876	225.159.882.425	173.994.497.911	113.680.151.264
1.3.	Aset Tetap	4.906.802.112.974	4.945.028.770.810	5.113.962.591.347	5.619.363.537.057	5.880.603.454.829
1.4.	Aset Lainnya	521.720.379.720	522.435.245.233	553.734.660.938	926.756.908.196	946.491.656.953
2.	**Kewajiban**	**28.437.693.898**	**46.104.570.479**	**60.890.139.733**	**281.779.469.063**	**75.718.521.969**
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	28.437.693.898	46.104.570.479	60.890.139.733	281.779.469.063	75.718.521.969
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
3.	**Ekuitas**	**6.190.737.213.029**	**6.147.843.445.067**	**6.084.349.535.572**	**6.728.905.682.222**	**7.168.345.501.083**

Sumber : APBD Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, 2021, 2022, 2023

Tabel 2.190 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Gresik

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	**Aset**	**-0,4%**	**-0,8%**	**14,1%**	**3,3%**
1.1.	Aset Lancar	-8,1%	-47,7%	15,1%	4,4%
1.1.1.	Kas	-19,3%	-74,6%	21,7%	16,6%
1.1.2.	Piutang	61,1%	-20,7%	14,5%	2,1%
1.1.3.	Persediaan	-46,1%	-16,4%	8,5%	-6,1%
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**-8,2%**	**-7,6%**	**-22,7%**	**-34,7%**
1.2.1.	Investasi Nonpermanen				
1.2.2.	Investasi Permanen	-8,2%	-7,6%	-22,7%	-34,7%
1.3.	Aset Tetap	0,8%	3,4%	9,9%	4,6%
1.4.	Aset Lainnya	0,1%	6,0%	67,4%	2,1%
2.	**Kewajiban**	**62,1%**	**32,1%**	**362,8%**	**-73,1%**
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	62,1%	32,1%	362,8%	-73,1%
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang				
3.	**Ekuitas**	**-0,7%**	**-1,0%**	**10,6%**	**6,5%**

Sumber : APBD Tahun 2024 dan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, 2021, 2022, 2023

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024 dijabarkan dalam pencapaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah terhadap target yang ditentukan dalam Peraturan Daerah perihal APBD tahun berkenaaan. Analisa penjelasan kinerja pengelolaan keuangan masa lalu dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp 3.291.997.122.262,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.133.574.194.041 atau mencapai 95.19%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 89.41%, capaian Pendapatan Transfer mencapai 98.12% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 101.51%. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Rp 3.192.751.693.289,33 atau mencapai 88,74% dari Target Rp 3.597.937.590.465,00. kebijakan pembiyaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp305.940.468.203. Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 dapat terealisasi Rp305.955.960.203,27 dengan Rp0 pengeluaran pembiayaa
2. Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD ditargetkan sebesar Rp3.677.070.809.274 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.366.654.784.393 atau mencapai 92%. Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 86%. capaian Pendapatan Transfer mencapai 95% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah melampauai target pendapatan dengan capaian 130%. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Rp3.554.078.352.827 atau mencapai 90,20% dari Target Rp3.940.289.380.229. Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 (tahun sebelumnya) dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp246.425.903.889 dari target sebesar Rp263.218.570.955 atau 93,62% dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi) dari target Rp5.022.890.000. Adapun

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp59.003.780.655.

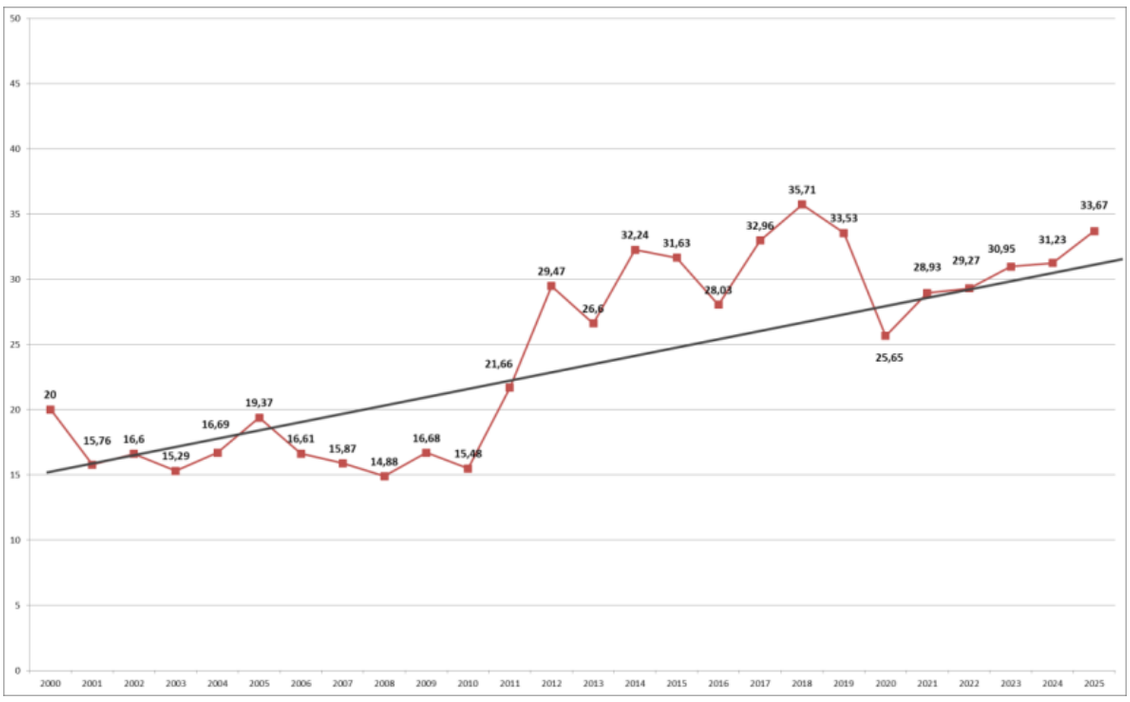
3. Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD ditargetkan sebesar Rp3.873.145.748.086,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.416.390.957.965,09 atau mencapai 88.20%. Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 73,92%. capaian Pendapatan Transfer mencapai 97,92% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah melampaui target pendapatan dengan capaian >100%. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Rp3.418.637.235.920,96 atau mencapai 86.50% dari Target Rp3.952.148.283,541. Realisasi belanja Operasi dari target Rp2.421.801.655.328,00 dapat terselesaikan sebesar Rp2.202.478.442.330,96 atau 90.94%. Belanja Modal dari target 642.097.658.539.00 terealisasi sebesar Rp431.340.278.246,35 atau 67.18%. Belanja Tidak Terduga dari Target Rp7.759.464.674,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.183.127.722,00 atau 15.25%. Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 (tahun sebelumnya) dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp78.862.135.455,34 dari target sebesar Rp79.048.460.455.00 atau 99.76% dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi dari target Rp 0 Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp76.802.183.730,47.

Kinerja pelaksanaan Tahun 2024 masih berjalan dalam masa penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD. Pendapatan daerah Tahun 2024 mencapai total sebesar Rp 3.730.420.012.926,00. Sumber-sumber utama pendapatan daerah ini terbagi menjadi beberapa kategori antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 1.385.028.684.601,00; Pendapatan Transfer: Rp 2.345.205.328.325,00. Total belanja daerah adalah Rp 3.695.507.021.522,00 yang terbagi menjadi beberapa jenis belanja yaitu Belanja Operasi: Rp 2.495.363.606.434,00; Belanja Modal: Rp 424.418.337.238,00; Belanja Transfer: Rp 775.725.077.850,00. Pembiayaan daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan: Rp 76.377.858.730,00;

Pengeluaran Pembiayaan mencapai Rp 20.150.000.000,00 dengan Pembiayaan Netto: Rp 56.227.858.730,00

2.2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kerangka pendanaan periode 2021-2026 melandasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 sangat dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang berpengaruh secara masing-masing terhadap perekonomian global dan Indonesia. Perlambatan perekonomian Indonesia pada Tahun 2020 telah diperkirakan oleh berbagai lembaga dunia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4 – 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 %, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.



Gambar 2.42 Pola Siklus Bisnis Kabupaten Gresik Tahun 2021-204

Selain faktor pandemi, Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gresik pada periode 2021-2026 mempertimbangkan siklus bisnis.

Walaupun fluktuasi *business activity* telah lama diketahui, yaitu sejak masa merkantilis, namun belum ada pemikir yang mencoba menganalisisnya secara sistematis. Baru pada sekitar Tahun 1890, para heterodox theorists mencobanya. Clement Juglar (1819-1905), tidak membangun business *cycles theory* secara deduktif, tetapi menggunakan material historis dan statistic, ia membangun business *cycles theory* dengan pendekatan induktif. Kontribusi utamanya adalah pemikirannya bahwa business cycles merupakan suatu hasil yang bukan merupakan akibat kekuatan yang bersumber di luar suatu sistem ekonomi tetapi dari dalam sistem itu sendiri. Menurutnya, *business cycles* terdiri dari tiga fase yang akan terus menerus berulang, yaitu *prosperity* (kemakmuran), *crisis* , *dan liquidation.*

Kapasitas riil Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Wajib

   Pemenuhan belanja wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:

   (1) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

   (2) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

   (3) Pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;

   (4) Pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;

   (5) Ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Prioritas I : Program Nawa karsa

   Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari.

3. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

   Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam hal pembangunan daerah, pemerintah daerah selalu mempunyai berbagai mekanisme untuk sampai pada kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak. Dengan begitu pemerintah juga menyiapkan beberapa regulasi atau skema kerjasama untuk mencapai pembangunan tersebut.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Periode 2024-2029

Proyeksi keuangan Kabupaten Gresik periode 2024-2029 memperhatikan berbagai dimensi mencakup siklus bisnis, perkembangan perekonomian regional , rencana pengambangan infrastruktur strategis yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli Daerah, kebijakan pendapatan transfer dari pemerintah Pusat, dan berbagai dimensi lainnya. *Pertimbangan pertama,* penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemerintah daerah diharapkan mulai melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Cakupan perubahan pada undang-undang HKPD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah; transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah dan sinergi fiskal pajak daerah dan retribusi daerah; restrukturisasi jenis pajak daerah yang meliputi penyelarasan objek pajak antara pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan pemantauan pemungutan pajak oleh daerah, dan

kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung kemudahan berusaha; pemberian sumber-sumber baru pajak daerah yang terdiri dari opsen pajak PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), opsen pajak akan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota; penyederhanaan jenis retribusi; dan harmonisasi dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Beberapa perubahan pada jenis pajak Kabupaten/Kota yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Tabel 2.191 Potensi Pajak dan Retribsusi Daerah dalam UU HKPD

No	Potensi	Keterangan
	Pajak	
1.	PBB-P2	Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak
2.	BPHTB	Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
3.	PBJT	Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/ atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4.	Pajak Reklame	Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
5.	PAT	Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
6.	Pajak MBLB	Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
7.	Pajak Sarang	Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah

No	Potensi	Keterangan
	Burung Walet	pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
8.	Opsen PKB	Opsen PKB sebesar 66% dihitung dari besaran Pajak terutang (Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor).
9.	Opsen BBNKB	Opsen BBNKB sebesar 66% dihitung dari besaran Pajak terutang (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha)
	Reribusi	Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
a.	Retribusi Jasa Umum	Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: a. Pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas
f.	Retribusi Jasa Usaha	Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. Pelayanan jasa kepelabuhanan; g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan

No	Potensi	Keterangan
		peraturan perundang-undangan.
g.	Retribusi Perizinan Tertentu	Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi a. Persetujuan bangunan gedung; b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan c. Pengelolaan d. pertambangan rakyat. e.

Pertimbangan pertama, makroenomi Daerah. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. kontras dengan makroekonomi nasional yang mengamati ekonomi suatu negara secara keseluruhan, makroekonomi daerah fokus pada variabel ekonomi yang signifikan untuk wilayah tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal atau moneter yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan drastis sebesar -3,68 persen, dipengaruhi oleh dampak global pandemi COVID-19 yang meredam aktivitas ekonomi di Indonesia dan secara luas. Penurunan tersebut mencerminkan berkurangnya produksi barang dan jasa, investasi yang melambat, konsumsi yang turun, serta gangguan dalam rantai pasokan dan perdagangan. Namun, pada tahun 2021, terjadi perbaikan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,79 persen. Perbaikan ini menunjukkan pemulihan yang kuat dari kondisi sebelumnya, didorong oleh peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga yang membaik, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, Kabupaten Gresik mencatat pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,62 persen. Meskipun lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan signifikan tahun sebelumnya (7,38 persen dari tahun 2021 ke 2022), pertumbuhan ini menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,98 persen, sementara sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

berhasil pulih dengan pertumbuhan dari -2,15 persen menjadi 3,78 persen. Di sektor pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar, menunjukkan kepercayaan yang kembali dari masyarakat dalam menggunakan penghasilannya. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 4,79% yang artinya mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya.

Tabel 2.192 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Periode 2021-2024

Uraian	Pertumbuhan			Rerata Geomaterik Pertumbuhan Periode 2021-2024
	2022	2023	2024	
Pendapatan Daerah	7,44%	1,48%	14,61%	5,44%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15,55%	-1,74%	36,15%	-9,94%
Pajak Daerah	8,58%	1,21%	30,30%	6,80%
Retribusi Daerah	45,14%	-3,79%	169,17%	-30,69%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,92%	2,23%	-5,81%	-5,91%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29,16%	-8,92%	12,95%	-14,99%
Pendapatan Transfer	7,98%	4,04%	3,55%	4,86%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10,16%	0,87%	3,94%	3,27%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	194,77%	-59,47%	1,48%	-25,80%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-80,83%	-89,61%	-100,00%	-86,85%
Belanja Daerah	11,32%	-3,73%	13,71%	-8,39%
Belanja Operasi	10,83%	-5,71%	18,69%	-10,49%
Belanja Pegawai	3,59%	3,20%	11,78%	5,13%
Belanja Barang Dan Jasa	24,19%	-19,52%	23,29%	-22,24%
Belanja Bunga		-		0,00%
Belanja Subsidi		-		0,00%
Belanja Hibah	-6,72%	19,11%	28,68%	-15,59%
Belanja Bantuan Sosial	12,91%	-17,65%	15,47%	-15,27%
Belanja Modal	3,88%	39,07%	-11,75%	-12,11%
Belanja Modal Tanah	-14,35%	-39,92%	44,78%	29,49%
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-7,36%	20,07%	-40,51%	20,76%



Uraian	Pertumbuhan			Rerata Geomaterik Pertumbuhan Periode 2021-2024
	2022	2023	2024	
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-33,46%	307,97%	-8,66%	48,47%
Belanja Modal Jalan Jaringan Dan Irigasi	40,25%	-9,30%	7,17%	-13,89%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-17,04%	130,76%	-3,59%	-17,20%
Belanja Modal Aset Lainnya	-32,53%	2910,75%	-75,16%	128,86%
Belanja Tidak Terduga	-90,48%	-58,11%	745,22%	157,66%
Belanja Tidak Terduga	-90,48%	-58,11%	745,22%	157,66%
Belanja Transfer	19,61%	-13,41%	12,63%	-14,92%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	-3,66%	55,83%	50,14%	17,63%
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	-57,05%	-	-100,00%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan Daerah	23,13%	-18,01%	9,99%	-16,09%
Pembiayaan Daerah	-76,07%	-100,00%		0,00%
Penerimaan Pembiayaan	-19,46%	-68,00%	-90,62%	-49,31%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-19,46%	-76,13%	-87,43%	-50,59%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-100,00%			0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		188,49%		0,00%
Pengeluaran Pembiayaan		-100,00%		
Pembentukan Dana Cadangan		-68,00%	-64,18%	0,00%
Penyertaan Modal Daerah		-76,13%	-100,00%	0,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			-100,00%	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah				0,00%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - Penyertaan Modal				0,00%
Pembiayaan Netto	-19,46%	-68,00%	-126,44%	-55,10%
Sisa Lebih	-1,40%	29,85%	0,00%	0,00%

Uraian	Pertumbuhan			Rerata Geomaterik Pertumbuhan Periode 2021-2024
	2022	2023	2024	
Pembiayaan Anggaran				

Kebijakan fiskal merujuk pada keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pajak, pengeluaran publik, dan pembiayaan. Kebijakan fiskal di sektor pendapatan yang dirumuskan pada periode 2021-2024 adalah:

a. Penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
b. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah.
c. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
d. Optimalisasi penerimaan transfer, dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
e. Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

Ditinjau dari pertumbuhan kerangka Pendanaan, Pendapatan daerah Kabupaten Gresik menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dengan rerata 5,44% dengan puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2024. Akan tetapi pada tahun ini masih dalam pelaksanaan sehingga realisasi Tahun 2024 dapat dirumuskan denga lebih akuntabel pada Tahun 2025. Ditinjau dari pendapatan Asli Daerah selama periode ini, rerata pertumbuhan justru mengalami penurunan 9,94%. Sedangkan pendapatan transfer yang menjadi tulang punggun pendanaan daerah mengalami rerata pertumbuhan 4,86%,

Kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran publik ditinjau dari kebijakan belanja. Kebijakan belanja pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Kabupaten Gresik ditelaah sebagai berikut :

a. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS dan Pemenuhan Belanja Operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif

b. Belanja yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti belanja arahan dari pusat atau provinsi tentang anggaran fungsi Pendidikan, fungsi Kesehatan, Infrastruktur, SPM, Pilkada, Dana Transfer ke Desa
c. Belanja prioritas daerah Nawa Karsa meliputi Gresik Mapan untuk Infrastruktur Jalan dan Pengendalian Banjir, Gresik Seger, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Sehati, Gresik Barokah untuk Pengentasan Kemiskinan, Gresik Cerdas untuk Pendidikan, dan Gresik Sehati untuk Persampahan
d. Belanja untuk meningkatkan pendapatan
e. Belanja pelaksanaan urusan dan penunjang pencapaian program pemerintah daerah melalui Operasional, Hibah, Bansos, BK sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

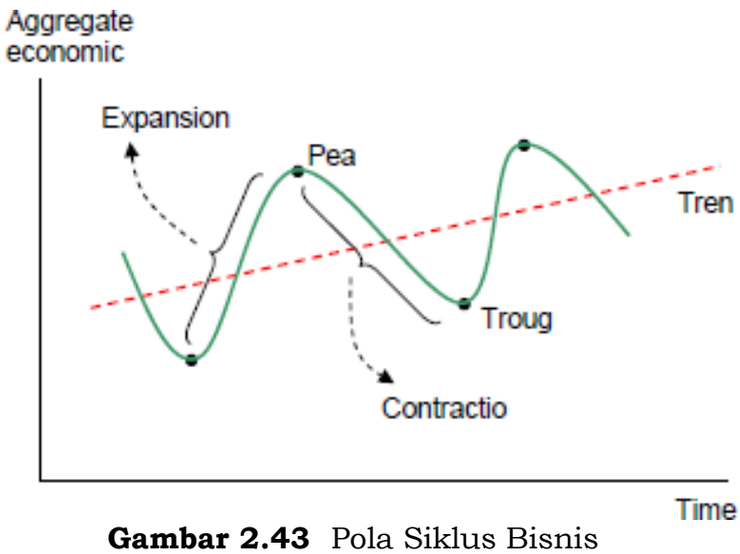
Selama pelaksanaan anggaran pada tahun 2021-2024, Kabupaten Gresik melaksanakan beberapa kali *refocusing* anggaran pada tiap tahun anggaran berkenaan. Praktek *refocusing* anggaran mengindikasikan beberapa potensi kelemahan dalam manajemen anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.

a. Ketidakpastian Perencanaan. *Refocusing* anggaran secara berulang menunjukkan bahwa perencanaan awal yang dilakukan tidak memadai atau tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam estimasi pendapatan, perubahan prioritas kebijakan, atau kurangnya koordinasi antara unit-unit pemerintahan dalam menetapkan anggaran.
b. Kurangnya Responsibilitas. Frekuensi *refocusing* anggaran dapat mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam manajemen anggaran. Pemerintah daerah seharusnya mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan kebutuhan atau kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi anggaran, sehingga dapat menghindari perubahan anggaran yang berulang.
c. Penanganan Krisis Keuangan. *Refocusing* anggaran secara berlebihan juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mungkin mengalami kesulitan keuangan atau menghadapi defisit yang tidak terduga. Ini bisa mencerminkan kurangnya kesiapan dalam mengelola keuangan publik secara efektif, termasuk dalam merencanakan sumber daya dan menghadapi risiko finansial.

d. Pengaruh Terhadap Stabilitas Ekonomi. Praktek *refocusing* anggaran yang sering dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Ini karena perubahan yang sering dalam alokasi anggaran bisa membingungkan dan mempengaruhi kepercayaan stakeholders terhadap konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah.
e. Pengaruh Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Jika *refocusing* anggaran terlalu sering, hal ini dapat mengganggu program-program dan layanan publik yang direncanakan. Perubahan yang berulang dalam anggaran dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat.

Dalam keseluruhan, *refocusing* anggaran yang sering menunjukkan bahwa terdapat potensi kelemahan dalam manajemen anggaran dan perencanaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran guna mengurangi ketidakpastian dan risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kebijakan fiskal.

Selain memperhatikan potensi pendapatan Daerah dan makroekonomi Daerah, proyeksi pendanaan dalam APBD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan siklus bisnis. Siklus bisnis dalam pendekatan Keynessian menekankan peran permintaan agregat dalam menentukan siklus bisnis. Fluktuasi dalam pengeluaran konsumen, investasi bisnis, dan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan perubahan dalam output ekonomi. Selanjutnya, pendekatan monetarist menekankan peran kebijakan moneter dan fluktuasi dalam jumlah uang beredar sebagai penyebab utama siklus bisnis. *Real Business Cycle Theory* menekankan bahwa fluktuasi ekonomi terutama disebabkan oleh perubahan dalam teknologi dan produktivitas, bukan oleh perubahan dalam permintaan agregat atau kebijakan moneter. Terakhir, *Financial Cycle Theory* menyoroti peran lembaga keuangan dan kredit dalam mempengaruhi siklus bisnis. Krisis keuangan dan perubahan dalam kondisi kredit dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi yang signifikan.



Gambar 2.43 Pola Siklus Bisnis

Berdasarkan pertimbangan dalam potensi keuangan, makroekonomi Daerah, dan siklus bisnis maka proyeksi pendapatan Kabupaten Gresik secara ringkas dirumuskan secara moderat sebagaimana berikut:

Tabel 2.193 Tabel Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

						URAIAN	%	2026	2027	2028	2029	2030
4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PENDAPATAN DAERAH**	**100,00%**	**3.901.196.610.593**	**4.000.998.592.250**	**4.085.052.289.927**	**4.172.936.357.832**	**4.310.610.994.524**
4	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**40,94%**	**1.597.271.716.593**	**1.697.073.698.250**	**1.781.127.395.927**	**1.869.011.463.832**	**2.006.686.100.524**
4	1	01	0	0	0	Pajak Daerah	28,82%	1.124.347.791.476	1.199.349.124.934	1.251.061.672.592	1.317.709.086.643	1.435.808.902.231
4	1	02	0	0	0	Retribusi Daerah	9,65%	376.499.000.552	400.184.526.075	431.268.215.888	450.747.340.995	468.768.202.538
4	1	03	0	0	0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,31%	12.054.327.489	12.307.842.897	12.498.172.535	12.886.809.356	12.962.757.429
4	1	04	0	0	0	Lain-lain PAD yang Sah	2,16%	84.370.597.076	85.232.204.344	86.299.334.911	87.668.226.837	89.146.238.326
4	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PENDAPATAN TRANSFER**	**59,06%**	**2.303.924.894.000**	**2.303.924.894.000**	**2.303.924.894.000**	**2.303.924.894.000**	**2.303.924.894.000**
4	2	01	0	0	0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	55,07%	2.148.430.324.000	2.148.430.324.000	2.148.430.324.000	2.148.430.324.000	2.148.430.324.000
4	2	02	0	0	0	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3,99%	155.494.570.000	155.494.570.000	155.494.570.000	155.494.570.000	155.494.570.000
						BELANJA DAERAH	**100,00%**	**3.896.829.801.719**	**3.968.317.589.106**	**4.049.911.253.468**	**4.158.703.825.149**	**4.282.874.661.260**
						BELANJA OPERASI	**62,28%**	**2.426.945.600.510**	**2.471.468.194.495**	**2.522.284.728.660**	**2.590.040.742.303**	**2.667.374.339.032**
5	1	01				Belanja Pegawai	30,00%	1.169.048.940.516	1.190.495.276.732	1.214.973.376.040	1.247.611.147.545	1.284.862.398.378
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	24,05%	937.187.567.313	954.380.380.180	974.003.656.459	1.000.168.269.948	1.030.031.356.033
5	1	03				Belanja Bunga	0,02%	779.365.960	793.663.518	809.982.251	831.740.765	856.574.932
5	1	05				Belanja Hibah	7,85%	305.901.139.435	311.512.930.745	317.918.033.397	326.458.250.274	336.205.660.909

			URAIAN	%	2026	2027	2028	2029	2030
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	0,36%	14.028.587.286	14.285.943.321	14.579.680.512	14.971.333.771	15.418.348.781
			BELANJA MODAL	**16,20%**	**631.286.427.878**	**642.867.449.435**	**656.085.623.062**	**673.710.019.674**	**693.825.695.124**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	2,32%	90.406.451.400	92.064.968.067	93.957.941.080	96.481.928.743	99.362.692.141
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,06%	119.242.991.933	121.430.518.227	123.927.284.356	127.256.337.050	131.055.964.635
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,27%	166.394.632.533	169.447.161.055	172.931.210.523	177.576.653.334	182.878.748.036
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6,25%	243.551.862.607	248.019.849.319	253.119.453.342	259.918.989.072	267.679.666.329
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,30%	11.690.489.405	11.904.952.767	12.149.733.760	12.476.111.475	12.848.623.984
			BELANJA TIDAK TERDUGA	**0,52%**	**20.263.514.969**	**20.635.251.463**	**21.059.538.518**	**21.625.259.891**	**22.270.948.239**
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	0,52%	20.263.514.969	20.635.251.463	21.059.538.518	21.625.259.891	22.270.948.239
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**21,00%**	**818.334.258.361**	**833.346.693.712**	**850.481.363.228**	**873.327.803.281**	**899.403.678.865**
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	3,82%	148.858.898.426	151.589.731.904	154.706.609.882	158.862.486.121	163.605.812.060
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	17,18%	669.475.359.935	681.756.961.808	695.774.753.346	714.465.317.161	735.797.866.804
			Defisit/Silpa (Rp)		4.366.808.874,39	32.681.003.144,16	35.141.036.459,00	14.232.532.683,30	27.736.333.264,38
			Defisit/Silpa (%)		0,11%	0,82%	0,87%	0,34%	0,65%
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		**-4.366.808.874**	**12.949.510.773**	**86.376.387.731**	**235.154.439.615**	**224.602.194.097**

			URAIAN	%	2026	2027	2028	2029	2030
6	**1**		**Penerimaan Pembiayaan**		**-**	**55.557.255.206**	**131.805.017.077**	**260.184.933.815**	**247.231.504.993**
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			55.557.255.206	131.805.017.077	260.184.933.815	247.231.504.993
6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0
6	**2**		**Pengeluaran Pembiayaan**		**4.366.808.874**	**42.607.744.433**	**45.428.629.346**	**25.030.494.200**	**22.629.310.896**
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah		4.366.808.874	32.681.003.144	35.141.036.459	14.232.532.683	27.736.333.264
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0	0	0	0	0
6	3		SILPA		0	0	0	0	0

Tabel 2.194 Tabel Proyeksi Kerangka Pendanaan Mandatory Spending Tahun 2026-2030

	2026		2027		2028		2029		2030	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
PENDIDIKAN	26,3%	1.024.109.647.185,00	27,1%	1.054.482.345.895,12	28,1%	1.091.208.239.007,36	28,8%	1.117.970.748.956,97	29,9%	1.163.016.877.053,00
INFRASTRUKTUR	45,2%	1.364.893.073.447,34	46,9%	1.446.411.284.879,16	46,5%	1.468.452.745.116,27	46,5%	1.515.690.037.530,35	47,3%	1.600.283.241.027,89
PENGAWASAN	0,8%	31.915.458.534,33	0,8%	32.861.996.445,51	0,8%	34.068.734.630,10	0,8%	35.775.478.668,39	0,7%	36.867.659.814,33
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,2%	6.283.266.325,01	0,2%	6.469.613.319,72	0,2%	6.707.186.512,98	0,2%	7.043.196.955,37	0,1%	7.258.217.053,16
RISET DAN INOVASI	0,5%	19.505.983.052,97	0,5%	20.004.992.961,25	0,5%	20.425.261.449,64	0,5%	20.864.681.789,16	0,5%	21.553.054.972,62

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kgegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

Tabel 2.195 Permasalahan Pembangunan Prioritas di Kabupaten Gresik

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
1.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir yang memiliki tingkat risiko tinggi sebesar 74%. Potensi bahaya banjir di Kabupaten Gresik sangat besar dengan dampak yang mencakup area seluas 82.809 hektar. Kali Lamong adalah sungai utama di wilayah Gresik dengan Daerah Aliran Sungai sekitar 720 km^2 dan panjang sungai sekitar 103 km. Kabupaten Gresik mencakup sekitar 44% dari DAS Kali Lamong dengan luas sekitar 310,12 km^2. Panjang aliran Kali Lamong di wilayah Gresik sendiri diperkirakan sekitar 58 km. Kali Lamong melewati beberapa daerah seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas, yang semuanya menjadi daerah yang rentan terhadap banjir. Kali Lamong adalah sungai intermittent yang memiliki penampang relatif datar. Sungai ini juga memiliki 34 anak sungai. Keadaan hidrologi DAS Kali Lamong dianggap kritis, dengan aliran sungai mencapai 700 m3/detik selama musim hujan, yang jauh melampaui kapasitas aliran normal sekitar 250 m3/detik. Namun, selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah. Selain bencana hidrometeororlogi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60,12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori sedang dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		pencemaran. Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun menurun terus. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal. Selanjutntya, reklamasi pasca-tambang Semen Indonesia di Gresik menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, proses reklamasi yang rumit, dan aspek sosial-ekonomi. Upaya reklamasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dipulihkan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.
2.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75,35) dan Nasional (75,02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan Nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis a. Dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 0,20% (179 bayi) dibandingkan tahun sebelumnya 103 bayi. Angka kematian Ibu masih mencapai 77,59 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,34 per 1000 kelahiran hidup. Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8,14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara *year on year*, Demam Berdarah *Dengue* meningkat 488 kasus, *Tubercolosis* meningkat 3.404 kasus. b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di bawah

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		rerata nasional (11,04 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di bawah. Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah rerata Jawa Timur (14,56 tahun) ; c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akses ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409. Angka ini naik dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Gender tiap tahun cenderung mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 sebesar 91,01.
3.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan Kemiskinan Multidimensi	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik megalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10,96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa pada tahun 2023 dan 142.390 pada tahun 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat. Kabupaten Gresik adalah wilayah perkotaan yang menjadi *hiterland* Surabaya Metropolitan Area dan berpotensi menyimpang kantong-kantong kemiskinan. Individu yang terjebak dalam kemiskinan kronis sering kali menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin sulit dicapai oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kronis sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses ke peluang kerja yang baik, dan ketidakmampuan untuk

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		berinvestasi dalam usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Selain kemiskinan kronis, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kemiskinan multidimensi. Di Kabupaten Gresik, jika pendidikan dan keterampilan terbatas, maka individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi, memperburuk kemiskinan. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, jika penduduk miskin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk keadaan ekonomi mereka. Selanjutnya, Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia.
4.	Tingkat Pengangguran dan Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19%) dan Nasional (4,91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan. Gresik memiliki banyak perusahaan manufaktur, tetapi penempatan tenaga kerja ke dalam posisi yang sesuai masih merupakan tantangan. Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan yang efektif dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur.
5.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Kemantapan kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 70,74% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah (10,31%). Nilai VC (*Volume-Capacity*) sebesar 52,17% mengindikasikan kategori jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatas konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai *Hinterland* Surabaya Metropolitan Area. Secara spesifik, keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang mempengaruhi daya saing produk dan profitabilitas. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja operasi 65,86 dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		rerata 16,20% per tahun.
6.	Rendahnya Kemandirian Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,20% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20,00% terhadap APBDes. Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57 Bumdes (17,30%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum. Fasilitasi *potential matching* antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal.
7.	Ketidakoptimalan implementasi Smart City	Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 *Smart City* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis Smart City. Dimensi Gresik Smart City menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (smart *governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (s*mart economy),* ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharan lingkungan (*smart environment*). Akan tetapi, pencapaian di setiap dimensi masih belum optimal. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniatur (*miniaturization)*, *big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing)*. Pemerintah daerah belum memiliki keterampilan digital yang memadai (Kegagapan digitalisasi) sehingga menghambat pemanfaatan teknologi informasi yang efektif di ilar *smart city* lainnya. Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal.
8.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023,

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		sebelum sedikit menurun menjadi 85,94 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh. Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022. Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi hingga mencapai 62,87% pada tahun 2024 atau tertinggi sejak 1 (satu) dekade terakhir. Kapasitas fiskal Gresik semakin lesu bahkan pada Tahun 2023, Gresik tidak mendapat Dana Insentif Daerah untuk pertama kalinya sejak 12 (dua belas) tahun berturut-turut yang menunjukkan minimnya inovasi pemerintahan. Pada tahun 2023-2024, ketika Kabupaten/Kota lainnya merangkak pulih dari resesi namun Gresik justru terjerembab dengan tunggakan pembayaran tahun 2022 dan 2023. Gresik harus *refocusing* 30% untuk membayar hutang Pada Tahun 2024, Kapasitas Fiskal Kabupaten Gresik dapat terealisasi sebesar 3.730.420.012.925,76, dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar

No	Permasalahan Prioritas	Analisa
		Rp1.385.028.684.600,76, pendapatan transfer daerah sebesar Rp2.345.205.328.325,00 dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp186.000.000,00

Tabel 2.196 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Fokus dan Urusan Pembangunan di Kabupaten Gresik

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia** Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75,35) dan Nasional (75,02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis a. Dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akses ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan
2.	Pemenuhan Hak Asasi Manusia	Gresik telah mendapatkan apresiasi Kabupaten Peduli HAM. Akan tetapi, terdapat **permasalahan fundamental dalam penegakan HAM** diantaranya : a. Kesadaran yang rendah terhadap HAM menyebabkan pelanggaran HAM sering tidak dilaporkan atau tidak diperhatikan, serta sulitnya membangun budaya penghormatan terhadap HAM di masyarakat. b. Sistem hukum dan peradilan yang lemah, termasuk kurangnya independensi peradilan, korupsi, serta kapasitas yang terbatas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. c. Kurangnya akuntabilitas menyebabkan impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga memicu pelanggaran lebih lanjut. d. Diskriminasi berbasis gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan. e. Konflik berbasis kekerasan domestik, dan kekerasan berbasis gender sering kali

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius. f. Sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun manusia, untuk mendukung program-program penegakan dan perlindungan HAM.
3.	Keadilan dan Kesetaraan Gender	**Indeks Ketimpangan Gender** Kabupaten Gresik pada 2024 mencapai 0,409. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2023 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2024, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan. a. Kesehatan Reproduksi. Meskipun telah ada perbaikan, kesehatan reproduksi masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan akses wanita melahirkan di fasilitas kesehatan yang belum optimal di seluruh wilayah. b. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan. Meskipun persentase perempuan yang berpendidikan SMA ke atas meningkat, masih terdapat ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Banyak perempuan yang belum mendapatkan akses pendidikan tinggi dan pemberdayaan yang memadai. c. Partisipasi Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja masih rendah, dan mereka yang bekerja sering kali menghadapi diskriminasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak. d. Peran dan Keterwakilan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan posisi pengambilan keputusan masih rendah. Perempuan sering kali kurang terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan dan organisasi. e. Akses Terhadap Pelatihan dan Keterampilan. Akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum masih terbatas.
4.	Perekonomian	**Pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Gresik mengalami peningkatan pada tahun 2024 secara *year on year* mencapai 4,79 dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4,62. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Surabaya (5,76%) Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Gresik mencakup dampak pandemi COVID-19, fluktuasi di sektor-sektor kunci, ketergantungan pada sektor industri pengolahan, penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas, serta masalah pada pengeluaran konsumsi.
		Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan laju inflasi yang lebih rendah dari nasional pada tahun-tahun awal, tetapi meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 1,81%. Fluktuasi inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan baik bagi individu maupun bisnis. Kabupaten Gresik menggunakan data inflasi Kota Surabaya karena kurangnya data spesifik untuk Gresik. Ketergantungan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan inflasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik.
5.	Ketimpangan	**Indeks Gini** di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk pembangunan manusia. Kesenjangan pendapatan juga mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini dapat mengurangi mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi rendah sulit meningkatkan taraf hidupnya. Akibatnya, kesenjangan ini bisa menjadi permanen dan menghambat potensi ekonomi individu dan komunitas secara keseluruhan.
		Indeks Williamson di Kabupaten Gresik berada pada kategori Sedang dengan nilai 0,48 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 0,35 pada tahun 2023 dan 2024 Meskipun terjadi sedikit penurunan, nilai ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah masih cukup signifikan. Ketimpangan antar

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		kecamatan mengindikasikan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal distribusi pembangunan dan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Gresik. Kecamatan yang berada dekat dengan Kota Surabaya dan Sidoarjo seperti Kecamatan Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, dan Driyorejo menunjukkan tingkat disparitas tinggi karena adanya pusat infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Sementara kecamatan lainnya, yang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah. Disparitas pendapatan antar daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini dapat mengurangi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya di daerah dengan ketimpangan tinggi
6.	Kemiskinan	**Tingkat Kemiskinan**. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10,96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,79%) dan provinsi (8.57%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 142.390 jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat.
7.	Pengangguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka** (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19%) dan Nasional (4,91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan.
8.	Tata Kelola Pemerintahan	**Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,94 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum stabil dan konsisten, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik belum mampu menembus rentang nilai >70 selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan lemahnya perbaikan kita di 8 (delapan) area perubahan. Lemahnya reformasi birokrasi selaras dengan penilaian Penilaian KPK terhadap resiko korupsi di Kabupaten Gresik dimana kesimpulan penilaian menjelaskan bahwa risiko korupsi yang menonjol meliputi risiko PBJ, risiko pengelolaan anggaran serta risiko pengelolaan SDM diikuti oleh risiko integritas pelaksanaan tugas dan risiko perdagangan pengaruh. Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022 Fluktuasi indeks menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tantangan. Perubahan dalam kebijakan dan metodologi penilaian dapat memengaruhi hasil secara tidak proporsional, dan ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Penurunan dalam kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi reformasi yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
9.	Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60,12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori “sedang" dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Lahan (IKL) menunjukkan tren penurunan. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal.
10.	Ketahanan Bencana	**Indeks Risiko Bencana (IRB)** Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga 2024 berada dalam kategori Risiko Sedang. IRB menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 (96,50) dan terendah pada tahun 2024 (91,42). Kategori Risiko “Sedang" menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik menghadapi risiko bencana yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak rendah. Ini mencerminkan bahwa daerah ini memiliki potensi untuk terkena bencana dengan dampak yang signifikan. Jika IRB tetap stabil dalam kategori Sedang, ada kemungkinan bahwa upaya mitigasi bencana belum sepenuhnya efektif atau tidak terimplementasi dengan baik. Ini bisa terjadi jika strategi mitigasi tidak memperhitungkan seluruh faktor risiko atau tidak dilaksanakan secara menyeluruh.
	Aspek Pelayanan Umum	
11.	Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di atas rerata nasional (8,85 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di atas rerata Jawa Timur (13,43 tahun)
		Kesejahteraan Guru honorer atau Guru non ASN yang belum sertifikasi yang sangat rendah
		Fasilitas sekolah yang terstandarisasi nasional belum optimal
12.	Kesehatan	Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 237 bayi dibandingkan tahun sebelumnya 171 bayi.
		Angka kematian Ibu masih mencapai 77,59 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,34 per 1000 kelahiran hidup.
		Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8,14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
		Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara *year on year*, Demam Berdarah *Dengue* meiningkat 488 dan kasus Tubercolosis meningkat 3.404.
13.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan kawasan hanya mencapai 43,24%.
		Persentase Akses Air Bersih/Minum (Jaringan Perpipaan) hanya mencapai 39,12% sedangkan Persentase Akses Air Bersih/Minum (Bukan Jaringan Perpipaan) mencapai 21,70%.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Terdapat 193 Waduk milik pemerintah Kabupaten namun hanya 6,41% yang berhasil dinormalisasi pada Tahun 2024.
		Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) hanya mencapai 56,93%.
		Terdapat sebesar 25,27% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat.
14.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertumbuhan rumah umum pada tahun 2024 mencapai 22,86% sedangkan penanganan rumah swadaya yang tidak layak huni hanya mencapai 2,04% sedangkan luasan kawasan kumuh masih mencapai 571,12 Ha.
15.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Intensitas bencana Kebakaran Gresik sangat tinggi mencapai 580 kejadian sedangkan jumlah personil dan infrastruktur sangat terbatas. Kondisi ini berbenturan dengan fakta bahwa jumlah Industri di Gresik yang beresiko tinggi dalam menyebabkan kebakaran sangat tinggi.
		Intensitas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terjadi di ranah digital dan konvensional yang membutuhkan penguatan pengawasan dan penindakan.
16.	Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hanya berkutat pada kisaran 0,39% sampai dengan 0,42% per tahun.
		Masih tingginya tingkat kesenjangan, keterlantaran, kekerasan kepada anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya dengan Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS 65,06%.
		Cakupan Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial masih rendah sebesar 64.38%.
17.	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19%) dan Nasional (4.91%).
		Rasio penempatan pencari kerja masih rendah mencapai 39,04%.
18.	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun masih tinggi mencapai 9,27%.
		Unmet Need ner KB masih tinggi mencapai 9,18%.
19.	Pangan	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) 93,6%, Rasio ketersediaan pangan 184.04 kg/kapita/th, dan Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras) mencapai 9,39%.
		Infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian masih belum optimal.
		Lahan pertanian di Kabupaten Gresik semakin

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		terbatas akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan industri dan perumahan.
		Perubahan iklim dan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat berdampak negatif pada produksi pangan.
		Sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang kurang efisien dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan.
20.	Pertanahan	Masih terjadi konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah terkait kepemilikan dan penggunaan lahan yang belum termediasi.
		Pemanfaatan lahan terutama aset Pemerintahan Kabupaten Gresik seringkali tidak efisien, dengan banyak lahan yang dibiarkan kosong atau digunakan secara sub optimal..
		Belum optimalnya layanan sertifikasi pertanahan dengan masih adanya mafia tanah.
21.	Lingkungan Hidup	Volume timbulan sampah Tahun 2023 143.408,50 Ton/Tahun sedangkan Volume sampah yang dikelola 110.711,36 Ton/Tahun. Pada tahun 2024, persentase pengelolaan sampah 77,21% dan penanganan sampah hanya 58,7%.
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih kategori yang rendah dengan nilai 60,12%.
		Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan masih mencapai 64,21%
22.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Kartu Identitas Anak masih rendah (73,79%), validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif yang terselesaikan masih 17% pada Tahun 2024.
23.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Secara status kemandirian Desa (IDM), Sebanyak 222 Desa di Gresik telah mencapai status mandiri diikuti 108 Desa berstatus maju. Akan tetapi, status kemandirian ini tidak selaras dengan kemandirian keuangan Desa dimana rata-rata pendapatan Asli Desa (PADes) sangat rendah hanya mencapai 5,20% per tahun. Hanya 11 Desa yang memiliki PADes dengan kontribusi lebih dari 20,00% terhadap APBDes.
		Dari 329 Bumdes hanya sebanyak 57 Bumdes (17,33%) yang telah memiliki dokumen hukum sehingga pengembangan Desa sangat rawan pelanggaran hukum.
		Fasilitasi *potential matching* antara unit usaha Bumdes dengan potensi, pasar, dan kemitraan dengan dunia usaha masih belum optimal.
24.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2024 (91.01) dibawah capaian Provinsi Jawa Timur.
		Masih terdapat Perempuan Gresik yang tidak hidup sejahtera atau terjerat dalam lingkaran kemiskinan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		seperti temuan sekolah perempuan di Desa Sooko, Mondoluku, Sumbergede, Kesamben Kulon, Dungus, Dooro, Kedungsumber, Pulopancikan, Sidomukti, Kramat, Kramatinggil, Brangkal dan Wonorejo bahwa 13 Kepala Keluarga Lansia (hidup sendiri) perempuan dihapus sebagai penerima PKH dan BPNT karena kesalahan administrasi, 44 penerima KIS yang datanya tidak sama dengan KTP mengakibatkan tidak dapat menerima manfaat KIP, penerima manfaat KPG (Kartu Gresik Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) selama 2 tahun sampai sekarang tidak mendapatkan pencairan dana, dan 20 perempuan disabilitas tidak menerima PKH.
25.	Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.
		Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 66,67%.
		Nilai *Volume-Capacity* (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (*Volume-Capacity*) sebesar 52,17% mengindikasikan kategori Jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.
		Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata.
26.	Komunikasi dan Informatika	Perkembangan massif dunia digital baik arus *mainstream* maupun *social media* yang menyentuh lansung generasi millenial dan Gen Z di Gresik (16-41 Tahun pada tahun 2022) mencapai 58,15% dari total potensial penduduk 17 Tahun ke atas pada Tahun 2024. Tingginya literasi digital selaras dengan rasio pengguna gadget mencapai 78,11% berdasarkan survey dari APJII pada Tahun 2022. Kondisi menghadapi berbagai ancaman seperti asimetris Informasi, Hoaks, Gelembung Informasi (*filter bubble),* dan berita buruk yang menjadi sisi gelap perkembangan dunia digital.
		Peningkatan kualitas pers dan pengendalian pers yang belum tersertifikasi.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem informasi yang *interoperable* dan pembangunan basis data terpadu belum optimal.
27.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Koperasi aktif pada tahun 2024 hanya mencapai 52,01% (815 dari total 1567 Koperasi).
		Rata rata pertumbuhan usaha mikro selama lima tahun terakhir hanya sekitar 1%.
		Penyalahgunaan dana hibah UMKM sebesar Rp 19 miliar yang diperuntukkan 782 UMKM pada tahun 2023-2024.

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		Belum adanya *monitoring* berkelanjutan terhadap hasil pembinaan usaha mikro.
28.	Penanaman Modal	Penyederhanaan birokrasi berbasis *easy of doing bussiness* perlu dioptimalkan.
		Kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian regulasi penanaman modal di Daerah.
		Kepatauhan perusahaan dalam pengendalian penanaman modal masih mencapai 69,42%.
		Keterbatasan akses ke pembiayaan dan insentif finansial untuk mendukung investasi baru dapat menghambat penanaman modal.
29.	Kepemudaan dan Olahraga	Ketebatasan partisipasi pemuda dalam pembangunan baik pada jenjang Desa hingga Kabupaten.
		Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga kompetisi dan rekreasi masih belum optimal.
30.	Statistik	Kelengkapan data sektoral belum optimal dengan belum tercukupinya dengan pemutakhiran yang lambat; Pengembangan satu data belum terintegrasi dengan optimal; Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan belum optimal.
		Pengembangan standar yang konsisten dalam metodologi pengumpulan data untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan; Kebutuhan untuk prosedur validasi yang ketat untuk memastikan akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan.
31.	Persandian	Pengembangan keamanan informasi, manajemen sandi, dan teknologi enkripsi belum optimal terutama dalam menghadapi peningkatan ancaman siber seperti *malware*, *phishing*, dan serangan DDoS yang dapat mengkompromikan keamanan informasi pemerintah dan masyarakat. Perangkat Daerah belum menerapkan teknologi enkripsi secara menyeluruh untuk melindungi data sensitif.
32.	Kebudayaan	Pelestarian dan apresiasi kebudayaan belum partisipatif.
		Obyek cagar budaya yang terdaftarkan masih mencapai 13,16%.
		Tradisi, bahasa, dan praktik budaya lokal yang mulai menghilang karena pengaruh modernisasi dan globalisasi.
		Keterbatasan pendanaan dan jejaring kerja untuk mendukung program-program kebudayaan, termasuk pelestarian situs bersejarah dan penyelenggaraan acara budaya.
33.	Perpustakaan	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat dengan efektifitas penguatan literasi masih mencapai 68,98% dan ketercukupan bahan pustaka masih 71,50%, serta kurangnya upaya digitalisasi koleksi buku dan materi lainnya, sehingga sulit diakses secara online.
34.	Kearsipan	Pemenuhanan standar dan prosedur yang baku

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		dalam pengelolaan arsip, termasuk dalam proses penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip di level pemerintah Daerah dan Desa masih perlu ditingkatkan.
35.	Kelautan dan Perikanan	Praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi termasuk penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem serta *overfishing* (Penangkapan Ikan Berlebihan).
		Pencemaran perairan akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang mencemari habitat ikan dan mengurangi kualitas air.
		Kurangnya pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti tempat penyimpanan yang sesuai standar (*cold storage*).
		Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya tidak diikuti dengan pengukuran kualitas kesejahteraan nelayan (nilai tukar nelayan, produktivitas,dsb.) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental.
36.	Pariwisata	Keterbatasan fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas umum menghambat perkembangan pariwisata.
		Kurangnya strategi pemasaran dan promosi yang efektif mengurangi daya tarik destinasi wisata.
37.	Pertanian	Kebutuhakan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan perubahan suhu yang dapat mempengaruhi hasil panen dan produktivitas.
		Keterbatasan akses ke teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien.
		Produktivitas tanaman pangan dan holtikulturan meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan (nilai tukar petani, produktivitas, dsb.) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan incremental.
38.	Perdagangan	Neraca perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 mencapai surplus 33,34%
		Pertumbuhan ekspor mengalami penurunan mencapai -12,24%
		Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, Kerjasama, dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan.
		Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
39.	Perindustrian	Rerata pembinaan terhadap industri kecil dan menengah hanya mencapai 0,77% sampai dengan 1,71% selama 5 tahun terakhir.
		IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas hanya 1,24%.
		Belum optimalnya kebijakan adaptasi dalam

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan karena risiko tinggi dan keterbatasan jaminan serta sulitnya membangun jaringan distribusi yang luas untuk penetrasi pasar dan ekspansi.
40.	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dapat mempertahankan nilai A selamai 6 tahun terakhir namun mengalami stagnasi atau perlambatan dalam perbaikan ke level AA.
		Kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD belum optimal untuk menggali dan memanfaatkan potensi bisnis. Belum optimlnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli Daerah serta ketergantungan yang tinggi pada APBD menghambat fleksibilitas keuangan dan operasional BUMD.
		Belum optimalnya kebijakan administrasi pembangunan dalam penggalian pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), *Limited Concession Scheme* (LCS), Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), dan CSR.
		Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan bersasaran berbasis kemiskinan kronis dan multidimensi sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan masih didominasi karitatif.
		Kerjasama pemerintah Daerah dengan pemerintah dan instansi lainnya perlu dioptimalkan untuk peningkatan kebermanfaatan di sektor prioritas.
41.	Sekretariat Dewan	Kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD masih mencapai 95%
42.	Perencanaan	Keselarasan prioritas pembangunan Daerah antar sektor dan dokumen perencanaan perlu dipotimalkan dalam arsitektur kinerja dari level strategis hingga output.
		Pembangunan basis data terpadu untuk perencanaan.
		Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar wilayah dan wilayah Kabupaten Gresik dengan wilayah sekitar serta proyek strategis nasional.
43.	Keuangan	Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan rasio kemandirian fiskal mencapai 86.68%
		Selama pelaksanaan anggaran pada tahun 2021-2024, Kabupaten Gresik melaksanakan beberapa kali *refocusing* anggaran pada tiap tahun anggaran berkenaan. Praktik *refocusing* anggaran mengindikasikan beberapa potensi kelemahan

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		dalam manajemen anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.
		Optimaliasi penyesuaian Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
44.	Kepegawaian	Optimalisasi indeks profesionalitas ASN.
		Optimalisasi manajemen sumber daya manusia ASN berbasis sistem Merit yang berfokus pada penilaian, promosi, dan pengembangan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi merek .
		Subjektivitas dalam penilaian kinerja.
		Kebutuhan untuk pengembangan budaya ASN berakhlak yang merupakan inisiatif dan pedoman yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN melalui penerapan nilai-nilai akhlak dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja ASN dan memastikan bahwa mereka melayani publik dengan cara yang etis dan profesional.
45.	Pengawasan	Keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan.
46.	Kewilayahan	Penguatan peningkatan kapasitas, manajemen ASN, pendanaan terhadap kecamatan dalam mendukung *intermediery* penyelenggaraan pelayanan publik.
47.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Politisasi identitas dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok.
		Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau perencanaan kebijakan.
		Tantangan dalam memperkuat institusi demokrasi seperti pemilihan yang adil, kebebasan pers, dan hak asasi manusia.
	Aspek Daya Saing Daerah	
48.	Kemampuan Ekonomi Daerah	Ditinjau dari perekomian (makro ekonomi Daerah). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami kenaikan pada tahun 2024 secara *year on year* mencapai 4,79 dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4,62 Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja Jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan Surabaya (5,76%) Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Tingkat Kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 10,96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024,

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
		angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,79%) dan provinsi (8.57%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 142.390 jiwa.
		Ditinjau dari infrasrtuktur, terdapat sebesar 29,26% jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat . Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan masih mencapai 66,67%. Nilai *Volume-Capacity* (VC) atau rasio volume terhadap kapasitas jalan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemacetan pada jalan. Nilai VC (*Volume-Capacity*) sebesar 52,17% mengindikasikan kategori jalan mulai padat, tetapi masih dalam kapasitas optimal.
		Angka kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 2.184 meningkat 121,1% dibandingkan tahun sebelumnya (1.803 kasus)
		Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menurun kembali di tahun 2023 menjadi 40,75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.
		Rasio lulusan D4/S1/S2/S3 mencapai atau 5,12% dari total penduduk
		Optimalisasi dan pemenuhan secara progressif pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
		Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik yang telah mencapai target nasional masih sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator.

2.3.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Gresik memperhatikan isu strategis global, nasional, regional Jawa Timur, dan lokal. Isu strategis dalam penyusunan RPJMD berfungsi sebagai dasar utama untuk perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Isu strategis membantu dalam mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh daerah, menetapkan prioritas pembangunan dengan menilai dampak, urgensi, dan potensi solusi dari berbagai isu yang ada, menjadi dasar dalam pengembangan strategi dan rencana aksi yang terencana dan terarah serta membantu pemerintah daerah dalam memetakan sumber daya yang tersedia dan kapabilitas yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Daerah. Rumusan isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagaimana berikut :

Tabel 2.197 Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
1.	*Sustainable Development Goals*	 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2)Tanpa Kelaparan; (3)Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5)Kesetaraan Gender; (6)Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7)Energi Bersih dan Terjangkau; (8)Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		dan Infrastruktur; (10)Berkurangnya Kesenjangan; (11)Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12)Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13)Penanganan Perubahan Iklim; (14)Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan;(16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Persentase capaian indikator TPB berdasarkan Tujuan SDGs di Kabupaten Gresik yang telah mencapai target nasional masih sebesar 60,78% atau sebanyak 123 indikator. Sedangikan ditingkat Desa, Capaian SDGs Desa Kabupaten Gresik hanya mencapai 50,32.%				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		 Capaian SDG's Desa Kabupaten Gresik, per 21 Juli 2024				
2.	Perubahan Iklim	Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris *Agreement* tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara significan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan kelautan, pesisir pangan, dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		ekonomi hijau dan pembangunan global di masa mendatang. stimulus hijau dan paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Tekhnologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif dimasa mendatang				
3.	Tata Kelola Keuangan Global	Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan FinTech. Pergeseran kebijakan fiskal mengacu pada perubahan dalam kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan perpajakan untuk mempengaruhi ekonomi. Hal ini termasuk peningkatan atau pengurangan pengeluaran publik, perubahan tarif pajak, atau reformasi dalam sistem pajak. CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan dan dikelola oleh bank sentral suatu negara. Berbeda dengan mata uang digital swasta atau kripto seperti Bitcoin, CBDC adalah representasi digital dari mata uang fiat dan didukung oleh otoritas moneter. FinTech merujuk pada inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, investasi berbasis teknologi, dan *blockchain*. Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi telah memasuki wilayah Negara kesatuan Indonesia dengan teknologi terbarukan yang berbasis digital atau dikenal sebagai era industri 4.0 yang berbasis *cyberphysical system*. Bahkan saat ini di Jepang sudah dikenal era industri 5.0 yang berbasis kepada "*super smartsociety*"				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		yang intinya mengarahkan keseimbangan antara komunitas manusia dan otomasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Adanya revolusi industry tersebut telah membuat disrupsi kehidupan dalam bentuk kemanfaatan, tantangan, bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat, kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi, apabila tidak dilakukan antisipasi dan sikap kebijakan yang tepat. Laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover (2016), *size* ekonomi digital dunia telah mencapai 11,5 triliun dollar atau berkisar 15,5 persen dari GDP dunia. Besarnya konstribusi ekonomi digital terhadap *size* ekonomi digital ekonomi dapat dicermati dari perdagangan online telah mengubah *landscape* ekonomi dunia sebagai "wajah baru" ekonomi global, mengacu pada laporan McKinsey (2018), setidaknya perdagangan *online* memiliki dampak di empat area. 1. Pertama, *financial benefits*. Memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, misalnya Indonesia sebagai pasar terbesar untuk *e-commerce* di Asia Tenggara. 2. Kedua, *job creation*. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital ini yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 3. Ketiga, *buyer benefits*. Ini bisa dilihat dari harga-harga di *marketplace e-commerce* yang biasanya lebih murah dari *offline*. 4. Keempat, *social equality*. Ekonomi digital telah berdampak terhadap				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya. Peringkat *Gross Merchandise Value* Asia Tenggara **No** / **Negara** / **Nilai GMV Tahun 2021 (US$)** / **Estimasi GMV Tahun 2025 (US$)** 1. Indonesia — 70 miliar — 146 miliar 2. Thailand — 30 miliar — 56 miliar 3. Vietnam — 21 miliar — 57 miliar 4. Malaysia — 21 miliar — 35 miliar 5. Filipina — 17 miliar — 40 miliar 6. Singapura — 15 miliar — 27 miliar Sumber : *Gross Merchandise Value*				
4.	Perkembangan Teknologi Informasi dan Gresik *Smart City*	Implementasi *smart city* di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan *smart city* di Indonesia, Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 *smart city* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota Pertama untuk menjadi Perintis *Smart City*. Dimensi Gresik *smart city* menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*smart governance*),				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

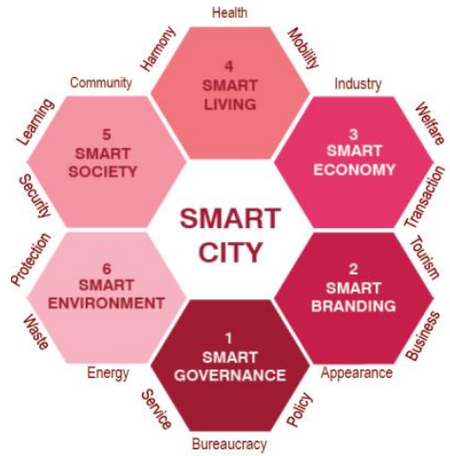
No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharan lingkungan (*smart environment*). Inisiasi terknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintergasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan *Indonesia Smart Nation*. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas pula. Membangun *smart city* adalah mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. Negara hadir untuk melayani, memberdayakan, dan membangun warga negara. Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep *smart city*. Selain dari pihak pemerintah, pihak swasta juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep *smart city* di Indonesia. Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan *grand scenario* berupa tren *Internet of Things* (IoT). Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan internet akan diekploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor, dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*),				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		teknologi miniatur (*miniaturization*), *big data analytics* dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*).				



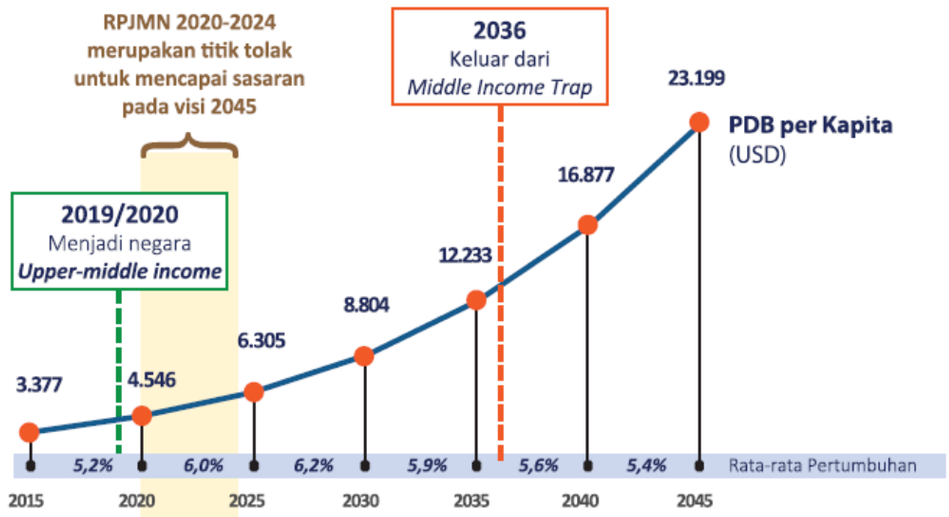


Konsep *Smart City* di Indonesia dan Dimensi Gresik *Smart City*

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		komunitas yang terbuka) dan modal *entrepreuneurial* (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Konsep *Smart City* sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat				
5.	Kerangka Pendanaan Inovatif *(inovatif financing)*					

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Target Pertumbuhan Perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Pengembangan pembiayaan alternatif pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu strategi untuk mencapai Kemandirian Daerah sebagai salah satu strategi kunci pembangunan perekonmian Indonesia. Kemandirian Daerah merupakan bagian dari peta besar transformasi ekonomi yang mulai diinisasi dalam periode tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Kemandirian ekonomi menjadi pendorong yang menggerakan perekonomian nasional untuk keluar dari *middle income trap*. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia per kapita telah bergerak *sideways* sejak mencapai 3.337 (USD) pada tahun 2015 menuju 4.456 (USD) pada tahun 2020 dan butuh lonjakan sebesar 7.687 (USD) untuk keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036 serta membutuhkan peningkatan 510% guna mencapai visi Indonesia 2045. Peningkatan pendapatan perkapita diharapkan berbanding lurus untuk mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belum memadainya kapasitas fiskal Kabupaten Gresik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur juga dipengaruhi dengan valuasi pendapatan asli daerah yang selama ini masih tergantung pada pajak dan retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh Pajak Daerah dengan rerata 61,8% sedangkan retribusi				

Keterangan

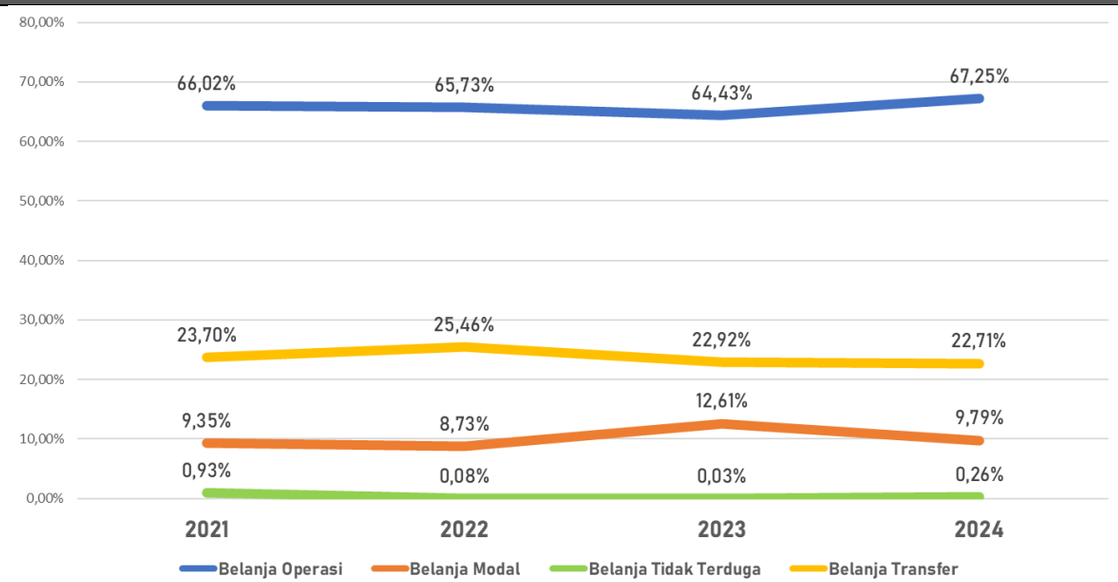
G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		mencapai 9,21%. Pendapatan yang sah dari pengelolaan kekayaan Daerah serta kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah selama ini belum dapat dioptimalkan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggerakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik. Akan tetapi, meninjau belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L



Proporsi Belanja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja Modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86% dan

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,20% per tahun. Berdasarkan fenomena ini, guna percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya. Selain itu, mekanisme birokrasi klasik juga dilaksanakan dengan mengoptimalkan integrasi pendanaan pembangunan pada sumber pemerintah (K/L, Non-K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip *Money Follow Program*. Pemerintah memberikan berbagai instrumen pendanaan infrastruktur yang dapat menarik minat investor swasta terutama dalam skema KPBU seperti jaminan Pemerintah, pembayaran *Availability Payment*, dan dukungan konstruksi seperti *Viability Gap Fund* (VGF). Selain itu juga terdapat beberapa instrument pasar modal yang dikembangkan untuk infrastruktur seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Pemerintah juga menyiapkan skema berbentuk LCS (*Limited Concession Scheme*) yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi dari suatu aset infrastruktur milik				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait untuk dioperasikan/dikelola agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta, dan uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Skema pendanaan alternatif lainnya adalah PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran) yaitu pembiayaan proyek yang dibiayai oleh sumber dana selain dari anggaran milik Pemerintah, contohnya, dana kelolaan jangka panjang (asuransi, dana repatriasi pengampunan pajak, dana pensiun, dll.), dan *private equity investors*.				
6.	Perkembangan Demografi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Pada awal perencanaan Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar 1377,29 (000 Jiwa), dan diestimasikan naik pada tahun 2045 sebesar 1670,44 (000 Jiwa).				

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik (000 Jiwa)

Proyeksi Jumlah Penduduk	2022	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040*	2045*
	1291,51	1377,29	1437,72	1487,80	1597,84	1670,44

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena lebih banyak orang yang dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan. Dengan lebih banyak orang yang bekerja, tingkat produktivitas nasional dapat meningkat. Ini bisa menghasilkan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dan peningkatan standar hidup. Jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi dapat berbalik menjadi beban. Banyaknya penduduk usia produktif tanpa pekerjaan dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Timur (4,19% dan Nasional (4,91%). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan finansial bagi individu. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik dengan uji kompetensi maupun non uji kompetensi. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas pelatihan ini dalam mengurangi pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi berbagai kejuruan, namun masih terdapat tantangan dalam hal penempatan tenaga kerja, termasuk				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja. Keterbatasan dalam penempatan kerja dan akses pelatihan dapat menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi mereka secara efektif. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran jika tidak ada sistem yang memadai untuk memfasilitasi transisi dari pelatihan ke pekerjaan. Gresik memiliki banyak perusahaan manufaktur, tetapi penempatan tenaga kerja ke dalam posisi yang sesuai masih merupakan tantangan. Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan yang efektif dapat menyebabkan pengangguran tetap tinggi. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama dalam memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Indeks Pembangunan Manusia Gresik mencapai 78,93 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (75,35) dan Nasional (75,02). Meskipun IPM Gresik lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, permasalahan di tiap aspek IPM masih membutuhkan penanganan strategis a. Dalam layanan kesehatan, akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Jumlah Balita Gizi Buruk kembali naik ke angka 237 bayi dibandingkan tahun sebelumnya 171 bayi. Angka kematian Ibu masih mencapai 77,59 per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Angka kematian bayi mencapai 4,34 per 1000 kelahiran hidup. Balita Stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8,14% meskipun mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit menular seperti HIV AIDS mengalami peningkatan dramatis hingga 218 kasus berdasarkan data termutakhir secara *year on year*, Demam Berdarah *Dengue* meningkat 488 kasus, dan Tubercolosis meningkat 3.404.				
		b. Kualitas pendidikan di Gresik kurang merata. Ketimpangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 (10,01 tahun) di atas rerata nasional (8.85 tahun). Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2024 (13,98 tahun) berada di atas rerata Jawa Timur (13.43 tahun)				
		c. Standar hidup. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta akse ke pekerjaan yang layak dan upah yang cukup masih menjadi tantangan				
		d. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada 2023 mencapai 0,409. Angka ini naik dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,407. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik telah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Sejalan dengan itu, indeks pembangunan gender				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Kabupaten Gresik tahun 2024 sebesar 90,01%. Namun, nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah yang signifikan.				
7.	Ketangguhan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga 2024 berada dalam kategori Risiko Sedang. IRB menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 (96,50) dan terendah pada tahun 2024 (91,42). Kategori Risiko “Sedang" menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik menghadapi risiko bencana yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak rendah. Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada dengan variabel diantaranya *hazard* (bahaya), *vulnerability* (kerentanan), dan *capacity* (kapasitas).				

Resiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2017-2024 dan Proporsi Bencana di Kabupaten Gresik

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori
2017	126,77	Risiko Sedang
2018	101,35	Risiko Sedang
2019	99,29	Risiko Sedang
2020	99,29	Risiko Sedang
2021	96,50	Risiko Sedang

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L

2022	117,31	Risiko Sedang
2023	117,31*	Risiko Sedang
2024	91,42*	Risiko Sedang

Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir dengan tingkat risiko tinggi sebesar 76%. Potensi bahaya banjir di daerah ini sangat besar, mencakup area seluas 82.809 hektar. Sungai utama di wilayah Gresik adalah Kali Lamong, yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas sekitar 720 km² dan panjang sungai sekitar 103 km. Kabupaten Gresik mencakup sekitar 44% dari DAS Kali Lamong dengan luas sekitar 310,12 km². Di wilayah Gresik, panjang aliran Kali Lamong diperkirakan mencapai 58 km. Sungai ini melewati beberapa daerah seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas, yang semuanya rentan terhadap banjir. Kali Lamong merupakan sungai intermittent dengan penampang relatif datar dan memiliki 34 anak sungai. Kondisi hidrologi DAS Kali Lamong dianggap kritis, dengan aliran sungai mencapai 700 m³/detik selama musim hujan, yang jauh melampaui kapasitas normal sekitar 250 m³/detik. Selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah.

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Daerah Aliran Sungai Kali Lamong  Selain bencana hidrometeorologi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Meskipun ada kemajuan, angka 60,12 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih berada pada kategori “sedang" dalam hal kualitas lingkungan hidup. Meskipun ada peningkatan, nilai Indeks Kualitas Air (50) masih dalam kategori kurang. Kualitas air di Kabupaten Gresik masih menunjukkan beberapa tingkat pencemaran. Indeks Kualiras Udara (IKU) menunjukkan peningkatan signifikan. Adapun Indek Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan tren penurunan. Nilai IKL yang rendah menunjukkan kualitas tutupan lahan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh deforestasi, konversi				

Keterangan

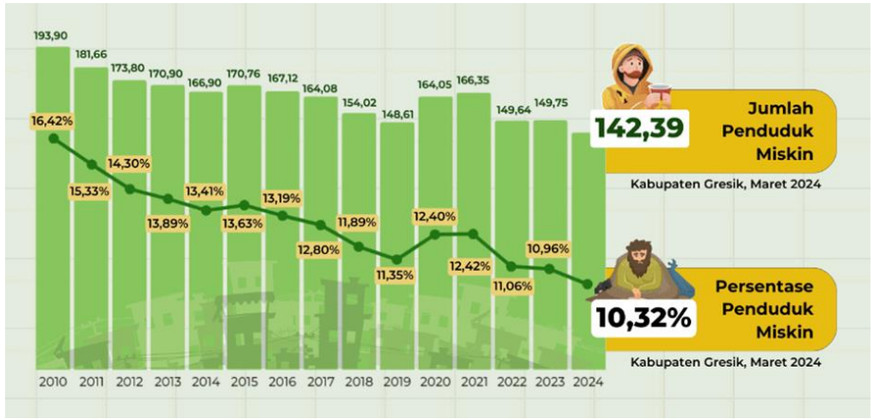
G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		lahan, atau pengelolaan lahan yang tidak optimal. Selanjutntya, reklamasi pasca-tambang Semen Indonesia di Gresik menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, proses reklamasi yang rumit, dan aspek sosial-ekonomi. Upaya reklamasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang dapat dipulihkan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.				
8.	Kemiskinan Kronis dan Multidimensi	Kabupaten Gresik adalah wilayah perkotaan yang menjadi *hiterland* Surabaya Metropolitan Area dan berpotensi menyimpang kantong-kantong kemiskinan. Individu yang terjebak dalam kemiskinan kronis sering kali menghadapi keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup semakin sulit dicapai oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kronis sering kali disebabkan oleh faktor struktural, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses ke peluang kerja yang baik, dan ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L



Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik megalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10,96% pada tahun 2023 menjadi 10,32% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). Jumlah penduduk miskin juga tetap signifikan, yaitu 149.640 jiwa pada tahun 2023 dan 142.390 pada tahun 2024.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun, dari Rp588.316 per kapita/bulan pada tahun 2023 menjadi Rp608.828 pada tahun 2024. Hal Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum terus meningkat.

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Selain kemiskinan kronis, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kemiskinan multidimensi. Di Kabupaten Gresik, jika pendidikan dan keterampilan terbatas, maka individu mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi, memperburuk kemiskinan. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dapat memperburuk kemiskinan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, jika penduduk miskin tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan kesehatan, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk keadaan ekonomi mereka. Paradigma kemiskinan unidimensional berkembang di awal abad ke 20 dalam karya klasik *Life and Labour of The People in London* (Both, 1902) yang diadaptasi di kota kecil York oleh Rowntree (1908) dalam *Poverty Study of Town.* Pandangan ini menempatkan kemiskinan sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis. Paradigma kemiskinan fisiologis masih bertahan hingga saat ini dan digunakan di berbagai belahan dunia namun mengalami adaptasi dan pengembangan berbasis kebutuhan dasar atau *basic need approach* (Streeten, 1981; 1979, 1978). Berbagai studi berpengaruh di dunia menggeser paradigma kemiskinan unidimensional yang berbasis pendapatan dan pengeluaran dengan melahirkan pendekatan kemiskinan multidimensional berbasis pendekatan kemampuan atau *capability approach* yang menggabungkan kerentanan, ketidaksetaraan dan hak asasi manusia sehingga konsep kemiskinan telah diperluas dari model fisiologis ke model sosial (Sen, 1981; 1979;1976). Pendekatan kemiskinan kembali berkembang dalam pendekatan deprivasi sosial atau *social deprivation approaches* yang memandang kemiskinan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		sebagai penolakan terhadap kesempatan dan pilihan yang paling mendasar bagi perkembangan manusia (Townsend, 1979). Selanjutnya, perkembangan paradigma kemiskinan multidimensional merujuk pada ekslusi sosial atau *social exclusion approach* dengan studi yang berpengaruh oleh Levitas et al., (2007). Pendekatan berikutnya, meletakkan konsepsi kemiskinan partisipatoris dengan pandangan berpengaruh dari Chamber (1997, 1995, 1983) yang menyoroti jaring perangkap deprivasi. Terakhir, paradigma kemiskinan multidmensi adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia yang mulai digaungkan dalam dokumen *Poverty Reduction and Human Right*s (UNDP, 2003). Indeks kemiskinan multidimensi Alkire dan Foster (2011) telah mendapatkan penerimaan umum di antara para studi. Menurut penilaian indeks ini di 103 Negara terdapat 1,45 miliar orang miskin secara multidimensi (Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2017). Angka ini jauh lebih tinggi dari pengukuran uni-dimensional *World Bank* berdasarkan paradigma fisiologis melalui paritas daya beli yang dituangkan dalam *poverty head count index* dengan menempatkan garis kemiskinan setinggi $ 1,90 per hari dan mengestimasikan 8,7% dari populasi dunia atau 700 juta manusia berada dalam kemiskinan fisiologis.				

Pergeseran Paradigma Kemiskinan

Paradigma	Filosofis Fundamental	Studi Kunci

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
		Fisiologis	Relasi penghasilan terhadap pemenuhan kebutuhan minimum fisiologis	Both (1902), Rowntree (1908)				
		Fisiologis-Kebutuhan Dasar	Pendapatan dan konsumsi terhadap kebutuhanan materialistis (makanan dan non makanan)	Streeten (1979), Streeten (1981), Streeten dan Burki (1978).				
		Kapabilitas	Kebebasan untuk memiliki hidup yang berharga, kemiskinan sebagai deprivasi peluang	Sen (1981), Sen (1979)				
		Deprivasi sosial	Kemiskinan relatif dimana individu, keluarga, dan kelompok dikecualikan dari pola hidup, kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya kekurangan sumber daya jauh dibawah rata-rata populasi	Townsend (1979).				
		Ekslusi Sosial	Keterbatasan dan/atau penolakan sumber daya, hak, barang dan jasa, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan dalam suatu masyarakat di arena ekonomi, sosial, budaya atau politik	Levitas et al. (2007), Levitas (2005)				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
		Partisipatoris	Keterbatasan akses partisipasi karena perangkap deprivasi	Chamber (1983), oleh Narayan et al. (2000)				
		Hak Asasi Manusia	Kemiskinan adalah pengingkaran terhadap hak asasi manusia	UNDP (2003), UNHCHR (2006).				
		Sumber : Suwanda et al (2024) Isu kemiskinan kronis dan kemiskinan multidimensi ini juga mencakup kesejahteraan nelayan dan petani di Kabupaten Gresik. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya tidak diikuti dengan pengukuran kualitas kesejahteraan nelayan (nilai tukar nelayan, produktivitas,,dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental. Produktivitas tanaman pangan dan holtikulturan meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani belum dilaksanakan (nilai tukar petani, produktivitas, dsb) sehingga intervensi kebijakan dalam urusan ini masih belum partisipatif dan inkremental. Hal ini juga berlaku dalam sektor pertanian. Produktivitas tanaman pangan dan holtikulturan meningkat namun pengukuran kualitas kesejahteraan petani juga belum dilaksanakan (nilai tukar oetani, produktivitas, dsb).						
9.	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil, yang tidak hanya fokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin. Pertumbuhan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, meningkatkan						

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L

kesempatan kerja, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu strategis seperti kesenjangan pendapatan, inklusi keuangan, akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UKM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan semua individu dan kelompok masyarakat berpartisipasi secara penuh dan menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami kenaikan pada tahun 2024 secara *year on year* mencapai 4,79% dibandingkan pada tahun 2023 mencapai 4,62%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari kinerja nasional 5,03%, kinerja Jawa Timur 4,93%. Dibandingkan dengan Surabaya Metropolitan Area, pertumbuhan ekonomi Gresik juga tertinggal dari Sidoarjo (5,54%) dan Surabaya (5,76%)

Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Gresik mencakup dampak pandemi COVID-19, fluktuasi di sektor-sektor kunci, ketergantungan pada sektor industri pengolahan, penurunan di sektor pengadaan listrik dan gas, serta masalah pada pengeluaran konsumsi.

Indikator	Realisasi (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Pertumbuhan Ekonomi 5,81 5,42 -3,68 3,79 7,38 4,62 4,79 Mekispun mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup positif, tingkat inflasi di Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan laju inflasi yang lebih rendah dari nasional pada tahun-tahun awal, tetapi meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 1,81%. Fluktuasi inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan baik bagi individu maupun bisnis. Kabupaten Gresik menggunakan data inflasi Kota Surabaya karena kurangnya data spesifik untuk Gresik. Ketergantungan ini mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan inflasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik. Selanjutnya, Indeks Gini di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 0,322 pada akhir tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Peningkatan kesenjangan pendapatan mengindikasikan bahwa keuntungan ekonomi tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.				
10.	Basis Perekonomian Daerah	Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019-2024) struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; terakhir adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresik. Pada tahun 2024, di antara kelima lapangan usaha tersebut, ada 4 kategori yang mengalami peningkatan peranan jika dibandingkan tahun 2023, yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki peran berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan dari 12 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 51,25 persen (angka ini meningkat dari 50,33 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,89 persen (turun dari 12,92 persen di tahun 2023), serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,67 persen (turun dari 8,79 persen di tahun 2023). Berikutnya				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,55 persen (turun dari 6,79 persen di tahun 2023); serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,14 persen (turun dari 6,88 persen di tahun 2023). Meninjau struktur perekonomian Kabupaten Gresik yang didominasi oleh industri maka pada pengembangan selanjutnya dibutuhkan penguatan basis perekonomian Kabupaten Gresik dengan industri berbasis teknologi (*advance technology).* Pengembangan basis perekonomian ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik dapat menjadi pusat industri maju yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian regional dan nasional. Gresik memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi, terutama karena lokasinya yang strategis sebagai bagian dari *hinterland* Surabaya Metropolitan Area dan keberadaan sejumlah kawasan industri. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan akan kebijakan yang mendukung inovasi dan investasi di sektor teknologi. Untuk mendukung industri berbasis teknologi tinggi, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting. Hal ini termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi, fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D), serta kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas canggih. Ditinjau dari pengembangan kawasan industri di Gresik, Percepatan pemerataan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama Pemerintah untuk dikembangkan.				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang memiliki luas 2.167 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Manyar. Kegiatan usaha di KEK dinilai memiliki potensi dan keunggulan yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik yang baru saja resmi beroperasi dan diproyeksikan mampu menjadi pusat perekonomian baru di Jawa Timur. KEK Gresik memiliki kegiatan utama di bidang industri metal (smelter), industri elektronik, industri kimia, industri energi, dan logistik. Dengan keberadaan KEK Gresik akan memberikan dampak positif bagi Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) di KEK Gresik berupa hak pemanfaatan fasilitas dan kemudahan *ultimate* yang menjadi kekhasan dari KEK. Adapun fasilitas fiskal yang bisa dimanfaatkan diantaranya *tax holiday*, *tax allowance*, bebas bea masuk, dan lain-lain. Sedangkan untuk fasilitas non fiskal dapat berupa fasilitas di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, keimigrasian, kemudahan lingkungan hidup, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi. KEK Gresik juga telah memiliki *anchor investor* yakni PT Freeport Indonesia dan diharapkan akan menjadi daya tarik bagi berbagai industri lain serta industri turunan tembaga untuk berinvestasi. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci sukses pengembangan industri berbasis teknologi tinggi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Pendidikan dan Pelatihan. Meningkatkan kurikulum pendidikan yang relevan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		dengan kebutuhan industri teknologi tinggi. Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja. 2. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi. Membangun kemitraan dengan universitas dan institusi pendidikan untuk penelitian dan pengembangan serta pelatihan tenaga kerja. 3. Program Beasiswa dan Magang, Menyediakan beasiswa untuk studi di bidang teknologi tinggi dan program magang di perusahaan teknologi.				
11.	Eksternalitas Pembangunan Smelter	PT Freeport Indonesia memastikan proses pembangunan smelter di Gresik selesai pada Mei 2024. Namun, proses produksi konsentrat segera dimulai Agustus 2024. Fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, mulai memproses 850 ribu ton konsentrat tembaga pada Agustus 2024. Kemudian, kapasitas produksi akan mencapai 100 persen pada akhir 2024. Smelter tembaga dengan *Design Single Line* terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600 ribu ton per tahun. Smelter Gresik tersebut sedang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta PGM (*Platinum Group Metal*). Produk samping antara lain asam sulfat, gipsum, dan timbal. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik membawa berbagai dampak eksternalitas yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		positif a. Pembangunan smelter akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Ini akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dimulainya produksi pada Agustus 2024, Smelter ini akan membutuhkan tenaga kerja untuk operasional dan *maintenance*, sehingga membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. b. Investasi besar dalam pembangunan Smelter sering disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya yang juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Lokasi smelter di Kawasan Ekonomi Khusus *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) akan mendorong pengembangan kawasan tersebut, menjadikannya pusat industri yang maju. c. Kehadiran smelter dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal dalam teknologi pengolahan logam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Selain dampak positif, dampak negatif juga dapat menjadi ancaman diantaranya: a. Proses pengolahan dan pemurnian logam di Smelter menghasilkan emisi gas dan limbah cair yang dapat mencemari udara dan sumber air setempat. Polusi ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Aktivitas Smelter dapat menyebabkan degradasi lahan dan hilangnya vegetasi,				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		yang mengakibatkan erosi dan penurunan kesuburan tanah. b. Paparan jangka panjang terhadap polutan yang dihasilkan oleh Smelter, seperti logam berat dan senyawa kimia berbahaya, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan reproduksi. c. Meskipun Smelter menciptakan lapangan kerja, tidak semua segmen masyarakat mungkin mendapatkan manfaat yang sama. Ketidaksetaraan pendapatan dan akses terhadap peluang kerja dapat meningkat. Pembangunan Smelter dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. d. Operasi Smelter yang intensif membutuhkan sumber daya alam yang besar, seperti air dan energi, yang dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya lokal dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem.				
12.	*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*	GEDSI, atau *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion,* adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial, memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Pendekatan ini menekankan pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam setiap aspek pembangunan dan pelayanan publik. Penjelasan isu strategis GEDSI sebagai berikut: a. Kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana akses terhadap hak, sumber daya, dan peluang tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang. Ini				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		berarti pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, politik, dan semua aspek kehidupan. Studi menunjukkan bahwa kesetaraan gender berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesetaraan gender dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan komunitas. Kesetaraan gender adalah masalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan adil dan setara; b. Inklusi disabilitas mengacu pada memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki akses yang setara ke semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial. Memberikan kesempatan yang setara bagi individu dengan disabilitas adalah masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menginklusikan individu dengan disabilitas dalam lingkungan kerja dan pendidikan dapat meningkatkan keanekaragaman dan mendorong inovasi. Inklusi disabilitas adalah bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pentingnya meninggalkan tidak ada seorang pun di belakang. c. Inklusi sosial mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menikmati manfaat pembangunan. Inklusi sosial dapat mengurangi ketidaksetaraan dan konflik				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L

sosial, meningkatkan kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan memastikan inklusi sosial, lebih banyak orang dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Inklusi sosial adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua anggota masyarakat.

GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) memainkan peran penting dalam pembangunan Kabupaten Gresik dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Perumusan kebijakan GEDSI dalam rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 harus memperhatikan hasil Munas Perempuan untuk perencanaan tahun 2025-2029

Agenda	Rencana Aksi	
Kemiskinan perempuan (perlindungan sosial)	Impact	Meningkatnya jangkauan perlindungan sosial bagi perempuan dengan keragaman identitas dan kerentanan.
	Outcome	1. Meningkatnya jangkauan perlindungan sosial bagi perempuan dengan keragaman identitas dan kerentanan melalui perbaikan kebijakan termasuk keberpihakan anggaran yang disediakan untuk perlindungan sosial, serta penjangkauan adminduk yang efektif;

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan integrasi data perlinsos dengan data pilah serta analisa kondisi kerentanan perempuan; 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam penentuan kriteria, serta verifikasi dan validasi data usulan untuk perlindungan sosial; 4. Meningkatnya kualitas program perlindungan sosial dengan perspektif GEDSI dan bertujuan untuk pemberdayaan bagi kesejahteraan perempuan; 5. Tersedianya kanal-kanal pengaduan yang aman bagi perempuan untuk pengawasan, kontrol implementasi program perlindungan sosial;				
			Output	1. Persentase perempuan rentan, marjinal yang dijangkau dalam perlindungan sosial; 2. Perbaikan tata kelola data dan integrasi data perlinsos dari lokal hingga nasional; 3. Persentasi partisipasi perempuan rentan marjinal dalam posisi strategis untuk				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				perlindungan sosial (penetuan kriteria, verifikasi dan validasi data); 4. Persentase pengembangan program perlindungan sosial yang memberdayakan dengan menggunakan analisa GEDSI 5. Persentase kanal-kanal pengaduan yang aman untuk pengawasan dan kontrol yang digunakan oleh perempuan.				
		Perempuan pekerja	Impact	Terpenuhinya hak-hak perempuan pekerja kelompok rentan, baik pekerja formal maupun informal, sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan berperspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) di setiap tahapan kerja.				
			Outcome	1. Terwujudnya tata kelola perlindungan bagi perempuan pekerja melalui perbaikan dan implementasi regulasi dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) & GEDSI; 2. Terpenuhinya perlindungan sosial bagi perempuan pekerja kelompok rentan melalui pendataan yang akurat dan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				terintegrasi antar K/L agar efektif; 3. Tersedianya data pilah potensi perempuan pencari kerja untuk pemenuhan akses peluang kerja dan data pilah kerentanan perempuan pekerja kelompok rentan untuk pemenuhan perlindungan di setiap tahapan kerja.; 4. Tersedianya layanan pengaduan dan penanganan kasus bagi perempuan pekerja kelompok rentan yang berprinsip berpusat pada keadilan bagi korban; 5. Meningkatnya jumlah unit layanan dan fasilitas pendukung kerja sesuai kebutuhan dari masing-masing kelompok perempuan pekerja rentan; 6. Adanya penyediaan dan perbaikan layanan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan pekerja; 7. Tersedianya sistem pengawasan dan monitoring dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil untuk perlindungan di				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				setiap tahapan kerja.				
			Output	1. Adanya kebijakan dan implementasi kebijakan untuk tata kelola perlindungan perempuan pekerja kelompok rentan dengan menggunakan perspektif HAM & GEDSI; 2. Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial bagi perempuan pekerja kelompok rentan melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi antar K/L; 3. Adanya data terpilah yang terintegrasi terkait perempuan pekerja dalam dan luar negeri di setiap tahapan kerja; 4. Meningkatnya persentase layanan pengaduan dan penanganan kasus bagi perempuan pekerja kelompok rentan yang berprinsip berpusat pada keadilan bagi korban di semua lingkup; 5. Meningkatnya kualitas layanan dan jumlah fasilitas pendukung kerja di setiap jenis sektor perempuan pekerja kelompok rentan melalui indikator yang terukur dan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				mengedepankan prinsip pelayanan publik; 6. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan perempuan pekerja; 7. Adanya saluran pengawasan dan *monitoring* yang dapat diakses oleh perempuan pekerja kelompok rentan.				
		Penghapusan perkawinan anak	Impact	Percepatan turunnya angka kasus perkawinan usia anak dan usia ≤ 19 tahun di Indonesia				
			Outcome	1. Meningkatnya kualitas dan ketangguhan keluarga untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan ≤ 19 tahun; 2. Meningkatnya persentase partisipasi sekolah bagi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal, terutama dari keluarga miskin dan daerah-daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan Terluar), Pegunungan dan Kepulauan; 3. Menurunnya angka kemiskinan; 4. Menguatnya peran pemerintah dari tingkat desa – nasional untuk pencegahan dan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				penanganan perkawinan anak dan usia ≤ 19 tahun.				
			Output	1. Menguatnya peran & pendidikan keluarga; 2. Memperluas aksesibilitas sarana prasarana layak, pengetahuan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi, mendukung partisipasi perempuan; 3. Penyandang disabilitas dan kelompok marginal dalam pendidikan formal dan informal; 4. Meningkatnya peluang lapangan pekerjaan dan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan daerah-daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); 5. Penyusunan, implementasi, pemantauan & evaluasi terhadap regulasi (kebijakan/program/anggaran) untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan usia ≤ 19 tahun dari tingkat desa sampai nasional.				
		Kepemimpinan perempuan	Usulan	1. Persentase peningkatan minimal 30% jumlah perempuan, penyandang disabilitas				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				dan kelompok marginal yang hadir dalam musrenbang di segala tingkatan; 2. Penyediaan data untuk isu perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal dari desa sampai nasional; 3. Peningkatan kualitas kepatuhan pada peraturan perundangan, implementasi kebijakan dan penganggaran yang responsif gender sebagai komitmen pengarusutamaan gender di semua sektor pembangunan; 4. Peningkatan pengadaan dan kualitas sarana prasarana yang responsif gender, ramah disabilitas dan inklusif; 5. Peningkatan program pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal untuk memperkuat kapasitas, partisipasi dalam perencanaan pembangunan; 6. Penyediaan forum pemantauan terhadap implementasi perencanaan; 7. Diintegrasikannya partisipasi dalam				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				perencanaan pembangunan menjadi indikator partisipasi politik perempuan di Indonesia.				
		Kesehatan perempuan	Impact	Meningkatnya akses perempuan, remaja, dan kelompok marjinal pada layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu-anak, dan layanan kesehatan aksesibel dengan akomodasi layak.				
			Outcome	1. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) khususnya di wilayah Indonesia Timur; 2. Tersedianya akses alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi tubuh dan meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi bagi laki-laki; 3. Menguatnya layanan KTD; 4. Meningkatnya pelibatan laki-laki dan keluarga dalam program kesehatan ibu dan anak; 5. Meningkatnya layanan dan cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara; 6. Meningkatnya program dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja yang mudah dijangkau di sekolah dan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				komunitas oleh remaja dari semua kelompok; 7. Adanya peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan di daerah pelosok dan bagi kelompok rentan serta marjinal; 8. Tersedianya layanan kesehatan yang aksesibel dengan akomodasi layak bagi difabel di faskes terdekat; 9. Meningkatnya program dan anggaran kesehatan reproduksi, kesehatan ibu-anak, kesehatan reproduksi remaja, dan perbaikan faskes desa dalam perencanaan pembangunan hingga di tingkat desa.				
			Output	1. Program perencanaan kehamilan dan penguatan *screening* kesehatan sebelum kehamilan dan saat kehamilan awal; 2. Penambahan dokter spesialis obgyn dan anak di kabupaten tinggi AKI dan AKB; 3. Penambahan sarana prasana layanan bersalin di Poskesdes dan tenaga kesehatan di daerah pelosok/jauh;				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				4. Mengintegrasikan layanan praktik bidan swasta di desa dengan layanan BPJS; 5. Pelatihan perawatan NICU bagi tenakes dan penambahan fasilitas kesehatan layanan NICU di kabupaten yang memiliki angka prematur dan AKB tinggi; 6. Pelatihan bagi kader tentang pendampingan bayi premature; 7. Penyediaan alat kontrasepsi secara lengkap sesuai dengan kondisi tubuh dan alkon bagi laki-laki serta biaya pemasangan alkon masih berbayar; 8. Pelibatan suami, toga, dan toma dalam edukasi kesehatan ibu anak dan kontrasepsi; 9. Sosialisasi deteksi dini kanker secara persuasif dengan melibatkan toma/toga/dan suami, dan penyediaan layanan deteksi dini kanker secara reguler an 'jemput bola' ke komunitas; 10. Pemberian vaksin HPV pada remaja secara gratis di semua daerah untuk mengurangi				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				resiko penyakit kanker serviks di semua daerah dan layanan USG payudara masuk dalam cakupan layanan BPJS; 11. Merevitalisasi layanan posyandu remaja di komunitas. penyediaan layanan kesehatan reproduksi remaja di sekolah dan PKBM bagi remaja dari semua kelompok; 12. Penyediaan layanan konseling kespro remaja online; 13. TOT bagi remaja penggerak kespro di sekolah dan komunitas, termasuk bagi remaja di SLB dan sekolah inklusi; 14. Penambahan tenaga kesehatan di daerah pelosok/kepulaua dan program magang mahasiswa kedokteran/perawat/bidan di daerah pelosok/kepualauan; 15. Penambahan sarana prasarana kesehatan di daerah pelosok/kepulauan dan durasi jam layanan kesehatan di puskesmas/pustu/poskesdes; 16. Integrasi layanan praktik bidan swasta di desa dengan layanan BPJS;				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				17. Perbaikan fasilitas kesehatan desa menjadi program prioritas pembangunan desa yang tertuang dalam Permendes PDT; 18. Penyediaan layanan kesehatan mental dan penambahan psikolog di Puskesmas; 19. Beasiswa sekolah kesehatan (bidan/tenakes) bagi warga di daerah pelosok; 20. Penyediaan psikolog di Puskesmas; 21. Melakukan sosialisasi SOP layanan kesehatan aksesibel dengan akomodasi layak bagi difabel kepada penyedia layanan kesehatan; 22. Melakukan TOT/Pelatihan layanan kesehatan aksesibel dengan akomodasi layak kepada pengelola faskes dan tenakes; 23. Penyediaan dukungan sarana prasarana layanan kesehatan yang aksesibel dengan akomodasi layak; 24. Memasukkan layanan kesehatan yang aksesibel dengan akomodasi layak dalam penilaian akreditasi faskes;				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				25. Penyediaan layanan pendampingan kesehatan bagi disabilitas mental saat hamil dan melahirkan.				
		Perempuan dan lingkungan hidup	Usulan	1. Program pemberdayaan perempuan untuk memperkuat kapasitas perempuan, anak dan disabilitas agar terlibat dalam proses-proses perencanaan pembangunan baik dalam isu adat dan kebencanaan; 2. Peraturan-peraturan di pusat dan daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat termasuk mewujudkan pemenuhan hak kolektif perempuan adat; 3. Peningkatan jumlah masyarakat adat termasuk di dalamnya perempuan adat, anak dan disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna dalam ruang-ruang; 4. Penguatan regulasi di daerah dan pusat terkait kebencanaan yang menggunakan perspektif GEDSI dan melibatkan perempuan, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
		Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Outcome	1. Persentase peningkatan jumlah kabupaten/kota yang membentuk UPTD PPA; 2. Persentase peninkatan polres dan polsek yang memiliki unit PPA; 3. Meningkatnya kualitas penanganan kasus dengan perspektif korban dan GEDSI; 4. Optimalisasi implementasi kebijakan untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dan inklusif; 5. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan nasional oleh pemerintah daerah untuk memastikan relevansinya.				
			Output	1. Membangun kolaborasi multi pihak lintas sektor dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah untuk memperkuat peran dan fungsi UPTD PPA dalam menyediakan dan memberikan layanan untuk penanganan, pelindungan dan pemulihan korban; 2. Melakukan pelatihan kepada petugas layanan pemerintah dan non pemerintah agar memiliki kapasitas dan perspektif				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				dalam memnyediakan dan memberikan layanan bagi korban; 3. Membangun kolaborasi dan koordinasi dengan Unit PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan kasus dengan menggunakan perspektif korban dan sosial inklusi; 4. Melakukan pelatihan kepada APH mengenai perspektif korban dan sosial inklusi dalam penanganan kasus berdasarkan peraturan perundangan agar UU yang relevan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar; 5. Melakukan pemantauan mengenai kualitas layanan yang disediakan dan diberikan oleh lembaga layanan; 6. Melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan bimtek kepada Lembaga Layanan Pemerintah dan Non Pemerintah menggunakan perspektif korban dan sosial inklusi; 7. Melakukan penguatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				dalam memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender dan inklusif diterapkan dan dilaksanakan oleh sektor terkait; 8. Mendorong Bappeda/Bappelitbangda daerah untuk melakukan pendampingan kepada semua sektor dalam menyusun renstra dan renja agar memenuhi prinsip PPRG Inklusif; 9. Mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji ulang kebijakan daerah yang terindentifikasi bertentangan dengan UU dan kebijakan nasional; 10. Mendorong pemerintah daerah melakukan revisi terhadap kebijakan daerah yang bertentangan dengan UU dan kebijakan nasional.				
		Perempuan dan anak berhadapan dengan hukum	Usulan	1. Menyediakan sarana dan prasarana terkait layanan dasar dan perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				marginal; 2. Meningkatkan pemahaman perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas, keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya tentang hukum dan hak warga negara terkait hukum; 3. Meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan stigma dan *labelling;* 4. Meningkatkan penerimaan dan memperkuat dukungan pada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum; 5. Menyediakan mekanisme perlindungan untuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas yang dilakukan atau difasilitasi oleh Aparat Penegak Hukum, Kementerian dan Lembaga terkait secara sinergis dan berkesinambungan; 6. Melakukan sensitisasi tentang kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
				kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian dan Lembaga terkait yang memberikan layanan dan perlindungan kepada perempuan- anak yang berhadapan dengan hukum; 7. Melakukan kajian kebijakan dan harmonisasi kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk penyandang disabilitas.				
13.	Pemenuhan Layanan Dasar	Pelayanan dasar adalah layanan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Pelayanan dasar mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan administrasi publik. Penyediaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah memiliki urgensi jangka panjang yang signifikan. Pelayanan yang baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan administrasi publik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan akses dan kualitas pelayanan dasar, pemerintah daerah dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Angka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kabupaten Gresik						

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		masih kurang optimal bahkan menjadi terendah di Jawa Timur pada tahun 2022. Selain itu Kabupaten Gresik harus segera memenuhi secara progressif pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar				
14.	Pembangunan Desa berbasis *Village Demand Driven*	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Hal tersebut menjadikan sistem pemerintahan Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah Desa dan Kepala Desa, melainkan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L

pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, pengelompokan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat Desa.

Pengarusutamaan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam Pembangunan Kemandirian Desa

	Paradigma Desentralisasi-Residualitas	Paradigma Rekognisi dan Subsidiaritas
Payung hukum	UU No. 32/2004 yang digantikan oleh UU No. 23/2014 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan	Sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government.*

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
			kabupaten/kota (*local state government)*					
		Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.				
		Delivery kewenangan dan program	Target	Mandat				
		Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaandan kemasyarakatan				
		Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek				

Keterangan

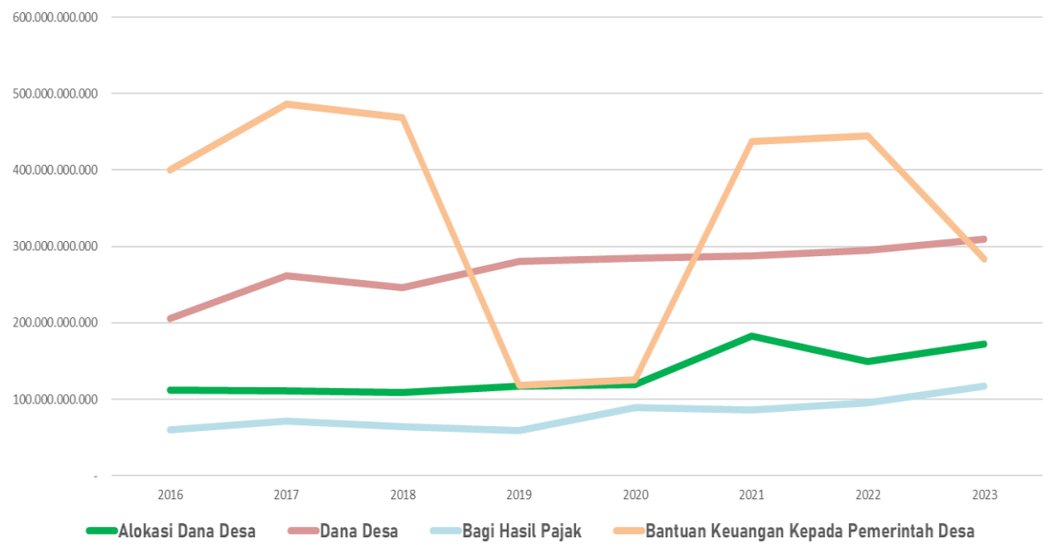
G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis			Level			
					G	N	R	L
		Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi				
		Model pembangunan	*Government driven development atau community driven development*	*Village driven development*				
		Pola ini akan mengarah pada pembangunan yang digerakkan oleh desa (*village driven development*), yang bersifat kolektif, inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri (*Self Governing Community*) harus dibarengi dengan adanya sumber daya yang handal, cakap, dan mumpuni dalam mengelola Desa. Sementara, faktanya mayoritas Desa belum memiliki kapasitas yang memadai akibat minimnya sumber daya manusia yang terlatih. Kondisi tersebut tentu saja akan menghambat proses percepatan pembangunan Desa. Sehingga, titik krusial untuk menciptakan kemandirian Desa diperlukan adanya sebuah intervensi untuk memperkuat sumber daya manusia Desa, baik aparatur Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, maupun masyarakat desa sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan Desa, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di skala lokal Desa.						

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L



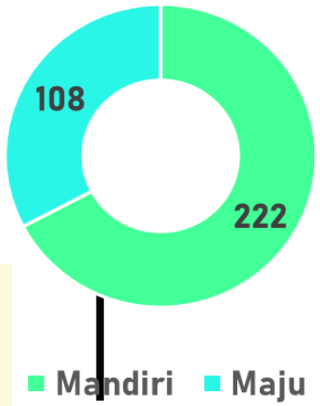
Alokasi Anggaran ke Desa di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2023

Bukti empiris *(evidence based)* keberpihakan pemerintah Daerah dalam mendorong Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa dapat dilihat dari gelontoran alokasi anggaran ke Desa yang hampir mencapai 1 Trilliun atau mencapai 22-26% dari

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik. Alokasi anggaran kepada Desa difungsikan lansung sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberpihakan pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam alokasi angggaran ke Desa dinilai efektif dalam pendekatan pengukuran kemandiran Desa melalui pendekatan Indeks				



Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
15.	Ketahanan Pangan Berbasis Protein dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan *linkage* dan logistik (*supply-value chain*) dan hub pangan (*food hub*). Ke depan diperlukan *upgrading* PIA Puspa Agro menjadi JATIM FOOD HUB didukung pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan Susut dan Sisa Pangan/*Food Loss and Waste* (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW. Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		mengoptimalkan input hilirisasi pangan / agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani. Gresik, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perikanan meskipun bukan penggerak utama basis perekonomian. Namun, perlu adanya pengembangan kawasan sentra produksi agro untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dan memastikan ketahanan pangan daerah. Hilirisasi produk pangan dari pertanian dan perikanan di Gresik masih perlu diperkuat untuk memastikan nilai tambah dan keberlanjutan produksi. Kabupaten Gresik memiliki rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan mencapai 25.790 Ha atau terluas kedua setelah peruntukan untuk pemukiman mencapai 27.962,64 Ha. Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya. Kegiatan usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan antara lain budidaya di tambak air payau dengan komoditas utama ikan bandeng, udang windu, kepiting bakau, udang vanamae dan sebagian udang putih. Budidaya tambak di air tawar atau tambak sawah dengan komoditas utama ikan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		bandeng, tawes, tombro, nila, sebagian udang windu dan udang vanname. Budidaya kolam dengan komoditas ikan tawes, ikan tombro dan ikan lele. Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur. Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan. Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah kabupaten Gresik memiliki BUMD yang bergerak dibidang energi yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas *Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas.* Untuk Gas *Pipa Dedicated* Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk *Compresed Natural Gas* berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG.				
16.	Pariwisata Religi dan Kelestarian Budaya Gresik	Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar yang khas yaitu wisata religi. Kabupaten Gresik memiliki 132 Obyek Daya Tarik Wisata. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan khususnya. Wisata religi dapat memperkuat kebanggaan dan identitas komunitas lokal, meningkatkan rasa keterhubungan dan kepemilikan terhadap situs-situs penting. Pengembangan wisata religi merupakan isu strategis karena memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, pelestarian budaya, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan identitas daerah, dan kerjasama antar daerah. Dengan memanfaatkan potensi situs-situs religius, Gresik dapat				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		meningkatkan daya tarik wisata, mengembangkan kapasitas ekonomi, dan memperkuat keberagaman budaya.				
17.	Akses Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	Akses infrastruktur dan konektivitas daerah memainkan peran krusial dalam pembangunan jangka panjang Gresik. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, desentralisasi pertumbuhan, daya saing regional, resiliensi terhadap krisis, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan lingkungan. Dengan menginvestasikan dalam infrastruktur dan meningkatkan konektivitas, Gresik dapat mengoptimalkan potensi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebutuhan akan akses infrastruktur dan konektivitas daerah merujuk Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Gresik sebagai KSN Grebangkertasusila yang meliputi Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Menganti, dan Kawasan Perkotaan Sidayu. Adapun tujuan dari pengembangan KSK ini antara lain untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis nasional melalui pengembangan Kawasan pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan penyediaan infrastruktur Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Terkait dengan konektivitas, selain jaringan jalan juga didukung rencana pengembangan transportasi kereta api di Kabupaten Gresik yang akan mengakomodasi rencana pengembangan transportasi transwilayah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Umum dan Jaringan Jalur				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		Kereta Api Khusus. Sedangkan rencana pengembangan pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah Kabupaten Gresik, antara lain: 1. Pelabuhan Pengumpul Pengembangan pelabuhan pengumpul Gresik di Kecamatan Gresik sebagai prasarana untuk melayani angkutan barang dan angkutan penumpang, yaitu Pelabuhan Gresik di Kecamatan Gresik. 2. Pelabuhan Pengumpan Regional Pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Kabupaten Gresik berupa pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Sangkapura. 3. Terminal Umum Pengembangan terminal umum di Kabupaten Gresik berupa Pelabuhan Manyar di Kecamatan Manyar yang melayani angkutan orang dan barang. 4. Terminal Khusus Pengembangan terminal khusus pada: 1) TUKS Pertamina di Kecamatan Gresik; 2) TUKS Pelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara di Kecamatan Gresik; 3) TUKS Pelabuhan PT. Indonesia Marina Shipyard di Kecamatan Gresik; 4) TUKS PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kecamatan Gresik; 5) TUKS PT. Sumbermas Indah Plywood di Kecamatan Gresik; 6) TUKS PT. PLN PJB III Gresik di Kecamatan Gresik; 7) TUKS PT. Semen Gresik di Kecamatan Gresik;				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		8) Pelabuhan PT. Jasa Mulia Abadi Raya di Kecamatan Kebomas; 9) Pelabuhan PT. Petrokimia di Kecamatan Manyar; 10) Pelabuhan PT. Karya Indah Alam Sejahtera di Kecamatan Manyar; 11) Pelabuhan PT. Siam Maspion Terminal di Kecamatan Manyar; 12) Pelabuhan PT. Smelting CO Jakarta di Kecamatan Manyar; 13) Pelabuhan But Saka Indonesia Pangkah di Kecamatan Manyar; 14) Perlabuhan perikanan di Kabupaten Gresik berupa Pelabuhan perikanan pantai yang dimanfaatakan oleh masyarakat nelayan sebagai tempat bersandarnya kapal nelayan. Pelabuhan perikanan tersebut antara lain: a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bawean di Kecamatan Sangkapura. b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Campurejo Panceng di Kecamatan Panceng Permasalahan fundamental yang dihadapi pembangunan infrastruktur di Gresik adalah capaian pembangunan dan kerangka pendanaan. Kemantapan kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 70,74% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah yaitu 10,31%. Nilai VC (*Volume-Capacity*) sebesar 52,17% mengindikasikan kategori Jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatasan konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai *Hinterland* Surabaya Metropolitan Area. Secara spesifik, keterbatasan konektivitas dapat meningkatkan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang mempengaruhi daya saing produk dan profitabilitas. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. Pemenuhan *mandatory spending* dalam pembiayaan infrastruktur ditemukan bahwa Kabupaten Gresik belum sepenuhnya memenuhi jika hanya ditinjau dari Belanja modal. Belanja modal Kabupaten Gresik berada pada rerata 10,12%. Nilai belanja modal lebih rendah dibandingkan rerata belanja Operasi 65,86% dan belanja transfer 23,70%. Akan tetapi, persentase ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastruktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rerata 16,20% per tahun.				
18.	Agenda Pembangunan Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2023-2043	Dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten dan Masyarakatnya, yaitu: (1) Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis Kabupaten Gresik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agro industri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan. Mendorong bergeraknya roda perekonomian daerah. Sektor-sektor kegiatan ekonomi utama: pertanian dan pertambangan & penggalian, industri, agro industri dan pariwisata, dijadikan motor penggerak tumbuhnya kegiatan pada sektor lainnya. Mata rantai pengolahan hasil				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		pertanian dan perindustrian di Kabupaten Gresik harus dapat diperpanjang sehingga nilai tambah yang dapat diciptakan dari pengolahan hasil-hasil pertanian tersebut dapat dinikmati oleh penduduk setempat dalam bentuk lapangan pekerjaan dan kenaikan pendapatan per kapita. Dapat dinikmati Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pendapatan kas daerah dari pajak dan retribusi yang semakin kuat, beragam dan meluas basisnya, dan dapat dinikmati oleh pengusaha/pedagang dalam bentuk variasi komoditas yang semakin beragam yang dapat diperdagangkan ke luar wilayah. Struktur perekonomian daerah akan semakin kuat bila dapat diciptakan diversifikasi kegiatan, dan *backward-forward linkages* yang meluas di antara kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. (2) Membuka dan pengembangan kawasan perbatasan, tertinggal, dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan. (3) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional. Pengembangan transportasi ini direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal, kereta api, bandara udara, dan transportasi sungai. (4) Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan.				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		(5) Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian, dan pariwisata. (6) Penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam berlandaskan kelestarian lingkungan. (7) Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, keterampilan dan wirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua lini sektor guna menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.				
19.	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip permbangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP). Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L

pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Gresik berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045

	Isu	Konten Isu
1	Kabupaten Gresik termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai Bengawasn Solo yang membawa dampak bencana banjir, penurunan kualitas air, sedimentasi, dan meningkatnya kepadatan permukiman di bantaran sungai	Eskalasi kejadian bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim, khususnya pada kawasan pesisir
2	Potensi bencana banjir	
3	Potensi bencana kebakaran hutan	
4	Potensi bencana perubahan iklim	
5	Potensi bencana tanah longsor	
6	Potensi bencana kekeringan	
7	Potensi bencana cuaca ekstrim dan putting	

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis		Level			
				G	N	R	L
			beliung				
		8	Potensi bencana abrasi				
		9	Dalam radius bahaya abrasi dan gelombang ekstrim				
		10	Memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi terutama pada DAS Bengawasn Solo dan DAS Lamong				
		11	Belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya	Kurang optimalnya pengelolaan persampahan khususnya kurang idealnya sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir (L1)				
		12	Bertambahnya limbah cair domestik				
		13	Peningkatan volume dan timbulan sampah				
		14	Terdapat wilayah yang belum terlayani sistem persampahan				
		15	Belum terpenuhinya standar kualitas dari sumber daya air dan pengolahan lengkap	Penurunan daya tampung badan air seiring dengan peningkatan volume kegiatan industri dan permukiman (L4)			
		16	Kurang optimalnya upaya dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya air				
		17	Terbatasnya ketersediaan sumber daya air yaitu air tanah dan air permukiman				
		18	Adanya pencemaran air sungai di wilayah utara dan selatan Kabupaten Gresik				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis		Level			
				G	N	R	L
		19	Pencemaran sungai, waduk, dan air laut				
		20	Peningkatan volume limbah cair permukiman, industri, dan pariwisata				
		21	Menurunnya debit sumber daya air pada musim kemarau				
		22	Kuantitas sumber daya air yang memenuhi beberapa pada luar wilayah Kabupaten Gresik				
		23	Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki perncanaan kebutuhan air baku				
		24	Ketersediaan air tergolong kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Gresik				
		25	Keterbatasan sumber daya air				
		26	Rendahnya nilai status air				
		27	Gagal panen diakibatkan oleh kurangnya pasokan air				
		28	Alih fungsi lahan pertanian				
		29	Adanya lahan kritis				
		30	Kerusakan hutan				
		31	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri				

Keterbatasan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan domestik

Penurunan daya dukung lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan terbuka (L2)

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis		Level			
				G	N	R	L
		32	Alih fungsi kawasan hutan untuk pengembangan industri				
		33	Berkurangnya luasan hutan mangrove				
		34	Alih fungsi lahan pada tanah pertanian yang subur menjadi permukiman dan industri				
		35	Masifnya kegiatan industri memengaruhi penuruna kualitas udara	Penurunan kualitas udara sebagai dampak dari peningkatan aktifitas industri (L3)			
		36	Gas rumah kaca dari kegiatan industri				
		37	Terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak	Sistem sanitasi yang belum komprehensif dan menyeluruh, terutama pada kawasan pesisir			
		1	Rendahnya kesadaran masyarakat atas isu kesehatan terkini, sehingga penularan penyakit lebih mudah tersebar	Lemahnya kesadaran akan kesehatan keluarga sebagai salah satu pondasi pembentuk generasi emas (S1)			
		2	Pengentasan stunting				
		3	Tingginya angka kematian ibu				
		4	Tingginya angka obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun				
		5	Akses terhadap layanan kesehatan seksual dan				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis		Level			
				G	N	R	L
			reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.				
		6	Penurunan keikutsertaan KB				
		7	Meningkatnya kehamilan pada usia remaja				
		8	Meningkatnya angka ibu rumah tangga dan anak dengan HIV				
		9	Meningkatnya perokok usia dini				
		10	Kurangnya fasilitas kesehatan dan pemantauan kesehatan secara rutin di daerah pelosok atau yang sulit untuk dijangkau				
		11	Preferensi penggunaan angkutan umum perkotaan	Terbatasnya fasilitas ruang publik yang mendukung kenyamanan dan keamanan anak dan golongan rentan			
		12	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah anak				
		13	Termasuk kedalam daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda masyarakat, serta kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian				
		14	Kurangnya sarana prasarana di kawasan umum yang menerapkan sistem ramah lansia				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis		Level			
				G	N	R	L
			dan difabel				
		15	Pengentasan kemiskinan				
		16	Pengalokasian ADD/ DD untuk penanggulangan kemiskinan (perbaikan RTLH, jambanisasi, air bersih)	Kurang optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat yang menyebabkan lambatnya penurunan angka kemiskinan (S2)				
		17	Program pemberdayaan masyarakat miskin perlu untuk dioptimalkan				
		18	Penertiban anak jalanan dan pengamen di jalan				
		1	Munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan yang berbatasan dengan Kota Surabaya				
		2	Peningkatan pembangunan jalan diantaranya seperti pembangunan jalan bebas hambatan antar kota yang terdiri dari Manyar-Tuban, pengembangan jalan strategis yaitu Jalan Raya Gresik, pembangunan *fly over* Teluk Lamong sebagai upaya penghubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat Kota Surabaya	Perkembangan ekonomi regional yang menyebabkan ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Gresik				
		3	Adanya kesenjangan wilayah dimana kegiatan terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kebomas,					

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis		Level			
				G	N	R	L
		dan Manyar					
		4	Kesetimbangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Masih lemahnya rehabilitasi ekonomi masyarakat terutama golongan rentan (E1)				
		5	Kesejahteraan masyarakat lansia					
		6	Angka pengangguran relatif tinggi	Terbatasnya akses UMKM pada sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi (E2)				
		7	Akses UMKM terhadap modal usaha					
		1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Kurang optimalnya kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan				
		2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)					
		3	Persentase anak usia 0–17 tahun dari kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah yang memiliki akta kelahiran	Kurangnya sinkronisasi dan keselarasan data kependudukan antar OPD (T1)				
		Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045					
20.	Kemajuan Iptek	Kabupaten Gresik menghadapi sejumlah isu strategis dalam pengembangan riset					

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
	Daerah	dan inovasi daerah yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2025–2029. Secara umum, kelembagaan riset di daerah belum terbentuk secara utuh dan terlembagakan dengan kuat. Meski Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) telah dibentuk, namun posisinya yang masih berada di bawah struktur Bappeda membatasi fleksibilitas operasional dan keleluasaan dalam pengembangan sistem riset yang mandiri. Kelembagaan riset juga masih terfragmentasi, belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem lintas perangkat daerah, serta belum memiliki jejaring kolaborasi yang kuat dengan perguruan tinggi, dunia usaha, maupun lembaga riset lainnya. Di sisi lain, pengembangan kapasitas sumber daya manusia peneliti di lingkungan pemerintah daerah juga masih terbatas. Jumlah ASN peneliti sangat minim, dan belum tersedia mekanisme penguatan kompetensi yang berkelanjutan. Ketiadaan pusat riset terpadu (seperti technopark atau inkubator inovasi) menyebabkan kegiatan riset yang dilakukan belum terakselerasi dan belum mampu menghasilkan inovasi yang aplikatif dan berdampak luas. Dari sisi pendanaan, riset dan inovasi di Gresik masih menghadapi keterbatasan yang serius. Belum terdapat alokasi anggaran yang jelas dan proporsional dalam struktur APBD untuk mendukung kegiatan riset secara konsisten. Tidak adanya mandatory spending untuk riset dan inovasi, serta minimnya insentif bagi inovator, baik ASN maupun masyarakat umum, memperlemah semangat dan partisipasi dalam menghasilkan solusi kreatif berbasis kebutuhan daerah. Selain itu, pemanfaatan hasil riset juga masih terbatas. Tidak tersedia sistem				

Keterangan

G	Global
N	Nasional
R	Regional
L	Lokal

No	Isu Strategis	Analisa Isu Strategis	Level			
			G	N	R	L
		dokumentasi dan pelaporan hasil riset dan inovasi daerah yang terintegrasi secara digital, seperti repositori data atau platform publikasi terbuka. Hal ini menyebabkan inovasi daerah sulit diakses, direplikasi, atau dikembangkan oleh pihak lain. Diseminasi hasil inovasi belum difasilitasi secara sistematis lintas OPD, desa, maupun mitra eksternal. Lebih lanjut, arah kebijakan riset daerah masih belum sepenuhnya sinkron dengan isu global dan prioritas nasional. Transformasi digital, pengembangan ekonomi hijau, energi baru terbarukan, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) belum diarusutamakan dalam agenda riset lokal. Demikian pula, keterlibatan sektor swasta dan kerja sama internasional belum menjadi bagian dari strategi pengembangan inovasi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan tata kelola riset dan inovasi di Kabupaten Gresik memerlukan upaya komprehensif dan lintas sektor, mencakup reformulasi kelembagaan BRIDA, pembangunan ekosistem kolaboratif pentahelix, penyediaan pendanaan inovatif, serta integrasi digitalisasi hasil riset. Penanganan isu-isu strategis ini akan menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.				

BAB III
VISI, MISI, & PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RANCANGAN AKHIR

RPJMD

KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029





3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1.1. VISI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029

Sebagai salah satu kabupaten dengan peran strategis di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Kabupaten Gresik terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan arah pembangunan yang lebih terarah dan terukur, visi pembangunan Kabupaten Gresik untuk periode 2025 - 2029 dirumuskan sebagai landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan permasalahan pembangunan, isu strategis, serta mengoptimalkan segenap potensi daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Gresik selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan pernyataan aspiratif dengan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan arah pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Setiap penggalan kata dalam visi tersebut mengandung makna mendalam yang mencerminkan komitmen dan integritas yang kuat dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama pemerintahan daerah dan masyarakat Gresik untuk mewujudkan pembangunan yang seutuhnya. Landasan filosofis ini menjadi pijakan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun uraian landasan filosofis dari visi Kabupaten Gresik 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penjabaran Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

	Uraian Filosofis
Pembangunan Gresik Maju	Pembangunan Gresik Maju mencerminkan komitmen Kabupaten Gresik untuk menjadi daerah yang berkembang secara dinamis, inovatif, dan berdaya saing dalam berbagai sektor. Kemajuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang modern, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Secara historis, Gresik telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran peradaban Islam di Nusantara sejak abad ke - 14. Keunggulan geografis dan potensi maritim menjadikan Gresik sebagai daerah yang memiliki fondasi kuat dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Sejarah panjang sebagai kota perdagangan dan industri memberikan modal besar bagi Gresik untuk terus maju dengan tetap mempertahankan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal.

	Uraian Filosofis
	Dalam perspektif pembangunan, kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh inovasi dan daya saing. Kabupaten Gresik perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung investasi, industri berbasis teknologi, serta ekonomi kreatif yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi. Kemajuan yang ingin dicapai juga harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Gresik yang maju.
Berkelanjutan	Berkelanjutan dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks Kabupaten Gresik, keberlanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang inklusif, hingga tata kelola pemerintahan yang berpihak pada keseimbangan jangka panjang. Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan berarti mendorong pertumbuhan yang stabil dan inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan sektor industri, pertanian, dan kelautan. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur harus memastikan bahwa pertumbuhan industrinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

	Uraian Filosofis
	Dari sisi sosial, keberlanjutan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan tetapi juga memperhatikan masyarakat di daerah perdesaan dan pesisir. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip *good governance,* di mana kebijakan pembangunan dirancang berdasarkan data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek tetapi juga memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Gresik.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Konsep Pusat Pertumbuhan Ekonomi dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menegaskan peran strategis daerah ini sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai salah satu kabupaten industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki potensi besar dalam sektor manufaktur, maritim, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Dengan posisi geografis yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta keunggulan sumber daya, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Kabupaten Gresik telah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur. Keberadaan berbagai industri skala besar, seperti semen, petrokimia, makanan dan minuman, serta industri berbasis logam dan energi, menjadikan Gresik sebagai motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Dengan semakin berkembangnya kawasan industri, Gresik memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

	Uraian Filosofis
	Untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri, diperlukan kebijakan yang mendukung hilirisasi industri, inovasi teknologi, dan efisiensi rantai pasok. Pemerintah daerah juga perlu mendorong industri yang berorientasi ekspor serta memberikan insentif bagi industri berbasis energi hijau dan ekonomi sirkular agar pertumbuhan industri tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke Selat Madura dan Laut Jawa, Gresik memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim. Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Internasional Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) menjadi aset penting dalam meningkatkan daya saing perdagangan dan logistik. Penguatan infrastruktur pelabuhan serta pengembangan industri berbasis kelautan, seperti perikanan, galangan kapal, dan ekspor hasil laut, menjadi kunci dalam memperkuat peran Gresik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Selain itu, sektor perdagangan juga terus berkembang, terutama dengan semakin luasnya jaringan distribusi barang dan jasa. Peningkatan konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri, dan pusat perdagangan akan semakin mempercepat perputaran ekonomi di Gresik. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Gresik membutuhkan infrastruktur yang kuat dan berkualitas. Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, serta jaringan transportasi yang terintegrasi akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, digitalisasi dan peningkatan akses internet di seluruh wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Investasi dalam infrastruktur hijau dan pembangunan yang ramah lingkungan juga perlu diprioritaskan agar pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, Gresik dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, efisien, dan berkelanjutan.
Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik 2025 - 2029, kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses

	Uraian Filosofis
	terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Dimensi kesejahteraan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang luas, serta keberlanjutan usaha bagi berbagai lapisan sosial. Kabupaten Gresik, dengan sektor industri, maritim, dan pertaniannya, memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur sosial lainnya. Gresik sebagai daerah industri harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan berbasis pendekatan *Gender, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Gresik perlu membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh agar masyarakat tetap dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi.

3.1.2. MISI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029

Untuk mewujudkan visi *"Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat"*, diperlukan langkah - langkah strategis yang terarah dan sistematis. Oleh karena itu, visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah selama periode 2025 - 2029. Rumusan misi Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

	Visi Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Misi Pertama	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
Misi Kedua	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Misi Ketiga	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
Misi Keempat	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.
Misi Kelima	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Penjelasan Misi pembangunan Gresik dirumuskan sebagaimana berikut:

Misi Pertama

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.

Misi pertama Kabupaten Gresik menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia yang menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan. Masyarakat Gresik diharapkan menjadi insan yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan kesiapan dan daya saing yang tinggi.

Dalam mewujudkan SDM yang unggul, aspek kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Gresik harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok, peningkatan kapasitas

tenaga medis, serta program kesehatan preventif dan promotif menjadi langkah - langkah yang harus diperkuat. Dengan masyarakat yang sehat, produktivitas tenaga kerja akan meningkat, sehingga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan akses pendidikan berkualitas mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum berbasis teknologi dan industri harus dikembangkan agar generasi muda Gresik siap menghadapi tantangan global. Selain itu, pelatihan guru secara berkelanjutan, modernisasi fasilitas pendidikan, serta program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu harus menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan di Gresik. Selanjutnya, Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan masyarakatnya, tetapi juga oleh karakter dan moralitas yang mereka miliki. Oleh sebab itu, pembangunan karakter menjadi aspek penting dalam misi ini. Nilai - nilai luhur seperti integritas, disiplin, kerja keras, dan kepedulian sosial harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun kehidupan bermasyarakat. Program kepemudaan yang menanamkan jiwa kepemimpinan serta pemberdayaan komunitas sosial dan keagamaan juga harus diperkuat untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kepribadian yang tangguh.

Melalui misi ini, Gresik memiliki visi untuk menjadi daerah dengan masyarakat yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kombinasi antara kesehatan yang baik, kecerdasan yang tinggi, karakter yang kuat, dan nilai - nilai religius yang terjaga, Kabupaten Gresik akan mampu menciptakan generasi penerus yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ke depan, Gresik tidak hanya ingin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga daerah yang mampu mencetak SDM berkualitas yang membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa.

Untuk mencapai misi "Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah", diperlukan berbagai pendekatan strategis yang mencakup aspek inklusivitas, pembangunan

berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pendekatan GEDSI sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan SDM di Gresik bersifat inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Dalam konteks pendidikan dan kesehatan, kebijakan harus dirancang agar dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial yang terpinggirkan. Di era industri 4.0, teknologi dan digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat mempercepat pencapaian SDM yang unggul melalui platform e - learning, smart school, dan integrasi teknologi dalam kurikulum. Dalam sektor kesehatan, digitalisasi layanan seperti rekam medis elektronik dan telemedicine dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Pembangunan kesehatan tidak hanya sebatas penyediaan layanan medis, tetapi juga mencakup aspek promotif dan preventif. Program pencegahan stunting, edukasi gizi, peningkatan sanitasi, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak menjadi strategi utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam riset kesehatan dapat menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan layanan kesehatan di Gresik. Gresik memiliki potensi budaya, ekonomi, dan sosial yang unik. Oleh karena itu, pendekatan dalam peningkatan kualitas SDM harus memperhatikan kearifan lokal. Pendidikan berbasis budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan pesantren dan lembaga keagamaan dapat menjadi strategi untuk menciptakan generasi yang unggul tetapi tetap berakar pada nilai - nilai daerah.

Keberhasilan pembangunan SDM tidak dapat dicapai hanya dengan peran pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan beasiswa, pelatihan vokasi, dan program CSR di bidang pendidikan serta kesehatan dapat mempercepat peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, peran masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung pendidikan dan kesehatan juga sangat penting.

Misi Kedua

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi kedua Kabupaten Gresik, yaitu *"Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing,"* memiliki tujuan besar untuk mengembangkan perekonomian daerah secara lebih cepat dan efisien. Salah satu aspek utama dalam misi ini adalah percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang cepat dan tepat waktu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini penting, terutama untuk mengurangi ketergantungan daerah pada sektor tertentu, seperti sektor formal atau migas, dan memperluas sektor - sektor ekonomi lain yang dapat menopang keberlanjutan ekonomi daerah. Aspek kedua yang tidak kalah penting dalam misi ini adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang merata berarti tidak ada daerah di Kabupaten Gresik yang tertinggal dalam hal infrastruktur, fasilitas, maupun kesempatan ekonomi. Baik wilayah perkotaan maupun pedesaan harus mendapatkan perhatian yang seimbang agar kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang lebih tertinggal bisa diminimalisir. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat di Gresik dapat merasakan manfaat pembangunan, baik dalam segi kesejahteraan, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik.

Selanjutnya, misi ini juga berfokus pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada potensi keunggulan lokal. Kabupaten Gresik memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti industri manufaktur, sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sektor - sektor ini secara maksimal, Gresik dapat menciptakan perekonomian yang tidak hanya bergantung pada sektor tertentu, tetapi lebih beragam dan lebih resilient terhadap perubahan ekonomi global. Selain itu, dengan mengandalkan

potensi lokal, Gresik juga dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi, karena potensi lokal tersebut sudah memiliki sumber daya yang ada di sekitar masyarakat. Namun, pengembangan sektor - sektor lokal tersebut tidak cukup hanya dengan meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan. Agar produk dan layanan yang dihasilkan dari Kabupaten Gresik dapat bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional, maka kualitas produk harus menjadi prioritas utama. Produk yang berkualitas akan meningkatkan citra Kabupaten Gresik di mata konsumen dan pasar, membuka peluang bagi produk lokal untuk diekspor, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pelaku usaha. Daya saing yang tinggi juga akan memperkuat posisi ekonomi Kabupaten Gresik dalam persaingan global, serta menarik lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor - sektor unggulan daerah ini.

Secara keseluruhan, misi kedua ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang cepat berkembang, merata, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal yang dapat bersaing secara global. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menggali potensi - potensi daerah secara optimal, Kabupaten Gresik diharapkan dapat menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih baik.

Dalam pencapaian misi kedua Kabupaten Gresik terkait dengan percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata dan berbasis potensi lokal yang berkualitas serta berdaya saing, beberapa pendekatan strategis dapat diterapkan. Pendekatan pertama adalah memaksimalkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Gresik. Hal ini mencakup pengidentifikasian sektor - sektor unggulan daerah, seperti industri manufaktur, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan memahami potensi tersebut, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor - sektor ini, seperti insentif bagi pelaku usaha lokal, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang - bidang tersebut.

Peningkatan produktivitas dan kualitas di sektor - sektor unggulan lokal juga harus menjadi fokus utama untuk memperkuat daya saing daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendukung perkembangan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terpadu dan terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Gresik akan memudahkan akses ke pasar, distribusi produk, serta meningkatkan efisiensi sektor industri dan jasa. Hal ini mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, fasilitas logistik, serta infrastruktur digital untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Infrastruktur yang baik juga akan mempermudah akses masyarakat ke layanan publik, pendidikan, dan kesehatan, yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Selanjutnya, Sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan teknis, serta penyuluhan kewirausahaan sangat penting. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, tenaga kerja di Kabupaten Gresik dapat memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor unggulan yang berkembang. Untuk mempercepat pembangunan perekonomian, kolaborasi dengan sektor swasta dan pengusaha lokal sangat penting. Pendekatan ini melibatkan penyediaan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang ramah investasi, pemberian insentif bagi pelaku usaha, serta kemudahan dalam perizinan usaha. Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan sektor - sektor unggulan di daerah. Selain itu, peningkatan kemampuan dan daya saing pengusaha lokal melalui kemitraan, pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta akses ke pasar yang lebih luas juga perlu diperhatikan.Dalam era globalisasi dan digitalisasi, penerapan teknologi dan inovasi menjadi hal yang sangat penting. Kabupaten Gresik perlu mendorong adopsi teknologi dalam berbagai sektor ekonomi, baik itu dalam industri

manufaktur, pertanian, maupun sektor jasa. Penggunaan teknologi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Selain itu, inovasi produk dan proses juga menjadi kunci agar produk - produk lokal dapat bersaing di pasar global. Pendekatan ini juga mencakup pengembangan ekonomi digital dan e - commerce untuk memudahkan pelaku usaha mengakses pasar yang lebih luas.

Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung merupakan aspek penting dalam mencapai misi ini. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal, seperti penyusunan anggaran yang tepat sasaran untuk sektor - sektor strategis, pengurangan hambatan birokrasi yang menghalangi pengusaha, serta pemberian insentif bagi sektor - sektor yang memiliki potensi besar. Selain itu, kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan ekonomi hijau juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian alam dan keberlanjutan sumber daya. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga internasional sangat penting untuk mendorong pencapaian misi ini. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat membuka peluang untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, serta menciptakan solusi inovatif yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat memperkuat jaringan distribusi produk lokal, sementara kerjasama dengan lembaga internasional dapat membuka peluang pasar ekspor dan akses ke pembiayaan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pendekatan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam harus menjadi perhatian. Pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi alam, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini juga melibatkan pengembangan sektor ekonomi hijau yang dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

Misi Ketiga

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi ketiga Kabupaten Gresik, yaitu *"Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat,"* memiliki fokus besar pada pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dan memadai memainkan peran penting dalam mempercepat perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

Infrastruktur yang berkelanjutan mengacu pada upaya pembangunan yang tidak hanya mengutamakan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks Gresik, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, yaitu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) atau penggunaan teknologi ramah lingkungan, sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga mencakup pengelolaan yang efisien terhadap fasilitas dan jaringan yang ada, seperti jalan, jembatan, sistem drainase, pasokan air bersih, dan energi. Dengan memperhatikan faktor keberlanjutan ini, pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi generasi mendatang.

Infrastruktur yang terintegrasi berarti pembangunan berbagai fasilitas dan jaringan infrastruktur yang saling terkait dan dapat berfungsi secara

sinergis untuk mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi ini harus mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, energi, komunikasi, dan layanan dasar lainnya, yang direncanakan dan dibangun secara terkoordinasi sehingga dapat mendukung kebutuhan perekonomian daerah secara menyeluruh. Sebagai contoh, pembangunan jalan dan pelabuhan yang terhubung dengan jaringan logistik dan distribusi barang akan meningkatkan efisiensi sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Demikian juga dengan pengembangan sistem energi terbarukan dan teknologi informasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi serta membuka akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat secara merata. Integrasi antara berbagai sektor ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Infrastruktur yang memadai dan terintegrasi menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, dapat meningkatkan konektivitas antara pusat - pusat ekonomi, memudahkan akses ke pasar, dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Ini akan meningkatkan efisiensi dan daya saing produk - produk lokal, baik di pasar domestik maupun internasional. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga mendukung pertumbuhan sektor - sektor industri unggulan Kabupaten Gresik, seperti industri manufaktur, pertanian, dan perikanan, dengan memfasilitasi alur distribusi yang lebih cepat dan lebih murah. Infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, seperti pembangunan fasilitas wisata dan transportasi yang terjangkau, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Gresik, baik domestik maupun internasional. Semua ini berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan sektor - sektor lain dalam perekonomian daerah.

Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya infrastruktur dasar yang memadai,

seperti jalan yang mulus, pasokan air bersih, sistem sanitasi yang baik, dan listrik yang stabil, kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Akses yang lebih mudah ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah yang baik, ruang terbuka hijau, dan sistem drainase yang efisien, juga akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih produktif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan daerah secara keseluruhan.

Infrastruktur yang modern dan efisien akan meningkatkan daya saing Kabupaten Gresik dalam menghadapi persaingan global. Di dunia yang semakin terhubung secara digital dan global, infrastruktur yang baik memungkinkan daerah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Misalnya, dengan pengembangan infrastruktur digital yang memungkinkan konektivitas internet yang cepat dan akses yang lebih luas ke teknologi baru, sektor ekonomi Gresik dapat bertransformasi dan bersaing di pasar global. Infrastruktur yang mendukung industri dan perdagangan akan mempermudah pelaku usaha lokal untuk mengakses pasar lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat inovasi. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi juga memiliki dampak sosial yang sangat besar. Infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi kesenjangan antar daerah, memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat pedesaan atau daerah terpencil untuk mengakses layanan publik dan ekonomi. Ini akan membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih banyak bagi masyarakat dari berbagai latar belakang dan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata. Selain itu, dengan adanya infrastruktur yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pembangunan infrastruktur sosial, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang

memadai, akan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.

Misi ketiga Kabupaten Gresik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, efisien, dan terintegrasi. Infrastruktur yang memadai dan terhubung akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat dan merata, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efisien, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat menciptakan sebuah landasan yang kuat untuk kemajuan jangka panjang Kabupaten Gresik, dengan memastikan bahwa kemajuan ekonomi yang dicapai tidak mengorbankan kualitas lingkungan atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam pencapaian misi ketiga Kabupaten Gresik beberapa pendekatan strategis yang dapat diterapkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berhasil dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi membutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data dan analisis kebutuhan infrastruktur di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta teknologi informasi. Dalam merencanakan pembangunan, perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, dan pakar perencanaan wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sektor saling mendukung dan terhubung dengan baik.

Infrastruktur yang berkelanjutan dan terintegrasi memerlukan kolaborasi yang erat antar berbagai sektor, baik itu sektor transportasi, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Misalnya, pembangunan jalan dan pelabuhan harus sejalan dengan pengembangan sistem logistik yang efisien untuk mendukung sektor industri dan perdagangan. Sektor energi juga harus terintegrasi dengan rencana pengembangan infrastruktur, dengan mempertimbangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kolaborasi ini juga mencakup integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam

pembangunan proyek - proyek infrastruktur. Pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur hijau *(green infrastructure)* yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan gedung dan jalan, pengelolaan drainase yang efektif untuk mencegah banjir, serta sistem energi terbarukan yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan upaya untuk melestarikan ekosistem dan mengurangi emisi karbon melalui pembangunan infrastruktur yang efisien dan tidak merusak alam. Pemanfaatan teknologi yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya alam juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam pembangunan infrastruktur, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Melalui konsultasi publik, survei, dan forum diskusi, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap proyek - proyek infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang berkelanjutan.

Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Pendekatan

ini mencakup penerapan teknologi terbaru dalam konstruksi, seperti pemanfaatan teknologi digital (smart infrastructure), yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan untuk mempermudah koordinasi antar instansi terkait dan meningkatkan transparansi dalam proses pembangunan. Selain itu, inovasi dalam desain dan konstruksi infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi juga perlu diperkenalkan. Misalnya, penggunaan bahan bangunan yang lebih ringan namun kuat, serta sistem energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk penerangan jalan umum dan fasilitas publik.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan memerlukan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, pendekatan pembiayaan yang inovatif perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan proyek - proyek infrastruktur. Pendekatan ini mencakup pencarian sumber pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta melalui skema Public - Private Partnership (PPP), pembiayaan berbasis kinerja, dan mekanisme pembiayaan kreatif lainnya. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan untuk memperoleh pembiayaan yang lebih fleksibel, serta memanfaatkan dana yang tersedia melalui program - program pemerintah pusat maupun lembaga internasional yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Setelah infrastruktur dibangun, penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada dikelola dan dipelihara dengan baik. Pendekatan ini mencakup penyusunan rencana pemeliharaan yang berkelanjutan agar infrastruktur dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Pemeliharaan yang efisien juga mengurangi biaya perbaikan yang tidak perlu dan memperpanjang umur infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan membantu mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan solusi yang tepat sebelum

masalah tersebut berkembang lebih besar. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, perlu ada pengembangan kapasitas dan keahlian lokal dalam sektor konstruksi dan teknik. Melalui pelatihan dan pendidikan, sumber daya manusia lokal dapat dilibatkan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah dalam hal penghematan biaya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.

Misi Keempat

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.

Misi keempat Kabupaten Gresik, *"Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat,"* menekankan pentingnya reformasi dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, transparansi berarti memberikan akses yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan, anggaran, dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Salah satu aspek penting yang perlu diterapkan adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan informasi secara online melalui platform pemerintah yang mudah diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk penggunaan dana publik, proses pengadaan barang dan jasa, serta alokasi anggaran untuk berbagai sektor. Hal ini dapat mengurangi praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik - baiknya untuk kepentingan rakyat.

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik mengenai setiap kebijakan, alokasi anggaran, dan implementasi program yang dilakukan. Akuntabilitas dapat dijalankan dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh masyarakat. Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang baik, serta audit yang transparan, menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan inti dari misi ini. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memberikan rasa keadilan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam hal infrastruktur pelayanan, ketersediaan informasi, dan efisiensi prosedur. Untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, perlu ada inovasi dalam proses dan sistem pemerintahan. Ini bisa mencakup penerapan teknologi baru, pembaruan prosedur kerja, serta penciptaan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inovasi juga dapat muncul dari pemberdayaan masyarakat, di mana mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam bentuk forum musyawarah desa maupun sistem partisipasi digital. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pengawasan merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mengembangkan sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga independen. Salah

satu bentuk pengawasan yang dapat diterapkan adalah pengawasan berbasis masyarakat, di mana masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan penyimpangan atau ketidakberesan dalam pemerintahan melalui kanal yang aman dan transparan. Agar sistem pemerintahan lebih berorientasi pada pelayanan terbaik, pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan yang akan diterapkan, baik melalui forum - forum terbuka, konsultasi publik, atau mekanisme lainnya.

Misi keempat ini berfokus pada penyempurnaan sistem pemerintahan Kabupaten Gresik agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan transparansi, akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta inovasi dalam sistem pemerintahan, diharapkan Gresik dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gresik, memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Untuk mencapai misi keempat diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup berbagai aspek dalam pemerintahan. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan perbaikan pada sisi administratif dan teknis, tetapi juga pada budaya organisasi, keterlibatan masyarakat, serta penerapan teknologi yang mendukung efisiensi dan transparansi. Salah satu pendekatan utama dalam pencapaian misi ini adalah reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Reformasi birokrasi mencakup perbaikan dalam sistem manajemen SDM di pemerintahan, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta penerapan sistem kerja yang lebih transparan dan efisien. Proses ini juga melibatkan penyederhanaan prosedur administratif, sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan budaya kerja yang melayani dengan orientasi pada kepuasan publik harus menjadi bagian dari strategi ini. Dengan reformasi

birokrasi yang baik, diharapkan setiap unit pemerintah dapat bekerja lebih produktif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Kabupaten Gresik perlu mengadopsi teknologi informasi dalam segala aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data publik, pelayanan administrasi, dan komunikasi dengan masyarakat. Sistem e - government yang berbasis pada platform digital dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti pengurusan izin, pendaftaran berbagai dokumen, atau pembayaran pajak daerah. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung pelaksanaan anggaran dan proyek pemerintah melalui portal publik yang terbuka. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan mendorong pengurangan praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengawasan yang ketat dan transparan merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Gresik perlu membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh, baik dari dalam (pengawasan internal) maupun luar (pengawasan eksternal). Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah membentuk atau memperkuat lembaga yang bertugas melakukan audit dan pengawasan, seperti inspektorat daerah atau lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran daerah dan program pemerintah. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting. Pengembangan mekanisme pengaduan publik yang transparan, misalnya melalui aplikasi atau platform online, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan setiap ketidakwajaran atau penyimpangan yang terjadi. Dengan sistem pengawasan

yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program.

Pendekatan lain yang sangat penting dalam pencapaian misi keempat ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membentuk forum - forum konsultasi publik di tingkat kecamatan atau desa, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan terkait pembangunan daerah. Peningkatan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah desa atau mekanisme serupa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan penting lainnya adalah membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah Kabupaten Gresik perlu memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki standar pelayanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan budaya pelayanan yang prima di setiap lini pemerintahan, mulai dari aparat pemerintah yang berada di kantor kecamatan hingga tingkat kabupaten, harus diprioritaskan. Pelayanan yang ramah, cepat, dan efektif akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Program pelatihan untuk aparatur pemerintah mengenai etika pelayanan publik dan keterampilan komunikasi juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap petugas pemerintahan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, penilaian kinerja berbasis hasil yang mengutamakan kepuasan masyarakat perlu diterapkan untuk memotivasi ASN untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Akuntabilitas keuangan merupakan komponen utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Gresik harus mengimplementasikan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan laporan keuangan daerah dapat diakses secara terbuka oleh publik, serta mendapatkan audit secara berkala dari lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, sistem penganggaran yang partisipatif, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan terkait alokasi anggaran, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Ini juga membantu masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki hak suara dalam perencanaan anggaran daerah.

Misi Kelima

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Misi kelima Kabupaten Gresik, *"Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar,"* memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup warga Gresik dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Misi ini mencakup dua aspek utama meliputi menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi inti dari misi ini. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sangat penting untuk memberikan peluang pekerjaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas dan keberlanjutannya. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu fokus pada sektor - sektor ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor industri, pertanian, pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif yang semakin

berkembang. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta, pelaku industri, dan sektor pendidikan untuk merancang program yang dapat menciptakan peluang kerja, termasuk di daerah - daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Selain itu, pengembangan kawasan industri yang berbasis pada sumber daya lokal dapat membuka lebih banyak peluang kerja, mengurangi ketergantungan pada sektor informal, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih stabil bagi masyarakat. Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus menjadi fokus utama. Pelatihan vokasi, kursus keterampilan, dan pendidikan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini akan mempersiapkan masyarakat agar lebih siap dan kompetitif di dunia kerja. Dengan memanfaatkan teknologi dan industri berbasis digital, pemerintah dapat membuka peluang untuk pekerjaan jarak jauh atau pekerjaan berbasis teknologi yang semakin diminati di era modern ini.

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap warga Gresik, tanpa terkecuali, memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar tersebut. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk seluruh masyarakat. Program ketahanan pangan, pemberdayaan petani lokal, serta distribusi pangan yang merata sangat penting untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Selain itu, peningkatan sistem pertanian yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Pemenuhan kebutuhan sandang dan papan harus memperhatikan aspek ekonomi yang dapat menciptakan akses yang lebih luas terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Program pembangunan perumahan dengan sistem subsidi atau pembiayaan berbasis masyarakat, serta pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan sosial, perlu diprioritaskan. Program perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah, atau yang dikenal dengan nama rumah subsidi, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah bagi masyarakat Gresik. Akses terhadap pendidikan yang

berkualitas menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa masyarakat Gresik dapat berkembang dan bersaing di dunia global. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu diperhatikan dengan serius. Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, peningkatan kualitas guru, serta modernisasi fasilitas pendidikan dapat memastikan bahwa setiap anak di Gresik memperoleh pendidikan yang layak dan dapat membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar untuk memastikan masyarakat dapat hidup produktif dan berkualitas. Untuk itu, penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Gresik perlu menjadi prioritas. Ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta program - program kesehatan preventif yang fokus pada pencegahan penyakit. Selain itu, perlu ada jaminan akses kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti melalui program jaminan kesehatan daerah atau sinergi dengan program BPJS Kesehatan.

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif sangat penting. Sektor ini terbukti memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah harus mendorong pemberdayaan UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, serta memfasilitasi pemasaran produk - produk lokal baik di pasar domestik maupun internasional. Penguatan sektor ekonomi kreatif, seperti seni, desain, kuliner, dan pariwisata, juga akan membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki Gresik. Program inkubasi bisnis, pemberian bantuan permodalan, serta pelatihan bagi pengusaha lokal dapat membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM. Selain itu, pengembangan pasar digital atau e - commerce untuk UMKM di Gresik bisa menjadi strategi yang efektif untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mencapai misi ini diperlukan berbagai pendekatan strategis yang mencakup kebijakan ekonomi yang inklusif, penguatan sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan pertama yang harus diterapkan adalah pembangunan ekonomi inklusif. Perekonomian yang berkembang harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi utama. Akses permodalan yang lebih luas, pelatihan wirausaha, serta digitalisasi usaha dapat membantu UMKM tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah daerah harus mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja dalam sektor industri, pertanian, dan perikanan yang berbasis keunggulan lokal. Dengan kebijakan yang berpihak pada industri padat karya dan ekonomi kreatif, lebih banyak masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam memperluas kesempatan kerja. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja di Gresik memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendirian dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) serta kerjasama dengan dunia usaha dapat memastikan lulusan pelatihan langsung terserap ke dunia kerja. Selain itu, penguatan pendidikan berbasis teknologi dan industri menjadi langkah penting agar generasi muda siap menghadapi persaingan global. Tidak hanya pendidikan formal, program sertifikasi keterampilan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja informal juga harus diperluas agar seluruh masyarakat dapat meningkatkan daya saingnya di pasar tenaga kerja. Selain menciptakan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah harus memastikan akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak bagi semua warga. Ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui modernisasi sektor pertanian dan perikanan, sehingga produksi pangan meningkat dan harga tetap stabil. Di sektor kesehatan, pemerataan fasilitas medis, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta program jaminan

kesehatan yang inklusif harus menjadi prioritas utama. Selain itu, program pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat membantu mengurangi jumlah warga yang tinggal di permukiman tidak layak huni.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik, transportasi umum yang terjangkau, serta akses internet yang luas akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Digitalisasi dalam pelayanan publik serta adopsi teknologi dalam sektor industri juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat Gresik akan lebih mudah dalam mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Keberhasilan peningkatan taraf hidup masyarakat tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi dengan perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu menyediakan pelatihan kerja, beasiswa pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, komunitas lokal juga harus didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, maka pembangunan di Gresik dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan dalam pencapaian misi ini harus bersifat menyeluruh dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Dengan menggabungkan strategi pembangunan ekonomi inklusif, penguatan SDM, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur, serta kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, Kabupaten Gresik dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dirancang untuk memastikan arah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima

misi utama telah dirumuskan sebagai strategi implementasi dalam berbagai sektor pembangunan. Setiap misi memiliki keterkaitan erat dengan landasan filosofis visi guna memastikan perencanaan yang holistik dan terarah. Berikut ini adalah hubungan antara kelima misi dengan setiap penggalan filosofis visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029:

Tabel 3.3 Keselarasan Filosofis Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Landasan Filosofis Visi	Keterkaitan dengan Misi
Pembangunan Gresik Maju Pembangunan yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing dengan infrastruktur modern dan tata kelola pemerintahan yang efektif	Misi Keempat. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Berkelanjutan Menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan	Misi Ketiga. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menegaskan peran Gresik sebagai motor penggerak ekonomi berbasis industri dan perdagangan	Misi Kedua. Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.
Kesejahteraan Masyarakat Mewujudkan peningkatan kualitas hidup yang merata dengan akses terhadap layanan dasar	Misi Pertama. Memperkuat insan Gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah.
	Misi Kelima. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui

Landasan Filosofis Visi	Keterkaitan dengan Misi
	penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3.1.3. TUJUAN RPJMD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan rangkaian kinerja yang mencerminkan pencapaian visi dalam kurun waktu lima tahun, yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025 - 2045 serta RPJMN Tahun 2025 - 2029. Sedangkan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan hasil penyelenggaraan pembangunan daerah guna mencapai tujuan RPJMD. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang - kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaranantara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rumusan pembangunan tujuan sasarn pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

		Tujuan	Indikator Kinerja
Misi Pertama	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia
			Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Kesalehan Sosial
Misi Kedua	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi
Misi Ketiga	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Misi Keempat	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi

		Tujuan	Indikator Kinerja
Misi Kelima	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka

Penajaman tujuan pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan Pertama

Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia

Fokus utama dari tujuan misi pertama adalah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia, yang mencerminkan konsep *Inclusive Human Development*. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan karakter moral. Dengan pendekatan yang inklusif, seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, dapat mengakses manfaat pembangunan secara merata.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi ini, terdapat tiga indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran utama dalam melihat kualitas SDM di Gresik, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa masyarakat Gresik memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar yang dapat meningkatkan kapasitas

mereka dalam berkontribusi pada pembangunan daerah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa pembangunan SDM di Gresik berjalan secara inklusif dan merata bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama perempuan. Dengan meningkatkan IPG, diharapkan terjadi kesetaraan dalam akses pendidikan, peluang kerja, serta partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Kesetaraan gender ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat SDM Gresik agar lebih tangguh dan berdaya saing. Selain aspek intelektual dan kesehatan, pembangunan karakter juga menjadi pilar utama dalam misi ini, yang diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Indikator ini mencerminkan tingkat moralitas dan kepedulian sosial masyarakat Gresik dalam kehidupan sehari - hari. Dengan meningkatnya IKS, diharapkan masyarakat Gresik tidak hanya unggul dalam aspek kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai - nilai keagamaan dan sosial.

Pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan SDM di Gresik benar - benar inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Beberapa tantangan utama dalam konteks GEDSI di Gresik meliputi kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan pekerjaan, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, serta marginalisasi kelompok sosial tertentu. Dengan menerapkan pendekatan GEDSI, pembangunan SDM di Gresik dapat menjadi lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan daerah.

Tujuan Kedua

Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing

Fokus tujuan dalam pencapaian misi kedua Kabupaten Gresik adalah mewujudkan transformasi ekonomi yang didukung oleh optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing, atau yang disebut sebagai *Advanced Indigenous Economy*. Transformasi ini tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan

ekonomi dalam angka, tetapi juga pada bagaimana ekonomi daerah berkembang secara berkelanjutan dengan mengandalkan keunggulan lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Filosofi utama dari misi kedua ini adalah percepatan pembangunan ekonomi yang merata, berbasis potensi unggulan lokal yang berkualitas, serta memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu, tujuan transformasi ekonomi ini berorientasi pada bagaimana Gresik dapat beralih dari model ekonomi yang bersifat eksploitatif menjadi ekonomi berbasis inovasi, nilai tambah, dan keberlanjutan.

Optimalisasi potensi daerah menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan ini. Gresik memiliki berbagai sektor unggulan, seperti industri manufaktur, pertanian modern, perikanan, dan ekonomi kreatif, yang jika dimanfaatkan secara maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini sejalan dengan filosofi misi kedua yang menekankan pemerataan pembangunan ekonomi, agar tidak hanya terpusat di daerah perkotaan dan sektor industri besar, tetapi juga merambah sektor - sektor berbasis masyarakat di pedesaan. Dengan optimalisasi potensi lokal ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya akan meningkatkan angka PDRB, tetapi juga akan membuka lebih banyak peluang bagi UMKM dan usaha berbasis komunitas, sehingga mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah. Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi Gresik. Di era globalisasi dan digitalisasi, produk serta tenaga kerja dari Kabupaten Gresik harus mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, daya saing ekonomi ini harus didukung oleh inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Semakin tinggi daya saing suatu daerah, semakin besar pula peluang investasi yang masuk, serta semakin luas akses pasar bagi produk lokal. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, tangguh, dan inklusif.

Indikator utama dalam mengukur keberhasilan tujuan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan seberapa besar dampak dari transformasi ekonomi, optimalisasi potensi daerah, dan peningkatan daya

saing terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menandakan bahwa sektor - sektor unggulan di Gresik berkembang secara optimal dan mampu bertahan menghadapi dinamika ekonomi global. Lebih jauh lagi, indikator ini juga dapat menggambarkan keberhasilan pemerataan ekonomi, di mana sektor - sektor ekonomi berbasis lokal mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Ketiga

Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan

Fokus utama dalam pencapaian tujuan misi ketiga Kabupaten Gresik adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang strategis, berkelanjutan, dan terintegrasi guna menciptakan konektivitas daerah yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Filosofi utama dari misi ini adalah bahwa infrastruktur bukan sekadar sarana fisik, tetapi juga fondasi yang menentukan daya saing ekonomi, efisiensi distribusi, serta kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang baik harus mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, tujuan dari pembangunan infrastruktur dalam misi ini tidak hanya sebatas mempercepat konektivitas fisik antarwilayah, tetapi juga menciptakan sistem infrastruktur yang mampu bertahan dalam jangka panjang, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Gresik.

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan tujuan ini adalah *Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)*, yang mencerminkan tingkat investasi dalam infrastruktur dan aset tetap yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PMTB menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan secara optimal dan berkontribusi terhadap produktivitas sektor industri, perdagangan, serta investasi. Dengan adanya infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi,

biaya logistik dapat ditekan, daya saing produk lokal meningkat, dan efisiensi distribusi barang serta jasa menjadi lebih baik. Hal ini selaras dengan filosofi misi ketiga, di mana pembangunan infrastruktur tidak hanya dimaksudkan sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Gresik.

Selain aspek ekonomi, indikator *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* juga menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Filosofi pembangunan berkelanjutan dalam misi ketiga menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, infrastruktur yang dibangun harus memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem, termasuk manajemen limbah, efisiensi energi, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Infrastruktur hijau, sistem drainase yang baik, serta pengelolaan air dan udara yang berkualitas menjadi bagian integral dari pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga melindungi generasi mendatang. Dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Gresik dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan ekologis, sejalan dengan filosofi bahwa pembangunan yang baik adalah yang dapat diwariskan tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, fokus tujuan dalam misi ketiga ini adalah membangun infrastruktur yang tidak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan menghubungkan pembangunan fisik dengan keberlanjutan serta integrasi antarwilayah, Kabupaten Gresik dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dalam jangka panjang, memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan lingkungan global.

Tujuan Keempat

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani

Fokus utama dalam pencapaian tujuan misi keempat adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (smart governance). Tujuan ini menitikberatkan pada penguatan sistem pemerintahan yang berbasis transparansi, efisiensi, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam konteks reformasi birokrasi, indeks reformasi birokrasi menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Indikator ini mencakup aspek efektivitas kebijakan, efisiensi pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta tingkat akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.

Peningkatan indeks reformasi birokrasi sejalan dengan filosofi misi keempat, yaitu membangun pemerintahan yang dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan menciptakan tata kelola yang cerdas dan inovatif, pemerintah Kabupaten Gresik dapat menghadirkan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam pelayanan publik. Penerapan prinsip smart governance juga memungkinkan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pemerintahan, seperti e - government dan sistem pengaduan online, yang semakin memperkuat transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar - benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat serta mekanisme pelaporan yang terbuka, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan meningkat. Selain itu, fokus pada aspek pelayanan yang melayani memastikan bahwa seluruh kebijakan dan inovasi yang diimplementasikan

tidak hanya sekadar meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pencapaian indeks reformasi birokrasi yang tinggi bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan bagaimana filosofi misi keempat diterjemahkan secara nyata dalam bentuk pemerintahan yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Pencapaian smart governance adalah terjemahan langsung dari filosofi misi keempat yang menginginkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Dengan menciptakan pemerintahan yang cerdas dan inovatif, pemerintah Kabupaten Gresik akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin menginginkan pelayanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara inovasi dan pelayanan yang responsif akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Kelima

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif

Fokus tujuan dalam pencapaian misi kelima Kabupaten Gresik adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment). Tujuan ini menekankan pentingnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, terdapat tiga indikator utama, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini yang mencerminkan tingkat kesenjangan ekonomi.

Tingkat kemiskinan menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana masyarakat Gresik telah mendapatkan akses terhadap sumber daya

ekonomi dan kebutuhan dasar mereka. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah berhasil dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik melalui peningkatan pendapatan, jaminan sosial, maupun kebijakan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mencerminkan efektivitas penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Jika tingkat pengangguran dapat ditekan, maka ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah telah mampu menyediakan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Penguatan sektor industri, UMKM, serta ekonomi kreatif menjadi langkah penting dalam menurunkan angka pengangguran ini. Di sisi lain, rasio gini menjadi indikator utama dalam melihat tingkat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Semakin kecil rasio gini, semakin menunjukkan bahwa kesejahteraan telah didistribusikan secara lebih merata, tanpa ada kesenjangan yang mencolok antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Hal ini mencerminkan filosofi dari misi kelima, yaitu pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha bagi kelompok kurang mampu menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Dengan demikian, fokus tujuan dalam misi kelima tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Pendekatan yang menyeluruh dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan memastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik harus diikuti dengan pencapaian sasaran yang jelas dan terukur.

Setiap tujuan yang diusung, baik itu terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan, ataupun pemberdayaan ekonomi, memerlukan langkah - langkah strategis yang terarah agar dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Sasaran yang dirumuskan bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diinginkan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan filosofi misi yang diusung. Dengan menghubungkan tujuan dan sasaran secara sinergis, Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Rumusan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.4 Arsitektur Tujuan dan Sasaran disertai Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
		Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender
			Indeks Ketimpangan Gender
			Indeks Inklusi (GEDSI)
	Indeks Kesalehan Sosial	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
		Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor
		Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
		bernilai tambah tinggi	
Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio *Government Expenditure*
		Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah
			Indeks Infrastruktur
			Indeks Konektivitas Wilayah
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana
		Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan
			Indeks Pemerintah Digital
			Indeks Sistem Merit
			Indeks Pelayanan Publik

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif	Tingkat kemiskinan (%)	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi
		Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Rasio Partispasi Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin
		Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai peta jalan pencapaian visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029, langkah selanjutnya menentukan target indikator kinerja utama. Penetapan target ini berfungsi sebagai ukuran kinerja atau tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan dan menjadi dasar dalam menyusun target sasaran strategis perangkat Daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan lintas OPD secara terukur dan terarah. Salah satu pendekatan utama dalam menetapkan target adalah dengan menganalisis capaian historis (baseline) lima tahun sebelumnya. Melalui data capaian indikator pada periode RPJMD sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gresik dapat mengetahui tren pertumbuhan atau stagnasi dari masing - masing indikator.

Baseline ini menjadi dasar realistis untuk menentukan tingkat akselerasi yang mungkin dicapai dalam lima tahun ke depan. Selain itu, penyesuaian dengan target nasional dan provinsi Jawa Timur menjadi acuan penting dalam penyusunan target daerah. Kabupaten Gresik sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional harus sinkron dengan arah kebijakan RPJPN 2025–2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Karakteristik lokal dan potensi unggulan daerah juga menjadi pertimbangan penting. Gresik memiliki keunggulan sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis, pelabuhan internasional, serta pusat pengembangan UMKM. Dengan potensi tersebut, target - target ekonomi seperti pertumbuhan sektor manufaktur, peningkatan investasi, dan ekspansi perdagangan luar negeri perlu ditetapkan secara progresif. Namun, tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan multidimensi, serta kebutuhan layanan dasar yang belum merata juga harus dijadikan dasar dalam menetapkan target sosial yang inklusif dan adil. Di sisi lain, tingkat urgensi dan dampak strategis dari setiap indikator harus menjadi landasan penetapan prioritas. Indikator seperti IPM, indeks reformasi birokrasi, indeks kerukunan umat beragama, dan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi indikator strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, target yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan capaian kuantitatif, tetapi juga kualitas hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Pertimbangan strategis lainnya adalah ketersediaan anggaran dan pembiayaan alternatif. Penetapan target harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, serta peluang pembiayaan inovatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Dana CSR, dan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, adanya risiko global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi juga harus diantisipasi dengan menetapkan target yang fleksibel dan adaptif.

Tabel 3.5 Target Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
1.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	Angka (0-100)	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07	80,44 - 81,64	80,70 - 82,90	81,07 - 83,63
		Indeks Pembangunan Gender	91,01 (2024*)	Angka (0-100)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76	91.21-92.01	91.26-92.26	91.31-92.51
		Indeks Kesalehan Sosial	80,32 (2024*)	Angka (0-100)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72	81.12-83.52	81.32-84.32	81.52-85.12
2.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi	4,79	Persen (%)	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	4,82-5,50	4,85-5,52	4,83-5,43
3.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58 (2024*)	Persen (%)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60	22,90 - 23,61	22,93 - 23,63	22,95 - 23,64
		Penurunan Emisi GRK	n/a	Ton CO_2eq	40.331,31	41.137,93	41.960,69	42.799,9	43.655,9	44.529,02

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
				per tahun						
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	Angka (0-100)	86.17	86.71	87.24	87.76	88.28	88.80
5.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	10,32	Persen (%) (Burden)	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21	8,08-8,9	5,61-8,37	5,29-7,31
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	Persen (%) (Burden)	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39	6,74-5,16	6,67-5,02	6,59-4,93

Tabel 3.6 Target Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	Tahun	10,37	10,49	10,62	10,81	10,92	10,99
		Harapan Lama Sekolah	13,97*	Tahun	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27
2.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	82,5	Angka (0-100)	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50
3.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	Angka (0-100)	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
4.	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	Angka (0-100)	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50
		Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	Angka (0-1)	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370
		Indeks Inklusi (GEDSI)	n/a	Angka (0-100)	60	64	68	72	76	80
5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	n/a	Angka (0-100)	76,6 – 78,2	76,9 – 78,5	77,2 – 78,8	77,5 – 79,1	77,8 – 79,4	78,1 – 79,7
6.	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	Persen (%)	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00	50.65-52.40	50.77-52.80	50.88-53.20
7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	Rasio Net Ekspor	10,51*	Persen (%)	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
	berbasis potensi lokal									
8.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5,11*	Angka (<3->6)	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09
9.	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio *Government Expenditure*	11,79	Persen (%)	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
10.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	Angka (0-5)	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25
		Indeks Infrastuktur	n/a	Angka (0-100)	63,23	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
	konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Konektivitas Wilayah	n/a	Angka (0-1)	0.745	0.765	0.785	0.805	0.827	0.850
11.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	91,42*	Angka (>100-0) (Burden)	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42	126,42-123,55	123,55-120,79	120,79 - 117,17
12.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	Angka (0-100)	65,09	65,16	65,24	65,32	65,4	65,48
13.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan	Indeks Pemerintah Digital	4,32	Angka (0-5)	4,37	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25	1,99 - 2,39	2,09 - 2,54	2,19 - 2,68
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	A	Predikat	A	A	A	AA	AA	AA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
	kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	310,5	Angka (0-410)	315	330	345	360	375	390
		Indeks Pelayanan Publik	1.66	Angka (>2,01)	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51
14.	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	100-0 (Burden)	48	46	44	42	40	38
15.	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	n/a perbedaan formulasi	Persen (%)	80-95	85-95	90-95	95-100	95-100	95-100
16.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus	Rasio gini	0,330	1-0 (burden)	0,311 - 0,351	0,303 - 0,343	0,295 - 0,335	0,287 - 0,327	0,279 - 0,319	0,271 - 0,311

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Satuan	Target Kinerja 2025	2026	2027	2028	2029	Transisi 2030
	ketimpangan sosial ekonomi									
17.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	n/a	Persen (%)	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55	50-60

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan pendekatan strategis dan transformatif yang dirancang secara komprehensif untuk memastikan tercapainya visi besar "Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat." Strategi dan arah kebijakan ini menjadi *grand design* pembangunan daerah, yang tidak hanya menetapkan langkah-langkah operasional, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mempercepat transformasi sosial, ekonomi, serta penguatan tata kelola pembangunan Kabupaten Gresik yang adaptif dan berorientasi pada hasil menuju *Gresik Baru yang Lebih Maju.*

Perumusan Strategi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melandasi **Petahapan Pertama 2025-2029** dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Pentahapan pertama untuk pembangunan Kabupaten Gresik difokuskan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial, ekonomi,dan tata kelola diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, permukiman, dan ekonomi; perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas publik; pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah; rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik; Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana; serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Melalui pendekatan *strategy-focused management*, strategi RPJMD menjadi tulang punggung dalam mengorkestrasi seluruh sumber daya, program, dan kebijakan pembangunan agar bergerak harmonis mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Perumusan strategi

ini memberikan kejelasan arah, memastikan efisiensi alokasi anggaran, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Gresik. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Setiap strategi yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam arah kebijakan yang menjadi pedoman operasional. Arah kebijakan memberikan fokus dan kejelasan implementatif terhadap strategi yang dipilih, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Tabel 3.7 Strategi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
1.	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	**1.**	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis data spasial, perluasan akses infrastruktur dan konektivitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan, integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan revolusi industri 5.0, serta penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk mewujudkan generasi emas Gresik yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.
			2.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.
			3.	Meningkatkan keadilan dan keseteraan	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
				gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	kapasitas kelembagaan dan partisipasi kelompok rentan, pemenuhan hak-hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, nondiskriminatif, dan berkeadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.
			4.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.
			5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok, revitalisasi peran lembaga adat dan komunitas budaya, serta fasilitasi ruang-ruang interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif, guna membangun solidaritas, saling menghargai, dan identitas kolektif yang kokoh dalam kerangka masyarakat madani yang berkeadaban.

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
2.	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	**6.**	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi, akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan kualitas SDM industri melalui kemitraan vokasi dan dunia usaha, insentif investasi sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan infrastruktur pendukung dan jaringan logistik terpadu guna menciptakan iklim industri yang adaptif, produktif, dan berorientasi ekspor.
			7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Penguatan ekosistem wirausaha lokal, digitalisasi rantai pasok dan pemasaran UMKM, pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendorong ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.
			8.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang investasi, fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal, serta insentif investasi yang mendorong adopsi teknologi tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
				bernilai tambah tinggi	
3.	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan	**9.**	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan terpadu lintas sektor dan wilayah, optimalisasi pembiayaan kreatif, penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik yang prima.
			10.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.
			11.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan green infrastructure, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
					pemeliharaan infrastruktur guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
			12.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
4.	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	**13.**	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Ppercepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, penguatan sinergi kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
5.	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif	**14.**	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, penguatan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, perbaikan deprivasi sosial-materiil, peningkatan kapabilitas dan ketahanan keluarga miskin, serta perluasan akses terhadap keadilan, pemberdayaan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan, yang didukung dengan integrasi data kemiskinan terpadu, serta tata kelola program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis bukti hingga tingkat desa.
			15.	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Pembangunan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan melalui perluasan cakupan program perlindungan sosial berbasis data terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam menjangkau kelompok miskin dan rentan, penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program perlindungan sosial secara transparan dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
			16.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan	Percepatan transformasi sosial ekonomi yang berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi

No	Misi	Tujuan	No	Sasaran	Strategi
				dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	di seluruh wilayah, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, optimalisasi distribusi program perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis data terpadu, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan Kabupaten Gresik.
			17.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Mengintegrasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi; penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM; optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam investasi daerah; serta kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi.

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari langkah strategis dalam mengakselerasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang tidak hanya menjadi panduan teknokratik, tetapi juga menjadi kompas kepemimpinan daerah dalam menjawab tantangan dan mengoptimalkan peluang pembangunan. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan, menyelaraskan, dan mengorkestrasi seluruh sumber daya dan potensi daerah agar terarah, efektif, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2039, arah kebijakan ditetapkan secara sistematis dan dinamis untuk memastikan kesinambungan serta sinergi antarperiode perencanaan, baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal antar tingkatan pemerintahan. Penetapan arah kebijakan juga mempertimbangkan urgensi penyelesaian permasalahan strategis, kebutuhan transformasi struktural daerah, serta proyeksi pembangunan jangka menengah dan panjang, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dan Pentahapan I Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, serta dengan mempertimbangkan keselarasan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Secara sistematis, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 akan disusun berdasarkan keselarahan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 3.8 Keselerasan Arah Pembangunan Nasional, Jawa Timur, dan Gresik

		Arah Pembangunan		
		Nasional	**Provinsi**	**Gresik**
Transformasi	Sosial	IE1: Kesehatan untuk Semua	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat	Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat
		IE2: Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan berkualitas dan merata	Pendidikan Berkualitas dan Merata
		IE3: Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Ekonomi	IE4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE5: Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6: Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
		IE7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Tata kelola	IE9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	IE13: Beragama Maslahat dan	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman,	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman

		Arah Pembangunan		
		Nasional	**Provinsi**	**Gresik**
	Kepemimpinan Indonesia	Berkebudayaan Maju	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah
		IE11: Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
			Daya saing Investasi	Investasi Berdaya Saing
		IE12: Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		
	Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	IE10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
		IE15: Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi dan Air
				Kemandirian Pangan
			Resiliensi terhadap Bencana dan	Resiliensi terhadap Bencana dan

	Arah Pembangunan		
	Nasional	**Provinsi**	**Gresik**
		Perubahan Iklim	Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memantabkan Pembangunan Kewilayahan yang mendorong titik pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat pemertaan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Dengan berlandaskan visi dan misi kepala daerah terpilih serta memperhatikan dinamika lokal, nasional, dan global, arah kebijakan pembangunan Gresik disusun secara terintegrasi berdasarkan kajian mendalam terhadap potensi unggulan, tantangan pembangunan, serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2030 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga menjadi katalisator perubahan menuju Gresik yang semakin maju, tangguh, dan sejahtera dalam bingkai pembangunan yang beraklahkul kariman, produktif, dan berdaya saing tinggi. Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.7 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis data spasial, perluasan akses infrastruktur dan konektivitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan, integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan revolusi industri 5.0, serta penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk mewujudkan generasi emas Gresik	Transformasi Sosial	Mendorong pendidikan inklusif dan adaptif berbasis data spasial untuk meningkatkan kualitas layanan dasar secara merata; memperkuat literasi, numerasi, dan karakter peserta didik; serta membangun sistem pembinaan pendidik berkelanjutan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing global.
			Transformasi Ekonomi	Mengintegrasikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan revolusi industri 5.0 guna menciptakan SDM yang siap kerja, inovatif, dan produktif, serta mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam pengembangan vokasi dan peningkatan kompetensi.
			Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan tata kelola sistem pendidikan melalui pemanfaatan data spasial, digitalisasi layanan, dan mekanisme monitoring-evaluasi berbasis kinerja; serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengambilan keputusan pendidikan.
			Landasan Transformasi-Supremasi	Meneguhkan kepemimpinan daerah dalam sektor pendidikan melalui kebijakan yang inklusif dan akuntabel, serta menjamin hak

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.	Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	anak atas pendidikan yang layak dan setara sesuai dengan prinsip konstitusional dan HAM.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dalam sistem pendidikan untuk memperkuat identitas dan kohesi sosial, serta mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum sebagai bagian dari kesadaran ekologi peserta didik.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memperluas akses dan konektivitas layanan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, pesisir, dan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkeadilan berbasis kebutuhan wilayah dan demografi.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang inklusif, aman, ramah lingkungan, dan berbasis digital untuk mendukung pembelajaran abad 21 dan pemulihan pasca-pandemi.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Membangun sistem pendidikan yang resilien dan berkelanjutan melalui pembinaan jangka panjang terhadap tenaga pendidik, penguatan peran komunitas sekolah, serta integrasi program pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan lintas periode dan sektor.
2.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang	Transformasi Sosial	Membangun sistem layanan kesehatan primer berbasis keluarga dan komunitas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat promosi dan edukasi perilaku hidup sehat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga derajat kesehatan secara kolektif dan berkelanjutan.
			Transformasi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui derajat kesehatan yang optimal dan investasi berkelanjutan di sektor kesehatan, termasuk pengembangan ekonomi kesehatan berbasis inovasi layanan dan teknologi.
			Transformasi Tata Kelola	Mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan integrasi data lintas fasilitas dan sektor untuk mempercepat respons sistem terhadap ancaman kesehatan serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola sektor kesehatan.
			Landasan Transformasi-	Memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil, merata, dan

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	bermutu melalui kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan perlindungan kelompok rentan.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Menguatkan ketahanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan budaya sehat, penyesuaian layanan berbasis kearifan lokal, dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan gaya hidup.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memastikan ketersediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil dan perdesaan secara proporsional berbasis analisis kebutuhan spasial dan demografis untuk menjamin keadilan layanan kesehatan.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pelayanan yang efektif, aman, dan nyaman bagi masyarakat di semua lapisan.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Mengembangkan sistem pengelolaan SDM kesehatan dan layanan yang berkelanjutan melalui skema pembinaan jangka panjang, integrasi lintas program, serta adaptasi terhadap dinamika risiko kesehatan di masa depan.
3.	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi kelompok rentan, pemenuhan hak-hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, nondiskriminatif, dan berkeadilan	Transformasi Sosial	Mengarusutamakan perspektif gender dan inklusi sosial dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan interseksionalitas dan berorientasi pada hak asasi manusia.
			Transformasi Ekonomi	Meningkatkan akses kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin terhadap pelatihan kerja, kewirausahaan, dan sumber daya ekonomi yang produktif untuk mempersempit kesenjangan ekonomi dan memperkuat kemandirian.
			Transformasi Tata Kelola	Membangun sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender dan inklusif melalui kelembagaan yang kuat, regulasi pendukung, serta kapasitas aparatur yang sensitif terhadap isu ketimpangan dan diskriminasi.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.	Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Menjamin perlindungan hukum yang adil dan nondiskriminatif bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan dan marginal, serta mendorong kepemimpinan yang progresif dan berperspektif kesetaraan dalam setiap level pemerintahan.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Membangun nilai budaya yang mendorong kesetaraan gender, penghormatan terhadap keberagaman, dan inklusi sosial sebagai bagian dari identitas masyarakat Gresik yang tangguh dan harmonis dalam keberagaman.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Menjamin akses layanan dasar, infrastruktur, serta ruang ekonomi dan partisipasi yang adil bagi seluruh kelompok sosial di wilayah perkotaan maupun perdesaan tanpa diskriminasi terhadap latar belakang sosial, gender, atau disabilitas.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan	Merancang infrastruktur dan layanan publik yang aksesibel bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, serta memastikan fasilitas umum memenuhi prinsip universal design yang adil dan ramah lingkungan.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Ramah Lingkungan	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam seluruh tahapan pembangunan lintas periode melalui kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti, serta menjaga keberlanjutan dampak positif bagi generasi mendatang.
4.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna	Transformasi Sosial	Memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif melalui pendekatan berbasis hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; serta menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang ramah anak dan bebas kekerasan.
			Transformasi Ekonomi	Mendorong kebijakan inklusif yang memastikan anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok rentan tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan, gizi, kesehatan, dan jaminan sosial untuk mendukung tumbuh kembang yang setara dan adil.
			Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola perlindungan anak yang akuntabel melalui kebijakan berbasis data terintegrasi, penguatan regulasi perlindungan anak, serta sistem koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang responsif terhadap isu-isu kerentanan anak.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.	Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Menegakkan perlindungan hukum terhadap anak dengan memperkuat sistem peradilan anak, penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak secara cepat dan berkeadilan, serta membangun kepemimpinan lokal yang berpihak pada pemenuhan hak anak.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Membangun budaya perlindungan anak sebagai nilai sosial bersama yang menjunjung tinggi kasih sayang, partisipasi, dan kesetaraan, serta mendorong praktik sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik dan sehat, termasuk dalam situasi krisis atau bencana.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memastikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah perdesaan dan tertinggal, dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas, yatim piatu, atau anak dalam kondisi khusus.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan	Mewujudkan sarana pendidikan, kesehatan, dan rekreasi yang aman, layak, ramah anak, serta mendukung pembentukan lingkungan fisik yang inklusif dan stimulatif bagi perkembangan anak.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Ramah Lingkungan	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Mengarusutamakan kebijakan perlindungan dan partisipasi anak dalam seluruh siklus pembangunan daerah lintas periode, serta memperkuat investasi sosial untuk pembangunan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok, revitalisasi peran lembaga adat dan komunitas budaya, serta fasilitasi ruang-ruang interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif, guna membangun solidaritas, saling menghargai, dan identitas kolektif yang kokoh dalam kerangka	Transformasi Sosial	Meningkatkan literasi sosial dan budaya serta memperkuat inklusi sosial melalui revitalisasi nilai-nilai lokal dan penguatan interaksi antar kelompok sebagai fondasi kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat.
			Transformasi Ekonomi	Mendorong ekonomi kreatif dan budaya lokal sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas serta sebagai bagian dari pelestarian identitas budaya yang bernilai ekonomi.
			Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis budaya dan partisipasi komunitas dengan penguatan kelembagaan sosial-budaya, kolaborasi antar aktor budaya, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan penyusunan kebijakan publik.
			Landasan Transformasi-	Membangun tatanan sosial yang berkeadaban dan damai melalui penghormatan terhadap

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		masyarakat madani yang berkeadaban.	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	keberagaman, penegakan hak atas kebebasan berbudaya, serta penguatan kepemimpinan sosial yang menjunjung tinggi prinsip toleransi dan persatuan.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Menanamkan nilai-nilai budaya luhur dan kearifan lokal sebagai bagian dari ketahanan budaya masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan ancaman disintegrasi.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Menjamin akses yang merata terhadap layanan budaya, fasilitas seni, ruang ekspresi, dan sarana interaksi sosial yang inklusif, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir sebagai basis pelestarian dan pemajuan budaya lokal.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Menyediakan infrastruktur budaya yang representatif dan ramah lingkungan seperti taman budaya, balai komunitas, dan ruang publik interaktif untuk mendorong tumbuhnya ekspresi seni-budaya sebagai alat kohesi sosial.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Mengarusutamakan kebijakan pembangunan berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal secara lintas generasi sebagai upaya menjaga identitas kolektif dan membangun keberlanjutan sosial-budaya di masa depan.
6.	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi, akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan kualitas SDM industri melalui kemitraan vokasi dan dunia usaha, insentif investasi sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan infrastruktur pendukung dan jaringan logistik terpadu guna menciptakan iklim industri yang adaptif, produktif, dan berorientasi ekspor.	Transformasi Sosial	Mendorong peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pemagangan berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang siap bersaing.
			Transformasi Ekonomi	Mengakselerasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi berbasis teknologi dan inovasi.
			Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	Menjamin kepastian hukum dan stabilitas kebijakan untuk mendukung investasi industri jangka panjang serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kepemimpinan Indonesia	
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Mengembangkan industri berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui penerapan teknologi hijau serta pengelolaan dampak lingkungan yang bertanggung jawab dalam aktivitas manufaktur.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri berbasis potensi lokal, serta pengembangan sentra-sentra industri baru di wilayah strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memperkuat infrastruktur pendukung industri, termasuk jaringan logistik, kawasan industri terpadu, serta digitalisasi sistem produksi dan distribusi guna meningkatkan efisiensi dan konektivitas antar rantai pasok.
			Kerangka Implementasi Transformasi-	Mendorong integrasi riset dan pengembangan teknologi dalam kebijakan industri, serta membangun kapasitas inovasi lokal untuk

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kesinambungan Pembangunan	mendukung keberlanjutan industri berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.
7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Penguatan ekosistem wirausaha lokal, digitalisasi rantai pasok dan pemasaran UMKM, pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendorong ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.	Transformasi Sosial	Meningkatkan kapasitas wirausahawan lokal melalui pelatihan, inkubasi bisnis, dan fasilitasi permodalan UMKM agar mampu beradaptasi dengan era digital dan pasar global.
			Transformasi Ekonomi	Mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok modern, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta mengembangkan sistem perdagangan yang berbasis nilai tambah produk lokal.
			Transformasi Tata Kelola	Memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan daerah dengan penguatan regulasi yang pro-UMKM, transparansi pasar, dan digitalisasi layanan publik di sektor perdagangan.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Menjamin perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan perdagangan lokal, termasuk dalam pengawasan pasar, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk unggulan daerah.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial	Mendorong model perdagangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta melestarikan identitas budaya lokal melalui

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Budaya Dan Ekologi	penguatan produk kreatif dan warisan budaya dalam aktivitas komersial.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mengembangkan pasar rakyat modern, pusat distribusi wilayah, dan sentra logistik lokal yang tersebar secara merata untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung perdagangan lokal secara inklusif.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan seperti revitalisasi pasar tradisional, pengembangan gudang logistik, serta digitalisasi fasilitas pemasaran untuk mendukung efisiensi dan daya saing UMKM.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Memastikan keberlanjutan pengembangan sektor perdagangan lokal melalui ekosistem kemitraan yang adaptif, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta strategi branding daerah yang konsisten dan berkelanjutan.
8.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan	Transformasi Sosial	Mendorong investasi yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja layak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara merata.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
	memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	regulasi dan percepatan perizinan, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang investasi, fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal, serta insentif investasi yang mendorong adopsi teknologi tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.	Transformasi Ekonomi	Meningkatkan investasi produktif pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi, khususnya sektor manufaktur, energi terbarukan, dan hilirisasi industri untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
			Transformasi Tata Kelola	Reformasi perizinan dan penyederhanaan regulasi investasi melalui digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan investasi.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha melalui pembenahan regulasi daerah yang pro-investasi serta penguatan pengawasan hukum terhadap praktik usaha yang sehat.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Mendorong praktik investasi yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif terhadap nilai sosial budaya masyarakat lokal.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang	Meningkatkan distribusi investasi ke kawasan hinterland dan kawasan strategis baru yang memiliki potensi tinggi untuk pengembangan ekonomi wilayah secara inklusif.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Merata dan Berkeadilan	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan infrastruktur penunjang investasi, termasuk kawasan industri, jalan, logistik, energi, dan digitalisasi kawasan secara terintegrasi dan ramah lingkungan.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Mendorong model investasi berkelanjutan yang sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang, mendukung daya dukung lingkungan, serta memfasilitasi transisi menuju ekonomi hijau dan berbasis inovasi.
9.	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan terpadu lintas sektor dan wilayah, optimalisasi pembiayaan kreatif,	Transformasi Sosial	Menjamin akses infrastruktur dasar secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan pemerataan layanan publik.
			Transformasi Ekonomi	Mendorong percepatan infrastruktur strategis sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi logistik, dan perluasan peluang investasi di sektor produktif.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik yang prima.	Transformasi Tata Kelola	Penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur melalui sistem perencanaan terpadu, pengawasan berbasis digital, dan peningkatan akuntabilitas lintas sektor dan wilayah.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip tata ruang dan hukum, serta menjamin stabilitas sosial dan keamanan proyek pembangunan melalui pendekatan partisipatif.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi risiko bencana serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal dalam perencanaannya.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Penyediaan infrastruktur di wilayah hinterland, pedesaan, dan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat keterpaduan wilayah.
			Kerangka Implementasi	Membangun dan merevitalisasi infrastruktur dengan kualitas tinggi dan berkelanjutan,

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	termasuk melalui inovasi teknologi hijau dan material ramah lingkungan, serta memperluas cakupan infrastruktur digital dan konektivitas jalan, energi, air, dan sanitasi.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proyek infrastruktur jangka panjang melalui kolaborasi multipihak, skema pembiayaan kreatif (PPP, CSR, blended finance), dan pemeliharaan aset infrastruktur secara berkala untuk menjaga keberlanjutannya.
10.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung	Transformasi Sosial	Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang layak dan modern sebagai prasyarat peningkatan kualitas hidup dan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah.
			Transformasi Ekonomi	Pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas industri, perdagangan, dan investasi melalui integrasi kawasan dan sistem logistik yang efisien, cerdas, dan berbasis teknologi.
			Transformasi Tata Kelola	Peningkatan tata kelola infrastruktur melalui sistem manajemen berbasis data spasial dan digital, pelibatan pemangku kepentingan, serta transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.	Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penegakan aturan tata ruang dan kepastian hukum dalam pengembangan infrastruktur strategis untuk menciptakan iklim pembangunan yang tertib, stabil, dan mendukung investasi.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Modernisasi infrastruktur yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sosial, dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan serta penguatan mitigasi risiko perubahan iklim.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis hingga wilayah pinggiran, hinterland, dan pedesaan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan daya saing kawasan secara inklusif.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan	Penyediaan sarana transportasi, energi, air bersih, dan jaringan komunikasi yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem transportasi cerdas serta memperhatikan efisiensi energi dan emisi karbon rendah.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Ramah Lingkungan	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Pengembangan infrastruktur dengan pendekatan jangka panjang, skema pembiayaan inovatif, dan perawatan aset infrastruktur secara berkelanjutan untuk menjaga daya guna dan keberlangsungan manfaatnya bagi generasi mendatang.
11.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan green infrastructure, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjamin	Transformasi Sosial	Melindungi masyarakat dari dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur tangguh dan responsif yang mendukung keselamatan dan keberlangsungan akses terhadap layanan dasar.
			Transformasi Ekonomi	Menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi melalui perlindungan infrastruktur ekonomi strategis dari risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta mendorong efisiensi biaya melalui penerapan *green economy*.
			Transformasi Tata Kelola	Integrasi sistem manajemen risiko bencana dalam siklus perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi prediktif serta sistem informasi geografis (GIS).
			Landasan Transformasi-	Penegakan regulasi lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko serta peningkatan

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Pengarusutamaan prinsip ekologi dan pembangunan rendah karbon dalam infrastruktur, serta pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan risiko dan konservasi lingkungan.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemerataan infrastruktur adaptif di wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan iklim, dengan memastikan tidak ada wilayah tertinggal dalam perlindungan risiko dan kelayakan infrastruktur.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penerapan standar *green infrastructure*, pemanfaatan material ramah lingkungan, sistem drainase berwawasan lingkungan, serta desain tahan gempa dan banjir dalam pembangunan infrastruktur.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Mendorong investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur tangguh, memperkuat sistem pemeliharaan berkelanjutan, dan membangun ekosistem pembiayaan untuk proyek infrastruktur yang memperhatikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
12.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan	Transformasi Sosial	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan serta membangun budaya hidup hijau melalui pendidikan lingkungan dan kampanye publik.
			Transformasi Ekonomi	Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui insentif pada sektor ramah lingkungan, industri beremisi rendah, dan transisi energi terbarukan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi daerah.
			Transformasi Tata Kelola	Penguatan peraturan dan pengawasan lingkungan hidup, peningkatan akuntabilitas pelaku usaha, serta digitalisasi pemantauan kualitas lingkungan secara real-time dan berbasis spasial.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	Penegakan hukum lingkungan secara adil dan konsisten, serta kepemimpinan daerah yang visioner dan berkomitmen terhadap

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.	Kepemimpinan Indonesia	pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Penguatan nilai budaya lokal yang selaras dengan konservasi alam serta peningkatan resiliensi sosial terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Penerapan kebijakan rendah karbon secara inklusif di seluruh wilayah, khususnya di kawasan industri, pesisir, dan pedesaan, dengan memastikan keadilan lingkungan dan distribusi manfaat yang merata.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan infrastruktur hijau dan rendah karbon, pengelolaan limbah dan air yang efisien, serta insentif penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.
			Kerangka Implementasi Transformasi-	Menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk generasi mendatang melalui instrumen perencanaan

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kesinambungan Pembangunan	jangka panjang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, penguatan sinergi kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.	Transformasi Sosial	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap, dan inklusif.
			Transformasi Ekonomi	Mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian daerah melalui pemanfaatan sistem pemerintahan digital yang mendukung pelayanan perizinan, investasi, dan UMKM secara terpadu dan real-time.
			Transformasi Tata Kelola	Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen, penguatan interoperabilitas data antarinstansi, serta reformasi birokrasi berbasis kinerja dan sistem merit.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil.
			Landasan Transformasi-	Penguatan etika digital aparatur serta penanaman nilai-nilai pelayanan publik yang

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	humanis, inklusif, dan menghargai keberagaman dalam penyampaian layanan digital kepada masyarakat.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemerataan akses digital dan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, pesisir, dan perdesaan, guna memastikan seluruh warga mendapatkan layanan publik yang adil dan setara.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang hemat energi dan ramah lingkungan, termasuk pusat data daerah dan sistem pelayanan daring berbasis cloud.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis data terbuka dan big data analytics guna mendukung pengambilan keputusan yang presisi dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan.
14.	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas	Perluasan dan percepatan pengurangan	Transformasi Sosial	Perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan air bersih secara menyeluruh untuk keluarga

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
	hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	kemiskinan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, penguatan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, perbaikan deprivasi sosial-materiil, peningkatan kapabilitas dan ketahanan keluarga miskin, serta perluasan akses terhadap keadilan, pemberdayaan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan, yang didukung dengan integrasi data kemiskinan terpadu, serta tata kelola program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis		miskin dan rentan; penguatan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan dan pengawasan program pembangunan.
			Transformasi Ekonomi	Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui peningkatan akses terhadap peluang usaha, keterampilan kerja, dan layanan keuangan mikro; mendorong integrasi kelompok rentan dalam rantai pasok lokal dan sektor produktif.
			Transformasi Tata Kelola	Penguatan sistem tata kelola program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis bukti melalui pemutakhiran dan pemanfaatan data kemiskinan multidimensi hingga tingkat desa.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan akses keadilan dan bantuan hukum bagi keluarga miskin serta penguatan posisi hukum kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Penguatan ketahanan sosial keluarga miskin melalui revitalisasi nilai-nilai solidaritas, pemberdayaan perempuan miskin, serta penguatan jejaring komunitas untuk mendukung ketangguhan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		bukti hingga tingkat desa.	Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemerataan program dan intervensi pengentasan kemiskinan antarwilayah melalui pendekatan kewilayahan berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat miskin di desa dan daerah tertinggal.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penyediaan sarana dasar layak huni dan akses infrastruktur dasar untuk keluarga miskin secara merata dan ramah lingkungan, seperti rumah layak, sanitasi, air bersih, dan akses transportasi bagi daerah terisolasi.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Membangun sistem monitoring dan evaluasi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan serta menyelaraskan program antarperiode melalui pendekatan evidence-based policy dan integrasi lintas sektor, guna memastikan keberlanjutan dampak dan pengurangan kesenjangan antar kelompok sosial.
15.	Memperluas partisipasi dan inklusifitas	Pembangunan sistem perlindungan sosial yang responsif,	Transformasi Sosial	Perluasan dan penguatan sistem perlindungan sosial yang menjangkau seluruh kelompok rentan melalui layanan dasar yang terintegrasi

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
	perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	inklusif, dan berkelanjutan melalui perluasan cakupan program perlindungan sosial berbasis data terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam menjangkau kelompok miskin dan rentan, penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program perlindungan sosial secara transparan dan berkeadilan sosial di seluruh		dan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi.
			Transformasi Ekonomi	Integrasi perlindungan sosial dengan program peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga miskin melalui dukungan terhadap UMKM, pelatihan kerja, dan akses ke sektor formal dan informal yang inklusif.
			Transformasi Tata Kelola	Penguatan tata kelola perlindungan sosial berbasis data terpadu, transparansi dalam perencanaan dan pengawasan, serta akuntabilitas distribusi bantuan sosial dan layanan berbasis sistem yang terintegrasi lintas lembaga.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penjaminan hak-hak sosial kelompok rentan dan miskin melalui regulasi yang melindungi, serta penguatan kontrol sosial dan pengawasan partisipatif untuk mencegah ketimpangan distribusi dan diskriminasi dalam program perlindungan sosial.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Pemberdayaan komunitas lokal dan penguatan solidaritas sosial dalam membangun jejaring perlindungan sosial berbasis budaya gotong royong dan nilai-nilai kearifan lokal.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		wilayah Kabupaten Gresik.	Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemerataan jangkauan program perlindungan sosial di seluruh wilayah termasuk desa-desa terpencil melalui pemetaan berbasis spasial dan kebijakan afirmatif untuk wilayah yang tertinggal atau rawan sosial.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Dukungan infrastruktur layanan sosial dasar yang memadai di tingkat lokal untuk mendukung efektivitas implementasi perlindungan sosial, seperti pusat layanan terpadu, transportasi, dan digitalisasi akses informasi program.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Penyusunan roadmap jangka panjang perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas dan dampak program secara konsisten.
16.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus	Percepatan transformasi sosial ekonomi yang berkeadilan melalui	Transformasi Sosial	Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merata untuk semua kelompok, termasuk kelompok rentan dan marjinal, guna

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
	ketimpangan sosial ekonomi	pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, optimalisasi distribusi program perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis data terpadu, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan Kabupaten Gresik.		mengurangi ketimpangan sosial secara struktural.
			Transformasi Ekonomi	Perluasan akses terhadap sumber daya produktif dan peluang usaha, serta kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
			Transformasi Tata Kelola	Optimalisasi sistem pendataan sosial-ekonomi yang terintegrasi dan akurat untuk mendukung distribusi program secara tepat sasaran serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif dan pembangunan wilayah.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penerapan kebijakan afirmatif yang berpihak pada kelompok termarjinalkan dan wilayah tertinggal dengan dukungan regulasi yang kuat dan kepemimpinan yang berpihak pada keadilan sosial dan pembangunan inklusif.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Penguatan jejaring sosial komunitas lokal dan lembaga adat dalam mendorong pemberdayaan sosial berbasis budaya serta penyadartahuan atas hak dan partisipasi warga dalam pembangunan.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui pendekatan berbasis potensi lokal, peningkatan konektivitas wilayah tertinggal, serta alokasi sumber daya secara adil untuk mempercepat pengentasan ketimpangan spasial.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penguatan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal agar mampu mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi secara setara, termasuk transportasi, energi, dan digitalisasi untuk penghubung antar wilayah.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang yang berpihak pada keadilan sosial dan ekonomi, disertai monitoring atas capaian inklusivitas dan keseimbangan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan.
17.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Mengintegrasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri	Transformasi Sosial	Meningkatkan kapabilitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang inklusif serta menjangkau kelompok rentan dan muda agar mampu memasuki dunia kerja secara produktif dan berkelanjutan.

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
		dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi; penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM; optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam investasi daerah; serta kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi.	Transformasi Ekonomi	Mendorong link and match antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri; memperkuat sektor UMKM dan wirausaha produktif sebagai penyerap tenaga kerja; serta menumbuhkan sektor ekonomi baru berbasis inovasi dan teknologi.
			Transformasi Tata Kelola	Penguatan sistem tata kelola pasar kerja daerah yang transparan dan berbasis data, termasuk sistem informasi ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi.
			Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penegakan regulasi yang mendorong prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dalam investasi dan kemitraan dengan industri, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak pekerja.
			Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	Mendorong etos kerja, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan masyarakat lokal berbasis nilai-nilai kultural dan sosial Gresik sebagai kekuatan pembangunan ekonomi kerakyatan.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan	Penyebaran pusat-pusat pelatihan dan inkubasi kewirausahaan hingga ke wilayah perdesaan

No	Sasaran	Strategi	Penjabaran Arah Kebijakan berdasarkan Kerangka Transformasi	
			Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	dan pesisir guna mendorong pemerataan akses terhadap keterampilan dan kesempatan kerja.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan infrastruktur pendukung vokasi dan pelatihan kerja yang modern dan inklusif, termasuk digitalisasi platform pelatihan jarak jauh yang menjangkau seluruh wilayah.
			Kerangka Implementasi Transformasi-Kesinambungan Pembangunan	Pembangunan sistem kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan iklim industri di masa depan, serta penyelarasan berkelanjutan antara kompetensi SDM lokal dengan arah transformasi ekonomi nasional dan global.

Tabel 3.8 Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1.	Penguatan peta jalan transformasi pendidikan Gresik yang inklusif dan berkeadilan berbasis data spasial, dengan melibatkan multipihak untuk merancang cetak biru layanan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan masa depan.	Perluasan akses dan pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil, melalui kolaborasi lintas sektor serta integrasi konektivitas digital guna menjamin kesetaraan hak belajar bagi seluruh anak di Gresik.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi pembelajaran, pendidikan karakter, dan kompetensi abad 21, dalam rangka menciptakan tenaga pengajar yang unggul dan responsif.	Integrasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri 5.0, serta menanamkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kewirausahaan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual yang holistik.	Penguatan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pendidikan dalam tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel, untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan pendidikan secara kolaboratif dan berdaya.	Penguatan sistem pendidikan daerah yang unggul, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui konsolidasi kebijakan, evaluasi menyeluruh, dan replikasi praktik baik, sebagai fondasi generasi emas Gresik masa depan
2.	Penguatan cetak biru transformasi	Percepatan pemerataan	Pengembangan dan penerapan	Peningkatan kualitas SDM	Pengintegrasian layanan	Perwujudan sistem layanan

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	layanan kesehatan primer berbasis keluarga dan komunitas dengan pendekatan promotif dan preventif, yang didukung oleh pemetaan kebutuhan wilayah serta pelibatan lintas sektor dalam pembangunan sistem layanan yang inklusif dan responsif.	infrastruktur dan distribusi tenaga kesehatan hingga wilayah pinggiran dan terpencil melalui skema afirmatif, penyediaan fasilitas layanan terpadu, serta sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan.	sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di semua level fasilitas kesehatan.	kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta pembangunan kultur pelayanan yang profesional, humanis, dan empatik berbasis standar pelayanan minimal dan etika profesi.	kesehatan lintas sektor seperti pendidikan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan sosial melalui platform kolaboratif serta penguatan gerakan masyarakat hidup sehat guna pembangunan ketahanan kesehatan sosial yang menyeluruh.	kesehatan daerah yang holistik, tangguh, dan berkelanjutan dengan percepatan evaluasi menyeluruh, penguatan jejaring layanan primer hingga rujukan, serta replikasi inovasi daerah menuju Gresik yang sehat, adaptif, dan inklusif.
3.	Penguatan landasan kebijakan dan kelembagaan pengarusutamaan gender serta inklusi sosial	Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan komunitas lokal dalam mendorong perencanaan	Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar	Penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan peluang pemberdayaan	Pengembangan mekanisme partisipatif dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, serta	Perwujudan ekosistem pembangunan yang setara, inklusif, dan berkeadilan sosial melalui integrasi

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	melalui perumusan regulasi daerah, peta jalan, dan standar operasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan daerah dan desa.	dan penganggaran responsif gender serta pelibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan di semua level pemerintahan.	yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok minoritas melalui program pelatihan, akses pembiayaan, serta fasilitasi usaha.	pemantauan pembangunan melalui kolaborasi multipihak yang menjamin ruang dialog, advokasi, dan kontrol sosial yang setara.	nilai-nilai kesetaraan dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan serta replikasi praktik baik di tingkat daerah dan desa.
4.	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas melalui regulasi, edukasi, serta peningkatan kapasitas aktor kunci dalam	Peningkatan akses dan kualitas layanan ramah anak di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan hukum dengan memastikan prinsip nondiskriminasi	Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau	Penjaminan lingkungan tumbuh kembang anak yang aman, sehat, dan mendukung melalui penyediaan ruang publik ramah anak, sistem peringatan dini	Pengembangan sistem pelaporan, pemantauan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dan responsif berbasis data serta pelibatan komunitas dan	Perwujudan ekosistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan perlindungan anak dalam pembangunan daerah dan replikasi praktik

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	perlindungan anak.	dan kepentingan terbaik anak.	seluruh lapisan masyarakat.	kekerasan, dan penguatan peran keluarga.	lembaga layanan.	baik di tingkat desa.
5.	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan etika sosial melalui pendidikan karakter, dialog budaya, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam memperkuat identitas budaya daerah.	Peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok melalui kurikulum pendidikan, media publik, dan kampanye sosial yang mendorong sikap inklusif dan saling menghargai.	Peneguhan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.	Penyediaan dan pengelolaan ruang interaksi sosial yang inklusif, aman, dan produktif melalui fasilitasi kegiatan seni budaya, dialog antar komunitas, serta revitalisasi situs budaya.	Pengembangan ekosistem budaya yang berkelanjutan melalui integrasi budaya lokal dalam pembangunan, dukungan terhadap inovasi budaya, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis tradisi.	Perwujudan masyarakat madani yang berkeadaban melalui kohesi sosial yang kuat, partisipasi aktif warga, serta harmonisasi antar kelompok dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
6.	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha,	Penerapan teknologi industri 4.0 secara bertahap pada sektor manufaktur unggulan melalui	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri melalui program vokasi, sertifikasi, dan kemitraan strategis dengan	Penataan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi sektor industri bernilai tambah tinggi dan	Penguatan infrastruktur industri dan logistik terpadu yang mendukung konektivitas kawasan	Perwujudan ekosistem industri manufaktur yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan melalui integrasi inovasi, SDM

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan lembaga riset untuk menciptakan nilai tambah dan efisiensi produksi.	fasilitasi digitalisasi proses produksi dan dukungan adopsi teknologi cerdas.	dunia usaha dan dunia pendidikan.	berorientasi ekspor secara berkelanjutan.	industri, efisiensi distribusi, dan akses ke pasar nasional maupun global.	unggul, teknologi maju, serta jejaring kemitraan global.
7.	Penguatan ekosistem wirausaha lokal melalui inkubasi bisnis, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM berbasis potensi unggulan daerah.	Peningkatan digitalisasi rantai pasok dan pemasaran produk lokal dengan mendorong adopsi platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan logistik terpadu.	Pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan strategis guna memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk lokal.	Pemfasilitasan sertifikasi, standardisasi, dan pengemasan produk unggulan daerah untuk memastikan kualitas dan daya saing di pasar nasional maupun internasional.	Penguatan pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis antar pelaku usaha, pemerintah, dan platform digital untuk ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.	Percepatan integrasi sistem perdagangan lokal melalui sinergi digitalisasi, logistik, inovasi produk, dan kelembagaan usaha guna mewujudkan perdagangan daerah yang tangguh dan adaptif.
8.	Penguatan transformasi tata kelola BUMD berbasis prinsip good corporate governance	Penyesuaian dan optimalisasi lini bisnis BUMD agar selaras dengan potensi	Peningkatan kompetensi manajerial dan profesionalisme SDM BUMD melalui	Penguatan struktur permodalan BUMD serta fasilitasi akses pembiayaan	Perluasan jejaring usaha dan sinergi bisnis antara BUMD dengan sektor swasta,	Percepatan reformasi model bisnis dan inovasi usaha BUMD yang adaptif terhadap

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	melalui regulasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.	unggulan dan kebutuhan strategis daerah guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.	pelatihan, asesmen berkala, serta penerapan sistem merit dan budaya kinerja tinggi.	kreatif dan inovatif melalui skema investasi publik-swasta dan kemitraan strategis.	BUMDes, dan antar BUMD dalam pengembangan usaha multisegmen yang kompetitif.	dinamika pasar dan teknologi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
9.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan perbaikan layanan perizinan berbasis digital yang terintegrasi.	Pengembangan kawasan industri dan sentra ekonomi strategis yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong sebaran investasi yang merata dan berdaya saing.	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang investasi, termasuk energi, air, transportasi, dan digitalisasi logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.	Pembangunan ekosistem kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal melalui fasilitasi forum bisnis, skema pembiayaan bersama, dan perlindungan usaha mikro dan kecil.	Penyusunan skema insentif investasi berbasis kinerja yang mendorong adopsi teknologi tinggi, praktik usaha berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.	Penguatan daya saing daerah sebagai tujuan investasi strategis melalui promosi investasi terpadu, rebranding kawasan industri, dan replikasi best practice model investasi unggulan.
10.	Penyusunan rencana induk infrastruktur daerah yang	Penguatan kolaborasi pendanaan infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan	Pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam	Pemanfaatan teknologi hijau dan prinsip berkelanjutan	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data spasial dan

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	terpadu, responsif terhadap kebutuhan lintas sektor dan wilayah, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.	melalui optimalisasi pembiayaan kreatif, pemanfaatan KPBU, dan sinergi anggaran lintas pemangku kepentingan.	strategis di wilayah prioritas melalui koordinasi lintas sektor, percepatan proses perizinan, dan pengawasan berbasis digital.	perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur melalui skema padat karya, CSR, dan kemitraan publik-swasta.	dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan bencana, dan kualitas lingkungan.	real-time guna memastikan keberlanjutan, keberdayagunaan, dan dampak ekonomi-sosial dari pembangunan infrastruktur.
11.	Penyusunan peta jalan penguatan infrastruktur dan konektivitas daerah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan wilayah tertinggal secara adil dan berkelanjutan.	Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan peningkatan aksesibilitas kawasan produktif.	Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.	Pemanfaatan teknologi cerdas dan digitalisasi dalam pengelolaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi layanan transportasi, pemeliharaan aset, dan respons terhadap	Penyempurnaan kebijakan pengelolaan infrastruktur berbasis data dan partisipasi publik guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan wilayah.	Pengintegrasian pengembangan infrastruktur dengan strategi pembangunan wilayah berkelanjutan dan berdaya saing, melalui replikasi praktik baik, evaluasi menyeluruh, dan inovasi kebijakan.

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				kebutuhan pengguna.		
12.	Penyusunan strategi ketangguhan infrastruktur daerah melalui pemetaan risiko bencana dan kerentanan iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif.	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengembangan green infrastructure di sektor-sektor strategis daerah.	Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui penguatan kelembagaan, tata kelola risiko bencana, serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi.	Pengintegrasian sistem manajemen risiko dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.	Penguatan teknologi dan inovasi dalam desain serta konstruksi infrastruktur tahan bencana dan ramah lingkungan.	Penguatan ketangguhan infrastruktur secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
13.	Penyusunan kebijakan rendah karbon dalam pembangunan daerah yang terintegrasi dengan seluruh sektor dan prioritas pembangunan.	Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan melalui investasi pada infrastruktur dan teknologi hijau di sektor-sektor strategis.	Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan terhadap perubahan iklim melalui pendidikan dan pelatihan berbasis perubahan iklim.	Penguatan tata kelola lingkungan hidup berbasis data yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif untuk mendorong pengelolaan sumber daya	Pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendukung proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan sektor terkait.	Pengukuran dan evaluasi keberhasilan upaya mitigasi perubahan iklim serta penyempurnaan kebijakan dengan menciptakan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				alam yang berkelanjutan.		kualitas hidup masyarakat.
14.	Percepatan implementasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan teknologi.	Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik.	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan terintegrasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang responsif, lincah, dan berorientasi hasil.	Penguatan kapasitas pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel dengan hasil yang terukur dan berorientasi pada masyarakat.
15.	Perluasan akses terhadap kebutuhan dasar secara menyeluruh untuk mengurangi kemiskinan	Peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, serta	Penguatan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan data kemiskinan yang terpadu dan berbasis bukti	Penyempurnaan program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis kolaborasi lintas sektor	Peningkatan peran serta masyarakat dalam program pembangunan, dengan memperkuat partisipasi aktif	Evaluasi dan penguatan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan serta penguatan ketahanan sosial

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	multidimensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.	guna merancang kebijakan yang tepat sasaran.	guna meningkatkan akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum.	dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas.	masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.
16.	Pembangunan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan cakupan program bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.	Penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjangkau dan melibatkan komunitas miskin dan rentan dalam program perlindungan sosial yang inklusif.	Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perlindungan sosial yang transparan dan akuntabel.	Penguatan sinergi antar sektor untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.	Evaluasi dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan serta peningkatan akses dan keadilan sosial bagi seluruh kelompok rentan.
17.	Percepatan transformasi sosial ekonomi dengan fokus pada pemerataan akses terhadap sumber daya,	Penguatan kebijakan afirmatif untuk kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, serta	Pengembangan sistem pemberdayaan sosial yang berbasis pada keadilan dan pemerataan	Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta	Penguatan sinergi antar sektor untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di	Evaluasi dan penajaman kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau wilayah yang

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah.	pengoptimalkan distribusi program perlindungan sosial berbasis data terpadu.	kesempatan ekonomi di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.	penurunan ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Gresik.	wilayah tertinggal dan untuk kelompok marjinal.	tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.
18.	Pengintegrasian pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis pada kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas.	Peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	Optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam proyek investasi daerah, dengan prioritas untuk sektor-sektor strategis.	Pengembangan kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi dan teknologi.	Evaluasi dan penyempurnaan sistem penyerapan tenaga kerja lokal yang adaptif terhadap perkembangan pasar kerja global dan teknologi baru.

3.2.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pembangunan Daerah memiliki urgensi yang vital dalam perumusan RPJMD karena rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah karena perumusan program pembangunan daerah merupakan *planning core* atau inti perencanaan strategis yang menjadi jembatan dalam pencapaian visi yang dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran, hingga strategi dan arah kebijakan. Perumusan program pembangunan prioritas ini merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang disebut dengan Nawakarsa.

Nawakarsa berasal dari dua kata, yakni *"Nawa"* yang berarti sembilan, dan *"Karsa"* yang bermakna kehendak, niat, atau cita-cita luhur. Secara harfiah, Nawakarsa dapat dimaknai sebagai *sembilan kehendak mulia* yang menjadi landasan utama arah pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode 2025–2029. Nawakarsa menjadi prioritas program pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik secara substansial. Selanjutnya, Program Prioritas Nawakarsa akan diakomodasi secara nomatif dalam nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program-program yang dirancang dalam Nawakarsa mengedepankan aspek keberlanjutan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemberdayaan masyarakat selaras dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Nakawarsa dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) navigasi meliputi: Gresik Tuntas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cemerlang, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Pesona Gresik.

Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, Nawakarsa.

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
1.	**Gresik Tuntas** Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable	**1.**	*Gresik Integrated Smart System*	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah *(One Data, One Portal, And Open Access)*
		2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.
		3.	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa
		4.	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.
2.	**Gresik Seger** Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	**5.**	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		6.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza
		7.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak
		8.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik
		9.	Gresik Sporti	Program santunan dalans upaya bentuk dukungan pada olahraga, atlit dan pelatih hingga e-sport
		10.	Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga
3.	**Gresik Mapan** Maju, Pintar, dan Aman	**11.**	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisası program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan
		12.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari gresik bagian utara hingga ke bagian selatan
		13.	Pembangunan Pasar Modern Tematik	Membangun pasar tematik modern yang terintegrasi dengan pariwisata
		14.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan
		15.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat,

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
				serta memfasilitasi ekonomi mikro
		16.	Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk gresik
		17.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi *feeder* Transjatim
		18.	Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program bantuan untuk dusun dengan mengintegrasikan bk, dana hibah, bansos secara tematik
		19.	Gresik Kota Santri 4.0	Pembangunan kota modern yang terintegrasi dengan GISS
		20.	Memastikan Ketersediaan Air Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa
4.	**Gresik Agropolitan**	**21.**	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi
		22.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU
		23.	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut
		24.	Pengembangan Komoditas Tanaman	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			Perkebunan Alternatif	contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka
		25.	Pembangunan *Techno Park* berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang
5.	**Gema Karya** Gresik mandiri dan berkarya	**26.**	Gresik Hub	Kolektifitas Peningkatan Skill Anak Muda dalam Bentuk Workshop Bisnis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kesenian Tradisi dan Modern
		27.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta memperkuat branding produk UMKM, UKM dan IKM Gresik
		28.	Program Pelatihan Intensif Bersertifikat BNSP	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen mesin), orientasi pengenalan dunia industri
		29.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana dan industri *(deman driven)*
6.	**Gresik Cemerlang** Cerdas, efisien,	**30.**	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
	menarik, relevan, global	**31.**	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas
		32.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD Dan TK Yang Non Sertifikasi	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi serta untuk guru pembimbing siswa inklusi
		33.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK
		34.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas
		35.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji
		36.	Peningkatan Kualitas Guru	Motalui beasiswa guru berprestasi, pelatihan dan workshop
		37.	BOP (Biaya Operasional Pesantren) untuk TPQ dan Madin	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin
		38.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
		39.	Literasi Digital Tingkat Desa	Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi digital pada siswa TK, SD,

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
				dan SMP yang bertujuan untuk 1. budaya bermedia digital, 2. cakap bermedia digital, 3. etis bermedia digital
		40.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi / Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi
		41.	Bawean Pulau Pendidikan	Meningkatkan potensi serta infrastruktur pendidikan di pulau Bawean, sebagai rintisan Bawean sebagai pulau pendidikan
7.	**Gresik Sehati** Pelayanan kesehatan integratif	**42.**	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan pelayanan di atasnya.
		43.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat
		44.	Memperkuat Posyandu, Polindes, dan Poskestren	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren
		45.	Peningkatan Tunjangan Kinerja Tenaga Kesehatan	Memberikan Peningkatan Tunjangan Kinerja untuk Tenaga Kesehatan Kabupaten Gresik

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
		46.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi
		47.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan akta lahir melalui digital.
		48.	Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
8.	**Gresik Barokah**	**49.**	Membangkitkan Kesetia Kawanan Sosial, Kepahlawanan, dan Kepeloporan Warga Gresik	
		50.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha	
		51.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS	
		52.	Menguatkan Pembentukan Karakter Pemuda yang didasarkan pada Nilai-Nilai Agama Nilai Budaya Lokal dan Toleransi	
		53.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial	
		54.	Gresik *Probono*	Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan
9.	**Pesona Gresik** Pelestarian dan naturalisasi alam	**55.**	Pengembangan dan revitalisasi ekowisata, yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap desa maupun wilayah	
		56.	Naturalisasi Tanah Bekas	Melakukan rehabilitasi tanah bekas galian atau

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	
			Galian atau Tambang	tambang, guna meningkatkan nilai ekonomis lahan dan mencegah bencana alam.
		57.	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan	
		58.	Revitalisasi fasilitas kota seperti area pedestrian, jalan utama, terminal, alun-alun, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung aktifitas wisatawan dan pentas seni pertunjukan	
		59.	*Green Industry*	Mendorong industri berkelanjutan untuk ekosistem sehat dengan mengedepankan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah

Pertama, **Gresik Tuntas** mencerminkan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka. Inisiatif seperti Gresik Integrated Smart System (GISS) menunjukkan upaya mengintegrasikan seluruh data pembangunan ke dalam satu sistem berbasis numerik dan spasial, guna menciptakan layanan publik yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara luas. Selain itu, program Gresik Rembug Akur, Desa Siap, dan Kios Pelayanan Publik mendorong pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, membangun ruang dialog untuk menyerap aspirasi serta menghadirkan layanan yang dekat dan terintegrasi di tingkat desa dan kecamatan. *Kedua,*, dengan semangat kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata, **Gresik Seger** menitikberatkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal. Program-program seperti Gresik Santri, PKH Inklusif, dan Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial menghadirkan perlindungan dan penghormatan terhadap peran sosial masyarakat, seperti guru ngaji, penjaga makam, serta lansia dan perempuan

kepala keluarga. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap nilai-nilai kearifan lokal, inklusivitas sosial, dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. *Ketiga,* **Gresik Mapan** merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Proyek seperti Gresik Bebas Banjir, Jalan Lintas Utara-Selatan, dan Pembangunan Pasar Modern Tematik menjadi fondasi terciptanya ruang-ruang publik yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Inisiatif Gresik Kota Santri 4.0 dan Sistem Transportasi Terpadu menggabungkan pendekatan modernisasi dan digitalisasi, menjawab kebutuhan kota masa depan yang terintegrasi secara teknologi dan sosial.

Keempat, mengusung identitas agraris dan maritim, **Gresik Agropolitan** merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Program seperti GOTani, Nelayan Gresik Berdaulat, dan Techno Park Minapolitan berupaya meningkatkan produktivitas petani dan nelayan melalui subsidi, asuransi, dan infrastruktur modern. Pendekatan ini bukan hanya menjaga kedaulatan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan rantai nilai agribisnis dan *blue economy. Kelima,* **Gema Karya** memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM. Program seperti Gresik Hub, Program 3B (Bela, Beli, Bagi), dan Pelatihan Bersertifikat BNSP dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda dan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara regional hingga global. Dengan menyinergikan seni tradisi, keterampilan vokasional, dan kebutuhan industri, Gresik menyiapkan SDM yang adaptif terhadap transformasi ekonomi masa depan. *Keenam,* dalam rangka menciptakan generasi unggul, **Gresik Cemerlang** menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan. Program seperti Insentif Guru PAUD dan TK, Beasiswa untuk Anak Yatim, Huffadz, dan Disabilitas, serta Bawean Pulau Pendidikan menunjukkan perhatian terhadap keberagaman

kebutuhan pendidikan, khususnya kelompok marginal dan wilayah 3T. Gresik juga mendorong literasi digital sejak dini melalui program seperti Literasi Digital Tingkat Desa, sebagai bekal penting menghadapi tantangan era digital.

Ketujuh, **Gresik Sehati** hadir sebagai jawaban terhadap tantangan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas. Melalui penguatan Puskesmas Komunitas Rumah Sehat, Posyandu, serta program Universal Health Coverage (UHC), Gresik mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif. Kolaborasi dengan UMKM lokal dalam program Makanan Bergizi juga menunjukkan pendekatan multisektor dalam memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. *Kedelapan,* memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat, **Gresik Barokah** berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial. Program ini menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, religiusitas, toleransi, dan kepedulian melalui dukungan pada tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta komunitas pemuda. Inisiatif seperti Gresik Probono juga membuka akses keadilan melalui bantuan hukum bagi warga miskin, memperkuat nilai keadilan sosial dan kepedulian antarwarga sebagai pilar kehidupan yang barokah. *Terakhir,* **Pesona Gresik** merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan. Melalui program seperti Revitalisasi Ekowisata, Naturalisasi Tanah Bekas Tambang, dan *Green Industry,* Gresik berupaya melestarikan alam sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan. Revitalisasi fasilitas kota dan pengelolaan sampah terpadu juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat, estetis, dan layak huni.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RANCANGAN AKHIR

RPJMD

KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029





4.1. Program Perangkat Daerah

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan program perangkat Daerah dikategorisasikan berdasarkan prioritas program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

1. Pemenuhan belanja wajib *(mandatory spending)* sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:
   (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
   (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

(4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;

(5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

2. Prioritas : Program Nawakarsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Nakawarsa dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) navigasi meliputi

(1) Gresik Tuntas,
(2) Gresik Seger,
(3) Gresik Mapan,
(4) Gresik Agropolitan,
(5) Gema Karya, Gresik
(6) Cemerlang, Gresik Sehati,
(7) Gresik Barokah, dan
(8) Pesona Gresik.

Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Peranggkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

3. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai Kinerja Pembangunan Daerah dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Nawakarsa ke dalam Nomenklatur Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
1.	**Gresik Tuntas** Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable	**1.**	*Gresik Integrated Smart System*	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah *(One Data, One Portal, And Open Access)*	Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
		2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
				menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
		3.	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa	Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		4.	Kios Pelayanan Publik (KPP)	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
			Tingkat Kecamatan	Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
2.	**Gresik Seger** Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	**5.**	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sosial



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
		6.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		7.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
						Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
					Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		9.	Gresik Sporti	Program santunan dalans upaya bentuk dukungan pada olahraga, atlit dan pelatih hingga e-sport	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
		10.	Program Keluarga	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
			Harapan (PKH) Inklusif			
3.	**Gresik Mapan** Maju, Pintar, dan Aman	**11.**	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisasi program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertanahan
		12.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari Gresik bagian utara hingga ke bagian selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13.	Pembangunan Pasar Modern Tematik	Membangun pasar tematik modern yang terintegrasi dengan pariwisata	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
					Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
		15.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Pengembangan Umkm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		16.	Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk gresik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
					Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		17.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi *feeder* Transjatim	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
		18.	Gebang Dusun (Gresik Bangun Dusun)	Program bantuan untuk dusun dengan mengintegrasikan bk, dana	Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
				hibah, bansos secara tematik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		19.	Gresik Kota Santri 4.0	Pembangunan kota modern yang terintegrasi dengan GISS	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
					Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		20.	Memastikan KetersediaanAir Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Pengembangan Akses Air Bersih Perpipaan	BUMD
4.	**Gresik Agropolitan**	**21.**	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian



Program Prioritas Daerah Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi		
		22.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine	Pertanian
		23.	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan
		24.	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
		25.	Pembangunan *Techno Park* berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
5.	**Gema Karya** Gresik mandiri dan berkarya	**26.**	Gresik Hub	KoesMilas Peningkatan Skill Anak Muda dalam Bentuk Workshop Bisnis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kesenian Tradisi dan Modern	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		27.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta memperkuat branding produk UMKM, UKM dan IKM Gresik	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		28.	Program Pelatihan Intensif Bersertifikat BNSP	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
				mesin), orientasi pengenalan dunia industri		
		29.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana dan industri *(deman driven)*	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
6.	**Gresik Cemerlang** Cerdas, efisien, menarik, relevan, global	**30.**	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		31.	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		32.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD dan TK	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**		
			Yang Non Sertifikasi	serta untuk guru pembimbing siswa inklusi		
		33.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		34.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
		35.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		36.	Peningkatan Kualitas Guru	Motalui beasiswa guru berprestasi, pelatihan dan workshop	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
		37.	BOP (Biaya Operasional Pesantren) untuk TPQ dan Madin	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		39.	Literasi Digital Tingkat Desa	Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi digital pada siswa TK, SD, dan SMP yang bertujuan untuk (1) budaya bermedia digital, (2) cakap bermedia digital, (3) etis bermedia digital	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		40.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**		
			/ Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi	
		41.	Bawean Pulau Pendidikan	Meningkatkan potensi serta infrastruktur pendidikan di pulau Bawean, sebagai rintisan Bawean sebagai pulau pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
7.	**Gresik Sehati** Pelayanan kesehatan integratif	**42.**	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan pelayanan di atasnya.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		43.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		44.	Memperkuat Posyandu,	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
			Polindes, dan Poskestren	dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren		
		45.	Peningkatan Tunjangan Kinerja Tenaga Kesehatan	Memberikan Peningkatan Tunjangan Kinerja untuk Tenaga Kesehatan Kabupaten Gresik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
		46.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Pengembangan Umkm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	**Navigasi**	**No**	**Sub Navigasi**			
		47.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan akta lahir melalui digital.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
					Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		48.	Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
8.	**Gresik Barokah**	**49.**	Membangkitkan Kesetia Kawanan Sosial, Kepahlawanan, dan Kepeloporan Warga Gresik		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		50.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Prioritas Daerah Nawakarsa				Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi		
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		51.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
		52.	Menguatkan Pembentukan Karakter Pemuda yang didasarkan pada Nilai-Nilai Agama Nilai Budaya Lokal dan Toleransi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
		53.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
		54.	Gresik *Probono* Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah



Program Prioritas Daerah Nawakarsa						Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi				
9.	**Pesona Gresik** Pelestarian dan naturalisasi alam	55.	Pengembangan dan Revitalisasi Ekowisata, yang Mengedepankan Keunggulan Kompetitif tiap Desa maupun Wilayah			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		56.	Naturalisasi Tanah Bekas Galian atau Tambang	Melakukan rehabilitasi tanah bekas galian atau tambang, guna meningkatkan nilai ekonomis lahan dan mencegah bencana alam.		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
		57.	Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Tingkat Kecamatan			Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
		58.	Revitalisasi Fasilitas Kota seperti Area Pedestrian, Jalan Utama, Terminal, Alun-Alun, serta Fasilitas Publik Lainnya yang Mendukung Aktifitas Wisatawan dan Pentas Seni Pertunjukan			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program Prioritas Daerah Nawakarsa					Nomenklatur Program Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No	Navigasi	No	Sub Navigasi			
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		59.	*Green Industry*	Mendorong industri berkelanjutan untuk ekosistem sehat dengan mengedepankan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industr	Perindustrian
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perindustrian



Selanjutnya, perumusan program perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasakan nomenklatur Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.2 Daftar Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2.	Program Pengelolaan Pendidikan
		3.	Program Pengembangan Kurikulum
		4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		6.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
Kesehatan	Dinas Kesehatan	7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kesehatan	Rsud Ibnu Sina	12.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		15.	Program Penyelenggaraan Jalan
		16.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pertanahan		17.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		18.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		20.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		21.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		22.	Program Penataan Bangunan Gedung
		23.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		24.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Perumahan dan Kawasan Permukiman		25.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		26.	Program Pengembangan Perumahan
		27.	Program Kawasan Permukiman
		28.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	29.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		30.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
		32.	Program Penanggulangan Bencana
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	33.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		34.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sosial	Dinas Sosial	35.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		36.	Program Pemberdayaan Sosial
		37.	Program Rehabilitasi Sosial
		38.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		39.	Program Penanganan Bencana
		40.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	41.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		42.	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		43.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		44.	Program Penempatan Tenaga Kerja
		45.	Program Hubungan Industrial
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	46.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		47.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		48.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		49.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		50.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
			Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		51.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		52.	Program Pengelolaan Persampahan
		53.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		55.	Program Pendaftaran Penduduk
		56.	Program Pencatatan Sipil
		57.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		58.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		60.	Program Penataan Desa
		61.	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		62.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		63.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		65.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		66.	Program Perlindungan Perempuan
		67.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		68.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		69.	Program Pengendalian Penduduk

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		70.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		71.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Perhubungan	Dinas Perhubungan	72.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		73.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		74.	Program Pengelolaan Pelayaran
		75.	Program Pengelolaan Perkeretaapian
Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		77.	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		78.	Program Aplikasi Informatika
Persandian		79.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Statistik		80.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	81.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		82.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		83.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		84.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		85.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		86.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		87.	Program Pengembangan UMKM
Perdagangan		88.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
		89.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		90.	Program Pengembangan Ekspor
		91.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		92.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		93.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		94.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		96.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		97.	Program Promosi Penanaman Modal
		98.	Program Pelayanan Penanaman Modal
		99.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		100.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	101.	Program Pengelolaan Arsip
Perpustakaan		102.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		103.	Program Pembinaan Perpustakaan
		104.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	105.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		106.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		107.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		108.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
		109.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga	110.	Program Pengembangan Kebudayaan
		111.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kepemudaan dan Olahraga		112.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		113.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Pariwisata		114.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		115.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		116.	Program Pemasaran Pariwisata
		117.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pertanian	Dinas Pertanian	118.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		119.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		120.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		121.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		122.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		123.	Program Penyuluhan Pertanian
		124.	Program Perizinan Pertanian
Pangan		125.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		126.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		127.	Program Pengawasan Keamanan Pangan

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Pengawasan	Inspektorat	128.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		129.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		130.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	131.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		132.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		133.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan		134.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keuangan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	135.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		136.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		137.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		138.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	139.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		140.	Program Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan		141.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	142.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		143.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		144.	Program Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	145.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
		146.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Kecamatan	Kecamatan Gresik	147.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		148.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		149.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		150.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		151.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		152.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Kebomas	153.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		154.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		155.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		156.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		157.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		158.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Manyar	159.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		160.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		161.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		162.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		163.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		164.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Kecamatan	Kecamatan Cerme	165.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		166.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		167.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		168.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		169.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		170.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Benjeng	171.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		172.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		173.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		174.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		175.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		176.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Balongpanggang	177.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		178.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		179.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		180.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		181.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		182.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Kecamatan	Kecamatan Duduksampeyan	183.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		184.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		185.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		186.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		187.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		188.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Driyorejo	189.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		190.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		191.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		192.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		193.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		194.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Wringinanom	195.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		196.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		197.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		198.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		199.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		200.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Kecamatan	Kecamatan Kedamean	201.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		202.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		203.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		204.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		205.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		206.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Menganti	207.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		208.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		209.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		210.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		211.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		212.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Sidayu	213.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		214.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		215.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		216.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		217.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		218.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Kecamatan	Kecamatan Ujungpangkah	219.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		220.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		221.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		222.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		223.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		224.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Panceng	225.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		226.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		227.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		228.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		229.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		230.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Bungah	231.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		232.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		233.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		234.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		235.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		236.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Kecamatan	Kecamatan Dukun	237.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		238.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		239.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		240.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		241.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		242.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Sangkapura	243.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		244.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		245.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		246.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		247.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		248.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Kecamatan Tambak	249.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		250.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		251.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		252.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		253.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		254.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Urusan	Perangkat Daerah	No	Program Pembangunan
Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	255.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		256.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		257.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		258.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		259.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.1.2. Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif Program

Penetapan Indikator dan Target Program memperhatikan arsitektur phon kinerja RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang telah diklasifikasikan menjadi ultimate outcome (tujuan), intermediate outcome sebagai *critical succes factor* (sasaran), *intermediate outcome* yang menaungi urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (sasaran Renstra OD). Arsitektur ini menjadi panduan dalam penjenjangan kinerja di tingkat *immediate outcome* (program pembangunan Daerah), dan output serta proses sebagai kinerja operasional pada penjabaran kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah. Penjabaran operasional dalam rumusan kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam Rencana strategis OPD 2025-2029 dengan mempedomani nomenklatur Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut, pagu Indikatif Program memperhatikan estimasi pertumbuhan pendapatan dan Belanja Daerah dalam Bab 2. Penetapan secara mendetail pendanaan masing-masing program disinkronisasikan dengan kewajiban pembiayaan (mandatory spending), program prioritas nawakarsa, belanja operasional rutin, inovasi, dan pertimbangan lainnya dalam perumusan kerangka pendanaan indikatif tahun 2025-2029. Penetapan Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam *Tabel 4.3 Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029* yang dimuat dalam lampiran Bab ini.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja merupakan langkah strategis yang krusial dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Kabupaten Gresik, penyusunan indikator kinerja untuk periode 2025–2029 merupakan instrumen vital dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun kebutuhan riil masyarakat. Secara substansial, indikator kinerja terbagi menjadi dua kategori utama meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1. PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) memegang peran sentral karena merepresentasikan capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah Daerah sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Dalam konteks penjenjangan kinerja, IKU pada tujuan RPJMD merupakan ultimate outcome yang dijabarkan pencapaiannya dalam sasaran-sasaran sebagai *critical succes factor.* Selanjutnya, penjabaran indikator kinerja utama ini dijabarkan dalam penjenjangan kinerja yang lebih operasional pada tingkatan sasaran Renstra OPD sebagai jembatan dokumen perencanaan strategis Daerah dan perangkat Daerah, capaian immediate outcome dalam program pembangunan, dan capaian operasional dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Lebih lanjut, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (1) menegaskan bahwa sasaran RPJMD dan RKPD menjadi dasar penilaian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Artinya, indikator yang melekat pada sasaran RPJMD akan menentukan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029,

penetapan Indikator Kinerja Utama harus bersifat relevan, terukur, dan berorientasi hasil (*outcome-based*), sekaligus mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemerintahan. Dengan adanya IKU yang tersusun secara tepat dan terstruktur, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kompas strategis yang akan memandu seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
		2024		2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	Angka (0-100)	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07	80,44 - 81,64	80,70 - 82,90	81,07 - 83,63
2.	Indeks Pembangunan Gender	91,01 (2024*)	Angka (0-100)	91.06-91.26	91.11-91.51	91.16-91.76	91.21-92.01	91.26-92.26	91.31-92.51
3.	Indeks Kesalehan Sosial	80,32 (2024*)	Angka (0-100)	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72	81.12-83.52	81.32-84.32	81.52-85.12
4.	Pertumbuhan ekonomi	4,79	Persen (%)	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	4,82-5,50	4,85-5,52	4,83-5,43
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58 (2024*)	Persen (%)	22,77 - 23,48	22,80 - 23,59	22,86 - 23,60	22,90 - 23,61	22,93 - 23,63	22,95 - 23,64
6.	Penurunan Emisi GRK	n/a	Ton CO_2eq per tahun	40.331,31	41.137,93	41.960,69	42.799,9	43.655,9	44.529,02



No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
		2024		2025	2026	2027	2028	2029	
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,94	Angka (0-100)	86.17	86.71	87.24	87.76	88.28	88.80
8.	Tingkat kemiskinan	10,32	Persen (%) (Burden)	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21	8,08-8,9	5,61-8,37	5,29-7,31
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,45	Persen (%) (Burden)	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39	6,74-5,16	6,67-5,02	6,59-4,93
10.	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,01*	Tahun	10,37	10,49	10,62	10,81	10,92	10,99
11.	Harapan Lama Sekolah	13,97*	Tahun	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27
12.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	82,5	Angka (0-100)	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50
13.	Indeks Perlindungan Anak	71,57*	Angka (0-100)	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	70,13*	Angka (0-100)	70.72-71.50	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50



No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
		2024		2025	2026	2027	2028	2029	
15.	Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	Angka (0-1)	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370
16.	Indeks Inklusi (GEDSI)	n/a	Angka (0-100)	60	64	68	72	76	80
17.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	n/a	Angka (0-100)	76,6 – 78,2	76,9 – 78,5	77,2 – 78,8	77,5 – 79,1	77,8 – 79,4	78,1 – 79,7
18.	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	Persen (%)	50.32-51.20	50.42-51.60	50.54-52.00	50.65-52.40	50.77-52.80	50.88-53.20
19.	Rasio Net Ekspor	10,51*	Persen (%)	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80
20.	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5,11*	Angka (<3->6)	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09
21.	Rasio *Government Expenditure*	11,79	Persen (%)	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45



No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
		2024		2025	2026	2027	2028	2029	
22.	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	Angka (0-5)	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25
23.	Indeks Infrastuktur	n/a	Angka (0-100)	63,23	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66
24.	Indeks Konektivitas Wilayah	n/a	Angka (0-1)	0.745	0.765	0.785	0.805	0.827	0.850
25.	Indeks Risiko Bencana	91,42*	Angka (>100-0) (Burden)	135,90-132,58	132,58-129,42	129,42-126,42	126,42-123,55	123,55-120,79	120,79 - 117,17
26.	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,12	Angka (0-100)	65,09	65,16	65,24	65,32	65,4	65,48
27.	Indeks Pemerintah Digital	4,32	Angka (0-5)	4,37	1,79 - 2,1	1,89 - 2,25	1,99 - 2,39	2,09 - 2,54	2,19 - 2,68
28.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	A	Predikat	A	A	A	AA	AA	AA
29.	Indeks Sistem Merit	310,5	Angka (0-410)	315	330	345	360	375	390



No	Indikator	Baseline	Satuan	Target Kinerja					Transisi 2030
		2024		2025	2026	2027	2028	2029	
30.	Indeks Pelayanan Publik	1.66	Angka (>2,01)	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51
31.	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48,87*	100-0 (Burden)	48	46	44	42	40	38
32.	Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	n/a perbedaan formulasi	Persen (%)	80-95	85-95	90-95	95-100	95-100	95-100
33.	Rasio gini	0,330	1-0 (burden)	0,311 - 0,351	0,303 - 0,343	0,295 - 0,335	0,287 - 0,327	0,279 - 0,319	0,271 - 0,311
34.	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	n/a	Persen (%)	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55	50-60



4.2.2. PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan pengukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek meliputi kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh validitas indikator kinerja serta keterkaitan indikator kinerja tersebut dengan tujuan pembangunan. Dalam konteks pecapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. Lagging indicators adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun leading indicators adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*). Perumusan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Aspek Daya Saing Daerah						
1.	Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	97,05	97,07	97,10	97,13	97,15	97,17
3.	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	92,19	92,21	92,23	92,25	92,27	92,29
4.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,69	98,71	98,73	98,75	98,77	98,79
5.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,91	98,93	98,95	98,97	98,99	99,01
6.	Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	98,69	98,71	99	98,75	98,77	98,79
7.	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	98,91	98,93	98,95	98,97	98,99	99,01
8.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	98,69	98,71	98,73	98,75	98,77	98,79
9.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	98,91	98,93	98,95	98,97	98,99	99,01
10.	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	98,69	98,71	98,73	98,75	98,77	98,79
11.	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	98,91	98,93	98,95	98,97	98,99	99,01
12.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100	100	100	100	100	100
14.	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	92,19	92,21	92,23	92,25	92,27	92,29
15.	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	92,19	92,21	92,23	92,25	92,27	92,29
16.	Skor Literasi Jenjang SD	72,97	75,47	77,97	80,47	82,97	85,47
17.	Skor Literasi Jenjang SMP	81,86	82,96	84,06	85,16	86,26	87,36
18.	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
19.	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	100	100	100	100	100	100
20.	Persentase RS terakreditasi	100	100	100	100	100	100
21.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	88	88,50	89	89,50	90	90,5
22.	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100	100	100	100	100	100
23.	Persentase petugas penanggung jawab PROGRAM esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis PROGRAM	100	100	100	100	100	100
24.	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	100	100	100	100	100	100
25.	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100	100	100	100	100	100
26.	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	96	96,50	97	97,50	98	98,50
27.	Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah	82,54	92,08	80,43	80,47	80,51	81,25
28.	Cost Recovery Rate (CRR)	78,86	78,66	77,91	77,32	76,75	77,11
29.	Bed Occupancy Rate (BOR)	27,61	30,42	34,72	37,91	40,56	43,15
30.	Average Lenght of Stay (ALOS)	3,5	3,9	4,6	4,9	5,2	5,8
31.	Turn Over Internal (TOI)	6,1	5,6	5,1	4,8	4,4	3,9

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
32.	Bed Turn Over (BTO)	42,3	43,1	44,2	46,9	47,1	49,2
33.	Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah	79	80	81	82	83	84
34.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	>88	>88,5	>89	>89,5	>90	>90,5
35.	Cost Recovery Rate (CRR)	88,07	88,92	89,67	90,42	91,17	91,92
36.	Bed Occupancy Rate (BOR)	67,86	69,75	71,64	73,52	75,41	77,23
37.	Average Lenght of Stay (ALOS)	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	4-9
38.	Turn Over Internal (TOI)	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
39.	Bed Turn Over (BTO)	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
40.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan		70	70	70	70	70
41.	Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah		25	26	27	28	29
42.	Cost Recovery Rate (CRR)		25	25,75	26,5	27,25	28
43.	Bed Occupancy Rate (BOR)		60	60	60	60	60
44.	Average Lenght of Stay (ALOS)		6-9	6-9	6-9	6-9	4-9
45.	Turn Over Internal (TOI)		1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
46.	Bed Turn Over (BTO)		40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
47.	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan dan Sumber Daya Air	97,88	98,15	98,42	98,68	98,83	98,98
48.	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	8,77	8,77	8,77	9,11	9,45	9,45
49.	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
50.	Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong	2	2	2	2	2	2
51.	Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
52.	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	33,68	17,60	19,23	19,84	20,68	20,97

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
53.	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa	0,764	0,764	0,767	0,767	0,772	0,774
54.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56.	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	100					
57.	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	100	60	60	60	60	60
58.	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	100	100	100	100	100	100
59.	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	64,11	71,27	78,44	85,62	92,81	100,00
60.	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61.	Persentase gedung pemerintah yang menerapkan efisiensi energi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62.	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63.	Persentase Rekomendasi Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikasi	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00
64.	Presentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	>25	>30	>35	>40	>45	>50
65.	Presentase Saluran Lingkungan dalam kondisi baik	>35	>40	>45	>50	>55	>60
66.	Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	3	4	4	4	5	5
67.	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	20	21	22	23	24	26
68.	Persentase Pencari Kerja dari Keluarga Miskin yang Diberi Pelatihan	20	21	22	23	24	26
69.	Persentase Pencari Kerja Perempuan yang diberi pelatihan	20	21	22	23	24	26
70.	Persentase Pencari Kerja Penyandang Disabilitas yang diberi pelatihan	20	21	22	23	24	26

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
71.	Rasio Program Pelatihan Kerja yang Sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	70	74	77	81	85	89
72.	Rasio Pekerja yang Mengalami Peningkatan Keterampilan atau Pendidikan	55	58	61	64	67	70
73.	Rasio Pekerja Berpendidikan Tinggi terhadap Total Pekerja	18	19	20	21	22	23
74.	Rasio Program Pelatihan Keterampilan yang Berkolaborasi dengan Industri atau Sektor Tertentu	30	32	33	35	36	38
75.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	20	25	30	35	40	45
76.	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	27,89	29	31	32	34	36
77.	Persentase Pembinaan terhadap Perusahaan yang Melanggar Upah Minimum	65	68	72	75	79	83
78.	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40	42	44	46	49	51
79.	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH	80	>80	>80	>80	>80	>80
80.	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan	80	80	80	80	80	80
81.	Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan	1 : 3	1 : 3	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
82.	Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan	1 : 5	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4
83.	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	>38	72,73	74,75	76,77	78,79	80,81
84.	Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa	>55	66	66	68	68	69
85.	Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	<11,65	<11,60	<11,55	<11,50	<11,45	<11,40
86.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	100	100	100	100	100
87.	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	7	7	7	9	9	9

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
88.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju	>50	>52	>54	>56	>58	>60
89.	Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa	>8,5	>8,7	>8,9	>9,1	>9,3	>89,5
90.	Persentase Konektivitas Darat	63,16	73,68	78,95	89,47	94,74	100,00
91.	Ratio Kendaraan Angkutan Lulus Uji	96,27	96,37	96,47	96,57	96,67	96,77
92.	Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	72,07	17,32	74,30	75,42	76,54	77,65
93.	Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	4,19	5,00	5,81	6,62	7,43	8,24
94.	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	>72,5	>73,5	>74,5	>75,5	>76,5	>77,5
95.	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat	>65	>67	>69	>71	>73	>75
96.	Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fossil di kawasan perkotaan	100	100	100	100	100	100
97.	Persentase Konektivitas Laut	60,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
98.	Persentase Ketersediaan ASDP		100	100	100	100	100
99.	Indeks Pembangunan Statistik	2,7	2,75	2,75	2,8	2,8	2,85
100.	Indeks KAMI	200	225	250	275	300	325
101.	Persentase Koperasi Aktif	67,87	68,26	68,65	69,04	69,43	69,82
102.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14,72	18,4	22	25,7	29,44	33,12
103.	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi Sehat	10,07	14,38	18,7	21,58	25,89	30,21
104.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	N/A	33	34,23	35,46	36,68	39,14
105.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro	2,71	3,39	4,07	4,74	4,74	4,74
106.	Indeks harga konsumen	105	105	105	105	105	105
107.	Pertumbuhan nilai ekspor	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
108.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	50	50	50	50	50

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
109.	Persentase peningkatan jumlah investor	39,04	>5-10	>5-10	>5-10	>5-10	>5-10
110.	Realisasi total terhadap target investasi	80	80	80	80	80	80
111.	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah	>65	>65	>65	>65	>65	>65
112.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5
113.	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha		80	80	80	80	80
114.	Tingkat kematangan layanan penanaman modal	5	5	5	5	5	5
115.	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		2	2	2	2	2
116.	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	>5-10	6.76	7.59	7.84	9.09	9.33
117.	Produksi perikanan tangkap (ton)	13856	14165	14474	14783	15092	15401
118.	Produksi perikanan budidaya (ton)	159768	163564	167361	171157	174954	178750
119.	Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	90	95	0,95	0,95	0,95	0,95
120.	Tingkat Pertumbuhan Belanja Modal (%)	>3-5	>3-5	>3-5	>3-5	>3-5	>3-5
121.	Pertumbuhan Kontribusi CSR (%)	>5-8	>5-8	>5-8	>5-8	>5-8	>5-8
122.	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang Penerapan Ekonomi Hijau (%)	100	100	100	100	100	100
123.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kawasan Industri	89,45	89,50	89,55	89,60	89,65	89,70
124.	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran untuk Mandatory Infrastruktur (%)	>40	>40	>40	>40	>40	>40
125.	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang pendukung Kawasan Strategis	100	100	100	100	100	100
126.	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100					
127.	Capaian Indeks Inovasi Daerah	0,00					
128.	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100					
129.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100					

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
130.	Realisasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	100	100	100	100	100	100
131.	Skor Pilar Kapabilitas Inovasi	>3,3	>3,35	>3,4	>3,45	>3,5	>3,55
132.	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Rida yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%
133.	Pertumbuhan Jumlah Inovasi Daerah		>3-5%	>3-5%	>3-5%	>3-5%	>3-5%
134.	Efektifitas pendapatan Daerah	90	90	90	90	90	90
135.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100	100	100	100	100
136.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	5	5	5	5	5	5
137.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52
138.	Cost to Revenue Ratio (%) - BPR Bank Gresik - PT Gresik Migas - Perumda Giri Tirta	 70 91 121	 69 90 120	 68 89 119	 67 88 118	 66 87 117	 65 86 116
139.	Net Profit Margin (%) - BPR Bank Gresik - PT Gresik Migas - Perumda Giri Tirta	 8,1 1,1 - 21	 8,2 1,2 - 20	 8,3 1,3 - 19	 8,3 1,2 - 19	 8,4 1,4 - 18	 8,5 1,5 - 17
140.	Return of Invesment (%) - BPR Bank Gresik - PT Gresik Migas - Perumda Giri Tirta	 6 9 - 76	 7 10 - 75	 8 11 - 74	 9 12 - 73	 10 13 - 72	 11 14 - 71
141.	Rasio Utilitas Aset (%) - BPR Bank Gresik - PT Gresik Migas - Perumda Giri Tirta	 15 173 168	 16 177 169	 17 175 170	 18 176 171	 19 177 172	 20 178 173
142.	Pertumbuhan pelanggan PDAM	10,65	10,70	10,75	10,80	10,85	10,90
143.	Nilai evaluasi kinerja TPID	>84	>85	>86	>87	>88	>89
144.	Efektivitas Kerjasama Daerah	>80	>80	>80	>80	>80	>80
145.	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	>80	>82	>84	>86	>88	>90
146.	Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34
147.	Jumlah proyek pembangunan fasilitas energi terbarukan	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
148.	Realisasi Belanja Infrastruktur dari Pendanaan Inovatif	Perencanaan	Perencanaan	Pengadaan	Pengadaan	>5	>5
	Aspek Geografi dan Demografi						
149.	Rasio Tutupan Lahan Hijau	8,00	8,01	8,02	8,03	8,04	8,05
150.	Rasio RTH yang dikelola (oleh DLH) per Luas Wilayah	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
151.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	10	11	12	13	14	15
152.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
153.	Perekaman KTP elektronik	100	100	100	100	100	100
154.	Rasio Keluarga Miskin yang memiliki KTP-el	88,33	88,7	90,39	92,65	94,93	97,42
155.	Jumlah pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	100	100	100	100	100	100
156.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100
157.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100
158.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100
159.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100
160.	Persentase anak pekerja Migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	100	100	100	100	100	100
161.	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	50,25	50,97	51,69	52,41	53,14	53,86
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
162.	Angka Partisipasi Murni PAUD	79,30	79,33	79,36	79,39	79,42	79,45
163.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat	97,13	97,16	97,19	97,22	97,25	97,28
164.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat	76,15	76,18	76,21	76,24	76,27	76,30
165.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	83,82	83,85	83,88	83,91	83,94	83,97
166.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat	102,62	102,65	102,68	102,71	102,74	102,77
167.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat	94,15	94,18	94,21	94,24	94,27	94,30
168.	Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat	93,09	93,12	93,15	93,18	93,21	93,24

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
169.	Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat	72,77	72,80	72,83	72,86	72,89	72,92
170.	Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan	90,63	90,65	90,67	90,69	90,71	90,71
171.	Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP di wilayah rentan	95,54	95,56	95,58	95,60	95,62	95,64
172.	Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatk an pelayanan melalui UPT LPABK	51,15	57,15	59,15	61,15	63,15	65,15
173.	Angka Partisipasi Murni Paud Sederajat dari Keluarga Miskin	56,44	56,47	56,5	56,53	56,56	56,59
174.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin	74,8	74,83	74,86	74,89	74,92	74,95
175.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin	57,98	58,01	58,04	58,07	58,1	58,13
176.	Rasio sekolah yang melakukan pelatihan atau sosialisasi sekolah ramah anak kepada guru dan siswa setiap tahun	34,64	34,66	34,68	34,7	34,7	34,74
177.	Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah	>40%	>45%	>50%	>55%	>60%	>65%
178.	Cakupan siswa miskin dan berprestrasi penerima beasiswa pendidikan tinggi	>5-10 orang	>5-10 orang	>5-10 orang	>5-10 orang	>5-10 orang	>5-10 orang
179.	Skor Numerasi Jenjang SD	63,09	65,99	68,89	71,79	74,69	77,59
180.	Skor Numerasi Jenjang SMP	70,63	72,13	73,63	75,13	76,63	78,13
181.	Persentase siswa SD yang melanjutkan ke jenjang berikutnya	96,47	96,48	96,49	96,5	96,51	96,52
182.	Persentase siswa SMP yang melanjutkan ke jenjang berikutnya	62,23	62,25	62,27	62,29	62,31	62,33
183.	Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan.	100	100	100	100	100	100
184.	Persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan).	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
185.	Persentase bayi yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan.	100	100	100	100	100	100
186.	Persentase bayi yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	100	100	100	100	100
187.	Persentase ibu hamil dari keluarga miskin yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan.	100	100	100	100	100	100
188.	Persentase ibu dari keluarga miskin yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan).	100	100	100	100	100	100
189.	Persentase bayi dari keluarga miskin yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan.	45	55	60	65	70	75
190.	Persentase bayi yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan.	100	100	100	100	100	100
191.	Persentase bayi dari keluarga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	100	100	100	100	100
192.	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	100	100	100	100	100	100
193.	Persentase balita stunting dari keluarga miskin mendapatkan penanganan	100	100	100	100	100	100
194.	CFR (Case Fatality Rate) DBD	0,80	0,70	0,60	0,50	0,50	0,50
195.	Penemuan Kasus Baru TBC (CDR)	85,0	85,5	86,0	86,5	87,0	87,5
196.	Persentase Pasien TBC yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
197.	Persentase Pasien HIV yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
198.	Persentase Pasien Malaria yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
199.	Persentase pasien TBC yang tercatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan TB elektronik (SITB) sejak awal pengobatan.	100	100	100	100	100	100
200.	Persentase Pasien TBC yang menerima kunjungan tindak lanjut oleh tenaga kesehatan atau kader minimal 1x per bulan.	100	100	100	100	100	100
201.	Persentase Pasien TBC yang Dilaksanakan Investigasi Kontak	75	80	85	90	95	100
202.	Persentase Pasien HIV yang Dilaksanakan Notifikasi Pasangan	75	80	85	90	95	100
203.	Persentase Pasien Malaria yang Dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	100	100	100	100	100	100
204.	Rasio Diagnosis TBC Menggunakan TCM Dibanding Pemeriksaan Radiologis	70	72	74	75	80	85
205.	ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	82	82,5	83	83,5	84	84,5
206.	Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri	12,50	12,55	13,00	13,50	14,00	14,50
207.	Rasio Keluarga Miskin yang menjadi peserta UHC dengan status PBPU BP Pemda dan PBIJK	>70	>75	>80	>85	>90	>95
208.	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif	100	100	100	100	100	100
209.	Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas ruang menyusui dan tempat bermain anak yang aman dan nyaman	84	100	100	100	100	100
210.	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	100	100	100	100	100	100
211.	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	89	91	93	95	97	99
212.	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PONKESTREN)	62	64	66	68	70	72
213.	Gross Death Rate (GDR)	31,11	30,78	30,35	29,67	29,12	28,75
214.	Net Death Rate (NDR)	10,51	10,01	9,8	9,6	9,2	8,9

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
215.	Gross Death Rate (GDR)	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45
216.	Net Death Rate (NDR)	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
217.	Gross Death Rate (GDR)		≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45	≤ 45
218.	Net Death Rate (NDR)		≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
219.	Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41
220.	Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak	91,72	91,73	91,74	91,74	91,75	91,76
221.	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Kelompok Rentan	>80	>85	>90	>95	>95	100,00
222.	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Sektor Perumahan dan Permukiman	>90	100	100	100	100	100
223.	Persentase Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni	>35	>40	>45	>50	>55	>60
224.	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi	100,00	100	100	100	100	100
225.	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	>12,24	>12,28	>12,32	>12,36	>12,40	>12,44
226.	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	>10,14	>10,17	>10,20	>10,23	>10,26	>10,29
227.	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	3,60	3,89	4,20	4,55	4,93	5,37
228.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
229.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
231.	Rasio Desa dengan Relawan Siaga Bencana Terlatih dan Aktif	28,09	29,49	30,90	32,30	33,71	35,11
232.	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
233.	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	5,68	9,33	13,93	16,23	20,28	26,37
234.	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	2,43	9,33	17,44	24,34	32,45	40,57
235.	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	17,28	28,40	34,57	40,74	46,91	53,09
236.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	100	100	100	100	100	100
237.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		50	60	70	80	90
238.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	57	59	61	63	65	67
239.	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	12	12	12	12	12	12
240.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	47	51	60	67	70	77
241.	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	92	92	95	95	97	97
242.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	48	49	51	52	53	54
243.	Indeks Kesejahateraan Sosial Lanjut Usia	>70	>72	>74	>76	>78	>80
244.	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	>72	>74	>76	>78	>80	>82
245.	Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	100	100	100
246.	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
247.	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	100	100	100	100	100	100
248.	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	87,00	87,50	88,00	88,50	90,00	90,50
249.	Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	100	100	100	100	100	100
250.	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1,50	1,70	1,90	2,00	2,00	2,00
251.	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
252.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	59,75	61,61	72,14	80,19	83,90	87,00
253.	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	29,77	31,57	37,59	40,29	42,10	43,60
254.	Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	30,07	30,82	33,68	39,90	41,80	43,41
255.	Persentase Pencari Kerja dari keluarga miskin yang ditempatkan	20	21	22	23	24	26
256.	Persentase Pencari Kerja Perempuan yang yang ditempatkan	30	32	33	35	36	38
257.	Persentase Pencari Kerja Penyandang Disabilitas yang yang ditempatkan	20	21	22	23	24	26
258.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di sektor manufaktur	35	37	39	41	43	45
259.	Tingkat Penyelesaian Kasus Pekerja Migran	90	95	99	100	100	100
260.	Rasio Pekerja Migran yang Terdaftar dalam Sistem Pendaftaran Tenaga Kerja Migran	30	32	33	35	36	38

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
261.	Realisasi pengajuan klaim jaminan ketenagakerjaan untuk Pekerja dari Keluarga Miskin	100	100	100	100	100	100
262.	Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia	28,57	28,57	42,86	42,86	57,14	57,14
263.	Persentase Penanganan Sampah	58,8	58,85	58,9	58,95	59	59,05
264.	Prosentase Pengurangan Sampah	18,52	18,53	18,54	18,55	18,56	18,57
265.	Persentase Penduduk Miskin yng terlayani Persampahan	>85	>90	>95	100	100	100
266.	Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 3	1 : 3	1 : 3
267.	Rasio Keluarga Miskin yang memiliki Akta Kelahiran	88,67	88,7	88,72	88,75	88,77	88,78
268.	Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa	>15	>15	>15	>15	>15	>15
269.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	30	50	55	60	65	70
270.	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan		6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
271.	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan	96	>95	>95	>95	>95	>95
272.	Cakupan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar		18	18	18	18	18
273.	Persentase KRT Perempuan Miskinyang Menyatakan Peningkatan Pendapatan setelah Intervensi Program	10					
274.	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	60	70	80	80	90	90
275.	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan	100	85	>85	>85	>85	>85

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
276.	Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial		>80	>80	>80	>80	>80
277.	Persentase Rata-Rata Usia Kawin Pertama dibawah 20 tahun	12,15	9,7	9,6	9,5	9,4	9,3
278.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	78	78	78	78	78	78
279.	persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI	>60	>60	>60	>60	>60	>60
280.	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	>25	>30	>35	>40	>45	>50
281.	Persentase keluarga miskin yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan atau perlindungan anak	-	48	48	48	48	48
282.	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	>35	47.50	52,12	53,33	53,33	53,33
283.	Rasio Wirausaha Pemuda	0,5	0.5	0.55	0.60	0.65	0.70
284.	Persentase cabor berprestasi	>85	84.30	84,5	84,7	84,75	85
285.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	7,5	10	12.5	15	17.5	20
286.	Persentase Atlet Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pembinaan	10	10.66	11.33	12	12,66	13.33
287.	Persentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terpelihara	100	100	100	100	100	100
288.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	>95	96	96	96	96	96
289.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	≥ 150.000	≥ 150.500	≥ 153.000	≥ 156.000	≥ 158.000	≥ 160.000
290.	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		20	20	30	30	40
291.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal		≥ 350.000	≥ 375.000	≥ 400.000	≥ 425.000	≥ 455.000
292.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	5	6,25	6.25	8.30	8.3	0,1
293.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	>8	10	10	12.5	12.5	14
294.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	>5-10	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
295.	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	>3-6	2	2	2	2.2	2.5

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
296.	Presentase Destinasi Wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan)	>50	>55	>60	>65	>70	>75
297.	Nilai survey perspektif masyarakat terhadap pariwisata Gresik	>70	>72	>74	>76	>78	>80
298.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	1	1	1.4	1.8	2.2	2.5
299.	Persentase Pelatihan/ Pembinaan Terhadap Kelompok Nelayan	43	43	43,5	43,9	44,2	44,5
300.	Persentase Pelatihan/Pembinaan Terhadap Kelompok Budidata	20	>22	>24	>26	>28	>30
301.	Pertumbuhan Angka konsumsi ikan	>2-4	>2-4	>2-4	>2-4	>2-4	>2-4
302.	Jumlah Produksi Pangan Lokal (Ton)	>190000	>190000	>190000	>190000	>190000	>190000
303.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	35	0,5	65	80	90	100
304.	Stabilitas Harga Pangan Utama	4,68					
305.	Pertumbuhan Skor Pola Pangan Harapan	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
306.	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	>40	>45	>50	>55	>60	>65
307.	Skor Pola Pangan Harapan	94,17					
308.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	>16	>18	>20	>22	>24	>26
309.	Persentase Keamanan Pangan Segar	>77	>78	>80	>85	>87	>93
310.	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	>90	>90	>90	>90	>90	>90
311.	Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	>90	>90	>90	>90	>90	>90
312.	Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasislitasi Instruktur Pertanian	>32,8	>33,3	>33,8	>34,3	>34,8	>35,3
313.	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	>90	>90	>90	>90	>90	>90
314.	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	92	92	0,93	0,93	0,94	0,94
315.	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	1,49	2,98	4,47	5,95	7,44	8,93
316.	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang mandatory pendidikan dan pelatihan ASN untuk pengembangan Kompetensi	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	penyelengaraan pemerintahan (0.34 % dari APBD)						
317.	Rasio Pendapatan Per Kapita terhadap Garis Kemiskinan	>17-20	>17-20	>17-20	>17-20	>17-20	>17-20
318.	Cakupan data Kemiskinan yang digunakan dalam Program Penanggulangan kemiskinan Sektoral Daerah	>60-70	>60-70	>60-70	>60-70	>60-70	>60-70
319.	Indeks Reformasi Hukum	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50	96,55
320.	Persentase Pembentukan Desa Sadar Hukum per tahun	>1,12	>1,12	>1,12	>1,12	>1,12	>1,12
321.	Presentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi	100	100	100	100	100	100
322.	Indeks Kesadaran Berbangsa	76,60	76,90	77,20	77,50	77,80	78,10
323.	Indeks Demokrasi Indonesia	7,15	7,25	7,35	7,45	7,55	7,65
324.	Indeks Kewaspadaan Nasional	76,60	76,90	77,20	77,50	77,80	78,10
	Aspek Pelayanan Umum						
325.	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	100	100	100	100
326.	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memenuhi ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi	>60	>64	>68	>72	>76	>80
327.	Persentase PSU Makam dalam Kondisi Baik	>40	>45	>50	>55	>60	>65
328.	Layanan Kepuasan pelayanan kepamongprajaan	>80	>80	>80	>80	>80	>80
329.	Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran	>90	>90	>90	>90	>90	>90
330.	Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	100	100	100	100	100	100
331.	Layanan Kepuasan pelayanan Linmas	>80	>80	>80	>80	>80	>80
332.	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100	100	100	100	100	100
333.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah *(LHE INTERNAL)*	>81	>81	>81	>81	>81	>81
334.	Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
335.	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	100	100	100	100
336.	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Pekerjaan	60	63	66	69	73	77
337.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air	60	62	64	66	68	70
338.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara	60	62	64	66	68	70
339.	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	62	64	66	68	70	72
340.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH	20	22	24	26	28	30
341.	Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	55	57	59	61	63	65
342.	Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi / Presentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Tertangani	100	100	100	100	100	100
343.	Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi/ Prosentase penerbitan sanksi administratif	100	100	100	100	100	100
344.	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100
345.	Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO	100	100	100	100	100	100
346.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66
347.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100
348.	Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode	20	20	18	16	14	12
349.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	100	100	100	100	100
350.	Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun	>40	45	>50	>55	>60	>65

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
351.	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100	100	100	100	100
352.	Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	>72	>74	>76	>78	>80	>82
353.	Nilai Tata Kelola Pemerintahan Desa	>70	>72	>74	>76	>78	>78
354.	Rasio Pencatatan Aset Desa	100	100	100	100	100	100
355.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	>80	81,65	82,66	83,66	84,67	85,68
356.	Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir	70	75	80	90	95	100
357.	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik	62,86	65,71	68,57	71,43	74,29	77,14
358.	Persentase Penerangan Jalan Umum yang menggunakan Lampu Ramah energi	75,00	80,01	85,01	90,02	95,02	100,00
359.	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	100	100	100	100	100	100
360.	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	66,67	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00
361.	Persentase pemenuhan daftar informasi dan dokumentasi publik	45,00	50,00	51,00	60,00	0,65	0,69
362.	Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	>95	>95	>95	>95	>95	>95
363.	Kapasitas Bandwith Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
364.	Persentase Aplikasi yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	85,4	85,1	86,9	87,6	88,3	89,10
365.	Persentase pemenuhan kebutuhan server	1,58	6,58	11,58	16,70	21,58	26,58
366.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	3,68	7,36	11,04	14,72	18,4	22,08
367.	Rasio Jumlah Usaha Mikro Terhadap Total Usaha yang Terdaftar OSS	2,71	3,39	4,07	4,74	4,74	4,74
368.	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100	100	100			
369.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100	100	100	100	100
370.	Persentase Alat UTTP berterra sah	>50	>62	>63	>64	>65	>66
371.	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
372.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
373.	Pertumbuhan promosi penanaman modal	3,78	>5	>5	>5	>5	>5
374.	Persentase penyelesaian ijin	75					
375.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan		75	75	75	75	75
376.	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan LPKM	30	30	60	60	60	60
377.	Persentase Capian Kinerja Program	100	100	100	100	100	100
378.	Nilai Surye Kepuasaan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	88,31 - 100 SANGAT BAIK	88,31 - 100 SANGAT BAIK	88,31 - 100 SANGAT BAIK	88,31 - 100 SANGAT BAIK	88,31 - 100 SANGAT BAIK	88,31 - 100 SANGAT BAIK
379.	Persentase Perpustakaan yang dibina	55,30%	64,16%	73,02%	81,88%	90,74%	100,00%
380.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	75	80	85	90	95	100
381.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	34,48	44,83	55,17	68,97	86,21	100
382.	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	11,58	26,35	44,58	62,81	81,28	100
383.	Rasio Kepatuhan Pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan	>40	>44	>48	>52	52,3	53,2
384.	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100
385.	Persentase nilai evaluasi lnternal AKlP OPD minimal A	87,25	87,50	87,75	88,00	88,25	88,50
386.	Persentase tindak lanjut audit Internal	100	100	100	100	100	100
387.	Persentase tindak lanjut audit Eksternal	88,45	88,50	88,55	88,60	88,65	88,70
388.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	100	100	100	100	100	100
389.	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
390.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3
391.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100					
392.	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
393.	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100
394.	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100
395.	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100
396.	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang mandatory pendidikan (%)	>20	>20	>20	>20	>20	>20
397.	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100
398.	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100
399.	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100
400.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan CSR (%)	>25	>30	>35	>40	>45	>50
401.	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100
402.	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100
403.	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100
404.	Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (%)	>90	>90	>90	>90	>90	>90
405.	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal	>70	72,31	72,31	72,31	72,31	72,31
406.	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur	>80	80	85	90	90	90
407.	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
408.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30,48	30	30	30	30	30

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
409.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	35,03	38	40	40	40	40
410.	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100	100	100	100	100	100
411.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
412.	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100	100	100	100	100	100
413.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
414.	Persentase pengan dengan SKP bernilai "Baik"	99,9	100	100	100	100	100
415.	Persentase Kedisiplinan ASN	96,51	100	100	100	100	100
416.	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sesuai dengan Formasi	93,5	94	94,5	95	95,5	96
417.	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100	100	100	100	100	100
418.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	100	100	100	100
419.	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	91	91,5	92	92,5	93	93,5
420.	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Managerial, dan Fungsional	56	58	60	62	64	66
421.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah		88,25	88,28	88,31	88,34	88,37
422.	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	2,5					
423.	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”	92					
424.	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	91,00					
425.	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100					
426.	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100					
427.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100					
428.	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100					
429.	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100					
430.	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Baik					

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
431.	Persentase Perbup yang diproses	90					
432.	Persentase Perda yang diproses	90					
433.	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90					
434.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	>80	>80	>80	>80	>80	>80
435.	Nilai evaluasi kinerja TPID	68,75					
436.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3					
437.	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%					
438.	Persentase pemenuhan data dukung LPPD	100	100	100	100	100	100
439.	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
440.	Indeks Kematangan Organisasi	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2
441.	Presentase Unit Pelayanan Publik dengan nilai Kepatuhan standar pelayanan Publik minimal kualitas tinggi	100	100	100	100	100	100
442.	Presentase Unit Pelayanan Publik dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat kategori Baik	98	98	98	98	98	98
443.	Tingkat Kematangan UKPBJ	3	3	3	3	3	3
444.	Persentase Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	>90	>90	>90	>90	>90	>90
445.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	77	78	79	80	81	82
446.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	87,85	87,9	87,95	88	88,15	88,2
447.	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100
448.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	100	100	100	100	100
449.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
450.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	100	100	100	100
451.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	100%	100%	100%	100%	100%
452.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
453.	Persentase Dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
454.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
455.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
456.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
457.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	80	80	80	80	80	80
458.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	80	80	80	80	80	80
459.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
460.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	80	80	80	80	80	80
461.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	80	80	80	80	80	80
462.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	80	80	80	80	80	80
463.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
464.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
465.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
466.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
467.	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	4	4	4
468.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
469.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
470.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
471.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
472.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
473.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
474.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
475.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
476.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
477.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
478.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
479.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
480.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
481.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
482.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
483.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
484.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
485.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
486.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
487.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
488.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
489.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
490.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
491.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
492.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
493.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
494.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
495.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
496.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
497.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
498.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
499.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
500.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
501.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
502.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
503.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
504.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
505.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
506.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
507.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
508.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
509.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
510.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
511.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
512.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
513.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
514.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
515.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
516.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
517.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
518.	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
519.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
520.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
521.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
522.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
523.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
524.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
525.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
526.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
527.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
528.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
529.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
530.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
531.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
532.	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
533.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
534.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
535.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
536.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
537.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
538.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
539.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
540.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
541.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
542.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
543.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
544.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
545.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
546.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
547.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
548.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
549.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
550.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
551.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
552.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
553.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
554.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
555.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
556.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
557.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
558.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
559.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
560.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
561.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
562.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
563.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
564.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
565.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
566.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
567.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
568.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
569.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
570.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
571.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
572.	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
573.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
574.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
575.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
576.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
577.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
578.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
579.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
580.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
581.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
582.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
583.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
584.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
585.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
586.	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
587.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
588.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
589.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
590.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
591.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
592.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
593.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
594.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
595.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
596.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
597.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
598.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
599.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
600.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
601.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
602.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
603.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
604.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
605.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
606.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
607.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
608.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
609.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
610.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
611.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
612.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
613.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
614.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
615.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
616.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
617.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
618.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
619.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
620.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
621.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
622.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
623.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
624.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
625.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
626.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
627.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
628.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
629.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
630.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
631.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
632.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
633.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
634.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
635.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
636.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
637.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
638.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
639.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
640.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
641.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
642.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
643.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
644.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
645.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
646.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
647.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
648.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
649.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
650.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
651.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
652.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
653.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
654.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
655.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
656.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
657.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
658.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
659.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
660.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
661.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
662.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
663.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
664.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
665.	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
666.	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
667.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
668.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
669.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
670.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
671.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
672.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
673.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
674.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
675.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
676.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
677.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
678.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
679.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
680.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100	100	100	100	100
681.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100	100	100	100	100
682.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100
683.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100	100	100	100	100
684.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100	100	100	100	100
685.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100	100	100	100	100
686.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
687.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
688.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	2025	2026	2027	2028	2029	2030
689.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
690.	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100	100	100	100	100
691.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18	18	18	18	18	18
692.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	100	100	100	100
693.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75	77	79	80	81	83
694.	Indeks Kinerja Ormas	76,60	76,90	77,20	77,50	77,80	78,10
695.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100
696.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100

Lampiran BAB 4 - Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					BELANJA				3.750.369.250.654		3.896.829.801.719		3.968.317.589.106		4.049.911.253.468		4.158.703.825.149		4.282.874.661.260
					DINAS PENDIDIKAN				1.018.887.607.615		1.024.109.647.185		1.054.482.345.895		1.091.208.239.007		1.117.970.748.957		1.163.016.877.053
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	1	01	01	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	555.844.829.518	100	571.072.264.632	100	574.913.213.924	100	594.041.514.440	100	605.914.958.447	100	625.034.053.577
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni PAUD	79,27	79,30	430.552.412.097	79,33	419.983.466.529	79,36	445.493.718.233	79,39	461.856.538.901	79,42	474.999.211.421	79,45	499.808.690.772
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat	97,1	97,13		97,16		97,19		97,22		97,25		97,28	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat	76,12	76,15		76,18		76,21		76,24		76,27		76,30	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar PAUD	83,79	83,82		83,85		83,88		83,91		83,94		83,97	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat	102,59	102,62		102,65		102,68		102,71		102,74		102,77	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat	94,12	94,15		94,18		94,21		94,24		94,27		94,30	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat	93,06	93,09		93,12		93,15		93,18		93,21		93,24	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederajat	72,74	72,77		72,80		72,83		72,86		72,89		72,92	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD di wilayah rentan	90,61	90,63		90,65		90,67		90,69		90,71		90,71	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP di wilayah rentan	95,52	95,54		95,56		95,58		95,60		95,62		95,64	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatk an pelayanan melalui UPT LPABK	N/A	51,15		57,15		59,15		61,15		63,15		65,15	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah	-	>40%		>45%		>50%		>55%		>60%		>65%	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan siswa miskin dan berprestrasi penerima beasiswa pendidikan tinggi	-	>5-10 orang		>5-10 orang		>5-10 orang		>5-10 orang		>5-10 orang		>5-10 orang	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Paud Sederajat dari Keluarga Miskin	-	56,44		56,47		56,5		56,53		56,56		56,59	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin	-	74,8		74,83		74,86		74,89		74,92		74,95	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat dari Keluarga Miskin	-	57,98		58,01		58,04		58,07		58,1		58,13	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio sekolah yang melakukan pelatihan atau sosialisasi sekolah ramah anak kepada guru dan siswa setiap tahun	-	34,64		34,66		34,68		34,7		34,7		34,74	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rerata Rasio Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Sederajat Kondisi Baik atau Sesuai Standar Nasional													
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Skor Numerasi Jenjang SD	-	63,09	-	65,99	250.000.000	68,89	250.000.000	71,79	250.000.000	74,69	250.000.000	77,59	250.000.000
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Skor Numerasi Jenjang SMP		70,63		72,13		73,63		75,13		76,63		78,13	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase siswa SD yang melanjutkan ke jenjang berikutnya		96,47		96,48		96,49		96,5		96,51		96,52	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase siswa SMP yang melanjutkan ke jenjang berikutnya		62,23		62,25		62,27		62,29		62,31		62,33	
4	1	01	04	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	97,03	97,05	32.490.366.000	97,07	32.488.938.000	97,10	33.625.413.738	97,13	34.860.185.667	97,15	36.606.579.089	97,17	37.724.132.704
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	92,17	92,19		92,21		92,23		92,25		92,27		92,29	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,67	98,69		98,71		98,73		98,75		98,77		98,79	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	98,89	98,91		98,93		98,95		98,97		98,99		99,01	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1	01	05	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	98,67	98,69	-	98,71	214.978.024	99	100.000.000	98,75	100.000.000	98,77	100.000.000	98,79	100.000.000
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	98,89	98,91		98,93		98,95		98,97		98,99		99,01	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	98,67	98,69		98,71		98,73		98,75		98,77		98,79	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	98,89	98,91		98,93		98,95		98,97		98,99		99,01	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	92,17	92,19		92,21		92,23		92,25		92,27		92,29	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	92,17	92,19		92,21		92,23		92,25		92,27		92,29	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	98,67	98,69		98,71		98,73		98,75		98,77		98,79	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	98,89	98,91		98,93		98,95		98,97		98,99		99,01	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100	100		100		100		100		100		100	
5	1	01	05	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Skor Literasi Jenjang SD	0	72,97	-	75,47	100.000.000	77,97	100.000.000	80,47	100.000.000	82,97	100.000.000	85,47	100.000.000
				DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Skor Literasi Jenjang SMP		81,86		82,96		84,06		85,16		86,26		87,36	
					DINAS KESEHATAN				715.885.212.405,90		718.401.441.560,00		739.707.549.356,00		758.870.638.694,00		780.288.616.495,00		799.873.082.634,00
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	317.240.132.910	100	315.627.418.139	100	328.361.461.723	100	335.914.950.601	100	344.844.319.826	100	356.043.519.960
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	100	152.400.827.953	100	116.618.112.313	100	146.115.383.813	100	150.430.117.755	100	158.598.927.451	100	160.602.829.321
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS terakreditasi	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan.	80,7	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan).	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan.	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	100		100		100		100		100		100	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan.		100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien TBC yang Dilaksanakan Investigasi Kontak	75	75		80		85		90		95		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien HIV yang Dilaksanakan Notifikasi Pasangan	75	75		80		85		90		95		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien Malaria yang Dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Diagnosis TBC Menggunakan TCM Dibanding Pemeriksaan Radiologis	66	70		72		74		75		80		85	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	79,0	82		82,5		83		83,5		84		84,5	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CFR (Case Fatality Rate) DBD	0,82	0,80		0,70		0,60		0,50		0,50		0,50	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penemuan Kasus Baru TBC (CDR)	81	85,0		85,5		86,0		86,5		87,0		87,5	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pengobatan Kasus TB	81	85,0		85,5		86,0		86,5		87,0		87,5	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Treatment Success Rate TB	81	85,0		85,5		86,0		86,5		87,0		87,5	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien Malaria yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	88,65	88		88,50		89		89,50		90		90,5	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar	0,82	0,80		0,70		0,60		0,50		0,50		0,50	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil dari keluarga miskin yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan.	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu dari keluarga miskin yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan).	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi dari keluarga miskin yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan.	45	45		55		60		65		70		75	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi dari keluarga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting dari keluarga miskin mendapatkan penanganan	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri	12,42	12,50		12,55		13,00		13,50		14,00		14,50	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Keluarga Miskin yang menjadi peserta UHC dengan status PBPU BP Pemda dan PBIJK		>70		>75		>80		>85		>90		>95	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100	100	5.642.530.350	100	7.053.355.127	100	7.262.541.156	100	7.529.231.762	100	7.906.424.269	100	8.147.797.629
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase petugas penanggung jawab PROGRAM esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis PROGRAM	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	100	100	195.056.000	100	237.495.011	100	244.538.558	100	253.518.354	100	266.218.883	100	274.346.216
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	100	100		100		100		100		100		100	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	96	96		96,50		97		97,50		98		98,50	
					DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif	100	100	1.850.825.193	100	1.741.626.895	100	1.793.279.479	100	1.859.131.194	100	1.952.268.233	100	2.011.868.569

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas ruang menyusui dan tempat bermain anak yang aman dan nyaman	59	84		100		100		100		100		100	
				DINAS KESEHATAN	RSUD Umar Mas''ud				6.055.840.000		7.053.224.278		7.087.278.253		7.170.904.691		7.394.045.243		7.433.043.296
	1			DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	02		DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
537	1	02	01	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah	80,52	82,54	6.055.840.000	92,08	7.038.224.278	80,43	7.067.278.253	80,47	7.155.904.691	80,51	7.384.045.243	81,25	7.423.043.296
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cost Recovery Rate (CRR)	98,20	78,86		78,66		77,91		77,32		76,75		77,11	
538	1	02	02	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupancy Rate (BOR)	24,59	27,61		30,42	15.000.000	34,72	20.000.000	37,91	15.000.000	40,56	10.000.000	43,15	10.000.000
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Average Lenght of Stay (ALOS)	3,1	3,5		3,9		4,6		4,9		5,2		5,8	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Turn Over Internal (TOI)	6,7	6,1		5,6		5,1		4,8		4,4		3,9	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Turn Over (BTO)	41,2	42,3		43,1		44,2		46,9		47,1		49,2	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Gross Death Rate (GDR)	31,52	31,11		30,78		30,35		29,67		29,12		28,75	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Net Death Rate (NDR)	11,64	10,51		10,01		9,8		9,6		9,2		8,9	
				DINAS KESEHATAN	RSUD IBNU SINA				232.500.000.000		258.499.637.479		237.852.642.450		244.335.149.477		247.186.546.232		252.822.759.550
	1			DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	02		DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
539	1	02	01	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah	104,58	79	232.500.000.000	80	221.989.931.010	81	225.019.011.585	82	229.613.749.441	83	232.118.672.110	84	234.122.719.822
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN P	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	88,65	>88		>88,5		>89		>89,5		>90		>90,5	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cost Recovery Rate (CRR)	106,09	88,07		88,92		89,67		90,42		91,17		91,92	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupancy Rate (BOR)	65,78	67,86		69,75	36.509.706.469	71,64	12.833.630.865	73,52	14.721.400.036	75,41	15.067.874.122	77,23	18.700.039.728

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Average Lenght of Stay (ALOS)	4,5	6-9		6-9		6-9		6-9		6-9		4-9	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Turn Over Internal (TOI)	2,5	1-3		1-3		1-3		1-3		1-3		1-3	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Turn Over (BTO)	56,74	40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Gross Death Rate (GDR)	99,09	≤ 45		≤ 45		≤ 45		≤ 45		≤ 45		≤ 45	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Net Death Rate (NDR)	65,57	≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25	
				DINAS KESEHATAN	RSUD Gresik Sehati				0		11.570.572.318		10.990.423.924	0	11.377.634.860	0	12.139.866.358		12.536.918.093
	1			DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	02		DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
542	1	02	01	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	-			70	5.106.162.712	70	5.618.632.835	70	6.168.524.078	70	6.905.718.293	70	7.476.907.342
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah	0			25		26		27		28		29	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cost Recovery Rate (CRR)	0			25		25,75		26,5		27,25		28	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupancy Rate (BOR)	-			60	6.464.409.606	60	5.371.791.089	60	5.209.110.782	60	5.234.148.065	60	5.060.010.751
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Average Lenght of Stay (ALOS)	0			6-9		6-9		6-9		6-9		4-9	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Turn Over Internal (TOI)	0			1-3		1-3		1-3		1-3		1-3	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Turn Over (BTO)	0			40-50		40-50		40-50		40-50		40-50	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Gross Death Rate (GDR)	0			≤ 45		≤ 45		≤ 45		≤ 45		≤ 45	
				DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Net Death Rate (NDR)	0			≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				278.018.713.734,54		318.115.399.496,74		326.122.185.059,92		312.576.626.737,82		319.169.686.987,22		359.090.991.366,88
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				236.460.063.735		276.343.751.603		283.111.687.713		267.986.724.148		272.345.960.592		310.835.848.815
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				236.460.063.735		276.343.751.603		283.111.687.713		267.986.724.148		272.345.960.592		310.835.848.815
1	1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	97,61	97,88	21.583.660.171	98,15	21.694.281.525	98,42	22.337.683.214	98,68	23.157.953.989	98,83	24.318.099.804	98,98	25.060.501.334
2	1	03	02	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	7,43	8,77	28.866.768.922	8,77	29.014.717.929	8,77	29.875.226.653	9,11	30.972.286.499	9,45	32.523.907.536	9,45	33.516.822.234
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	6,41	5,77		5,77		5,77		5,77		5,77		5,77	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong	-	2		2		2		2		2		2	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun	-	14,29		14,29		14,29		14,29		14,29		14,29	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air	-	14,29		14,29		14,29		14,29		14,29		14,29	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penyelenggaraan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	10,31	33,68	184.603.634.642	17,60	224.221.546.067	19,23	229.443.659.374	19,84	212.347.931.215	20,68	213.919.826.739	20,97	250.626.037.309
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penyelenggaraan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa	-	0,764		0,764		0,767		0,767		0,772		0,774	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penyelenggaraan Jalan	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan	-	0,764		0,764		0,767		0,767		0,772		0,774	
4	1	03	12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang	108,55	100,00	1.406.000.000	100,00	1.413.206.082	100,00	1.455.118.472	100,00	1.508.552.444	100,00	1.584.126.513	100,00	1.632.487.938
				DINAS PEKERJAAN UMUM	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang	100,00	100,00	1.406.000.000	100,00	1.413.206.082	100,00	1.455.118.472	100,00	1.508.552.444	100,00	1.584.126.513	100,00	1.632.487.938
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				41.558.650.000		41.771.647.894		43.010.497.347		44.589.902.590		46.823.726.395		48.255.142.552
	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				41.558.650.000		41.771.647.894		43.010.497.347		44.589.902.590		46.823.726.395		48.255.142.552
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	1,56	100											
5	2	10	05	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	1,56	100	41.508.650.000	60	41.721.391.632	60	42.958.750.602	60	44.536.255.633	60	46.767.391.882	60	48.195.142.552
6	2	10	17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Program Penanganan Konflik, Sengketa, Dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	8,33	100	50.000.000	100	50.256.262	100	51.746.745	100	53.646.957	100	56.334.513	100	60.000.000
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				87.563.476.124,00		87.409.184.472,99		90.001.536.599,93		93.306.518.120,86		97.980.901.987,58		100.973.286.311,00
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				87.563.476.124,00		87.409.184.472,99		90.001.536.599,93		93.306.518.120,86		97.980.901.987,58		100.973.286.311,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				41.535.647.387		41.748.527.386		42.986.691.139		44.565.222.186		46.797.809.576		48.227.637.343
557	1	03	03		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan	0,36	0,37	15.688.539.321	0,37	15.768.946.789	0,38	16.236.616.898	0,39	16.832.848.038	0,40	17.676.124.530	0,41	18.215.754.765
558	1	03	05		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi aman	56,93	91,72	9.815.426.610	91,73	9.865.732.989	91,74	10.158.327.572	91,74	10.531.355.480	91,75	11.058.945.611	91,76	11.396.561.552
559	1	03	06		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	56,96	64,11	3.508.242.750	71,27	3.526.223.322	78,44	3.630.802.865	85,62	3.764.130.993	92,81	3.952.702.955	100,00	4.073.374.091
560	1	03	08		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	75,00	100,00	12.266.921.106	100,00	12.329.791.973	100,00	12.695.464.787	100,00	13.161.659.900	100,00	13.821.020.596	100,00	14.242.959.272
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah yang menerapkan efisiensi energi	Inisiasi Data	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Kelompok Rentan	Inisiasi Data	>80		>85		>90		>95		>95		100,00		
561	1	03	09		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	100,00	100,00	53.828.600	100,00	54.104.484	100,00	55.709.097	100,00	57.754.812	100,00	60.648.160	100,00	63.648.160
562	1	03			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Rekomendasi Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikasi	-	16,67	202.689.000	33,33	203.727.829	50,00	209.769.920	66,67	217.472.963	83,33	228.367.723	100,00	235.339.508
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memenuhi ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi	82,72	>60		>64		>68		>72		>76		>80	
	1	04			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				46.027.828.737,00		45.660.657.086,54		47.014.845.461,00		48.741.295.935,00		51.183.092.412,00		52.745.648.963,00
563	1	04	01		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Sektor Perumahan dan Permukiman	>90	>90	16.803.367.337,00	100	16.286.413.421,00	100	16.769.430.380,00	100	17.385.227.172,00	100	18.256.176.244,00	100	18.813.514.741,00
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	-	>85		>85		>85		>85		>85		>85	
564	1	04	02		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni	-	>35	1.136.042.400	>40	1.141.864.886	>45	1.175.729.929	>50	1.218.904.367	>55	1.279.967.913	>60	1.319.043.751
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi	Inisiasi Data	100,00		100		100		100		100		100		
565	1	04	03		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	12,19	>12,24	14.114.744.750	>12,28	14.187.086.150	>12,32	14.607.841.968	>12,36	15.144.262.229	>12,40	15.902.945.507	>12,44	16.388.442.778
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	10,11	>10,14		>10,17		>10,20		>10,23		>10,26		>10,29	
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	2,04	3,60		3,89		4,20		4,55		4,93		5,37	
567	1	04	05		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	0,82	>25	13.973.674.250	>30	14.045.292.630	>35	14.461.843.184	>40	14.992.902.167	>45	15.744.002.748	>50	16.224.647.693
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Saluran Lingkungan dalam kondisi baik	Inisiasi Data	>35		>40		>45		>50		>55		>60	
					DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Makam dalam Kondisi Baik	Inisiasi Data	>40		>45		>50		>55		>60		>65	
					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					27.916.506.150		28.059.584.836		28.891.766.545		29.952.712.369		31.453.255.721		32.413.484.743

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
###	1	05	01	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	23.498.073.893	100	23.868.530.206	100	24.568.990.234	100	25.462.023.713	100	26.725.058.563	100	27.533.452.571
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Layanan Kepuasan pelayanan kepamongprajaan	Inisiasi Data	>80	4.418.432.257	>80	4.191.054.630	>80	4.322.776.311	>80	4.490.688.656	>80	4.728.197.158	>80	4.880.032.172
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran	Inisiasi Data	>90		>90		>90		>90		>90		>90	
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Layanan Kepuasan pelayanan Linmas	Inisiasi Data	>80		>80		>80		>80		>80		>80	
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Inisiasi Data	100		100		100		100		100		100	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				11.293.487.485,00		11.317.195.017,05		11.652.836.572,08		12.080.744.927,36		12.685.954.941,96		13.073.241.466,74
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
572	1	05	01	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah *(LHE INTERNAL)*	81,92 / A	>81	9.738.167.433	>81	9.753.903.583	>81	10.043.181.567	>81	10.411.981.153	>81	10.933.590.980	>81	11.267.379.999
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran	100	100	1.555.320.052	100	1.563.291.435	100	1.609.655.005	100	1.668.763.774	100	1.752.363.962	100	1.805.861.468
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.071.829.833		9.118.325.103		9.388.753.315		9.733.521.386		10.221.142.361		10.533.181.205
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.071.829.833		9.118.325.103		9.388.753.315		9.733.521.386		10.221.142.361		10.533.181.205
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				9.071.829.833		9.118.325.103		9.388.753.315		9.733.521.386		10.221.142.361		10.533.181.205
1	1	05	01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100,00	100,00	6.722.517.636	100,00	6.756.972.126	100,00	6.957.368.128	100,00	7.212.852.355	100,00	7.574.195.178	100,00	7.805.425.997
2	1	05	03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	2.349.312.197	100,00	2.361.352.977	100,00	2.431.385.187	100,00	2.520.669.031	100,00	2.646.947.183	100,00	2.727.755.208
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rasio Desa dengan Relawan Siaga Bencana Terlatih dan Aktif	28,09	28,09		29,49		30,90		32,30		33,71		35,11	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
					DINAS SOSIAL				25.708.979.895,83		25.433.365.033,85		26.187.659.200,97		27.149.306.445,23		28.509.407.353,65		29.379.764.323,08
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
577	1	06	01	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	6.193.588.707	100	5.693.332.311	100	6.281.761.896	100	6.512.436.924	100	6.838.690.981	100	7.047.467.764

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
578	1	06	02	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	2,30	5,68	3.035.513.100	9,33	2.948.507.943	13,93	3.035.953.797	16,23	3.147.438.241	20,28	3.305.115.698	26,37	3.406.016.795
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	1,22	2,43		9,33		17,44		24,34		32,45		40,57	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	4,94	17,28		28,40		34,57		40,74		46,91		53,09	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	N/A	100	316.000.000	100	532.000.000	100	128.199.222	100	132.906.876	100	139.565.122	100	143.825.873
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	N/A			50		60		70		80		90	
579	1	06	04	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	57	4.938.398.176	59	4.963.708.633	61	5.110.920.630	63	5.298.600.739	65	5.564.045.151	67	5.733.908.573
				DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	12		12		12		12		12		12	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	47		51		60		67		70		77	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	92		92		95		95		97		97	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	48		49		51		52		53		54	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Kesejahateraan Sosial Lanjut Usia	N/A	>70		>72		>74		>76		>78		>80	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	N/A	>72		>74		>76		>78		>80		>82	
580	1	06	05	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	10.597.785.400	100	10.664.904.551	100	10.981.200.696	100	11.384.445.648	100	11.954.773.104	100	12.319.737.551
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	35,87	36,00		37,00		38,00		39,00		40,00		41,00	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	N/A	100		100		100		100		100		100	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	86,36	87,00		87,50		88,00		88,50		90,00		90,50	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1,28	1,50		1,70		1,90		2,00		2,00		2,00	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	N/A	6,60		6,60		6,60		6,60		6,60		6,60	
581	1	06	06	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	49,53	59,75	430.510.985	61,61	432.717.455	72,14	445.550.844	80,19	461.912.090	83,90	485.052.536	87,00	499.860.590
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	24,28	29,77		31,57		37,59		40,29		42,10		43,60	
				DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	25,26	30,07		30,82		33,68		39,90		41,80		43,41	
582	1	06	07	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	197.183.528	100	198.194.140	100	204.072.115	100	211.565.927	100	222.164.761	100	228.947.177
					DINAS TENAGA KERJA				15.007.433.590		10.223.279.386		10.526.477.960		10.913.024.861		11.459.735.513		11.809.587.074
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.007.433.590		10223279386		10526477960		10913024861		11459735513		11809587074
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				15.007.433.590		10.223.279.386		10.526.477.960		10.913.024.861		11.459.735.513		11.809.587.074
583	2	07	01	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	7.293.594.021	100	7.412.168.263	100	7.631.995.851	100	7.912.253.347	100	8.308.634.116	100	8.562.286.446
584	2	07	02	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	3	3	33.943.420	4	77.823.028	4	80.131.077	4	83.073.601	5	87.235.346	5	89.898.533
585	2	07	03	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	9,23	20	3.022.049.160	21	1.761.884.026	22	1.814.137.389	23	1.880.755.035	24	1.974.975.366	26	2.035.268.923
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dari Keluarga Miskin yang Diberi Pelatihan	N/A	20		21		22		23		24		26	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Perempuan yang diberi pelatihan	N/A	20		21		22		23		24		26	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Penyandang Disabilitas yang diberi pelatihan	N/A	20		21		22		23		24		26	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio Program Pelatihan Kerja yang Sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	N/A	70		74		77		81		85		89	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio Pekerja yang Mengalami Peningkatan Keterampilan atau Pendidikan	N/A	55		58		61		64		67		70	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio Pekerja Berpendidikan Tinggi terhadap Total Pekerja	N/A	18		19		20		21		22		23	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rasio Program Pelatihan Keterampilan yang Berkolaborasi dengan Industri atau Sektor Tertentu	N/A	30		32		33		35		36		38	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Pekerjaan	N/A	60		63		66		69		73		77	
586	2	07	04	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	13,52	20	222.429.709	25	387.162.139	30	398.644.463	35	413.283.242	40	433.987.525	45	447.236.628
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja dari keluarga miskin yang ditempatkan	N/A	20		21		22		23		24		26	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Penyelesaian Kasus Pekerja Migran	N/A	90		95		99		100		100		100	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rasio Pekerja Migran yang Terdaftar dalam Sistem Pendaftaran Tenaga Kerja Migran	N/A	30		32		33		35		36		38	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Perempuan yang yang ditempatkan	N/A	30		32		33		35		36		38	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Penyandang Disabilitas yang yang ditempatkan	N/A	20		21		22		23		24		26	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di sektor manufaktur	N/A	35		37		39		41		43		45	
587	2	07	05	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	27,89	27,89	4.435.417.280	29	584.241.929	31	601.569.179	32	623.659.636	34	654.903.161	36	674.896.545
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pembinaan terhadap Perusahaan yang Melanggar Upah Minimum	N/A	65		68		72		75		79		83	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	N/A	40		42		44		46		49		51	
				DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Realisasi pengajuan klaim jaminan ketenagakerjaan untuk Pekerja dari Keluarga Miskin	N/A	100		100		100		100		100		100	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP				42.419.412.212		42.636.821.717		43.901.330.202		45.513.448.066		47.793.538.801		49.252.616.468
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.419.412.212		42.636.821.717		43.901.330.202		45.513.448.066		47.793.538.801		49.252.616.468
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				42.419.412.212		42.636.821.717		43.901.330.202		45.513.448.066		47.793.538.801		49.252.616.468
588	2	11	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	16.783.192.758	100	16.869.210.584	100	17.369.511.945	100	18.007.344.566	100	18.909.459.902	100	19.486.742.341
589	2	11	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air	61	60	1.213.251.350	62	1.219.469.550	64	1.255.636.166	66	1.301.744.872	68	1.366.958.485	70	1.408.690.038
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara	61	60		62		64		66		68		70	
590	2	11	4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH	>80	80	4.922.766.662	>80	4.947.997.004	>80	5.094.743.031	>80	5.281.829.076	>80	5.546.433.277	>80	5.715.759.029
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia	14,29	28,57		28,57		42,86		42,86		57,14		57,14	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Hijau	8,00	8,00		8,01		8,02		8,03		8,04		8,05	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang terkelola (oleh DLH) per Luas Wilayah	0.017	0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017	
591	2	11	5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH	>62	62	99.999.900	64	100.512.423	66	103.493.387	68	107.293.808	70	112.668.914	72	116.108.557
592	2	11	6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH	18	20	170.710.962	22	171.585.896	24	176.674.733	26	183.162.474	28	192.338.379	30	198.210.232
593	2	11	8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	>50	55	199.999.998	57	201.025.045	59	206.986.978	61	214.587.828	63	225.338.051	65	232.217.343

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
594	2	11	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi	100	100	49.999.600	100	50.255.860	100	51.746.331	100	53.646.528	100	56.334.063	100	58.053.872
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		100	
595	2	11	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	58,7	58,8	18.979.490.982	58,85	19.076.765.355	58,9	19.642.537.631	58,95	20.363.838.914	59	21.384.007.730	59,05	22.036.835.056
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengurangan Sampah	18,51	18,52		18,53		18,54		18,55		18,56		18,57	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan	80	80		80		80		80		80		80	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan	1 : 3	1 : 3		1 : 3		1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan	1 : 5	1 : 5		1 : 5		1 : 4		1 : 4		1 : 4		1 : 4	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penduduk Miskin yng terlayani Persampahan	>80	>85		>90		>95		100		100		100	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa	1 : 4	1 : 4		1 : 4		1 : 4		1 : 3		1 : 3		1 : 3	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				12.584.309.449		12.648.807.007		13.023.941.061		13.502.198.280		14.178.618.952		14.611.474.664
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
596	2	12	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	12.039.438.674	100	12.101.143.640	100	12.460.035.279	100	12.917.585.092	100	13.564.718.354	100	13.978.832.439
597	2	12	02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9,07	10	155.439.975	11	156.236.642	12	160.870.255	13	166.777.638	14	175.132.707	15	180.479.292
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75,49	75,00		76,00		77,00		78,00		79,00		80,00	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Keluarga Miskin yang memiliki KTP-el	100	88,33		88,7		90,39		92,65		94,93		97,42	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	100	100		100		100		100		100		100	
598	2	12	03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	57.960.800	100	58.257.863	100	59.985.655	100	62.188.411	100	65.303.869	100	67.297.516
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak pekerja Migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	N/A	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Keluarga Miskin yang memiliki Akta Kelahiran	N/A	88,67		88,7		88,72		88,75		88,77		88,78	
599	2	12	04	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100	100	74.319.600	100	258.468.357	100	266.133.924	100	275.906.731	100	289.728.852	100	298.573.916
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO	100	100		100		100		100		100		100	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	90,60	90,61		90,62		90,63		90,64		90,65		90,66	
600	2	12	05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	257.150.400	100	74.700.505	100	76.915.948	100	79.740.408	100	83.735.170	100	86.291.501
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemutakhiran data dan KK belum ber barcode	20	18		12		16		9		5		>95	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.378.807.016,83		18.275.306.764,81		18.817.309.652,62		19.508.307.417,35		20.485.616.605,48		21.111.017.160,62

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.378.807.016,83		18.275.306.764,81		18.817.309.652,62		19.508.307.417,35		20.485.616.605,48		21.111.017.160,62
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				17.378.807.016,83		18.275.306.764,81		18.817.309.652,62		19.508.307.417,35		20.485.616.605,48		21.111.017.160,62
601	2	13	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	6.016.653.430,16	100	6.111.834.581,22	100	6.293.097.311,06	100	6.524.188.591,14	100	6.851.031.372,46	100	7.060.184.892,52
602	2	13	02	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	100	184.869.800,00	100	204.060.462,11	100	210.112.418,52	100	217.828.038,56	100	228.740.586,68	100	235.723.754,08
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	36,12	>38		72,73		74,75		76,77		78,79		80,81	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa	-	>55		66		66		68		68		69	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	11,69	<11,65		<11,60		<11,55		<11,50		<11,45		<11,40	
603	2	13	03	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		100	32.932.000,00	100	82.444.274,77	100	84.889.379,28	100	88.006.635,27	100	92.415.510,50	100	95.236.841,81
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	6	7		7		7		9		9		9	
604	2	13	04	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun	18,48	>40	8.881.822.686,67	45	9.755.618.664,85	>50	10.044.947.514,79	>55	10.413.811.949,07	>60	10.935.513.493,11	>65	11.269.361.203,97
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	1		100		100		100		100		100	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	Inisasi Data	>72		>74		>76		>78		>80		>82	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Nilai Tata Kelola Pemerintahan Desa	Inisasi Data	>70		>72		>74		>76		>78		>78	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik	90,91	>95		>95		>95		>95		>95		>95	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rasio Pencatatan Aset Desa	100	100		1		100		100		100		100	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (Bumades) dengan status Maju	46,97	>50		>52		>54		>56		>58		>60	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa	8,77	>8,5		>8,7		>8,9		>9,1		>9,3		>89,5	
605	2	13	05	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	0,5	>80	2.262.529.100	81,65	2.121.348.782	82,66	2.184.263.029	83,66	2.264.472.203	84,67	2.377.915.643	85,68	2.450.510.468
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rasio anggaran program pengentasan kemiskinan Desa terhadap APBDesa	15,44	>15		>15		>15		>15		>15		>15	
					DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.588.772.985		22.765.619.300		23.440.794.364		24.301.572.913		25.519.010.694		26.298.074.550
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
606	2	08	02	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender	N/A	30	252.298.075	50	253.591.162	55	261.112.083	60	270.700.482	65	284.261.785	70	292.939.946
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86			6,86		6,86		6,86		6,86		6,86	
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan	89,94	96	436.611.860	>95	438.849.599	>95	451.864.852	>95	468.457.958	>95	491.926.332	>95	506.944.235
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	18 Kecamatan		195.320.000	18	196.321.061	18	202.143.485	18	209.566.475	18	220.065.143	18	226.783.459
608	2	08	04	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase KRT Perempuan Miskinyang Menyatakan Peningkatan Pendapatan setelah Intervensi Program	9,58	10											
610	2	08	06	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	152,65 poin	60	36.630.925	70	36.818.667	80	37.910.623	80	39.302.754	90	41.271.707	90	42.531.681
611	2	08	07	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan	83,77	100	454.071.000	85	456.398.221	>85	469.933.926	>85	487.190.553	>85	511.597.375	>85	527.215.811
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial	N/A			>80		>80		>80		>80		>80	
	2	14		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
612	2	14	01	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	88,89%	100	7.229.921.125		7.328.049.698	100	7.545.382.526	100	7.822.459.460	100	8.214.341.817	100	8.465.115.520
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rata-Rata Usia Kawin Pertama dibawah 20 tahun	9,27	12,15	567.600.000	9,7	570.509.084	9,6	587.429.050	9,5	609.000.261	9,4	639.509.395	9,3	659.032.826
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang telah Tersosialisasi Program Bangga Kencana	9,27	12,15	567.600.000	9,7	570.509.084	9,6	587.429.050	9,5	609.000.261	9,4	639.509.395	9,3	659.032.826
614	2	14	03	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	78	78	4.351.931.000	78	4.374.235.674	78	4.503.965.281	78	4.669.357.146	78	4.903.278.293	78	5.052.969.319
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI	N/A	>60		>60		>60		>60		>60		>60	
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak	N/A	>25	9.064.389.000	>30	9.110.846.134	>35	9.381.052.537	>40	9.725.537.825	>45	10.212.758.847	>50	10.524.541.752
				DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga desil yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan atau perlindungan anak	-	-		48		48		48		48		48	
				DINAS PERHUBUNGAN					67.699.534.969		68.046.511.071		70.064.611.559		72.637.481.479		76.276.407.016		78.605.031.447
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					67.699.534.969		68.046.511.071		70.064.611.559		72.637.481.479		76.276.407.016		78.605.031.447

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				67.699.534.969		68.046.511.071		70.064.611.559		72.637.481.479		76.276.407.016		78.605.031.447
616	2	15	01	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100,00	100,00	16.960.112.550	100,00	17.047.037.132	100,00	17.552.612.413	100,00	18.197.168.737	100,00	19.108.793.709	100,00	19.692.161.563
617	2	15	02	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Konektivitas Darat	63,16	63,16	49.600.723.759	73,68	49.854.939.180	78,95	51.333.520.161	89,47	53.218.558.370	94,74	55.884.652.612	100,00	57.590.741.984
617	2	15	02	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Kendaraan Angkutan Lulus Uji	96,17	96,27		96,37		96,47		96,57		96,67		96,77	
617	2	15	02	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	70,95	72,07		17,32		74,30		75,42		76,54		77,65	
617	2	15	02	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	4,02	4,19		5,00		5,81		6,62		7,43		8,24	
				DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Tempat Khusus Parkir	62,5	70		75		80		90		95		100	
				DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik	62,86	62,86		65,71		68,57		71,43		74,29		77,14	
				DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	72,16	>72,5		>73,5		>74,5		>75,5		>76,5		>77,5	
				DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	66,98	>65		>67		>69		>71		>73		>75	
				DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penerangan Jalan Umum yang menggunakan Lampu Ramah energi	69,99	75,00		80,01		85,01		90,02		95,02		100,00	
				DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Realisasi Angkutan Umum yang Menggunakan Bahan Bakar Non Fosil di Kawasan Perkotaan	100	100		100		100		100		100		100	
618	2	15	03	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Konektivitas Laut	60,00	60,00	799.662.460	80,00	803.760.919	80,00	827.598.589	100,00	857.989.160	100,00	900.971.909	100,00	928.477.468
619	2	15	05	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	60,00	66,67	339.036.200	73,33	340.773.841	80,00	350.880.396	86,67	363.765.212	93,33	381.988.786	100,00	393.650.432
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				18.023.591.484		18.115.966.646		18.653.243.878		19.338.216.920		20.307.005.072		20.926.952.836
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.023.591.484		18.115.966.646		18.653.243.878		19.338.216.920		20.307.005.072		20.926.952.836
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.896.632.862		17.988.357.331		18.521.849.969		19.201.998.044		20.163.962.028		20.779.542.865
620	2	16	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	7.007.017.319	100	7.042.929.937	100	7.251.806.779	100	7.518.103.203	100,00	7.894.738.202	100,00	8.135.754.801
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan daftar informasi dan dokumentasi publik	-	45,00	5.033.140.045	50,00	5.058.936.076	51,00	5.208.972.297	60,00	5.400.253.000	0,65	5.670.789.893	0,69	5.843.912.099
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	97,10	>95		>95		>95		>95		>95		>95	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kapasitas Bandwith Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2GB	2GB	5.856.475.498	2GB	5.886.491.318	2GB	6.061.070.893	2GB	6.283.641.841	2GB	6.598.433.933	2GB	6.799.875.965
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	84,7	85,4		85,1		86,9		87,6		88,3		89,10	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan kebutuhan server	-	1,58		6,58		11,58		16,70		21,58		26,58	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				67.844.272		68.191.990		70.214.405		72.792.776		76.439.481		78.773.084
623	2	20	02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,7	2,7	67.844.272	2,75	68.191.990	2,75	70.214.405	2,8	72.792.776	2,8	76.439.481	2,85	78.773.084
	2	21		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100	100	59.114.350	100	59.417.325	100	61.179.504	100	63.426.100	100	66.603.563	100	68.636.887
624	2	21	02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	-	200	59.114.350	225	59.417.325	250	61.179.504	275	63.426.100	300	66603563	325	68.636.887
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				68.459.776.876		40.421.833.058		21.329.071.028		21.987.390.484		22.407.800.682		22.879.187.201

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.532.629.698		17.391.387.171		18.463.031.785		19.018.787.033		19.485.680.043		20.054.717.704
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.532.629.698		17.391.387.171		18.463.031.785		19.018.787.033		19.485.680.043		20.054.717.704
625	2	17	01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program		100	11.439.329.341	100	11.661.387.171	100	12.092.031.785	100	12.094.787.033	100	12.097.680.043	100	12.100.717.704
626	2	17	03	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif		67,87	1.009.687.463	68,26	1.050.000.000	68,65	1.100.000.000	69,04	1.150.000.000	69,43	1.200.000.000	69,82	1.250.000.000
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		14,72		18,4		22		25,7		29,44		33,12	
627	2	17	04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi Sehat		10,07	43.581.839	14,38	90.000.000	18,7	140.000.000	21,58	190.000.000	25,89	240.000.000	30,21	290.000.000
	2	17	06	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		3,68		7,36	100.000.000	11,04	100.000.000	14,72	100.000.000	18,4	100.000.000	22,08	100.000.000
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		N/A		33		34,23		35,46		36,68		39,14	
628	2	17	07	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro		2,71	3.350.388.352	3,39	3.590.000.000	4,07	3.911.000.000	4,74	4.134.000.000	4,74	4.368.000.000	4,74	4.704.000.000
629	2	17	08	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Jumlah Usaha Mikro Terhadap Total Usaha yang Terdaftar OSS		2,71	689.642.703	3,39	900.000.000	4,07	1.120.000.000	4,74	1.350.000.000	4,74	1.480.000.000	4,74	1.610.000.000
	3			DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				51.927.147.178		23.030.445.887		2.866.039.243		2.968.603.451		2.922.120.639		2.824.469.497
	3	30		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				30.730.570.842		1.708.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.550.000.000		2.450.000.000
630	3	30	03	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	N/A	100	30.630.238.495	100	808.000.000	100	1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	N/A	100		100		100		100		100		100	
631	3	30	04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks harga konsumen	N/A	105	42.052.220	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000	105	150.000.000
632	3	30	05	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor	N/A	3-5	18.718.480	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000	3-5	100.000.000
633	3	30	06	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP berterra sah	N/A	>50	39.561.647	>62	650.000.000	>63	650.000.000	>64	750.000.000	>65	700.000.000	>66	600.000.000
	3	31		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				21.196.576.336		21.322.445.887		366.039.243		368.603.451		372.120.639		374.469.497
634	3	31	02	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	N/A	21.167.346.835	50	21.261.702.444	50	303.494.291	50	303.761.762	50	304.030.571	50	304.300.724
635	3	31	03	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	N/A	0,04	13.109.927	0,04	31.424.092	0,04	32.356.057	0,04	33.544.216	0,04	35.224.683	0,04	36.300.049
636	3	31	04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	N/A	100	16.119.574	100	29.319.351	100	30.188.895	100	31.297.473	100	32.865.385	100	33.868.724
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				14.793.777.811,07		15.298.777.182,00		15.752.503.158,00		16.330.956.969,00		17.149.090.185,00		17.672.630.714,00
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.793.777.811		15.298.777.182		15.752.503.158		16.330.956.969		17.149.090.185		17.672.630.714

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				14.793.777.811		15.298.777.182		15.752.503.158		16.330.956.969		17.149.090.185		17.672.630.714
637	2	18	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	13.577.541.505	100	13.760.347.596	100	14.168.447.344	100	14.688.732.424	100	15.424.594.989	100	15.895.488.811
638	2	18	02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	55,76	39,04	189.177.757	>5-10	220.822.471	>5-10	227.371.550	>5-10	235.720.949	>5-10	247.529.880	>5-10	255.086.661
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	Inisasi Data	80		80		80		80		80		80		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah	Inisasi Data	>65		>65		>65		>65		>65		>65		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Inisasi Data	1,5-2,5		1,5-2,5		1,5-2,5		1,5-2,5		1,5-2,5		1,5-2,5	
639	2	18	03	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	15	3,78	224.768.407	>5	389.792.372	>5	401.352.703	>5	416.090.932	>5	436.935.872	>5	450.274.984
640	2	18	04	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian ijin	93,89	75	660.979.892		776.129.676		799.147.869		828.493.689		869.998.802		896.558.790
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan				75		75		75		75		75	
641	2	18	05	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan LPKM	69,42	30	129.702.800	30	137.698.800	60	141.782.625	60	146.989.080	60	154.352.803	60	159.065.004
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha				80		80		80		80		80	
642	2	18	06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat kematangan layanan penanaman modal	5	5	11.607.450	5	13.986.267	5	14.401.067	5	14.929.895	5	15.677.839	5	16.156.464
642	2	18	06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal				2		2		2		2		2	
					DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				28.600.155.128		29.501.070.625		30.376.003.434		31.491.452.500		33.069.082.235		34.078.640.443
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.295.646.966		27.964.869.881		28.794.242.566		29.851.607.174		31.347.085.451		32.304.073.225
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				25.444.679.612		25.951.658.101		26.721.323.629		27.702.567.773		29.090.385.457		29.978.478.969
652	2	19	01	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capian Kinerja Program	100	100	12.428.003.922	100	12.635.179.116	100	13.009.908.999	100	13.487.650.940	100	14.163.342.834	100	14.595.732.185
653	2	19	02	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	33	>35	413.554.500	47.50	333.540.758	52,12	343.432.798	53,33	356.044.127	53,33	373.880.898	53,33	385.295.019
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	N/A	0,5		0.5		0.55		0.60		0.65		0.70		
654	2	19	03	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor berprestasi	84,21	>85	11.103.121.190	84.30	11.475.250.372	84,5	11.815.579.480	84,7	12.249.463.981	84,75	12.863.126.327	85	13.255.821.675
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	N/A	7,5		10		12.5		15		17.5		20		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terpelihara	100	100		100		100		100		100		100		
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pembinaan	N/A	10		10.66		11.33		12		12,66		13.33	
655	2	19	04	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	76	>95	1.500.000.000	96	1.507.687.854	96	1.552.402.352	96	1.609.408.724	96	1.690.035.398	96	1.741.630.090
	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.850.967.354		2.013.211.780		2.072.918.937		2.149.039.401		2.256.699.994		2.325.594.250
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	≥ 150.000	1.058.386.000	≥ 150.500	1.047.177.785	≥ 153.000	1.071.200.397	≥ 156.000	1.104.575.717	≥ 158.000	1.155.923.381	≥ 160.000	1.185.181.033
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A			20	75.000.000	20	84.000.000	30	90.000.000	30	99.000.000	40	103.000.000
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A			≥ 350.000	25.000.000	≥ 375.000	26.000.000	≥ 400.000	30.000.000	≥ 425.000	31.000.000	≥ 455.000	37.000.000
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan		5	127.601.700	6,25	139.148.533	6.25	143.275.353	8.30	148.536.623	8.3	155.977.874	0,1	160.739.685
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		>8		10		10		12.5		12.5		14	
658	2	22	06	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	NA	>5-10	664.979.654	1-2	726.885.463	1-2	748.443.187	1-2	775.927.061	1-2	814.798.739	1-2	839.673.538
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.304.508.162		1.536.200.744		1.581.760.868		1.639.845.326		1.721.996.784		1.774.567.218
	3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.304.508.162		1.536.200.744		1.581.760.868		1.639.845.326		1.721.996.784		1.774.567.218
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	5	>3-6	564.898.665	2	625.886.871	2	644.449.213	2	668.114.284	2.2	701.584.857	2.5	723.003.375
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Destinasi Wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan)		>50		>55		>60		>65		>70		>75	
660	3	26	03	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Nilai survey perspektif masyarakat terhadap pariwisata Gresik		>70	196.313.097	>72	257.252.346	>74	264.881.849	>76	274.608.679	>78	288.365.771	>80	297.169.222
661	3	26	05	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2	>5-10	543.296.400	6.76	633.061.527	7.59	642.429.806	7.84	667.122.363	9.09	702.046.156	9.33	724.394.620
				DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	N/A	1		1	20.000.000	1.4	30.000.000	1.8	30.000.000	2.2	30.000.000	2.5	30.000.000	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				7.774.564.384,43		7.814.410.863,65		8.046.168.026,97		8.341.634.500,34		8.759.526.010,19		9.026.943.512,67

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
643	2	23	01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	7.016.639.377	100	7.052.601.312	100	7.261.764.984	100	7.528.427.088	100	7.905.579.283	100	8.146.926.847
644	2	23	02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Surye Kepuasaan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	88,25 SANGAT BAIK	88,31 - 100 SANGAT BAIK	528.188.587	88,31 - 100 SANGAT BAIK	530.895.678	88,31 - 100 SANGAT BAIK	546.640.803	88,31 - 100 SANGAT BAIK	566.714.213	88,31 - 100 SANGAT BAIK	595.104.939	88,31 - 100 SANGAT BAIK	613.272.757
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	46,44%	55,30%		64,16%		73,02%		81,88%		90,74%		100,00%	
645	2	23	03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	70	75	60.000.000	80	60.307.514	85	62.096.094	90	64.376.349	95	67.601.416	100	69.665.204
	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
646	2	24	02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	24,14	34,48	169.736.420	44,83	170.606.359	55,17	175.666.145	68,97	182.116.850	86,21	191.240.372	100	197.078.704
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	7,14	11,58		26,35		44,58		62,81		81,28		100	
					DINAS PERIKANAN				9.323.371.303,48		9.796.014.035,42		10.086.540.917,66		10.456.932.719,52		10.980.794.488,12		11.316.024.570,05
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.323.371.303,48		9.796.014.035,42		10.086.540.917,66		10.456.932.719,52		10.980.794.488,12		11.316.024.570,05
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.323.371.303,48		9.796.014.035,42		10.086.540.917,66		10.456.932.719,52		10.980.794.488,12		11.316.024.570,05
647	3	25	01	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	6.477.413.860,48	100	6.613.038.355,72	100	6.809.165.618,15	100	7.059.207.643,76	100	7.372.462.095,00	100	7.639.158.565,00
648	3	25	03	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	13547	13856	537.494.441,00	14165	648.644.095,41	14474	667.881.363,36	14783	692.406.895,31	15092	727.077.228,37	15401	749.291.752,29
				DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelatihan/ Pembinaan Terhadap Kelompok Nelayan	42,8	43		43		43,5		43,9		44,2		44,5	
649	3	25	04	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	155972,01	159768	1.034.676.544,00	163564	1.156.117.555,36	167361	1.190.405.300,11	171157	1.234.118.637,29	174954	1.295.456.253,94	178750	1.335.507.954,00
				DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pelatihan/Pembinaan Terhadap Kelompok Budidata		20		>22		>24		>26		>28		>30	
650	3	25	05	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio Kepatuhan Pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan	N/A	>40	121.380.180	>44	172.860.419	>48	177.987.055	>52	184.522.987	52,3	193.698.788	53,2	199.682.517
651	3	25	06	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Angka konsumsi ikan	1,69	>2-4	1.152.406.278	>2-4	1.205.353.610	>2-4	1.241.101.581	>2-4	1.286.676.556	>2-4	1.392.100.123	>2-4	1.392.383.782
					DINAS PERTANIAN				40.192.399.465,83		40.398.395.003,63		41.596.516.985,42		43.123.998.904,45		45.284.385.218,00		46.657.855.770,30
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				527.380.908,00		530.083.859,00		545.804.908,00		565.847.623,00		594.194.935,00		612.334.972,00
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				527.380.908,00		530.083.859,00		545.804.908,00		565.847.623,00		594.194.935,00		612.334.972,00
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Produksi Pangan Lokal (Ton)	-	>190000	42.134.000	>190000	42.349.947	>190000	43.605.947	>190000	45.207.218	>190000	47.471.968	>190000	48.921.228
				DINAS PERTANIAN		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	-	35		0,5		65		80		90		100	
662	2	09	02	DINAS PERTANIAN		Stabilitas Harga Pangan Utama	9,39	4,68											
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pertumbuhan Skor Pola Pangan Harapan	1,08	0,6	307.798.982	0,6	309.376.524	0,6	318.551.909	0,6	330.249.578	0,6	346.794.117	0,6	357.381.312
				DINAS PERTANIAN		Persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA	-	>40		>45		>50		>55		>60		>65	
				DINAS PERTANIAN		Skor Pola Pangan Harapan	93,6	94,17											
664	2	09	04	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	15,79	>16	117.696.710	>18	118.299.933	>20	121.808.433	>22	126.281.408	>24	132.607.737	>26	136.656.088
665	2	09	05	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	100	>77	59.751.216	>78	60.057.455	>80	61.838.619	>85	64.109.419	>87	67.321.113	>93	69.376.344
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				39.665.018.557,83		39.868.311.144,63		41.050.712.077,42		42.558.151.281,45		44.690.190.283,00		46.045.520.798,30
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				39.665.018.557,83		39.868.311.144,63		41.050.712.077,42		42.558.151.281,45		44.690.190.283,00		46.045.520.798,30

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
666	3	27	01	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	18.789.816.815	100	18.886.119.063	100	19.446.237.216	100	20.160.330.075	100	21.170.303.693	100	21.816.606.898
667	3	27	02	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi	81,3	>90	14.214.513.090	>90	14.287.365.826	>90	14.711.095.706	>90	15.251.307.587	>90	16.015.353.525	>90	16.504.282.473
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik	92,61	>90		>90		>90		>90		>90		>90	
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan KP2B yang Mendapatkan Insentif Prasarana Pertanian	49,53	50,25	4.843.507.976	50,97	4.868.332.098	51,69	5.012.715.450	52,41	5.196.789.329	53,14	5.457.133.286	53,86	5.623.732.821
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasislitasi Instruktur Pertanian	32,66	>32,8		>33,3		>33,8		>34,3		>34,8		>35,3	
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	N/A	>90	134.654.341	>90	135.344.477	>90	139.358.477	>90	144.475.914	>90	151.713.735	>90	156.345.368
670	3	27	05	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	N/A	92	593.024.812	92	596.064.204	0,93	613.742.075	0,93	636.279.537	0,94	668.155.283	0,94	688.553.238
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	N/A	90		95		0,95		0,95		0,95		0,95	
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan	100	100	48.478.300	100	48.726.763	100	50.171.885	100	52.014.266	100	54.620.029	100	56.000.000
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas	-	1,49	1.041.023.224	2,98	1.046.358.714	4,47	1.077.391.268	5,95	1.116.954.573	7,44	1.172.910.732	8,93	1.200.000.000
					INSPEKTORAT				31.752.718.355,25		31.915.458.534,33		32.861.996.445,51		34.068.734.630,10		35.775.478.668,39		36.867.659.814,33
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31.752.718.355,25		31.915.458.534,33		32.861.996.445,51		34.068.734.630,10		35.775.478.668,39		36.867.659.814,33
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH				31.752.718.355,25		31.915.458.534,33		32.861.996.445,51		34.068.734.630,10		35.775.478.668,39		36.867.659.814,33
706	6	01	01	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	95,07	95,15	18.579.538.755,25	95,35	18.674.763.278,41	95,65	19.228.613.112,84	95,95	19.934.714.512,33	96,25	20.933.385.449,72	96,55	21.572.455.834,24
707	6	01	02	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A	86,96	87,25	4.417.292.200,00	87,50	4.439.931.866	87,75	4.571.609.868	88,00	4.739.485.737	88,25	4.976.920.121	88,50	5.128.859.341
				INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit Internal	100	100		100		100		100		100		100	
				INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit Eksternal	88,41	88,45		88,50		88,55		88,60		88,65		88,70	
				INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	100	100		100		100		100		100		100	
708	6	01	03	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100,00	100,00	8.755.887.400,00	100,00	8.800.763.390	100,00	9.061.773.464	100,00	9.394.534.381	100,00	9.865.173.098	100,00	10.166.344.639
				INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3		3		3		3		3		3	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				20.264.763.301,31		37.522.235.307,97		38.579.997.213,25		39.682.365.675,64		41.086.510.657,96		42.392.231.282,62
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20.264.763.301,31		37.522.235.307,97		38.579.997.213,25		39.682.365.675,64		41.086.510.657,96		42.392.231.282,62
	5	01			PERENCANAAN				17.947.992.887,31		18.010.252.255,00		18.575.004.252,00		19.257.104.226,00		20.221.928.969,96		20.839.176.310,01
695	5	01	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	9.495.033.237,31										
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program				100	9.543.697.525,00	100	9.826.741.289,00	100	10.187.592.887,00	100	10.697.961.517,00	100	11.024.557.060,00
696	5	01	02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100	100	3.823.254.000,00	100	3.842.849.080,00	100	3.956.819.002,00	100	4.102.118.896,00	100	4.307.623.064,40	100	4.439.129.472,00
697	5	01	03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	4.629.705.650,00	100	4.629.705.650,00	100	4.791.443.961,00	100	4.967.392.443,00	100	5.216.244.287,40	100	5.375.489.778,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang mandatory pendidikan (%)	-	>20		>20		>20		>20		>20		>20			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang mandatory pendidikan dan pelatihan ASN untuk pengembangan Kompetensi penyelengaraan pemerintahan (0.16 % dari APBD)	-	0,34		0,34		0,34		0,34		0,34		0,34			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Rasio Pendapatan Per Kapita terhadap Garis Kemiskinan	17,84	>17-20		>17-20		>17-20		>17-20		>17-20		>17-20			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Cakupan data Kemiskinan yang digunakan dalam Program Penanggulangan kemiskinan Sektoral Daerah	-	>60-70		>60-70		>60-70		>60-70		>60-70		>60-70			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Tingkat Pertumbuhan Belanja Modal (%)	-	>3-5		>3-5		>3-5		>3-5		>3-5		>3-5			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Tingkat Kepatuhan Pelaporan CSR (%)	-	>25		>30		>35		>40		>45		>50			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Pertumbuhan Kontribusi CSR (%)	-	>5-8		>5-8		>5-8		>5-8		>5-8		>5-8			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang Penerapan Ekonomi Hijau (%)	-	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kawasan Industri	89,40	89,45		89,50		89,55		89,60		89,65		89,70			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (%)	-	>90		>90		>90		>90		>90		>90			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran untuk Mandatory Infrastruktur (%)	-	>40		>40		>40		>40		>40		>40			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran bidang pendukung Kawasan Strategis	-	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKI	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100	100													
	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.316.770.414,00		19.505.983.052,97		20.004.992.961,25		20.425.261.449,64		20.864.681.789,16		21.553.054.972,62	
698	5	05	02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Inovasi Daerah		0,00	2.316.770.414,00											
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGI	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100	100													
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGI	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100	100													
				BADAN PERENCANAAN P	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGI	Realisasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	100	100		100		100		100		100		100			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Skor Pilar Kapabilitas Inovasi	3,29	>3,3		>3,35	19.505.983.052,97	>3,4	20.004.992.961,25	>3,45	20.425.261.449,64	>3,5	20.864.681.789,16	>3,55	21.553.054.973	
				BADAN PERENCANAAN P	PROGAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Rida yang difasilitasi	-			100%		100%		100%		100%		100%			
				BADAN PERENCANAAN P	PROGAM RISET DAN INOVASI DAER	Pertumbuhan Jumlah Inovasi Daerah	-			>3-5%		>3-5%		>3-5%		>3-5%		>3-5%			
					BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				900.544.999.521,63		897.819.015.566,00		902.137.564.725,00		907.093.475.704,00		913.274.153.421,00		917.910.235.002,29	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				900.544.999.521,63		897.819.015.566,00		902.137.564.725,00		907.093.475.704,00		913.274.153.421,00		917.910.235.002,29	
	5	02			KEUANGAN				900.544.999.521,63		897.819.015.566,00		902.137.564.725,00		907.093.475.704,00		913.274.153.421,00		917.910.235.002,29	
699	5	02	01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	71.028.289.707,80	100	66.172.358.774,00	100	68.134.876.285,00	100	70.636.883.644,00	100	74.175.585.076,00	100	76.400.852.628,29	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	5	02	02	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal	N/A	>70	819.275.261.136,04	72,31	819.641.946.625,00	72,31	821.641.946.625,00	72,31	823.641.946.625,00	72,31	825.641.946.625,00	72,31	827.641.946.625,00
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur	N/A	>80		80		85		90		90		90	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT	TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	N/A	30,48		30		30		30		30		30	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	35,03		38		40		40		40		40	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	100		100		100		100		100		100	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100		100		100		100		100		100	
701	5	02	03	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100	100	1.820.499.272,00	100	2.399.157.033,00	100	2.470.310.424,00	100	2.561.023.656,00	100	2.689.323.457,00	100	2.771.425.178,00
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04	
702	5	02	04	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas pendapatan Daerah	95,25	90	8.420.949.405,79	90	9.605.553.134,00	90	9.890.431.391,00	90	10.253.621.779,00	90	10.767.298.263,00	90	11.096.010.571,00
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	100		100		100		100		100		100	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	N/A	5		5		5		5		5		5	
				BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	N/A	32,52		32,52		32,52		32,52		32,52		32,52	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				19.176.123.388,28		19.325.822.365,32		19.898.981.090,70		20.629.699.334,08		21.663.186.979,94		22.324.537.303,15
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5	03			KEPEGAWAIAN														
703	5	03	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	10.205.367.575	100	10.254.296.523	100	10.558.414.992	100	10.946.134.666	100	11.494.504.022	100	11.845.417.023
704	5	03	02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik"	99,9	99,9	2.719.528.504	100	2.788.259.518	100	2.870.952.779	100	2.976.378.155	100	3.125.486.002	100	3.220.903.227
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kedisiplinan ASN	96,51	96,51		100		100		100		100		100	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	100	100		100		100		100		100		100	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sesuai dengan Formasi	93,5	93,5		94		94,5		95		95,5		96	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100	100		100		100		100		100		100	
	5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
705	5	04	02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	90	91	6.251.227.309	91,5	6.283.266.325	92	6.469.613.320	92,5	6.707.186.513	93	7.043.196.955	93,5	7.258.217.053	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Managerial, dan Fungsional	54	56		58		60		62		64		66		
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH				862.439.262,00	-	112.410.346.153,19	-	115.744.174.307,96	-	119.994.461.262,55	-	126.005.833.084,82	-	113.621.056.000,07	
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				862.439.262,00		112.410.346.153,19		115.744.174.307,96		119.994.461.262,55		126.005.833.084,82		113.621.056.000,07	
					SEKRETARIAT DAERAH				862.439.262,00		112.410.346.153,19		115.744.174.307,96		119.994.461.262,55		126.005.833.084,82		113.621.056.000,07	
8				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah	N/A	88,23	215.609.815,50	88,25	28.102.586.538,30	88,28	28.936.043.576,99	88,31	29.998.615.315,64	88,34	31.501.458.271,21	88,37	16.231.579.428,58	
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal "A"	N/A	87		89		91		93		96		98		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit pelayanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat kategori baik	98	98		98		98		98		98		98		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Unit Pelayanan Publik dengan nilai Kepatuhan standar pelayanan Publik minimal kualitas tinggi	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit pelayanan publik kategori zona hijau kepatuhan pelayanan publik	N/A	20		25		30		35		40		45		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	N/A	95,25		95,47		95,5		95,55		95,6		95,65		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	N/A	5,55		5,55		5,55		5,55		5,55		5,55		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100	100	323.414.723,25	100	42.153.879.807,45	100	43.404.065.365,49	100	44.997.922.973,46	100	47.252.187.406,81	100	48.694.738.285,74	
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerjasama Daerah	-	>80		>80		>80		>80		>80		>80		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	80	>80		>80		>80		>80		>80		>80		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rasio santri yang mendapat pembinaan		80		80		80		80		80		80		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	96,24	96,30		96,35		96,40		96,45		96,50		96,55		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan layanan bantuan hukum Probono untuk Keluarga Miskin														
5				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai evaluasi kinerja TPID			323.414.723,25		42.153.879.807,45		43.404.065.365,49		44.997.922.973,46		47.252.187.406,81		48.694.738.285,74	
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cost to Revenue Ratio (%) - BPR Bank Gresik - PT Gresik Migas - Perumda Giri Tirta	68,4	68,75												
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio Utilitas Aset (%) - BPR Bank Gresik - PT Gresik Migas - Perumda Giri Tirta	71 92 112	70 91 121		69 90 120		68 89 119		67 88 118		66 87 117		65 86 116		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pertumbuhan pelanggan PDAM	8 1 - 22	8,1 1,1 - 21		8,2 1,2 - 20		8,3 1,3 - 19		8,3 1,2 - 19		8,4 1,4 - 18		8,5 1,5 - 17		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah proyek pembangunan fasilitas energi terbarukan	14 172 167	15 173 168		16 177 169		17 175 170		18 176 171		19 177 172		20 178 173		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	5 8 - 77	6 9 - 76		7 10 - 75		8 11 - 74		9 12 - 73		10 13 - 72		11 14 - 71		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	10,60	10,65		10,70		10,75		10,80		10,85		10,90		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	84,36	>84		>85		>86		>87		>88		>89		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan UKPBJ	84,36	>84		>85		>86		>87		>88		>89		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	84,36	>84		>85		>86		>87		>88		>89		
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	84,36	>84		>85		>86		>87		>88		>89		
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				106.574.493.139,93		107.120.712.581,85		110.297.662.567,44		114.347.946.040,37		120.076.443.952,45		123.742.229.374,14	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				106.574.493.139,93		107.120.712.581,85		110.297.662.567,44		114.347.946.040,37		120.076.443.952,45		123.742.229.374,14	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD				106.574.493.139,93		107.120.712.581,85		110.297.662.567,44		114.347.946.040,37		120.076.443.952,45		123.742.229.374,14	
693	4	02	01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	51.540.923.306,93	100	51.805.082.708,82	100	53.341.500.389,38	100	55.300.274.423,39	100	58.070.656.555,66		59.843.481.926,08	
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	100		100		100		100		100		100		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	A		A		A		A		A		A		
694	4	02	02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	55.033.569.833,00	100	55.315.629.873,03	100	56.956.162.178,05	100	59.047.671.616,98	100	62.005.787.396,79	100	63.898.747.448,05	
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					KECAMATAN GRESIK				23.778.321.265		23.900.190.776		24.609.014.577		25.512.691.799		26.790.803.096		27.608.693.201	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN															
	7	01			KECAMATAN															
746	7	01	01	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	17.101.290.754	100	17.188.938.907	100	17.698.722.663	100	18.348.644.359	100	19.267.857.817	100	19.856.081.702	
747	7	01	02	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	1.304.363.285	100	1.311.048.455	100	1.349.931.088	100	1.399.502.434	100	1.469.613.416	100	1.514.478.897	
748	7	01	03	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	5.117.236.950	100	5.143.463.998	100	5.296.007.119	100	5.490.483.862	100	5.765.541.057	100	5.941.555.899	
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100		
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	80		80		80		80		80		80		
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	80		80		80		80		80		80		
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100		
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	80		80		80		80		80		80		
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	80		80		80		80		80		80		
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	80		80		80		80		80		80		
749	7	01	04	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	65.541.600	100	65.877.516	100	67.831.289	100	70.322.149	100	73.845.083	100	76.099.482	
750	7	01	06	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	189.888.676	100	190.861.900	100	196.522.418	100	203.738.995	100	213.945.723	100	220.477.221	
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN KEBOMAS				18.376.637.227,31		18.470.821.832,00		19.018.623.240,00		19.717.013.519,00		20.704.778.273,00		21.336.869.563,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	12.259.414.535	100	12.322.246.931	100	12.687.695.975	100	13.153.605.806	100	13.812.563.015	100	14.234.243.492
747	7	01	02	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	4	4	1.527.369.300	4	1.535.197.428	4	1.580.727.796	4	1.638.774.318	4	1.720.872.122	4	1.773.408.221
748	7	01	03	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	4.161.227.792	100	4.182.555.067	100	4.306.599.875	100	4.464.744.209	100	4.688.414.845	100	4.831.546.355
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	99.724.000	100	100.235.109	100	103.207.848	100	106.997.784	100	112.358.060	100	115.788.213
750	7	01	06	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	328.901.600	100	330.587.297	100	340.391.746	100	352.891.402	100	370.570.231	100	381.883.282
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN MANYAR				4.058.501.292		4.079.302.069		4.200.284.635		4.354.524.925		4.572.673.898		4.712.271.980
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.810.233.154	100	3.829.761.499	100	3.943.343.274	100	4.088.148.320	100	4.292.952.603	100	4.424.011.140
748	7	01	03	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	153.285.989	100	154.071.616	100	158.641.020	100	164.466.539	100	172.705.832	100	177.978.327
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	54.999.837	100	55.281.724	100	56.921.251	100	59.011.478	100	61.967.781	100	63.859.581
750	7	01	06	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	39.982.312	100	40.187.231	100	41.379.090	100	42.898.588	100	45.047.682	100	46.422.932
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN CERME				3.610.657.837,50		3.656.746.289,89		3.765.196.838,75		3.903.460.099,94		4.099.012.042,99		4.224.149.814,36

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN CERME	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.422.401.638	100	3.467.525.232	100	3.570.363.927	100	3.701.472.653	100	3.886.905.615	100	4.005.568.039
747	7	01	02	KECAMATAN CERME	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	10.806.200	100	10.861.584	100	11.183.714	100	11.594.395	100	12.175.240	100	12.546.935
748	7	01	03	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	90.565.400	100	91.029.569	100	93.729.293	100	97.171.163	100	102.039.155	100	105.154.284
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN CERME	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	43.550.000	100	43.773.204	100	45.071.415	100	46.726.500	100	49.067.361	100	50.565.327
750	7	01	06	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	43.334.600	100	43.556.700	100	44.848.490	100	46.495.389	100	48.824.672	100	50.315.229
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN BENJENG				4.698.779.438,00		4.722.861.792,00		4.862.930.835,00		5.041.504.414,00		5.294.069.051,00		5.455.690.436,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	4.554.474.438	100	4.577.817.195	100	4.713.584.555	100	4.886.673.929	100	5.131.482.011	100	5.288.139.817
747	7	01	02	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	3.255.000	100	3.271.683	100	3.368.713	100	3.492.417	100	3.667.377	100	3.779.337
748	7	01	03	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	92.545.000	100	93.019.315	100	95.778.050	100	99.295.154	100	104.269.551	100	107.452.771
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	42.010.000	100	42.225.311	100	43.477.615	100	45.074.174	100	47.332.258	100	48.777.253
750	7	01	06	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	5.425.000	100	5.452.804	100	5.614.522	100	5.820.695	100	6.112.295	100	6.298.895
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
778	7	01	05	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	1.070.000	100	1.075.484	100	1.107.380	100	1.148.045	100	1.205.559	100	1.242.363
					KECAMATAN BALONGPANGGANG				4.871.430.390,41		4.896.397.621,00		5.041.613.332,00		5.226.748.381,00		5.488.593.199,00		5.656.153.166,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	4.710.657.290	100	4.734.800.520	100	4.875.223.640	100	5.054.248.627	100	5.307.451.712	100	5.469.481.652
747	7	01	02	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	15.571.100	100	15.650.906	100	16.115.075	100	16.706.843	100	17.543.807	100	18.079.398
748	7	01	03	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	96.062.800	100	96.555.145	100	99.418.744	100	103.069.539	100	108.233.022	100	111.537.242
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	42.446.400	100	42.663.948	100	43.929.261	100	45.542.404	100	47.823.946	100	49.283.952
750	7	01	06	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	3.346.400	100	3.363.551	100	3.463.306	100	3.590.484	100	3.770.356	100	3.885.461
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
778	7	01	05	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	3.346.400	100	3.363.551	100	3.463.306	100	3.590.484	100	3.770.356	100	3.885.461
					KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN				4.070.667.823		4.091.530.958		4.212.876.203		4.367.578.873		4.586.381.810		4.726.398.376
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.772.972.019	100	3.792.309.392	100	3.904.780.425	100	4.048.169.390	100	4.250.970.845	100	4.380.747.731
747	7	01	02	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	5.836.400	100	5.866.313	100	6.040.294	100	6.262.102	100	6.575.815	100	6.776.567
748	7	01	03	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	199.265.682	100	200.286.966	100	206.227.009	100	213.799.951	100	224.510.704	100	231.364.738
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	63.375.782	100	63.700.598	100	65.589.809	100	67.998.358	100	71.404.877	100	73.584.778

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	7	01	06	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	29.217.940	100	29.367.689	100	30.238.666	100	31.349.072	100	32.919.569	100	33.924.562
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN DRIYOREJO				3.715.576.309		3.734.619.515		3.845.379.602		3.986.587.287		4.186.303.657		4.314.106.333
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.512.584.409	100	3.530.587.233	100	3.635.296.199	100	3.768.789.329	100	3.957.594.660	100	4.078.415.133
747	7	01	02	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	12.117.300	100	12.179.404	100	12.540.617	100	13.001.126	100	13.652.444	100	14.069.236
748	7	01	03	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	70.721.000	100	71.083.462	100	73.191.631	100	75.879.330	100	79.680.662	100	82.113.214
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	52.050.000	100	52.316.769	100	53.868.362	100	55.846.483	100	58.644.228	100	60.434.564
750	7	01	06	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	68.103.600	100	68.452.647	100	70.482.793	100	73.071.019	100	76.731.663	100	79.074.186
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN WRINGINANOM				3.823.383.860,00		3.842.979.605,17		3.956.953.399,00		4.102.258.228,00		4.307.769.376,00		4.439.280.251,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.552.595.935	100	3.570.803.828	100	3.676.705.524	100	3.811.719.262	100	4.002.675.257	100	4.124.871.985
747	7	01	02	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	9.925.800	100	9.976.672	100	10.272.557	100	10.649.779	100	11.183.302	100	11.524.715
748	7	01	03	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	86.059.801	100	86.500.878	100	89.066.292	100	92.336.930	100	96.962.740	100	99.922.893
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	47.807.550	100	48.052.575	100	49.477.702	100	51.294.592	100	53.864.301	100	55.508.712

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	7	01	06	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	111.172.524	100	111.742.309	100	115.056.325	100	119.281.354	100	125.257.001	100	129.080.942
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
778	7	01	05	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	15.822.250	100	15.903.343	100	16.374.999	100	16.976.311	100	17.826.775	100	18.371.004
					KECAMATAN KEDAMEAN				3.608.966.291		3.596.420.125		3.703.081.541		3.839.063.843		4.031.389.721		4.154.463.067
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.305.032.029	100	3.290.928.129	100	3.411.706.272	100	3.537.923.274	100	3.712.279.478	100	3.823.853.654
747	7	01	02	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	9.840.350	100	9.890.784	100	10.184.122	100	10.558.097	100	11.087.027	100	11.425.500
748	7	01	03	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	171.061.548	100	171.938.279	100	177.037.566	100	183.538.632	100	192.733.380	100	198.617.292
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	61.263.008	100	61.576.995	100	63.403.225	100	65.731.480	100	69.024.435	100	71.131.665
750	7	01	06	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	30.884.678	100	31.042.969	100	31.963.631	100	33.137.380	100	34.797.466	100	35.859.791
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
778	7	01	05	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	30.884.678	100	31.042.969	100	8.786.725	100	8.174.980	100	11.467.935	100	13.575.165
					KECAMATAN MENGANTI				3.754.159.026,90		3.833.089.622,94		3.946.770.102,92		4.091.700.987,05		4.296.683.248,00		4.427.855.678,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.620.700.727	100	3.657.925.041	100	3.766.410.549	100	3.904.718.379	100	4.100.333.358	100	4.225.511.468
747	7	01	02	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	1.356.000	100	7.751.526	100	7.981.418	100	8.274.507	100	8.689.035	100	8.954.301
748	7	01	03	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	54.243.500	100	83.103.553	100	85.568.211	100	88.710.394	100	93.154.526	100	95.998.418
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	41.254.000	100	44.464.730	100	45.783.450	100	47.464.682	100	49.842.524	100	51.364.155
750	7	01	06	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	36.604.800	100	39.844.773	100	41.026.475	100	42.533.025	100	44.663.805	100	46.027.336
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN SIDAYU				5.140.357.646		5.166.703.192		5.319.935.534		5.515.290.961		5.791.590.919		5.968.401.033
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	4.814.296.620	100	4.838.971.026	100	4.982.483.598	100	5.165.447.321	100	5.424.221.135	100	5.589.815.903
747	7	01	02	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	3.195.300	100	3.211.677	100	3.306.927	100	3.428.362	100	3.600.113	100	3.710.020
748	7	01	03	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	170.849.400	100	171.725.044	100	176.818.007	100	183.311.010	100	192.494.356	100	198.370.971
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	83.478.826	100	83.906.675	100	86.395.151	100	89.567.701	100	94.054.781	100	96.926.157
750	7	01	06	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	68.537.500	100	68.888.770	100	70.931.851	100	73.536.567	100	77.220.534	100	79.577.982
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN UJUNGPANGKAH				3.841.581.973,00		3.848.706.923,00		3.962.850.574,00		4.108.371.957,00		4.314.189.385,00		4.445.896.254,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.632.301.623	100	3.638.418.027	100	3.746.695.723	100	3.884.738.615	100	4.079.978.880	100	4.204.917.202
747	7	01	02	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000
748	7	01	03	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	85.349.700	100	85.787.137	100	88.331.383	100	91.575.035	100	96.162.676	100	99.098.404
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	46.146.100	100	46.382.610	100	47.758.209	100	49.511.957	100	51.992.362	100	53.579.624
750	7	01	06	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	65.284.550	100	65.619.149	100	67.565.259	100	70.046.350	100	73.555.467	100	75.801.024
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN PANCENG				4.296.958.195,21		4.318.981.121,00		4.447.072.007,00		4.610.374.672,00		4.841.340.968,00		4.989.141.125,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	4.064.073.095	100	4.084.902.429	100	4.206.051.089	100	4.360.503.131	100	4.578.951.594	100	4.718.741.327
747	7	01	02	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	43.379.200	100	43.601.529	100	44.894.648	100	46.543.242	100	48.874.922	100	50.367.013
748	7	01	03	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	92.587.700	100	93.062.234	100	95.822.242	100	99.340.968	100	104.317.660	100	107.502.350
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	61.634.800	100	61.950.693	100	63.788.006	100	66.130.390	100	69.443.329	100	71.563.348
750	7	01	06	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	35.283.400	100	35.464.236	100	36.516.022	100	37.856.941	100	39.753.463	100	40.967.087
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN BUNGAH				4.412.357.978		4.434.972.354		4.566.503.270		4.734.191.617		4.971.360.781		5.123.130.281
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	4.206.394.142	100	4.227.952.905	100	4.353.344.107	100	4.513.204.954	100	4.739.303.332	100	4.883.988.405
747	7	01	02	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	6.022.200	100	6.053.065	100	6.232.585	100	6.461.454	100	6.785.154	100	6.992.296
748	7	01	03	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	111.557.480	100	112.129.238	100	115.454.730	100	119.694.388	100	125.690.727	100	129.527.909
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	44.028.800	100	44.254.458	100	45.566.942	100	47.240.223	100	49.606.820	100	51.121.255
750	7	01	06	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	44.355.356	100	44.582.688	100	45.904.906	100	47.590.598	100	49.974.748	100	51.500.415
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN DUKUN				4.794.857.233		4.819.432.009		4.962.365.098		5.144.590.044		5.402.318.969		5.567.245.089
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	4.545.190.633	100	4.568.485.809	100	4.703.976.421	100	4.876.712.973	100	5.121.022.041	100	5.277.360.514
747	7	01	02	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	2.392.400	100	2.404.662	100	2.475.978	100	2.566.900	100	2.695.494	100	2.777.784
748	7	01	03	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	167.789.200	100	168.649.159	100	173.650.899	100	180.027.602	100	189.046.458	100	194.817.813
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	48.200.000	100	48.447.036	100	49.883.862	100	51.715.667	100	54.306.471	100	55.964.380
750	7	01	06	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	20.793.000	100	20.899.569	100	21.519.401	100	22.309.624	100	23.427.271	100	24.142.476
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
778	7	01	05	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100	100	10.492.000	100	10.545.774	100	10.858.537	100	11.257.278	100	11.821.234	100	12.182.122
					KECAMATAN SANGKAPURA				4.066.375.607,00		4.174.271.844,68		4.298.070.992,15		4.455.902.132,90		4.679.129.807,28		4.821.977.856,98
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.978.998.007	100	3.999.391.311	100	4.118.003.911	100	4.269.222.738	100	4.483.098.320	100	4.619.961.771
747	7	01	02	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100	100	2.264.000	100	2.275.604	100	2.343.093	100	2.429.134	100	2.550.827	100	2.628.700
748	7	01	03	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	23.880.800	100	85.549.827	100	88.087.035	100	91.321.714	100	95.896.665	100	98.824.271
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	32.861.600	100	43.081.276	100	44.358.966	100	45.987.889	100	48.291.747	100	49.766.035
750	7	01	06	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	28.371.200	100	43.973.827	100	45.277.988	100	46.940.659	100	49.292.248	100	50.797.080
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					KECAMATAN TAMBAK				3.637.452.546,00		3.656.095.349,00		3.764.526.593,00		3.902.765.242,00		4.098.282.373,00		4.223.397.869,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01			KECAMATAN														
746	7	01	01	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	3.442.628.762	100	3.460.273.047	100	3.562.896.659	100	3.693.731.176	100	3.878.776.313	100	3.997.190.560
748	7	01	03	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	100	122.060.124	100	122.685.711	100	126.324.282	100	130.963.086	100	137.523.953	100	141.722.390
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100	100		100		100		100		100		100	
749	7	01	04	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	34.829.260	100	35.007.768	100	36.046.017	100	37.369.677	100	39.241.788	100	40.439.791
750	7	01	06	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100	37.934.400	100	38.128.823	100	39.259.635	100	40.701.303	100	42.740.319	100	44.045.128
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100	
				KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	100		100		100		100		100		100	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				23.444.971.830		23.565.132.846		24.264.019.613		25.155.028.138		26.415.221.532		27.221.645.596
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8	01	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	5.066.481.346	100	5.092.448.259	100	5.243.478.373	100	5.436.026.186	100	5.708.355.211	100	5.882.624.241
	8	01	02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18 kecamatan	18	2.674.218.621	18	2.687.924.623	18	2.767.642.185	18	2.869.273.853	18	3.013.016.088	18	3.104.999.745
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kesadaran Berbangsa	n/a	76,60		76,90		77,20		77,50		77,80		78,10	
	8	01	03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	6.404.707.400	100	6.437.533.038	100	6.628.455.223	100	6.871.861.311	100	7.216.121.480	100	7.436.420.750

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	7,05	7,15		7,25		7,35		7,45		7,55		7,65	
	8	01	04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		75	319.535.000	77	321.172.692	79	330.697.924	80	342.841.611	81	360.016.974	83	371.007.847
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	n/a	76,60		76,90		77,20		77,50		77,80		78,10	
	8	01	05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	2.143.199.883	100	2.154.184.288	100	2.218.072.360	100	2.299.523.060	100	2.414.722.445	100	2.488.440.937
	8	01	06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	6.836.829.580	100	6.871.869.946	100	7.075.673.549	100	7.335.502.116	100	7.702.989.334	100	7.938.152.077
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	n/a	76,60		76,90		77,20		77,50		77,80		78,10	

BAB V
PENUTUP

RANCANGAN AKHIR

RPJMD

KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Gresik lima tahun ke depan, Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi dengan semangat Nawakarsa menuju Gresik Baru lebih Maju. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

5.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Tahun 2025 hingga Tahun 2029 serta transisi pada tahun 2030. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan

dokumen perencanan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2030 akan mendasarkan pada ketentuan transisi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2030 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target indikator kinerja utama maupun indiktaor kinerja Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati Gresik berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
b. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini;
c. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan

Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan akuntable berdasarkan prinsip *good governance* dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029; dan

e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) didukung perangkat Daerah lainnya melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dimulai Tahun 2025.

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E., M.MB.